



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- 1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah

Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Malang tahun anggaran 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 9);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4400);
- f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389);
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5165);
 - j) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - m) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - o) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 - p) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005–2025;

- q) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023;
- s) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- t) Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang;
- u) Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang;
- v) Peraturan Bupati Malang Nomor 196 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang;
- w) Peraturan Bupati Malang Nomor 201 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- x) Peraturan Bupati Malang Nomor 24 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 201 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- y) Peraturan Bupati Malang Nomor 106 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- z) Peraturan Bupati Malang Nomor 133 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 106 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.3. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN ATAU ENTITAS AKUNTANSI

a. Domisili dan Operasional Entitas

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112°17',10,90" - 112°57',00,00" Bujur Timur dan 7°44',55,11" - 8°26',35,45" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 353.486 ha terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa

Timur, terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan dan terletak antara 0-2000 meter dari permukaan laut.

Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger Semeru di bagian Timur membujur dari Utara ke Selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian Barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut.

Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang yaitu: Gunung Kelud (1.731 m), Gunung Kawi (2.651 m), Gunung Panderman (2.040 m), Gunung Anjasmoro (2.277m), Gunung Welirang (2.156 m), Gunung Arjuno (3.339 m), Gunung Bromo (2.329 m), Gunung Batok (2.868 m), Gunung Semeru (3.676 m), Pegunungan Kendeng (600 m). Dengan kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, sumber air yang cukup untuk mengairi lahan pertanian sepanjang tahun.

Kabupaten Malang memiliki 18 sungai besar, diantaranya Brantas yang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Wilayah datar Kabupaten Malang sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah terjal perbukitan sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo. Wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto dan Jombang

- b. Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang
- c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- e. Lingkaran dalam : Kota Malang dan Kota Batu

Letak geografis ini menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu.

Dengan kondisi topografis yang merupakan pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1^o C hingga 26,6^o C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71^o C hingga 89^o C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan Desember.

Secara geografis wilayah Kabupaten Malang merupakan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir. Klasifikasi pengembangan wilayah adalah hutan bakau, perikanan darat, perkebunan, permukiman dan hutan. Adapun struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%, perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak kolam 0,03%; padang rumput/tanah kosong 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

Beberapa permasalahan pengembangan wilayah adalah kerusakan alam dan lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, terbatasnya ketersediaan lahan. Sedangkan potensi pengembangan wilayah diarahkan ke pengembangan kawasan:

- a. Gunung Bromo di Kecamatan Poncokusumo meliputi potensi alam yang sangat indah, aktifitas keagamaan dan acara ritual Yadnya Kasada dari masyarakat Tengger yang memiliki keunikan sendiri, vegetasi yang beragam seperti bunga abadi edelweis, flora fauna yang sangat indah;

- b. Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan aktifitasnya antara lain adanya mitos dan kepercayaan tentang Gunung Kawi dan komodifikasi budaya termasuk Kirab Budaya Agung, Pasarean yang dikeramatkan, kirab dan gebyar Suroan;
- c. Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang yaitu keindahan bendungan yang dikelilingi gunung;
- d. Potensi alam Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.

Untuk efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi enam wilayah pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah (Perda) nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) :

1. Wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang, 2) Pengembangan jalan Malang-Batu, 3) Peningkatan konversi lingkungan, 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang-Bandara Abdul Rahman Saleh; dan pengembangan permukiman.
2. Wilayah pengembangan Kapanjen dengan pusat di perkotaan Kapanjen (meliputi Kecamatan Kapanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan Lingkar Timur dan

penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen, 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep, 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan, 4) Percepatan penyelesaian JLS, 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan; dan pengembangan permukiman.

3. Wilayah pengembangan Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan, 2) Jalan penghubung dengan Blitar dan Ngantang, 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon-Ngantang-Kasembon-Kandangan, 4) Peningkatan persediaan air di pedesaan dan penunjang irigasi.
4. Wilayah pengembangan Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), peternakan, perikanan serta industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur, yaitu 1) Jalan utama Pakis-Tumpang-Poncokusumo-Ngadas-Bromo, 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan, 3) Jalan tembus utama antar kecamatan, 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air; di wilayah pengembangan ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.
5. Wilayah pengembangan Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju

perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).

6. Wilayah pengembangan Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendangbiru dan Bajulmati (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

Dengan kondisi topografis Kabupaten Malang yang bergunung-gunung serta memiliki bentang wilayah yang sangat luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana banjir, erosi, longsor, gempa bumi, tsunami dan angin puting beliung, yaitu antara lain:

1. Wilayah potensi bencana banjir dan longsor meliputi : kecamatan ampelgading, tirtoyudo, gedangan, donomulyo, sumbermanjing Wetan, kasembon, jabung, dau dan dampit;
2. Wilayah potensi bencana alam letusan gunung api, meliputi Kecamatan pocokusumo, jabung, ampelgading, tirtoyudo, dampit, wajak, poncokusumo, kasembon, ngantang, pujon, karangploso, singosari dan lawang;
3. Wilayah potensi bencana alam gempa bumi, meliputi kecamatan gedangan, sumbermanjing wetan, dampit, tirtoyudo, dan ampelgading;

4. Wilayah potensi bencana alam tsunami meliputi kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo dan Ampelgading;
5. Wilayah potensi bencana alam puting beliung, mencakup wilayah kecamatan Pagak, Karangploso, Jabung, Wagir, Kromengan, Pakis dan Poncokusumo.

Gambar 1. Peta Kabupaten Malang



Sumber: www.malangkab.go.id

b. Penjelasan Mengenai Kegiatan Pokok Entitas

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas Desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom, termasuk di dalamnya Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 maka Ibukota Kabupaten Malang dipindahkan dari Wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Adapun tujuan umum pembentukan Kabupaten Malang selaras dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat yang

merupakan warisan leluhur pendahulu yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur material spiritual diatas dasar kesucian yang langgeng (abadi) dan dikenal dengan sesanti Satata Gama Karta Raharja.

Pemerintah Kabupaten Malang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang mencakup urusan wajib antara lain :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial;
- g. Tenaga kerja;
- h. Pangan;
- i. Pertanahan;
- j. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera;
- m. Perhubungan;
- n. Komunikasi dan Informatika;
- o. Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kepemudaan dan Olah Raga;
- r. Kebudayaan;
- s. Perpustakaan;
- t. Kearsipan;

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Malang juga melaksanakan urusan pemerintah pilihan yang mencakup:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Perdagangan;
- e. Industri;
- f. Transmigrasi;

Disamping urusan pemerintah wajib dan pilihan, pemerintah kabupaten malang juga melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari :

- a. Perencanaan;
- b. Keuangan;
- c. Kepegawaian;
- d. Penelitian dan pengembangan; dan
- e. Fungsi lainnya.

Setiap Perangkat Daerah memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Malang yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. INFORMASI TENTANG EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

Berbagai guncangan mempengaruhi lingkungan ekonomi global 2023. Kembalinya permintaan yang tinggi pasca pandemi disertai shock dari sisi penawaran mengakibatkan melonjaknya inflasi. Inflasi tinggi kemudian direspons oleh negara-negara maju dengan menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga tersebut di satu sisi menurunkan inflasi seiring menurunnya permintaan agregat, di samping harga komoditas energi yang juga menurun. Dinamika situasi global tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia cenderung lemah dan tidak merata. Negara-negara berkembang dan emerging mulai pulih namun tidak cukup kuat. Sementara itu, kawasan ASEAN masih termasuk kawasan yang resilien dari sisi ekonomi dan mendapat posisi yang sedikit menguntungkan di tengah pertarungan geopolitik. Sehingga ASEAN bisa tetap menjadi pusat pertumbuhan. Saat kegiatan manufaktur negara-negara kelompok G7 dan G20 melemah akibat inflasi dan suku bunga tinggi, geliat manufaktur negara-negara ASEAN relatif ekspansif, utamanya Indonesia dan Filipina.

Di tengah risiko *volatilitas* kondisi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 berperan penting sebagai *shock absorber* dalam upaya meredam dampak gejolak perekonomian global. Kinerja APBN tahun 2023 yang sehat dan terjaga kuat, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di tahun 2024.

Dengan kerja keras APBN, perekonomian nasional di tahun 2023 mampu tumbuh dengan tingkat inflasi yang terjaga dan terkendali serta tren menurun sepanjang tahun. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus dalam 43 bulan beruntun, didukung oleh *Prompt Manufacturing Index (PMI)* atau

Indeks manajer pembelian manufaktur Indonesia yang terus berada di zona ekspansif selama 28 bulan berturut-turut. Akselerasi belanja negara dilaksanakan sebagai wujud dukungan penuh APBN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak *El Nino* dan stabilisasi harga.

Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023 juga ditunjukkan oleh kondisi fiskal yang semakin sehat, dengan ditopang pendapatan negara yang meningkat signifikan. Dalam hal ini, realisasi defisit mencapai 1,65% terhadap PDB atau lebih rendah dari targetnya pada APBN 2023 sebesar 2,84% PDB, atau pada Perpres 75/2023 sebesar 2,27% terhadap PDB. Hal ini menyebabkan keseimbangan primer berhasil kembali mencapai nilai positif setelah surplus terakhir di tahun 2011. Namun demikian, *spillover effect* dari pelemahan ekonomi global serta tingginya suku bunga global masih tetap perlu diwaspadai dampaknya di tahun 2024.

Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US\$4.919,7. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,04 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen (*year on year/y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,33 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,11 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,45 persen (*quarter to quarter/c-to-c*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,81 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 39,13 persen.

Selama tahun 2023 perekonomian Indonesia dilihat secara spasial masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan dengan pertumbuhan (*quarter to quarter/c-to-c*) sebesar 6,94 persen; 6,37 persen; dan 5,43 persen. Sedangkan kelompok provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,05 persen terhadap ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 4,96 persen (*quarter to quarter/c-to-c*).

Data Realisasi sementara pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun (112,6% terhadap APBN 2023 atau 105,2% dari Perpres 75/2023) atau tumbuh 5,3% dibandingkan realisasi tahun 2022. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun melampaui target APBN 2023 (106,6% terhadap APBN atau 101,7% terhadap Perpres 75/2023), tumbuh kuat sebesar 5,9% dari realisasi tahun 2022, di tengah gejolak perekonomian global yang sangat dinamis dan termoderasi harga komoditas. Pencapaian penerimaan perpajakan yang cukup kuat ini terutama ditopang oleh pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan efektivitas reformasi perpajakan. Penerimaan perpajakan tersebut juga didukung realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun melampaui target APBN 2023 (108,8% terhadap APBN atau 102,8% terhadap Perpres 75/2023), meningkat signifikan sebesar 8,9% dibandingkan realisasi tahun 2022. Di sisi lain, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp286,2 triliun (94,4% dari APBN 2023 atau 95,4% dari Perpres 75/2023), mengalami kontraksi sebesar 9,9% dibandingkan realisasi tahun 2022. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp605,9 triliun (137,3% dari APBN 2023 atau 117,5% dari Perpres 75/2023), tumbuh 1,7% dibandingkan realisasi tahun 2022. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, yang berasal dari dividen BUMN dan penerimaan SDA Non Migas, meskipun Pendapatan SDA Migas mengalami kontraksi akibat moderasi harga komoditas terutama minyak bumi.

Sementara itu, Realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.087,2 triliun (87,3% dari APBN atau 83,5% dari Perpres 75/2023), menurun 9,0% dibandingkan realisasi tahun 2022. Belanja non-K/L tersebut antara lain untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp475,7 triliun empat ratus tujuh puluh lima koma tujuh triliun rupiah) atau 111,6% dari APBN 2023 atau 106,9% dari Perpres 75/2023. Realisasi Transfer ke Daerah tahun 2023 mencapai Rp881,3 triliun (delapan raus delapan puluh satu koma tiga triliun rupiah) atau 108,2 persen dari Pagu APBN 2023 dan Perpres 75/2023, meningkat sebesar 8,0% dibandingkan pada tahun 2022. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah, peningkatan alokasi DBH dan pembayaran kurang bayar DBH s.d. tahun 2022 dan peningkatan penyaluran DAK. Realisasi Defisit anggaran tahun 2023 sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB, sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal oleh Pemerintah di tengah tantangan ketidakpastian global.

Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 mencapai Rp359,5 triliun (60,1% dari target APBN 2023 atau 74,9% dari target Perpres 75/2023). Pembiayaan utang di tahun 2023 Rp407,0 triliun (58,4% dari target APBN TA 2023 atau 96,6% dari Perpres 75/2023), dilaksanakan dengan prudent dan mampu menjaga efisiensi biaya utang (*cost of fund*). Pemerintah melanjutkan kebijakan pembiayaan investasi sebesar Rp90,1 triliun melalui antara lain penyertaan modal negara kepada BUMN dan investasi kepada BLU. Kebijakan tersebut ditempuh antara lain guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan lingkungan hidup, dan meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai targetnya sebesar 5,0%. Hal ini sejalan dengan tren penguatan pemulihan ekonomi yang konsisten di kisaran 5% dalam 8 kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama didorong oleh tingkat konsumsi domestik yang stabil, serta kinerja positif perdagangan internasional. Namun demikian, dinamika perekonomian global yang masih *volatile* akibat konflik geopolitik, dan lesunya perekonomian RRT masih perlu untuk diwaspadai.

Tingkat inflasi domestik tahun 2023 bergerak moderat dan tetap terkendali seiring dengan menurunnya gejolak inflasi dunia, akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi. Inflasi Indonesia diperkirakan berada di kisaran 2,6% didukung oleh kebijakan stabilisasi, serta berfungsinya peran APBN sebagai *shock absorber*. Keberhasilan dalam menjaga *supply* dan distribusi kebutuhan pangan dan energi nasional, termasuk dengan subsidi dan kompensasi energi berperan dalam menjaga tingkat inflasi.

Adapun asumsi makro ekonomi yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan APBD adalah pertumbuhan regional, laju inflasi, tingkat pengangguran regional dan lain-lain asumsi yang relevan. Pencapaian dari perkiraan indikator makro ekonomi digunakan sebagai salah satu alat untuk mengetahui keberhasilan pembangunan. Indikator makro di Kabupaten Malang sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Makro Tahun 2019- 2023

No	Indikator makro	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	(%)	5,55	5,49	3,12	5,13	5,00
2.	Inflasi	(%)	1,42	1,42	1,75	6,45	2,56
3.	PDRB (ADHB)	Triliun Rupiah	96.83	103.75	107.04	117.42	128,37
4.	PDRB (ADHK)	Juta Rupiah	64.819.045	68.379.670	66.545.473	68.619.103	72.136.463
5.	PDRB Perkapita (ADHB)	Ribu Rupiah	37.359,27	39.370,49	38.495,23	40.114,13	43.730,98
6.	PDRB Perkapita (ADHK)	Ribu Rupiah	25.009,33	26.220,06	25.107,69	25.716,45	26.857,46
5.	Indeks Pembangunan Manusia	(%)	70,35	71,24	70,6	71,38	73,00
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	3,70	5,49	5,40	6,57	5,70
8.	Angka Kemiskinan	(%)	9,47	10,15	10,50	9,55	9,45
9.	Gini Rasio	(%)	0,38	0,37	0,367	0,368	0,378

Catatan : Tahun 2023 angka sementara

Sumber : BPS Kabupaten Malang

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan

yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur. Prioritas dan program pembangunan di tahun 2023 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Sebagaimana arah pembangunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, pada tahap ke-4 (Tahun 2020-2025) dengan arah pembangunan adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan; meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya; meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup; mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai dan daya dukung lingkungan; meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan tetap mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan lima tahunan sebagai wujud pelaksanaan amanat peraturan daerah. Selain mempedomani dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2023 juga tidak bisa lepas dari dinamika yang muncul sebagai akibat dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan

kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah konkret untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kemajuan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang menunjukkan arah positif dan berdampak pada pembangunan ekonomi, ektivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kondisi ini masih perlu ditingkatkan dengan menggali serta mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang serta memacu terhadap sektor-sektor lainnya yang belum berkembang dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Geliat perekonomian Kabupaten Malang naik dari tahun 2022 sebesar 3,13 persen menjadi 5,00 persen di tahun 2023. Dengan didukung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2023 mengalami kenaikan 10,95% dibanding tahun 2022 yaitu dari Rp117,42 triliun menjadi Rp128,37. Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,23% tahun 2022 menjadi 73% pada tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang tahun 2023 mencapai 73,00, meningkat 1,62 poin (1,40 persen) dibandingkan

tahun sebelumnya (71,38). Pembangunan manusia di Kabupaten Malang terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2019 hingga 2020 status pembangunan manusia Kabupaten Malang bergerak dari level “sedang” menuju level “tinggi”. Selama 2020-2023, IPM Kabupaten Malang rata-rata meningkat sebesar 0,82 persen per tahun, dari 71,24 pada tahun 2020 menjadi 73,00 pada tahun 2023. Pada tahun 2023 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Malang yang diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,378. Angka ini meningkat 0,01 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio 2022 yang sebesar 0,368. Gini Ratio di Kabupaten Malang termasuk dalam kategori ketimpangan rendah sejak tahun 2019-2023. Gini Ratio di Kabupaten Malang pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,38 dan terus menurun hingga mencapai angka terendah pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,367. Pada tahun 2022 nilai Gini Ratio mulai naik menjadi 0,368 dan terus meningkat hingga mencapai angka 0,378 pada tahun 2023. Naiknya Gini Ratio merupakan indikasi bahwa perbedaan pendapatan antar penduduk semakin melebar. Bantuan sosial Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran yang kemudian berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk.

Potensi ekonomi Kabupaten Malang yang memiliki sumber daya alam dan lahan pertanian yang semakin berkurang karena perubahan pemanfaatan lahan, sebenarnya masih terdapat lahan yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian disamping sektor pertanian harus terus dilaksanakan dengan mendorong pembangunan di beberapa sektor potensi lainnya, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, bangunan konstruksi, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa lainnya.

Dengan potensi yang dimiliki usaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya kebijakan pengembangan ekonomi wilayah, serta perkembangan perekonomian daerah sekitar Kabupaten Malang. Faktor internal yang diupayakan

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya penguatan kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, penyediaan infrastruktur pertanian, penyediaan modal usaha dengan bunga rendah bagi UMKM dan koperasi, perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar, dan lain-lain. Selain itu, faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kondisi sosial dan politik, kondisi sosial dan keadaan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung upaya mendorong perekonomian daerah. Untuk tetap mempertahankan angka pertumbuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mendorong peningkatan potensi utama yaitu: pertanian (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan), perindustrian, perdagangan dan sektor potensi lainnya yaitu: pariwisata dan pertambangan; dengan memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi serta mendorong investasi. Terkait dengan itu perlu pula didorong peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, pengairan dan permukiman.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Kabupaten Malang maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 telah disusun pada Tahun 2022 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Akan tetapi seiring dengan dinamika pembangunan di Daerah Tahun 2023 dan

evaluasi terhadap pelaksanaan semester pertama tahun 2023, beberapa kondisi yang mendasari dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2023 yaitu: capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dari masing-masing kegiatan; asumsi makro ekonomi pada tahun 2023 telah mengalami perbaikan dari target yang telah ditetapkan pada RPJMD sehingga diharapkan pada pertengahan tahun kedua 2023 perekonomian Kabupaten Malang diharapkan terus mengalami perbaikan yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah; kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai; terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat Pusat yang berkaitan dengan keuangan Daerah maupun kebijakan teknis lainnya; kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Disisi lain dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang perlu diupayakan identifikasi sektor-sektor yang merupakan unggulan dan memberikan dampak bagi sektor lain yang belum berkembang. Dengan ini diharapkan masyarakat Kabupaten Malang bisa lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sosial ekonomi masing-masing. Sehingga dapat memberi kemajuan dan perubahan, dan pembangunan yang selama ini berjalan mampu menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat. Perkembangan distribusi presentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha secara lengkap adalah pada tabel berikut :

**Tabel 2. Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha
Tahun Anggaran 2019 - 2023**

(dalam persen)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, kehutanan dan perikanan	15,04	15,37	14,80	14,72	14,60
Pertambangan & Penggalian	1,81	1,76	1,69	1,56	1,58
Industri Pengolahan	32,12	33,21	32,95	32,44	32,41
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
Konstruksi	12,76	12,23	12,45	12,72	12,63
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	19,21	18,12	18,82	19,32	19,38
Transportasi dan pergudangan	1,24	1,11	1,12	1,32	1,51
Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,49	3,28	3,37	3,55	3,71
Informasi dan komunikasi	4,00	4,41	4,49	4,42	4,33
Jasa keuangan dan asuransi	1,66	1,67	1,64	1,68	1,66
Real estate	1,41	1,51	1,51	1,48	1,40
Jasa perusahaan	0,39	0,38	0,37	0,36	0,37
Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	1,88	1,96	1,85	1,67	1,58
Jasa pendidikan	2,34	2,49	2,41	2,23	2,24
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,56	0,63	0,64	0,60	0,59
Jasa lainnya	1,91	1,68	1,70	1,75	1,85

*Catatan: Tahun 2023 angka sementara
Sumber : BPS Kabupaten Malang*

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto total Atas Dasar Harga Berlaku. Secara Umum struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2019-2023, dimana peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu sekitar 45,21 persent, kemudian kelompok tersier berkisar antara 38,61 persen dan kelompok primer berkisar antara 16,18 persen.

Kontribusi kelompok kategori primer turun dari 16,28 persen menjadi 16,18 persen. Kategori pertanian sendiri turun dari 14,72 persen menjadi 14,60 persen. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka turunnya kontribusi kategori pertanian tidak lepas dari sub kategori pendukungnya yaitu sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian yang cenderung mengalami penurunan dari tahun lalu.

2.2. KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD

A. KEBIJAKAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran

Daerah. Sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), dengan berorientasi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS). Pada hakekatnya, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 mengarah pada isu strategis yang merupakan fungsi hakiki pemerintahan, yaitu pelayanan masyarakat (*publicservices*), pembangunan dalam arti luas (*development*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Malang pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Kebijakan keuangan daerah didasarkan pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun sebelumnya sampai dengan target tahun penyusunan perencanaan serta proyeksi tahun 2023. Berdasarkan pada tren pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah maka dapat ditentukan arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan Intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat.
2. Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif;
3. Pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Disamping itu upaya lain yang terus digerakkan untuk memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain daerah yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang. Dengan komposisi kerangka pendanaan berdasarkan pada data realisasi dan proyeksi target pendapatan Kabupaten Malang tahun 2019 sampai dengan 2024 yang terbagi melalui Pendapatan Asli Daerah sebesar 23,19%, Pendapatan Transfer sebesar 70,28%, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 6,52%. Penentuan proyeksi tersebut diasumsikan melalui realisasi tahun sebelumnya serta target tahun berjalan pada tahun 2022.

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif. Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang

disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan dengan memperhatikan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui prinsip *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas dalam penganggaran. Hal ini sejalan dengan pencapaian manfaat yang lebih jelas sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2023.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan modal dan pemberian pinjaman dan bergulir. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang akan dilakukan dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan kondisi keuangan daerah.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk dana cadangan persiapan pilkada serta pembayaran pokok hutang kepada PDAM.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan Visi pembangunan Kabupaten Malang ***“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”***, dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya. Adapun Misi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul;
2. Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila;
3. Mewujudkan inovasi Pelayanan Publik dan pembangunan kemandirian desa;
4. Mewujudkan keluarga Bahagia, mandiri dan sejahtera;
5. Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industry kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur diutamakan untuk lebih

menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik dan infrastruktur yang semakin baik. Rencana pembangunan yang dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Dalam mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional, maka tema pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2023 adalah **“Pembangunan Pariwisata Kreatif (pariwisata dan industri kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal”**, dengan 6 prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan dan mendorong sektor industri, perdagangan dan pemberdayaan masyarakat serta ekonomi kretatif;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata untuk mendukung perekonomian dan pariwisata serta peningkatan daya saing daerah;
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas dan kesehatan dalam rangka mewujudkan sumberdaya manuasia yang produktif dan berdaya saing;
4. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang inovatif;
5. Peningkatan ketentraman, ketertiban dan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal serta penegakan hukum;
6. Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

B. STRATEGI DAN PRIORITAS APBD

Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2023 terbagi dalam strategi dan prioritas pendapatan daerah dan belanja daerah. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang profesional;
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan asli daerah;
4. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;
5. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
6. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
9. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan dan fungsi penunjang lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan penyakit serta terus berupaya menekan pandemi COVID-19 menjadi endemi.
3. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wirausaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
4. Mendorong aktivitas pariwisata kreatif (pariwisata dan industri kreatif) berbasis komunitas dan budaya lokal serta potensi unggulan daerah;
5. Persiapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 agar terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan;
6. Mendorong tingkat komponen dalam negeri dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri;
7. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Penganggaran belanja operasi disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien;
9. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Malang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di tahun 2023;
10. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
11. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2023 berdasarkan kinerja. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat

dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;

12. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya;
13. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial dengan mempertimbangkan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
14. Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian;
15. Belanja bantuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
16. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya diubah sebagaimana dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, politis, topdown dan bottom-up melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah kabupaten malang. Sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Malang memuat 3 (tiga) kewenangan Urusan Pemerintahan yaitu (1) kewenangan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar meliputi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; perumahan dan Kawasan Permukiman; Ketentraman dan Ketertiban; Umum Serta Perlindungan Masyarakat; Sosial, (2) kewenangan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar meliputi Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga, Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; Kearsipan, (3) kewenangan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan oleh Inspektorat Daerah. Unsur Kewilayahan meliputi wilayah Kecamatan dan Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik. Urusan dan Program Pemerintahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 dijabarkan sebagai sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Urusan dan Program Tahun 2023

KODE	URUSAN	PROGRAM
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengelolaan Pendidikan. 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

KODE	URUSAN	PROGRAM
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. 4. Program Penyelenggaraan Jalan. 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 7. Program Pengembangan Permukiman. 8. Program Penataan Bangunan Gedung. 9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Perumahan. 2. Program Kawasan Permukiman. 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Penanggulangan Bencana. 3. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pemberdayaan Sosial. 3. Program Rehabilitasi Sosial. 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 5. Program Penanganan Bencana. 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja; 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; 4. Program Penempatan Tenaga Kerja; 5. Program Hubungan industrial
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Program Perlindungan Perempuan. 4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHIA); 5. Program Perlindungan Khusus Anak.
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. 3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan. 5. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengelolaan Izin Lokasi.

KODE	URUSAN	PROGRAM
		3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. 4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. 5. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee. 6. Program Pengelolaan Tanah Kosong. 7. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah. 8. Program Penatagunaan Tanah.
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). 3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 4. Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. 10. Program Pengelolaan Persampahan.
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pendaftaran Penduduk. 3. Program Pencatatan Sipil. 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Penataan Desa. 3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa. 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa. 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengendalian Penduduk. 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. 4. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian. 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 7. Program Pengembangan UMKM.

KODE	URUSAN	PROGRAM
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. 3. Program Promosi Penanaman Modal. 4. Program Pelayanan Penanaman Modal. 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. 4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Kebudayaan. 2. Program Pengelolaan Permuseuman.
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembinaan Perpustakaan. 2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengelolaan Arsip. 3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. 4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata. 3. Program Pemasaran Pariwisata. 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. 5. Program Penyuluhan Pertanian. 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 7. Program Perizinan Usaha Pertanian. 8. Program Penyuluhan Pertanian.
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan. 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 4. Program Pengembangan Ekspor.

KODE	URUSAN	PROGRAM
		5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. 6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. 3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. 4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4.01	Sekretariat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 3. Program Perekonomian dan Pembangunan.
4.02	Sekretariat DPRD	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5.01	Perencanaan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
5.02	Keuangan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
5.03	Kepegawaian	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Kepegawaian Daerah.
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5.05	Penelitian dan Pengembangan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
6.01	Inspektorat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
7	UNSUR KEWILAYAHAN	
7.01	Kecamatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

KODE	URUSAN	PROGRAM
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah, ditetapkan 1 (satu) program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah yaitu “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota”.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang.

Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.501.832.816.808,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.025.586.055.284,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp3.178.842.234.524,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp297.404.527,00. Sedangkan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp4.375.225.182.406,89; yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp838.906.956.543,89 Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp3.239.566.166.862,00 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp296.752.059.001,00.

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.705.964.209.126,00; yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp3.350.964.020.286,00; Belanja Modal sebesar Rp578.498.629.921,00; Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.209.649.650,00; dan Belanja Transfer sebesar Rp773.291.909.269,00. Sedangkan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.303.906.080.736,83; terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.2.994.600.953.868,83; Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.549.383.173.460,00; Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.379.689.219,00; dan realisasi Belanja Transfer sebesar Rp758.542.264.189,00.

Dengan demikian terjadi surplus sebesar Rp71.319.101.670,06. Sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam penerimaan pembiayaan sebesar Rp204.131.392.318,25 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp12.000.000.000,00 sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp204.131.392.318,25. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar

Rp275.450.493.988,31. Adapun secara rinci realisasi APBD Kabupaten Malang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	4.501.832.816.808,00	4.375.225.182.406,89	97,19
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.025.586.055.284,00	838.906.956.543,89	81,80
4.1.01	Pajak Daerah	476.666.164.778,00	454.120.555.692,00	95,27
4.1.02	Retribusi Daerah	119.529.323.105,00	34.597.374.072,00	28,94
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	46.849.399.240,00	25.482.015.537,05	54,39
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	382.541.168.161,00	324.707.011.242,84	84,88
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.178.842.234.524	3.239.566.166.862,00	101,91
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.801.416.277.603	2.812.521.313.441,00	100,40
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.315.877.317.603	2.326.982.353.441,00	100,48
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	219.996.134.671	223.768.129.181,00	101,71
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.655.177.855.000	1.666.245.288.928,00	100,67
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	91.141.827.000	88.582.620.305,00	97,19
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	349.561.500.932	348.386.315.027,00	99,66
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	22.916.865.000	22.916.865.000	100,00
4.2.01.05	Dana Desa	462.622.095.000	462.622.095.000	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	377.425.956.921	427.044.853.421,00	113,15
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	359.282.895.400	408.901.791.900,00	113,81
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	18.143.061.521	18.143.061.521,00	100,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	297.404.527.000	296.752.059.001,00	99,78
4.3.01	Pendapatan Hibah	22.999.297.000	21.723.499.500,00	94,45
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	274.405.230.000	275.028.559.501,00	100,23
5	BELANJA DAERAH	4.705.964.209.126	4.303.906.080.736,83	91,46
5.1	BELANJA OPERASI	3.350.964.020.286	2.994.600.953.868,83	89,37
5.1.01	Belanja Pegawai	1.674.608.074.660	1.456.092.249.859,91	86,95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.315.004.900.532	1.181.742.699.245,92	89,87
5.1.05	Belanja Hibah	330.958.045.094	327.264.685.763,00	98,88
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.393.000.000	29.501.319.000,00	97,07
5.2	BELANJA MODAL	578.498.629.921	549.383.173.460,00	94,97
5.2.01	Belanja Modal Tanah	38.638.690.145	34.438.052.554,00	89,13

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.014.334.731	159.628.882.616,00	92,80
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.098.598.585	39.738.698.978,00	80,94
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	314.608.356.110	311.839.906.693,00	99,12
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.140.238.750	1.976.231.659,00	92,33
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.998.411.600	1.761.400.960,00	88,14
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.209.649.650	1.379.689.219,00	42,99
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.209.649.650	1.379.689.219,00	42,99
5.4	BELANJA TRANSFER	773.291.909.269	758.542.264.189,00	98,09
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	51.551.340.769	36.801.957.153,00	71,39
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	38.937.769.132	32.543.249.560,00	83,58
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	12.613.571.637	4.258.707.593,00	33,76
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	721.740.568.500	721.740.307.036,00	100,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	721.740.568.500	721.740.307.036,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT	(204.131.392.317)	71.319.101.670,06	(34,94)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	204.131.392.318	204.131.392.318,25	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.131.392.318	216.131.392.318,25	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	216.131.392.318	216.131.392.318,25	100,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	216.131.392.318	216.131.392.318,25	100,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	42.050.714.677	42.050.714.677,25	100,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	174.080.677.641	174.080.677.641,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.000.000.000	12.000.000.000,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.000.000.000	12.000.000.000,00	100,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	12.000.000.000	12.000.000.000,00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0	0	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	204.131.392.318	204.131.392.318,25	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	275.450.493.988,31	0,00

Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi, capaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		ANGGARAN	REALISASI	(%)
KODE	PENDAPATAN	4.501.832.816.808,00	4.375.225.182.406,89	97,19
1	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	369.260.390.905,00	373.790.089.490,91	103,93
1.02	Bidang Kesehatan	359.538.451.502,00	300.211.436.136,83	83,50
1.03	Bidang Pekerjaan Umum	9.721.939.403,00	745.285.540,00	7,67
2	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	74.821.201.024,00	19.117.878.363,38	25,55
2.11	Bidang Lingkungan Hidup	7.552.439.759,00	5.063.179.832,00	67,04
2.15	Bidang Perhubungan	40.055.064.760,00	8.240.604.875,00	20,57
2.16	Bidang Komunikasi dan Informatika	4.869.485.174,00	1.363.681.720,00	28,00
2.17	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	462.986.700,00	381.057.594,38	82,30
2.18	Bidang Penanaman Modal	17.952.609.687,00	3.393.543.480,00	18,90
2.19	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.928.614.944,00	675.810.862,00	17,20
3	Usuran Pemerintahan Pilihan	44.153.618.256,00	14.405.607.683,00	32,63
3.25	Bidang Kelautan dan perikanan	10.167.030.555,00	3.743.599.173,00	36,82
3.26	Bidang Pariwisata	5.355.831.337,00	460.867.000,00	8,60
3.27	Bidang Pertanian	3.959.548.900,00	1.016.093.000,00	25,66
3.31	Bidang Perindustrian	24.671.207.464,00	9.185.048.510,00	37,23
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	4.013.597.606.623,00	3.967.166.321.329,60	98,84
5.2	Keuangan	4.013.597.606.623,00	3.967.166.321.329,60	98,84
	BELANJA	4.705.964.209.126,00	4.303.913.674.911,83	91,46
1	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.895.447.462.014,00	2.583.140.977.209,83	89,21
1.01	Bidang Pendidikan	1.430.209.904.574,00	1.301.630.732.325,61	91,01
1.02	Bidang Kesehatan	889.246.930.703,00	718.780.244.170,22	80,83
1.03	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	503.259.595.224	492.296.654.888,00	97,82
1.04	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.406.049.604,00	6.304.772.203,00	98,42
1.05	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	37.978.603.814,00	36.457.347.019,00	95,99
1.06	Bidang Sosial	28.346.378.095,00	27.671.226.604,00	97,62
2	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	308.051.358.311,00	292.067.664.182,00	94,81
.2.07	Bidang Tenaga Kerja	17.553.829.583,00	16.340.201.727,00	93,09

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		ANGGARAN	REALISASI	(%)
2.08	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.689.674.129,00	5.106.402.824,00	89,75
2.09	Bidang Pangan	7.501.757.387,00	7.127.969.926,00	95,02
2.10	Bidang Pertanahan	49.424.546.131,00	44.788.650.059,00	90,62
2.11	Bidang Lingkungan Hidup	38.879.674.487,00	36.664.171.431,00	94,30
2.12	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.918.210.133,00	17.174.248.740,00	95,85
2.13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.176.058.044,00	17.528.838.567,00	96,44
2.14	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34.109.507.756,00	33.420.724.533,00	97,98
2.15	Bidang Perhubungan	54.154.889.533,00	52.367.221.328,00	96,72
2.16	Bidang Komunikasi dan Informatika	11.750.122.636,00	11.339.904.854,00	96,51
2.17	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.969.479.216,00	8.521.120.732,00	95,00
2.18	Bidang Penanaman Modal	9.212.249.032,00	8.410.930.787,00	91,30
2.19	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	21.550.206.041,00	20.632.224.396,00	95,74
2.20	Bidang Statistik	223.923.000,00	223.923.000,00	100,00
2.21	Bidang Persandian	44.401.798,00	44.401.798,00	100,00
2.22	Bidang Kebudayaan	3.933.952.000,00	3.898.472.850,00	99,10
2.23	Bidang Perpustakaan	122.014.300,00	117.589.591,00	96,37
2.24	Bidang Kearsipan	8.836.863.105,00	8.360.667.039,00	94,61
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	139.680.160.084,00	127.987.540.653,00	91,63
3.25	Bidang Kelautan dan Perikanan	13.743.435.308,00	13.118.975.424,00	95,46
3.26	Bidang Pariwisata	10.247.243.244,00	8.891.830.926,00	86,77
3.27	Bidang Pertanian	82.097.922.455,00	75.799.395.335,00	92,33
3.30	Bidang Perdagangan	933.377.475,00	872.040.357,00	93,43
3.31	Bidang Perindustrian	32.448.941.602,00	29.100.912.611,00	89,68
3.32	Bidang Transmigrasi	209.240.000,00	204.386.000,00	97,68
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	143.521.403.283,00	133.356.064.706,00	92,92
4.01	Sekretariat Daerah	61.936.486.961,00	60.226.928.437,00	97,24
4.02	Sekretariat DPRD	81.584.916.322,00	73.129.136.269,00	89,64
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	976.207.977.213,00	939.135.543.399,00	96,20
5.01	Perencanaan	12.910.602.762,00	12.506.368.259,00	96,87
5.02	Keuangan	942.264.605.844,00	906.436.539.340,00	96,20
5.03	Kepegawaian	2.529.323.127,00	2.370.514.255,00	93,72
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	11.507.481.928,00	11.054.806.902,00	96,07
5.05	Penelitian dan Pengembangan	6.995.963.552,00	6.767.305.583,00	96,73
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	23.762.970.519,00	22.625.895.160,00	95,21
6.1	Inspektorat Daerah	23.762.970.519,00	22.625.895.160,00	95,21

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		ANGGARAN	REALISASI	(%)
7	Unsur Kewilayahan	133.348.683.684,00	118.205.922.863,00	88,64
7.01	Kecamatan	133.348.683.684,00	118.205.922.863,00	88,64
8	Unsur Pemerintahan Umum	85.944.194.018,00	85.011.354.750,00	98,91
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	85.944.194.018,00	85.011.354.750,00	98,91

Sedangkan berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah, capaian target kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
01	PELAYANAN UMUM	1.305.198.102.625,00	1.242.528.676.587,00	95,20
01 2 03	Pangan	7.501.757.387,00	7.127.969.926,00	95,02
01 2 10	Komunikasi dan Informatika	11.750.122.636,00	11.339.904.854,00	96,51
01 2 14	Statistik	223.923.000,00	223.923.000,00	100,00
01 2 15	Persandian	44.401.798,00	44.401.798,00	100,00
01 2 18	Kearsipan	8.836.863.105,00	8.360.667.039,00	94,61
01 4 01	Administrasi Pemerintahan	61.936.486.961,00	60.230.742.437,00	97,25
01 4 02	Pengawasan	23.762.970.519,00	22.625.895.160,00	95,21
01 4 03	Perencanaan	12.910.602.762,00	12.506.368.259,00	96,87
01 4 04	Kuangan	942.264.605.844,00	906.436.539.340,00	96,20
01 4 05	Kepegawaian	2.529.323.127,00	2.411.511.221,00	95,43
01 4 06	Pendidikan dan Pelatihan	11.507.481.928,00	11.054.806.902,00	96,07
01 4 07	Penelitian dan Pengembangan	6.995.963.552,00	6.753.555.583,00	96,54
01 4 08	Sekretariat DPRD	81.584.916.322,00	75.206.813.257,00	92,18
01 4 11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	133.348.683.684,00	118.205.577.811,00	88,64
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	123.922.797.832,00	121.466.769.769,00	98,02
03 1 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	37.978.603.814,00	36.455.415.019,00	95,99
03 4 12	Kesatuan Bangsa dan Politik	85.944.194.018,00	85.011.354.750,00	98,91
04	EKONOMI	237.499.422.248,00	222.399.639.747,00	93,64
04 2 01	Tenaga Kerja	17.553.829.583,00	16.455.477.927,00	93,74
04 2 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.176.058.044,00	17.528.838.567,00	96,44
04 2 09	Perhubungan	54.154.889.533,00	52.379.615.328,00	96,72
04 2 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.969.479.216,00	8.531.901.258,00	95,12

KODE			URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
04	2	12	Penanaman Modal	9.212.249.032,00	8.410.930.787,00	91,30
04	3	01	Kelautan dan Perikanan	13.743.435.308,00	13.111.442.827,00	95,40
04	3	03	Pertanian	82.097.922.455,00	75.801.594.085,00	92,33
04	3	06	Perdagangan	933.377.475,00	872.040.357,00	93,43
04	3	07	Perindustrian	32.448.941.602,00	29.103.412.611,00	89,69
04	3	08	Transmigrasi	209.240.000,00	204.386.000,00	97,68
05			LINGKUNGAN HIDUP	88.304.220.618,00	81.456.437.990	92,25
05	2	04	Pertanahan	49.424.546.131,00	44.792.266.559,00	90,63
05	2	05	Lingkungan Hidup	38.879.674.487,00	36.664.171.431,00	94,30
06			PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	509.665.644.828,00	498.601.677.091,00	97,83
06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	503.259.595.224,00	492.296.904.888,00	97,82
06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.406.049.604,00	6.304.772.203,00	98,42
07			KESEHATAN	923.356.438.459,00	752.194.193.703,22	81,46
07	1	02	Kesehatan	889.246.930.703,00	718.773.469.170,22	80,83
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34.109.507.756,00	33.420.724.533,00	97,98
08			PARIWISATA DAN BUDAYA	14.181.195.244,00	12.790.303.776,00	90,19
08	2	16	Kebudayaan	3.933.952.000,00	3.898.472.850,00	99,10
08	3	02	Pariwisata	10.247.243.244,00	8.891.830.926,00	86,77
10			PENDIDIKAN	1.451.882.124.915,00	1.322.516.503.905,61	91,09
10	1	01	Pendidikan	1.430.209.904.574,00	1.301.766.689.918,61	91,02
10	2	13	Kepemudaan dan Olah Raga	21.550.206.041,00	20.632.224.396,00	95,74
10	2	17	Perpustakaan	122.014.300,00	117.589.591,00	96,37
11			PERLINDUNGAN SOSIAL	51.954.262.357,00	49.951.878.168,00	96,15
11	1	06	Sosial	28.346.378.095,00	27.671.226.604,00	97,62
11	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.689.674.129,00	5.106.402.824,00	89,75
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Cakil	17.918.210.133,00	17.174.248.740,00	95,85
			JUMLAH	4.705.964.209.126,00	4.303.906.080.736,83	91,46

3.2. KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

Dalam pencapaian target kinerja keuangan tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Adapun permasalahan utama dan solusinya secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DAERAH

Permasalahan :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan adalah:

- Terbatasnya potensi Pajak Daerah yang menyebabkan terbatasnya Pajak Asli Daerah yang berdampak juga pada terbatasnya Pendapatan Daerah;
- Inventarisasi Barang Milik Daerah belum dilaksanakan secara maksimal dan penilaian asset itu sendiri belum berjalan secara keseluruhan yang berdampak nilai pada neraca tidak sesuai dengan kondisi yang ada;
- Sumber Daya Manusia yang masih belum kompeten terutama terkait dengan tenaga fungsional dalam rangka persiapan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah seperti tenaga penilaian objek bangunan, juru sita Pajak belum memadai.

2. Pendapatan Transfer

Kestabilan jumlah pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer pusat ternyata masih menjadi ketergantungan daerah dalam berbagai pembayaran dibandingkan pendapatan asli daerah yang diperoleh dalam tahun 2023, sehingga indikator kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah hanyalah sebatas pada indikator dan bukan determinan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan pendapatan dari sisi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dalam pendistribusian, memerlukan penetapan alokasi waktu yang lebih cermat untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Solusi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah selalu diupayakan dengan melaksanakan kegiatan yang sarannya adalah Terwujudnya realisasi pajak dan retribusi pajak secara optimal serta terlaksananya *fiscal sustainability* yang adil, pasti dan layak

melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Strategi yang diambil dalam pencapaian arah dan kebijakan pendapatan daerah yaitu:

- Pemberdayaan segenap aparat dengan cara meningkatkan motivasi, disiplin dan etos kerja dalam rangka meningkatkan kinerja;
- Meningkatkan koordinasi dengan segenap instansi dan institusi terkait dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah baik di tingkat daerah, provinsi maupun Pusat;
- Memperluas jangkauan pelayanan dengan sistem jemput bola guna meningkatkan penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah tertentu;
- Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah tertentu dan penerimaan lain-lain yang sah;
- Melakukan pendekatan intensif dengan Pemerintah Pusat dan berbagai pihak, baik dalam rangka peningkatan sumbangan pihak ketiga maupun penerimaan yang bersumber pada prioritas pembangunan.

Adapun solusi yang ditempuh agar tujuan dan sasaran dapat dicapai yaitu:

- Meningkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah;
- Meningkatkan produktifitas kinerja aparatur sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal;
- Meningkatkan koordinasi baik secara internal maupun eksternal;
- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Meningkatkan enterpreunership khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktifitas dunia usaha serta meningkatkan pelayanan publik terutama kemudahan-kemudahan dalam rangka peningkatan investasi.

Sedangkan Langkah-langkah yang akan diambil antara lain:

- Pemungutan pendapatan Daerah disesuaikan dengan ketentuan Perda bagi wajib pajak agar tidak terjadi pungutan dibawah ketentuan Perda;
- Kecepatan dan ketepatan dalam penyampaian Surat Penetapan Pajak maupun Surat Penetapan Retribusi Daerah;
- Pendataan potensi pajak lebih akurat dan mudah dalam system pengenaan pajak maupun pelayanan setoran pajak dan retribusi tertentu;
- Perlu adanya pemisahan secara jelas antara Tugas Pokok dan Fungsi, agar semua permasalahan dapat ditangani secara professional;
- Lebih meningkatkan kinerja dan koordinasi yang mantap dengan Instansi-Instansi terkait.

2. Pendapatan Transfer

- Mengoptimalkan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak agar pencapaiannya dapat lebih proporsional sesuai dengan kondisi obyektif yang ada;

B. BELANJA DAERAH

Permasalahan :

Secara garis besar kendala utama dalam belanja daerah adalah tajamnya perbedaan antara ruang lingkup permasalahan atau kebutuhan daerah yang harus ditangani dengan kemampuan keuangan daerah, hal ini terkait dengan pengalokasian anggaran belanja yang sebagian belum didasarkan dari perencanaan strategis dan pengalokasian anggaran yang tidak efisien serta keterbatasan instrument teknis perencanaan anggaran belanja yang berorientasi pada kinerja.

Solusi :

Dalam menghadapi kendala atau permasalahan tersebut diperlukan penanganan ataupun solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian Daerah sesuai dengan prioritas program;

2. Mengembangkan jiwa leadership dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas dalam rangka peningkatan produktivitas dunia usaha dan masyarakat;
3. Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyak kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar pula;
4. Memprioritaskan kegiatan yang dapat memberi umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan lain;
5. Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah;

Disamping permasalahan belanja tersebut diatas dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, beberapa asumsi pokok yang dapat mempengaruhi kebijakan/belanja daerah:

1. Penerimaan pendapatan daerah dapat terpenuhi agar dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kebutuhan belanja daerah digunakan untuk mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan mempertimbangkan besarnya pendapatan daerah belum sepenuhnya memenuhi target belanja, maka diperlukan solusi sebagai berikut:

1. Kebijakan defisit anggaran yang sudah dilakukan harus dapat memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kemampuan penyediaan dana dan dampaknya pada masa yang akan datang;
2. Setiap pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan kesinambungan fiskal dapat terjaga.

3.3. PENCAPAIAN KINERJA

Terlepas dari permasalahan dan solusinya, beberapa pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menurut kewenangan urusan tahun 2023, secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.01. Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran bidang Pendidikan sebesar Rp1.430.209.904.574,00 dengan realisasi mencapai Rp1.301.630.732.325,61 atau 91,01%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pendidikan.

Program yang dilaksanakan:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Program Pengelolaan Pendidikan.
- Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

Pencapaian kinerja urusan pendidikan :

- Indeks pendidikan dengan target 0,68 realisasi 0,63 atau mencapai 92,65%;
- Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan :
- Permasalahan internal orang tua dan anak sekolah, dalam hal ini terdapatnya anak putus sekolah dan sebagian anak hanya mengikuti pendidikan sampai SMP/MTS;
- Permasalahan pemerataan pendidikan bagi semua masyarakat dalam hal ini Kurangnya kuantitas dan kualitas guru di pedesaan yang dapat mengedukasi masyarakat dan siswa akan pentingnya pendidikan sehingga dapat mengurangi angka anak putus sekolah;
- Adanya pergeseran/perubahan yang secara signifikan berpengaruh pada waktu pelaksanaan.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Pemerataan Kuantitas Tenaga Pendidik;
- Beasiswa bagi Peserta Didik yang Kurang Mampu;
- Rehabilitasi Ruang Kelas.

1.02. Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran bidang Kesehatan sebesar Rp889.246.930.703,00 dengan realisasi mencapai Rp718.780.244.170,22 atau 80,83%. Pelaksanaan urusan terdistribusi pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen, dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

Pencapaian kinerja urusan kesehatan :

- Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan target 81% realisasi 85,11% atau mencapai 105,07%;
- Angka kematian ibu (AKI) dengan target 66 / 100.000KH realisasi 52,91 / 100.000KH atau mencapai 80,17%, indikator ini merupakan indikator yang bersifat negatif sehingga capaian yang diharapkan adalah capaian dibawah 100% atau realisasi dibawah target;
- Angka Kematian Bayi dengan target (AKB) 2,3 /1.000KH realisasi 1,72 /1.000KH atau mencapai 74,78%, indikator ini merupakan indikator yang bersifat negatif sehingga capaian yang diharapkan adalah capaian dibawah 100% atau realisasi dibawah target;
- Persentase kasus balita stunting dengan target 11% realisasi 6,4% atau mencapai 58,11%, indikator ini merupakan indikator yang bersifat negatif sehingga capaian yang diharapkan adalah capaian dibawah 100% atau realisasi dibawah target;
- Prevalensi kasus gizi buruk dengan target 0,14% realisasi 0,053% atau mencapai 37,86%, indikator ini merupakan

indikator yang bersifat negatif sehingga capaian yang diharapkan adalah capaian dibawah 100% atau realisasi dibawah target;;

- Persentase tingkat hunian Rumah Sakit di RSUD Kanjuruhan dengan target 70% realisasi 64,71% atau mencapai 92,44%;
- Persentase indikator mutu nasional di RSUD Kanjuruhan yang tercapai dengan target 70% realisasi 77,84% atau mencapai 111,2%;
- Persentase elemen akreditasi di RSUD Kanjuruhan yang memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku dengan target 80% realisasi 80% atau mencapai 100%;
- Kemampuan RSUD Kanjuruhan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar target 1 realisasi 1,10 atau mencapai 110;
- Kapasitas sumber daya manusia yang profesional di RSUD Kanjuruhan dengan target 90% realisasi 93,6% atau mencapai 104%;
- Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kanjuruhan dengan target 90% realisasi 93,6 atau mencapai 104%;
- Persentase Indikator Mutu Nasional di RSUD Lawang yang meliputi :
 - Persentase Tingkat Hunian Rumah Sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) dengan target 60-85% realisasi 41,07% atau mencapai 63,18%;
 - Angka Kematian Umum Tiap 1.000 Pasien Keluar atau *Gross Death Rate* (GDR) dengan target $\leq 45\%$ realisasi 28,9% atau mencapai 64,22%, indikator ini merupakan indikator negatif sehingga capaian yang diharapkan adalah dibawah target;
 - Angka kematian lebih atau sama dengan 48 jam tiap 1.000 pasien keluar atau *Net Death Rate* (NDR) dengan target $\leq 25\%$ realisasi 13,5% atau mencapai 54%. indikator ini merupakan indikator negatif sehingga capaian yang diharapkan adalah dibawah target;

- Persentase Peningkatan Mutu Yang Memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit di RSUD Lawang, yang meliputi:
 - Persentase tenaga profesional medis dan keperawatan dengan target 100% realisasi 93,02% atau mencapai 93,02%;
 - Persentase kelengkapan prasarana yang terstandar dengan target 80% realisasi 95,35% atau mencapai 119,19%;
 - Persentase kelengkapan sarana gedung/fisik sesuai standar dengan target 80% realisasi 81,63% atau mencapai 102,04%;
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Lawang dengan target 80% realisasi 83,99% atau mencapai 104,99%;
- Inovasi Pelayanan Kesehatan dengan target 1 inovasi realisasi 1 inovasi atau mencapai 100%.
- Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Berkualitas.

Permasalahan/pendorong pelaksanaan program kegiatan Dinas Kesehatan:

- Adanya dukungan dari pembiayaan berbagai sumber dana beserta kebijakan yang mengatur pemanfaatan sumber dana untuk pelaksanaan program kesehatan;
- Jumlah penduduk yang sangat besar serta jangkauan pelayanan yang luas apabila dihubungkan dengan jumlah SDM kesehatan yang mengakibatkan kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- Potensi Pemenuhan tenaga kesehatan (bidan dan perawat) pada semua desa dan kelurahan untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan;
- Ketersediaan obat , alat kesehatan serta kemudahan dalam pelayanan perijinan baik untuk tenaga kesehatan, serta perijinan lain yang membutuhkan sertifikat layak sehat;
- pelaksanaan pembangunan kesehatan yang mengedepankan pendekatan pembangunan berbasis potensi masyarakat yang masih kurang;
- Jangkauan wilayah yg luas dan jumlah penduduk yg tinggi memberikan akses layanan yg terkendala rentang jangkauan;
- Rasio antara jumlah penduduk dengan tenaga kesehatan yang masih kurang/belum memenuhi standar sehingga

mempengaruhi kualitas capaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat;

- Perubahan kebijakan Pemerintah dalam sistem perencanaan dan penganggaran mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan sehingga merubah pola perilaku kesehatan baru.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Komitmen dari daerah untuk mendukung kebijakan dari pusat dalam rangka mendukung pelaksanaan program kesehatan;
- Meningkatkan upaya promosi kesehatan advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sertas lintas sektor dalam melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat, upaya deteksi dini pencegahan stunting;
- Strategi peningkatan peran serta dari stake holder dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung pencapaian program kesehatan;
- Dukungan dan kebijakan daerah dalam rangka memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
- Peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas dengan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, penambahan alat kesehatan untuk memenuhi standart pelayanan kesehatan;
- Strategi dan dukungan lintas sektor untuk penguatan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat dalam mendukung pencapaian pembangunan kesehatan.

Permasalahan pelaksanaan program kegiatan RSUD:

- Indikator Program: Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang belum tercapai karena Terdapat Penambahan Pagu BLUD serta terbatasnya waktu pelaksanaan realisasi belanja;
- Indikator Program: Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit belum tercapai karena beberapa faktor sebagai berikut :
- Realisasi anggaran sebesar 98,68% karena terdapat efisiensi serta adanya perubahan harga pada beberapa belanja pemeliharaan alat kesehatan.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Lebih mengoptimalkan kecermatan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran berikutnya, khususnya dalam penetapan batas waktu pelaksanaan realisasi belanja anggaran tiap tahun disesuaikan dengan rencana kebutuhan/rencana aksi pelaksanaannya, sehingga terjadi keseimbangan antara yang ingin dicapai dengan yang direncanakan.
- Lebih mengoptimalkan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan setiap perencanaan berikutnya khususnya dalam penetapan target kinerja dan penyerapan anggaran tiap tahun. Perencanaan berikutnya disesuaikan dengan rencana kebutuhan/rencana aksi pelaksanaannya;
- Meningkatkan pendapatan guna pengembangan pelayanan melalui pemenuhan persyaratan proses kredensial BPJS sehingga dapat dioptimalkan pelayanan cathlab, ESWL dan HD;
- Mempertahankan capaian yang telah berhasil melalui pelayanan prima yang memuaskan bagi pasien dan keluarga;
- Meningkatkan sarana prasarana pendukung guna menunjang pelayanan yang bermutu/berkualitas;
- Meningkatkan kualitas SDM yang professional dan kompeten melalui pelatihan-pelatihan/Diklat karyawan (diklat teknis dan fungsional);
- Peningkatan *performance* Rumah Sakit terutama tampilan fisik Rumah Sakit yang lebih baik;
- Peningkatan promosi pelayanan RS melalui social media: IG, *Facebook*, (RSUD Kanjuruhan), Twitter (@RsudKanjuruhan) Podcast RS/akun youtube RS yang mengupload profil layanan RS secara kontinyu;
- Peningkatan koordinasi dengan lintas sector (Dinkes, Dinsos, dll) terkait rujukan pasien ke Rumah Sakit;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap indicator mutu nasional (13 indikator) di Rumah Sakit;

1.03. Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp503.259.595.224,00 dengan realisasi mencapai Rp492.296.654.888,00 atau 97,82%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- Program Penyelenggaraan Jalan;
- Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- Program Kawasan Permukiman
- Program Penataan Bangunan Gedung;
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Pencapaian kinerja urusan Pekerjaan Umum :

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

- Persentase prasarana jalan kondisi mantap dengan target sebesar 73% realisasi sebesar 73,30% atau mencapai 100,41%.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

- Presentase kecukupan debit air irigasi terhadap luas areal pertanian dengan target sebesar 57% realisasi sebesar 58,20% atau mencapai 102,11%;
- Persentase panjang saluran irigasi teknis (primer dan sekunder) dalam kondisi baik dengan target sebesar 57,70% realisasi sebesar 58,48% atau mencapai 101,35%.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Ciptakarya

- Persentase rumah layak huni dengan target sebesar 96,07% realisasi 96,08% atau mencapai 100%;

- Persentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi dengan target sebesar 80,70% realisasi 80,68% atau mencapai 99,96%;
- Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Teknis dengan target sebesar 42,43% realisasi 43,53% atau mencapai 102,59%.

Permasalahan/pendorong pelaksanaan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga :

- Pelaksanaan kegiatan “Salob” (Sapu Lobang) dilakukan untuk segera menambal setiap ada lubang di Jalan Kabupaten sehingga tidak memperparah kerusakan dan layak untuk mobilitas barang dan jasa;
- Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang optimal turut mendukung kondisi jalan tetap baik;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota yang optimal turut mendukung dalam upaya peningkatan fungsi jalan;
- Pelaksanaan kegiatan RAJASAMA (kegiatan pengeprasan bahu jalan yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat sekitar) dalam rangka mempertahankan fungsi jalan dan bangunan pelengkap dalam kondisi mantap;
- Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan yang didukung dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah sebagai upaya pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sehingga memberikan dampak positif terhadap tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Malang.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan DPU BM:

- Penjaringan penanganan baik melalui pengaduan SP4N!LAPOR, Media Sosial Dinas, Website Dinas, Surat Warga oleh masyarakat, secara berkala dikoordinasikan dengan bidang-bidang yang menangani;

- Sinkronisasi mantap internal dan eksternal dalam memprioritaskan pemeliharaan rutin jalan, penanganan kegiatan fisik khususnya;
- Perencanaan teknis yang matang dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) ;
- Koordinasi mantap antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik khususnya.

Permasalahan/pendorong pelaksanaan program kegiatan DPU SDA:

- Keberhasilan mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena keberhasilan kegiatan normalisasi saluran irigasi, susuk wangan, perbaikan pintu air dan bangunan ukur di 7 UPT dan pengaturan pembagian air secara optimal sehingga mendukung pelayanan air irigasi, serta percepatan pelaksanaan pekerjaan dengan membagi beberapa tahap yang dilaksanakan mulai awal tahun.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup:

- Penataan Lingkungan:
- Pengendalian Pencemaran:
- Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
- Perlu peningkatan SDM yang kompeten untuk melakukan implementasi pengendalian pencemaran udara pada kegiatan sektor industri dan transportasi;
- Menambah luasan penghijauan pada Kanan Kiri Jalan;
- Perlu dilakukan publikasi terhadap upaya-upaya pencemaran udara;
- Dilaksanakan pemantauan secara rutin dan uji emisi kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun umum, dan melakukan evaluasi secara periodik;
- Mengurangi kadar pencemaran udara dengan upaya penanaman terutama di jalan protokol dan konservasi lahan kritis dengan tegakan vegetasi yang sesuai kondisi lahan;
- Penetapan regulasi terkait pengendalian pencemaran udara;

- Melakukan edukasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik dengan tidak melakukan pembakaran dalam mengelola sampah;
- Diperlukan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya khususnya sector swasta dan masyarakat juga memberikan kontribusi dalam pengendalian kerusakan lahan;
- Melakukan kajian terkait lahan yang berpotensi dan direkomendasikan untuk dilakukan penghijauan;
- Mengembalikan bantaran/ sempadan sungai/waduk dengan penanaman tegakan vegetasi;
- Menambah luas RTH publik seperti taman, hutan kota, sempadan sungai sabuk hijau khususnya wilayah perkotaan dan mengoptimalkan tanah milik pemerintah dan bangunan sebagai model RTH yang ideal;
- Peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan kegiatan penghijauan di kawasan lahan kritis, sempadan sungai, sempadan sumber mata air dan sempadan pantai, penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan peningkatan RTH (pengayaan);
- Kegiatan penghijauan yang dilakukan seharusnya diikuti dengan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan penanaman pohon yang telah dilakukan;
- Implementasi kebijakan dalam pengelolaan tutupan lahan, penetapan kawasan RTH dalam regulasi untuk memenuhi standar minimal kecukupan sebesar 30% dari luas wilayah;
- Inovasi bersama masyarakat melalui perangkat desa dan dunia usaha melalui program CSR untuk melaksanakan konservasi sehingga cakupan konservasi yang dilaksanakan dapat lebih luas;
- Koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan seperti Perhutani, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Balai Besar serta Dinas Kehutanan Provinsi untuk bersama memelihara dan memulihkan kondisi tutupan vegetasi.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan:

- Pemantauan debit air irigasi di semua Daerah irigasi untuk mengantisipasi kekurangan debit, Juru Sumber Daya Air dan

Petugas Pintu Air (PPA) merupakan ujung tombak dalam pengaturan debit;

- Menggiatkan normalisasi saluran irigasi, susuk wangan, perbaikan pintu air dan bangunan ukur di 7 UPT diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan air irigasi dari segi infrastruktur; dan
- Menambah jumlah alat berat dan operator dalam rangka mendukung normalisasi saluran di seluruh wilayah kerja.;
- Pemeliharaan saluran irigasi secara kontinu;
- Memprioritaskan rehabilitasi terutama pada saluran dengan kondisi rusak berat dan sedang.

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya :

- Koordinasi mantap dengan BAZNAS Kabupaten Malang;
- Meningkatnya jumlah rumah yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- Kabupaten Malang belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk mengolah lumpur tinja yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- Belum optimalnya pendataan Prasarana Dasar Permukiman yang melingkupi 33 Kecamatan;
- Jumlah penduduk Kabupaten Malang yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga menyebabkan jumlah penduduk yang harus dilayani juga semakin meningkat;
- Ketersediaan debit air baku yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan air minum yang jumlahnya menurun dari tahun ke tahun;
- Indikator Kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain meningkatnya jumlah pemohon dan luasan rekomendasi pemanfaatan ruang.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya :

Dalam rangka meminimalisir indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan tersebut dan sebagai

langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- Melanjutkan pendataan Prasarana Dasar Permukiman yang melingkupi 33 Kecamatan. Akan ditindaklanjuti di Tahun yang akan datang

1.04. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran urusan perumahan sebesar Rp6.406.049.604,00 dengan realisasi mencapai Rp6.304.772.203,00 atau 98,42%. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Pengembangan Perumahan;
- Program Kawasan Permukiman;
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);

Pencapaian kinerja urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman :

- Persentase rumah layak huni dengan target 96,07 realisasi 96,08% atau mencapai 100,01%;

1.05. Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Alokasi anggaran urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Rp37.978.603.814,00 dengan realisasi mencapai Rp36.457.347.019,00 atau 95,99%. Pelaksanaan urusan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- Program Penanggulangan Bencana;
- Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran;

Pencapaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat :

- Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dengan target 100% realisasi 100% atau mencapai 100%;
- Persentase fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintah desa dengan target sebesar 100% realisasi sebesar 100% atau mencapai 100%;
- Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dengan target sebesar 100% realisasi sebesar 100% atau mencapai 100%.

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan:

- Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja Perangkat Daerah.
- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.
- Secara umum tidak didapatkan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan, namun sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Hal ini dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana yang berguna untuk pencegahan/preventif terhadap bencana, penanganan bencana yang responsif dan pemulihan dampak bencana yang terjadi;
- Pembangunan di Kabupaten Malang yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala:besar, menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan.
- Ketersediaan data dan informasi yang menunjang dokumen perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu lebih digali lagi;

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Meningkatkan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja Perangkat Daerah.
- Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.
- Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Meningkatkan langkah sosialisasi Perda yang dilakukan di tingkat masyarakat luas;
- Peningkatan kualitas dan jumlah SDM serta penambahan possektor damkar di beberapa wilayah kabupaten malang agar terciptanya peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Malang;
- Bersinergitas dengan OPD terkait dalam peningkatan kualitas kegiatan pelanggaran Perda dan penyelenggaraan Trantibumlinmas di Kabupaten Malang.

1.06. Bidang Sosial

Alokasi anggaran urusan sosial sebesar Rp28.346.378.095,00 dengan realisasi mencapai Rp27.671.226.604,00 atau 97,62%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Sosial.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pemberdayaan Sosial;
- Program Rehabilitasi Sosial;
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- Program Penanganan Bencana;
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Pencapaian kinerja urusan Sosial :

- Meningkatnya Kesejahteraan Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target sebesar 0,2% realisasi sebesar 4,82% atau mencapai 241%.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.07. Bidang Tenaga Kerja

Alokasi anggaran urusan tenaga kerja sebesar Rp17.553.829.583,00 dengan realisasi mencapai Rp16.340.201.727,00 atau 93,09%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Tenaga Kerja.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Program Penempatan Tenaga Kerja;
- Program Hubungan Industrial;

Pencapaian kinerja urusan Tenaga Kerja :

- Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun dengan target 100% realisasi 100% atau mencapai 100%;
- Persentase perencanaan tenaga kerja dalam satu tahun dengan target 100% realisasi 100% atau mencapai 100%;
- Persentase penempatan tenaga kerja dalam satu tahun dengan target 100% realisasi 100% atau mencapai 100%;
- Persentase hubungan industrial dalam satu tahun dengan target 100% realisasi 100% atau mencapai 100%.

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Banyaknya Peraturan Perusahaan yang telah habis masa berlakunya sehingga terdapat kenaikan pengajuan pengesahan Peraturan Perusahaan yang mengakibatkan kinerja melebihi yang ditetapkan;
- Adanya keterbukaan dan pemahaman dari para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- Antusiasme dan keterbukaan perusahaan dalam mengikuti kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang tinggi sehingga kinerja dapat mencapai target;
- Perda tentang Retribusi IMTA belum dilakukan perubahan sehingga kinerja belum tercapai. Realisasi anggaran

digunakan untuk persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan;

- Tingginya animo masyarakat untuk bekerja ke luar negeri setelah kondisi pandemi covid-19 yang mulai pulih sehingga realisasi kinerja melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan dari sisi anggaran, realisasinya disesuaikan untuk kebutuhan penyediaan operasional pelayanan di LTSA serta fasilitasi penjemputan PMI bermasalah;
- Belum adanya LPTKS yang mengajukan perjinan dengan wilayah kerja dalam satu daerah Kab/Kota sehingga realisasi kinerja belum mencapai target yang ditetapkan;
- Sub Kegiatan mengalami pergeseran saat P-APBD dan tidak dianggarkan dalam DPPA.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Menyusun perencanaan kegiatan dan penganggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas;
- Melaksanakan kegiatan tahun berikutnya dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja;
- Melaksanakan kegiatan tahun berikutnya sesuai dengan target perencanaan;

2.08. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi anggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp5.689.674.129,00 dengan realisasi mencapai Rp5.106.402.824,00 atau 89,75%. Pelaksanaan urusan ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program Kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- Program Perlindungan Perempuan;
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- Program Perlindungan Khusus Anak.

Pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Persentase penanganan Kasus Perempuan dan Anak yang diselesaikan dengan target sebesar 100% realisasi sebesar 100% atau mencapai 100%.
- Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD dengan target sebesar 20% realisasi 20% atau mencapai 100%.
- Persentase pembentukan desa/kelurahan layak anak dengan target 5% realisasi 5% atau mencapai 100%.
- Persentase pembentukan desa/kelurahan layak anak dengan target sebesar 5% realisasi 5% atau mencapai 100%.
- Persentase pembentukan desa/kelurahan layak anak dengan target sebesar 5% realisasi 5% atau mencapai 100%.

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Adanya efisiensi anggaran (sisa pagu anggaran melalui penyedia / Pihak Ketiga) karena harga yang disepakati dengan Pihak ketiga lebih kecil dari pagu yang sudah dialokasikan dan juga ada beberapa pembelanjaan yang terbayar atcost (seperti pajak kendaraan, wifi, listrik dan air).
- terlatihnya seluruh OPD dalam pembuatan GAP, GBS dan ToR, sesuai dengan format dari kementerian.
- Anggaran yang tidak terserap dikarenakan tidak adanya klien perempuan dan anak yang membutuhkan layanan rumah perlindungan.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Meningkatkan ketelitian/kecermatan dalam penentuan pagu anggaran sesuai dengan analisa standar belanja dan standar biaya umum.
- Mengupayakan penambahan anggaran agar peserta di seluruh OPD dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis PPRG.
- Membangun jejaring di kecamatan untuk membantu memberikan layanan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- Direncanakan menyesuaikan kerangka kegiatan dengan mengevaluasi/menelaah kembali kegiatan sebelumnya.

2.09. Bidang Pangan

Alokasi anggaran urusan pangan sebesar Rp7.501.757.387,00 dengan realisasi mencapai Rp.7.127.969.926,00 atau 95,02%. Pelaksanaan urusan pangan ada pada Dinas Ketahanan Pangan.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pencapaian kinerja urusan pangan :

- Skor pola pangan harapan (PPH) dengan target 88,7 realisasi 88,7 atau mencapai 100%;
- Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan utama dengan target 100% realisasi 1127,9% atau mencapai 1127,9%;
- Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG) dengan target 91% realisasi 91% atau mencapai 100%.

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Adanya produksi padi 484.619,54 Ton, Ketersediaan Pangan Utama Beras 310.641,13 Ton dengan kebutuhan terhadap Pangan Utama Beras 242.880,27 Ton sehingga ada surplus 67.760,85 Ton (27,9 %).
- Meningkatnya keragaman produksi bahan pangan sehingga keragaman ketersediannya meningkat / surplus untuk masyarakat Kabupaten Malang.
- Diadakannya Cadangan Pangan Pemerintah sebanyak 49 Ton dari target 48,9 Ton
- Tersalurkannya 6 Bahan Pangan pokok di 3 Toko di Gapoktan / Poktan di Kabupaten Malang dalam rangka memutus mata rantai distribusi.
- Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman(B2SA).
- Terlaksananya pelatihan olahan pangan lokal

- Terlaksananya kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang memanfaatkan hasil pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga.
- Meningkatnya keamanan pangan segar asal tumbuhan dan wawasan masyarakat terkait pangan aman.
- Penguatan Peran serta Satgas Keamanan Pangan di Kecamatan.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

Dalam rangka mempertahankan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Ketahanan Pangan melakukan Langkah-langkah dengan:

- Meningkatkan kompetensi petugas data dan analisis data yang ada di Dinas Ketahanan Pangan;
- Meningkatkan Kerjasama dengan OPD lintas rumpun pertanian tentang ketepatan waktu dan kevalidan data yang dikirim;

2.10. Bidang Pertanahan

Alokasi anggaran urusan Pertanahan sebesar Rp49.424.546.131,00 dengan realisasi mencapai Rp44.788.650.059,00 atau 90,62%. Pelaksanaan urusan ada pada Dinas Pertanahan.

Program Kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengelolaan Izin Lokasi;
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
- Program Pengelolaan Tanah Kosong;
- Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
- Program Penatagunaan Tanah.

Pencapaian kinerja urusan pertanahan :

- Persentase Permasalahan Tanah yang dtangani dengan Target Kinerja 84% realisasi 86% atau mencapai 102,38%;

- Persentase Tanah Aset yang *Clean and Clear* dan Bersertipikat dengan target 31% realisasi 33% lokasi atau mencapai 106,45%.

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan :

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Sesuai dengan aturan PP no 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan hasil koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tentang Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah masih belum ada seksi yang membidangi;
- Jadwal pengukuran tanah dengan petugas ukur Kantor Pertanahan, dan juga petugas ukur dalam pengerjaan plotting grafikal cukup memakan waktu yang lama terutama batas tanah yang berdampingan dengan bangunan instansi lain yang berdampak pada penerbitan berkas peta bidang sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya;

Penyebab Keberhasilan antara lain :

- Efisiensi pada perjalanan dinas dalam daerah;
- Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi KKPR/ Izin lokasi dengan pihak terkait (DPMPTSP, DPKPCK, BPN);
- Percepatan pelaksanaan kegiatan untuk memfasilitasi redistribusi tanah di wilayah Kabupaten Malang yang diselenggarakan oleh BPN;
- Percepatan pelaksanaan kegiatan kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Koordinasi yang baik dengan BPN dalam fasilitasi PTSL;
- Percepatan kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara;
- Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait pengendalian pemanfaatan tanah negara.

Penyebab Kegagalan antara lain:

- Belum terealisasi dikarenakan anggaran menyesuaikan kebutuhan sewaktu-waktu yaitu pada perjalanan dinas dalam daerah;
- Pemegang keputusan dan pengambil kebijakan bukan dari Pemkab Malang (misalnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Pengadilan)

- Proses pengadaan tanah peningkatan ruas jalan menggunakan mekanisme penetapan lokasi dimana tahapannya lebih panjang dibandingkan pengadaan langsung.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Optimalisasi capaian realisasi anggaran dengan efisiensi serapan anggaran sesuai kebutuhan yaitu Efisiensi pada perjalanan dinas dalam daerah;
- Melakukan koordinasi lebih intens agar target kinerja dan anggaran tercapai.

2.11. Bidang Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup sebesar Rp38.879.674.487,00 dengan realisasi mencapai Rp36.664.171.431,00 atau 94,30%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya dan Dinas Lingkungan Hidup.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- Program Pengelolaan Persampahan.

Pencapaian kinerja urusan Lingkungan Hidup :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 58,13% realisasi 69,34% atau mencapai 119,28%;

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Peningkatan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2023 salah satunya karena pada capaian nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan sebesar 3,71 poin (4,65%) dari tahun 2022. Capaian IKU pada tahun 2023 adalah 83,45 dan capaian tahun 2022 adalah 79,74. Titik pantau kualitas udara ambien pada tahun 2023 dilaksanakan pada 4 lokasi titik uji representasi area peruntukan perkantoran, pemukiman, industri dan transportasi, yang diharapkan lebih bisa memberikan data yang lebih representative menggambarkan kondisi riil kualitas udara di wilayah perkotaan Kabupaten Malang meskipun secara statistik data tersebut dapat dikatakan belum mempresentasikan kondisi riil Kabupaten Malang secara keseluruhan.
- Pada capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 3,84 poin (8,19%) dari tahun 2022. Peningkatan capaian IKL dari 46,88 atau kategori “kurang” pada tahun 2022 meningkat menjadi 50,72 atau kategori “sedang” pada tahun 2023. Luas tutupan hutan di wilayah Kabupaten Malang sesuai peta citra landsat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercatat seluas 85.134,731 ha. Luas ini meningkat 8.524,938 ha dari tahun sebelumnya seluas 76.609,748 ha. Upaya peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan rehabilitasi hutan dan lahan juga berpotensi dalam peningkatan tutupan lahan di Kabupaten Malang.
- Dukungan dalam upaya pengendalian kerusakan lahan antara lain dari Perum Jasa Tirta I, PT. PLN Nusantara Power, Komunitas Milenial Youth Sadar Lingkungan, PT. Pertamina dan PT. Cheil Jedang. Terdapat program dengan melibatkan instansi antara lain Pemulihan bekas tambang di Kecamatan Wajak yang dilakukan bersama dengan KLHK serta Rehabilitasi DAS IPPKH Jalan Lintas Selatan Kabupaten Malang di Kawasan Tahura R. Soerja.
- Terlaksananya pengawasan kepada kegiatan/usaha atas ketaatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dan upaya penegakan hukum lingkungan

hidup. Pada Tahun 2023 juga dilaksanakan pengawasan secara tidak langsung merupakan evaluasi dari laporan semester kegiatan/usaha yang dikirim oleh kegiatan/usaha, dan jika ada kekurangan dari pemenuhan kewajiban lingkungan akan didampingi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) agar kegiatan/usaha berperan aktif memenuhi kewajiban lingkungan guna mendukung pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

- Dalam upaya penegakan hukum lingkungan, DLH telah memproses sanksi administratif pada kegiatan/usaha yang tidak taat dimana ditemukan pelanggaran PPLH dan tidak menindaklanjuti hasil pengawasan.
- Peningkatan kesadaran kegiatan/usaha atas perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, meningkatnya ketaatan kegiatan/usaha, baik dalam hal pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan, ketersediaan IPAL serta TPS B3 yang dilengkapi dengan rincian teknis limbah B3 sebagai wujud komitmen kegiatan/usaha dalam upaya pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara.
- Meningkatnya penanganan sampah baik melalui pelayanan persampahan oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, melalui edukasi pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan ketersediaan sarana prasarana penanganan sampah.
- Peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Malang dalam upaya pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan terpilihnya Desa Berseri dan Kampung Proklam.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Peningkatan peran serta dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar.
- Meningkatkan pengawasan terhadap limbah USK atau limbah domestik.
- Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha/kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air.
- Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

- Peningkatan koordinasi antara pusat, provinsi dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air.
- Peningkatan SDM yang kompeten dan melaksanakan pelatihan untuk melakukan implementasi pembinaan dan pengawasan pada kegiatan sektor industri dan transportasi, dalam upaya pengendalian pencemaran udara.
- Menyiapkan anggaran APBD khusus untuk pengendalian pencemaran air dan udara.
- Meningkatkan upaya penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau publik, melakukan penanaman vegetasi terutama di jalur protokol dengan intensitas kendaraan tinggi, melakukan pemantauan secara rutin emisi gas buang dari sumber bergerak dan tidak bergerak, membuat hari tanpa kendaraan (car free day) di ruas jalan dengan tingkat pencemaran tinggi, mendorong keterlibatan swasta melalui CSR khususnya dalam upaya perbaikan kualitas udara, melakukan edukasi dalam pengelolaan sampah dengan tidak melakukan pembakaran sampah.
- Merumuskan inovasi dalam pengendalian pencemaran udara, konservasi lahan kritis dan penanaman pada area berfungsi lindung (sempadan).
- Mendorong peran serta masyarakat untuk ikut aktif menjaga kelestarian tutupan vegetasi, koordinasi insentif dengan pemangku kepentingan seperti Perhutani, Taman Nasional, Taman Hutan Raya untuk bersama memelihara dan memulihkan kondisi tutupan vegetasi.
- Melaksanakan publikasi terhadap upaya-upaya pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan tutupan lahan.

2.12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi anggaran urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp17.918.210.133,00 dengan realisasi mencapai Rp17.174.248.740,00 atau 95,85%. Pelaksanaan urusan ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program Kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Program Pendaftaran Penduduk;
- Program Pencatatan Sipil;
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Pencapaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

- Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun dengan target 100% realisasi 94,72% atau mencapai 94,72%;
- Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-49 tahun dengan target 100% realisasi 94,72% atau mencapai 94,72%;
- Persentase *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* dengan target 100% realisasi 99,92% atau mencapai 99,92%.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Berkurangnya volume kegiatan koordinasi dari perencanaan awal, sehingga terdapat anggaran perjalanan dinas yang tidak terserap.
- Peruntukan anggaran hanya untuk pembayaran alat komunikasi. Sedangkan untuk listrik dan air tidak diserap dikarenakan pembayaran dua rekening tersebut dikakukan oleh bagian hukum.
- Adanya selisih pembayaran pajak kendaraan. Dimana harga yang tertera dalam aplikasi jauh lebih tinggi daripada harga pajak yang dibayarkan.
- Adanya efisiensi dalam kegiatan belanja.
- Menurunnya jumlah akseptor pelayanan KB MKJP sehingga capaian kinerja dan realisasi anggaran tidak dapat tercapai. Hal ini disebabkan masyarakat masih takut mendapat tindakan pelayanan KB di kamar operasi dan masih adanya anggapan di masyarakat bahwa peserta KB adalah wanita sehingga mempengaruhi jumlah kesertaan KB Pria.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi capaian dan realisasi anggaran sehingga menjadi pedoman perencanaan kebutuhan ditahun berikutnya.

- Pembuatan Aplikasi Terpadu untuk mencatat permohonan di Tahun 2023;
- Dengan adanya keterbatasan sumber daya maka berkas digital akan di fokuskan terlebih dahulu pada penyelesaian konversi seluruh berkas pencatatan sipil menjadi berkas digital dalam kurun waktu 3 tahun, setelah itu akan dikembangkan lebih lanjut pada konversi berkas pendaftaran penduduk;
- Percepatan pencetakan KIA hanya dapat dilakukan melalui pencetakan masal KIA dengan melibatkan pihak ketiga yang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Apabila dimungkinkan akan dilakukan pengajuan anggaran pada tahun 2024.

2.13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Alokasi anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp18.176.058.044,00 dengan realisasi mencapai Rp17.528.838.567,00,00 atau 96,44%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penataan Desa;
- Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi 100% atau mencapai 100%.
- Persentase fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintah desa target sebesar 100% dan realisasi 100% atau mencapai 100%.
- Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa target sebesar 100% dan realisasi 100% atau mencapai 100%.

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan:

- Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja Perangkat Daerah.
- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.

2.14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alokasi anggaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebesar Rp34.109.507.756,00 dengan realisasi mencapai Rp33.420.724.533,00 atau 97,98%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengendalian Penduduk;
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pencapaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun dengan target 100% realisasi 94,72% atau mencapai 94,72%;
- Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-49 tahun dengan target 100% realisasi 98,21% atau mencapai 98,21%;

- Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dengan target 100% realisasi 97,79% atau mencapai 97,79%;
- Persentase peningkatan strata Kelompok Ketahanan Keluarga dengan target 100% realisasi 99,92% atau mencapai 99,92%.

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan

- Karena ada beberapa ASN yang purna tugas, sehingga serapan anggaran tidak dapat optimal.
- Adanya 1 (satu) orang tenaga kontrak yang resign, sehingga anggaran tidak dapat terserap optimal.
- Berkurangnya volume kegiatan koordinasi dari perencanaan awal, sehingga terdapat anggaran perjalanan dinas yang tidak terserap.
- Peruntukan anggaran hanya untuk pembayaran alat komunikasi. Sedangkan untuk listrik dan air tidak diserap dikarenakan pembayaran dua rekening tersebut dikakukan oleh bagian hukum.
- Adanya selisih pembayaran pajak kendaraan. Dimana harga yang tertera dalam aplikasi jauh lebih tinggi daripada harga pajak yang dibayarkan.
- Adanya selisih pembayaran pajak kendaraan. Dimana harga yang tertera dalam aplikasi jauh lebih tinggi daripada harga pajak yang dibayarkan.
- Adanya efisiensi anggaran dalam belanja
- Adanya belanja pembayaran tagihan listrik dibalai yang tidak terserap, dikarenakan kebutuhan listrik dibalai dalam tahun 2023 mengalami penurunan.
- Menurunnya jumlah akseptor pelayanan KB MKJP sehingga capaian kinerja dan realisasi anggaran tidak dapat tercapai. Hal ini disebabkan masyarakat masih takut mendapat tindakan pelayanan KB di kamar operasi dan masih adanya anggaran di masyarakat bahwa peserta KB adalah wanita sehingga mempengaruhi jumlah kesertaan KB Pria.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi capaian dan realisasi anggaran sehingga menjadi pedoman perencanaan kebutuhan ditahun berikutnya.

2.15. Bidang Perhubungan

Alokasi anggaran urusan sebesar Rp54.154.889.533,00 dengan realisasi mencapai Rp52.367.221.328,00 atau 96,70%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Perhubungan.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pencapaian kinerja urusan Perhubungan :

- Persentase kuantitas prasarana lalu lintas angkutan jalan dengan target sebesar 4% realisasi sebesar 1,33%;
- Persentase kendaraan bermotor laik jalan dengan target sebesar 74% realisasi sebesar 83,66%.

Permasalahan pelaksanaan program kegiatan :

- Tidak seimbang anggaran untuk pembiayaan perlengkapan jalan dengan kebutuhan perlengkapan jalan;
- Terdapat refocusing anggaran sehingga berpengaruh terhadap realisasi kinerja pada perlengkapan jalan.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan:

- Melaksanakan perencanaan kegiatan sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan;
- Penentuan titik lokasi pelaksanaan kegiatan hendaknya berdasarkan survey sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar dapat dirasakan dan berdampak positif bagi masyarakat;
- Pemilihan pelaksana kegiatan diharapkan sesuai dengan keahlian,
- pengalaman pelaksanaan kegiatan dan kualifikasi yang dipersyaratkan;
- Agar hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan spesifikasi teknis, berdaya guna dan berhasil guna hendaknya pengawasan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh tenaga pengawas pekerjaan yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang konstruksi;

- Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap perlengkapan jalan yang telah terpasang.
- Menyediakan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar dan prasarana yang nyaman bagi para wajib uji.
- Meningkatkan kompetensi tenaga penguji dengan mengirimkan tenaga penguji untuk mengikuti Diklat fungsional (Penguji Kendaraan Bermotor) sebagai syarat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan.

2.16. Bidang Komunikasi dan Informatika

Alokasi anggaran urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp11.750.122.636,00 dengan realisasi mencapai Rp11.339.904.854,00 atau 96,51%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;

Pencapaian kinerja urusan komunikasi dan informatika :

- Jumlah kunjungan website dengan target 285.000 pengunjung realisasi 428.608 pengunjung atau mencapai 150,39%;
- Jumlah komunikasi informasi masyarakat yang aktif di Kab. Malang dengan terget sebesar 240 KIM dan realisasi sebesar 241 KIM ata mencapai 100,42%.
- Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang teraliri jaringan internet dengan target sebesar 96,30% dan realisasi sebesar 100% atau mencapai 104,84%.
- Jumlah aplikasi yang terintegrasi dan baru dalam penyelenggaraan SPBE dengan target sebesar 20 aplikasi dan realisasi sebesar 820 aplikasi atau mencapai 100%.
- Persentase pemanfaatan data statistik untuk perencanaan pembangunan dengan target 85% dan realisasi sebesar 89% atau mencapai 104,71%.

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Jumlah kunjungan website mengalami kenaikan/mengalami keberhasilan dikarenakan konten/isi website yang bermutu.

- Pemeliharaan jaringan secara rutin.
- Terpasangnya jaringan internet oleh provider di Kecamatan.
- Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Meningkatkan kinerja dan koordinasi antar bidang.
- Melakukan pembentukan dan pembinaan pada KIM di kecamatan - kecamatan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi.
- Meningkatkan SDM pengelola KIM diperlukan Bimbingan Teknis.
- Pemeliharaan jaringan secara rutin.
- Penambahan bandwidth agar kualitas internet terjaga dengan baik.
- Melaksanakan Bimbingan Teknis bagi operator di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Malang.
- Melaksanakan integrasi aplikasi disetiap PD guna menunjang SPBE.
- Meningkatkan kualitas data dan updating data sektoral Pemerintah Kabupaten Malang.
- Monitoring portal satu data Kab Mlg kpd instansi yg sdh menginput data dan yg blm dlm aplikasi satu data (Kamasuta Bertali)
- Melaksanakan sosialisasi semua data baru di PD dan memberikan bimbingan pengelolaan data statistik agar data yg terkompilasi mjd data yg valid dan bisa digunakan oleh semua PD.

2.17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Alokasi anggaran urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebesar Rp8.969.479.216,00 dengan realisasi mencapai Rp8.521.120.732,00 atau 95,00%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;

- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
- Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
- Program Pengembangan UMKM

Pencapaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

- Persentase Koperasi Rehabilitasi dengan target sebesar 1% realisasi sebesar 2,39% atau mencapai 390%;
- Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha dengan target sebesar 0,05% realisasi sebesar 0,81% atau mencapai 1620%.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan

- Masih banyaknya koperasi yang belum menerapkan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Masih banyaknya koperasi yang belum bisa dan memahami dengan ketentuan pengisian penilaian kesehatan koperasi secara online;
- Belum tersedianya server sebagai penunjang kegiatan E-Lapkop (Pelaporan Perkembangan Koperasi berbasis Teknologi Informasi/Online);
- Keterbatasan jenis pelatihan yang bisa dilaksanakan sehingga program pemberdayaan yang disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah belum bisa dilaksanakan dengan maksimal;
- Karena ada refocussing banyak Kegiatan menjadi terhambat

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Diperlukan pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Diperlukan tindak lanjut dan monitoring evaluasi kepada koperasi yang telah dinilai kesehatannya;
- Penganggaran untuk pembelian server/sewa tahunan;
- Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan;

2.18. Bidang Penanaman Modal

Alokasi anggaran urusan penanaman modal sebesar Rp9.212.249.032,00 dengan realisasi mencapai Rp8.410.930.787,00 atau 91,30%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- Program Promosi Penanaman Modal;
- Program Pelayanan Penanaman Modal;
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pencapaian kinerja urusan Penanaman Modal :

- Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan terpadu satu pintu dengan target sebesar 88% realisasi sebesar 88,18% atau mencapai 100,20%;
- Persentase peningkatan jumlah investor dengan target 11% realisasi 53,79% atau mencapai 489%;
- Persentase peningkatan nilai realisasi investasi dengan target 2% realisasi 3,77% atau mencapai 188,5%.

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan

- Adanya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Adanya media sosial (Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok, Facebook) yang dapat dimanfaatkan untuk sarana promosi investasi di Kabupaten Malang.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan harmonisasi peraturan perundangan.
- Melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik.
- Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik terutama untuk peningkatan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik.

- Menginventarisasi dan mengumpulkan data peraturan penanaman modal dan pelayanan perizinan dalam rangka meningkatkan percepatan berusaha.
- Menginventarisasi dan mengumpulkan data peraturan penanaman modal dan pelayanan perizinan dalam rangka meningkatkan percepatan berusaha.
- Mencari calon investor dengan cara proaktif berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat serta meningkatkan fasilitasi terhadap calon investor.
- Melakukan promosi potensi investasi dengan memanfaatkan media sosial.
- Melakukan penyusunan dokumen potensi dan peluang investasi serta buku profil investasi.
- Mengumpulkan bahan promosi serta menganalisisnya dalam rangka untuk peningkatan konten promosi.
- Mengoptimalkan peran berbagai media khususnya media sosial online dan pemanfaatan promotion material berupa brosur, leaflet, pamflet dan booklet dalam rangka mendukung kegiatan promosi potensi investasi daerah.
- Bekerja sama secara aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dalam penggalan potensi dan dan peluang investasi serta mempromosikannya.
- Untuk meningkatkan investasi, selain sosialisasi investasi, DPMPTSP juga memberikan pendampingan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada pelaku usaha.
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka mencukupi kelengkapan perizinan berusaha.
- Melakukan pengawasan terhadap perusahaan, bersama Perangkat Daerah Teknis (yang memiliki hak akses seperti Disperindag, Dinas LH, dan Dinas Koperasi) dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terkait perizinan berusaha dan LKPM.
- Untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan

perubahan sistem OSS versi 1.1 ke OSS RBA, maka DPMPSTSP menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kepada pelaku usaha dan memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang akan memproses perizinan melalui OSS RBA.

- Melaporkan kepada BKPM terkait maintenance tersebut.

2.19. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Alokasi anggaran urusan kepemudaan dan olah raga sebesar Rp21.550.206.041,00 dengan realisasi mencapai Rp20.632.224.396,00 atau 95,74%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- Program pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Pencapaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga :

- Persentase kapasitas kepemudaan dengan target 62% realisasi 62% atau mencapai 100%;
- Persentase kapasitas keolahragaan dengan target 35% realisasi 35% atau mencapai 100%;
- Persentase penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan target 57% realisasi 57% atau mencapai 100%.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan

- Secara umum program dan kegiatan dapat dilaksanakan.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Mempertahankan capaian kinerja yang baik dengan perencanaan kegiatan dan penganggaran di tahun depan yang lebih akurat.

2.20. Bidang Statistik

Alokasi anggaran urusan statistik sebesar Rp223.923.000,00 dengan realisasi mencapai Rp223.923.000,00 atau 100%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektorali;

Pencapaian kinerja urusan statistik :

- Jumlah kunjungan website dengan target 280.000 kunjungan realisasi 545.768 kunjungan atau mencapai 194%;
- Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Malang dengan target 187 realisasi 187 atau mencapai 100%;
- Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang teraliri jaringan internet dengan target 94,71% realisasi 99% atau mencapai 105.53%;
- Jumlah aplikasi yang terintegrasi dan baru dalam penyelenggaraan SPBE dengan target 10 aplikasi realisasi 7 aplikasi atau mencapai 70%;
- Tingkat keamanan informasi Pemerintah dengan target 21% realisasi 28% atau mencapai 113%;
- Persentase pemanfaatan data statistik untuk perencanaan pembangunan dengan target 80% realisasi 94,5% atau mencapai 118%.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Dilakukan update atau pembaharuan secara rutin tentang konten dan informasi Kabupaten Malang serta mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu dengan melakukan bimbingan-bimbingan teknis untuk operator website di Perangkat Daerah;
- Meningkatkan sarana prasarana yang memadai;
- Pemeliharaan jaringan secara rutin;
- Penambahan bandwidth agar kualitas internet terjaga dengan baik;

- Melaksanakan bimbingan teknis bagi operator di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Malang tentang aplikasi-aplikasi baru untuk memudahkan pekerjaan;
- Melaksanakan integrasi aplikasi di setiap Perangkat Daerah guna menunjang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
- Meningkatkan titik yang diamankan dengan jumlah seluruh titik pada Pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan;
- Meningkatkan kualitas data dan updating data sectoral Pemerintah Kabupaten Malang untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakai;
- Monitoring portal satau data Kabupaten Malang kepada Instansi yang sudah menginput data dan belum menginput dalam aplikasi satu data;
- Melaksanakan sosialisasi semua data baru di Perangkat Daerah dan memberikan bimbingan pengelolaan data statistic agar data yang terkompilasi menjadi data yang valid dan bisa digunakan/dimanfaatkan oleh semua Perangkat Daerah (PD) yang membutuhkan.

2.21. Bidang Persandian

Alokasi anggaran urusan persandian sebesar Rp44.401.798,00 dengan realisasi mencapai Rp44.401.798,00 atau 100%. Pelaksanaan pada Dinas Komunikasi dan informatika.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Pencapaian kinerja bidang persandian :

- Jumlah kunjungan website dengan target 280.000 kunjungan realisasi 545.768 kunjungan atau mencapai 194%;
- Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Malang dengan target 187 realisasi 187 atau mencapai 100%;
- Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang teraliri jaringan internet dengan target 94,71% realisasi 99% atau mencapai 105.53%;

- Jumlah aplikasi yang terintegrasi dan baru dalam penyelenggaraan SPBE dengan target 10 aplikasi realisasi 7 aplikasi atau mencapai 70%;
- Tingkat keamanan informasi Pemerintah dengan target 21% realisasi 28% atau mencapai 113%;
- Persentase pemanfaatan data statistik untuk perencanaan pembangunan dengan target 80% realisasi 94,5% atau mencapai 118%.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Dilakukan update atau pembaharuan secara rutin tentang konten dan informasi Kabupaten Malang serta mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu dengan melakukan bimbingan-bimbingan teknis untuk operator website di Perangkat Daerah;
- Meningkatkan sarana prasarana yang memadai;
- Pemeliharaan jaringan secara rutin;
- Penambahan bandwidth agar kualitas internet terjaga dengan baik;
- Melaksanakan bimbingan teknis bagi operator di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Malang tentang aplikasi-aplikasi baru untuk memudahkan pekerjaan;
- Melaksanakan integrasi aplikasi di setiap Perangkat Daerah guna menunjang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
- Meningkatkan titik yang diamankan dengan jumlah seluruh titik pada Pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan;
- Meningkatkan kualitas data dan updating data sectoral Pemerintah Kabupaten Malang untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakai;

- Monitoring portal satau data Kabupaten Malang kepada Instansi yang sudah menginput data dan belum menginput dalam aplikasi satu data;
- Melaksanakan sosialisasi semua data baru di Perangkat Daerah dan memberikan bimbingan pengelolaan data statistic agar data yang terkompilasi menjadi data yang valid dan bisa digunakan/dimanfaatkan oleh semua Perangkat Daerah (PD) yang membutuhkan.

2.22. Bidang Kebudayaan

Alokasi anggaran urusan kebudayaan sebesar Rp3.933.952.000,00 dengan realisasi mencapai Rp3.898.472.850,00 atau 99,10%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Pengembangan Kebudayaan;
- Program Pengelolaan Permuseuman.

Pencapaian kinerja urusan Kebudayaan :

- Persentase pembinaan lembaga adat dibandingkan dengan jumlah lembaga adat dengan target 34% realisasi 34% atau mencapai 100%;
- Persentase kelompok kesenian yang dibina di Kabupaten Malang dengan target 34% realisasi 34% atau mencapai 100%;
- Persentase jumlah koleksi yang dipamerkan dibanding dengan jumlah koleksi keseluruhan dengan target 67% realisasi 67% atau mencapai 100%.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Program dan Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Mempertahankan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan.

2.23. Bidang Perpustakaan

Alokasi anggaran urusan perpustakaan sebesar Rp122.014.300,00 dengan realisasi mencapai Rp117.589.591,00 atau 96,37%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Pembinaan Perpustakaan;
- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

Pencapaian kinerja urusan perpustakaan :

- Persentase Peningkatan Minat Baca Buku Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang dengan target 2500 Pengunjung realisasi 4109 Pengunjung atau mencapai 164,36%.

2.24. Bidang Kearsipan

Alokasi anggaran urusan kearsipan sebesar Rp8.836.863.105,00 dengan realisasi mencapai Rp8.360.667.039,00 atau 94,61%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;

Pencapaian kinerja urusan Kearsipan :

- Persentase peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah dengan target 5.000 berkas realisasi 68.000berkas atau mencapai 160%

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

3.25. Bidang Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran urusan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp13.743.435.308,00 dengan realisasi mencapai Rp13.118.975.424,00 atau 95,46%. Pelaksanaan urusan ada pada Dinas Perikanan.

Program Kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- Proram Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pencapaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan :

- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan dengan target sebesar 3% dan realisasi sebesar minus 5,02% atau mencapai 167,33%.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Melaksanakan dan mengembangkan inovasi bidang perikanan secara berkelanjutan;
- Meningkatkan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha perikanan melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perikanan;
- Meningkatkan akses permodalan dan jaringan pemasaran produk perikanan;
- Meningkatkan kualitas atau mutu produk perikanan dalam rangka peningkatan daya saing produk perikanan.

3.26. Bidang Pariwisata

Alokasi anggaran urusan pariwisata sebesar Rp10.247.243.244,00 dengan realisasi mencapai Rp8.891.830.926,00 atau 86,77%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata;
- Program Pemasaran Pariwisata;
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Pencapaian kinerja urusan Pariwisata :

- Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun dengan target sebesar 100% realisasi 100% atau mencapai 100%;
- Presentase destinasi wisata yang berkembang dengan target sebesar 7,5% realisasi 7,5% atau mencapai 100%;

- Persentase pemenuhan dukungan dalam menunjang Pemasaran Pariwisata dengan target 100% realisasi 100% atau mencapai 100%;
- Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun dengan target 100% realisasi 75% atau mencapai 75%.

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target kinerja.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Optimalisasi pencapaian kinerja dan meningkatkan

3.27. Bidang Pertanian

Alokasi anggaran urusan pertanian sebesar Rp82.097.922.455,00 dengan realisasi mencapai Rp75.799.395.335,00 atau 92,33%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- Program Penyuluhan Pertanian;
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- Program Perizinan Usaha Pertanian.

Pencapaian kinerja urusan Pertanian :

- Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 90,81%.
- Persentase Penyediaan Sarana Pendukung UsahaTani Pertanian/Perkebunan dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 86,88%.

- Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 99,50%.
- Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 98,79%.
- Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 96,74%.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota agar memperhatikan pencapaian kinerja dan anggaran untuk memastikan target perangkat daerah dapat tercapai.
- Agar penetapan target kinerja dan penyerapan anggaran pada perencanaan berikutnya disesuaikan dengan rencana pelaksanaannya.
- Sub Kegiatan telah mencapai target Triwulan IV Renja tahun 2023 dengan efisiensi belanja dari sisa kontrak, agar dipertahankan pada pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya.
- Sub Kegiatan telah mencapai target Triwulan IV Renja tahun 2023 dengan efisiensi belanja dari sisa kontrak, agar dipertahankan pada pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya.
- Agar penetapan target kinerja dan penyerapan anggaran pada perencanaan berikutnya disesuaikan dengan rencana pelaksanaannya.

3.30. Bidang Perdagangan

Alokasi anggaran urusan perdagangan sebesar Rp933.377.475,00 dengan realisasi mencapai Rp872.040.357,00 atau 93,43%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;

- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting;
- Program Pengembangan Ekspor;
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Pencapaian kinerja urusan perdagangan :

- Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan target 19,33% realisasi 19,31% atau mencapai 99,90%;
- Persentase omset pasar daerah dengan target 1% realisasi 1% atau mencapai 100%.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- pengembangan IKM yang sudah ada dengan memberikan berbagai pelatihan, pembinaan serta terus menerus dan berkelanjutan dan informasi pasar, menumbuhkan jumlah wirausaha baru, peningkatan keterkaitan IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya, fasilitasi permasalahan (klinik bisnis) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- Mengadakan sosialisasi secara berkala kepada para pedagang pasar.
- Melakukan pembinaan kepada para pedagang pasar secara berkala.
- Melakukan sosialisasi di masing-masing pasar tentang ketertiban, kebersihan dan kerapian untuk mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan aman sehingga para pedagang yang beraktifitas di pasar memiliki budaya bersih,
- mengadakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dapat mewujudkan kenyamanan bagi para pelaku pasar,
- mengadakan pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam manajemen pengelolaan pasar agar dapat bekerja secara optimal.
- mengadakan program revitalisasi pasar dapat membantu pengelolaan pasar menjadi pasar yang dapat bersaing dengan pasar modern (swalayan).

- Dalam rangka menangani Wabah Penyakit mulut dan kuku (PMK), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang berkolaborasi dengan Muspika yang terdiri dari Camat, Kapolsek dan Danramil pada wilayah kecamatan Kabupaten Malang.

3.31. Bidang Perindustrian

Alokasi anggaran urusan perindustrian sebesar Rp32.448.941.602,00 dengan realisasi mencapai Rp29.100.912.611,00 atau 89,68%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Pencapaian kinerja urusan perindustrian :

- Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan dengan target 33,66% realisasi 32,43% atau mencapai 96,34%;
- Persentase industri kecil formal dan industry non formal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha industry dengan target 4,06% realisasi 5,26% atau mencapai 129,56%;

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- pengembangan IKM yang sudah ada dengan memberikan berbagai pelatihan, pembinaan serta terus menerus dan berkelanjutan dan informasi pasar, menumbuhkan jumlah wirausaha baru, peningkatan keterkaitan IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya, fasilitasi permasalahan (klinik bisnis) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- Mengadakan sosialisasi secara berkala kepada para pedagang pasar.
- Melakukan pembinaan kepada para pedagang pasar secara berkala.
- Melakukan sosialisasi di masing-masing pasar tentang ketertiban, kebersihan dan kerapian untuk mewujudkan pasar

yang tertib, bersih, indah dan aman sehingga para pedagang yang beraktifitas di pasar memiliki budaya bersih,

- mengadakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dapat mewujudkan kenyamanan bagi para pelaku pasar,
- mengadakan pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam manajemen pengelolaan pasar agar dapat bekerja secara optimal.
- mengadakan program revitalisasi pasar dapat membantu pengelolaan pasar menjadi pasar yang dapat bersaing dengan pasar modern (swalayan).
- Dalam rangka menangani Wabah Penyakit mulut dan kuku (PMK), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang berkolaborasi dengan Muspika yang terdiri dari Camat, Kapolsek dan Danramil pada wilayah kecamatan Kabupaten Malang.

3.32. Bidang Transmigrasi

Alokasi anggaran urusan transmigrasi sebesar Rp209.240.000,00 dengan realisasi mencapai Rp204.386.000,00 atau 97,68%. Pelaksanaan urusan pada Dinas Tenaga Kerja.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Pencapaian kinerja urusan Transmigrasi :

- Persentase pembangunan transmigrasi dalam satu tahun dengan target 1001% realisasi 100% atau mencapai 100%.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Adanya program transmigrasi luncuran dan pengganti dari pusat sehingga harus menyiapkan natif pendanaan agar tetap bisa memberangkatkan transmigran sesuai target yang ditetapkan.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Melaksanakan kegiatan tahun berikutnya dengan memperhatikan evaluasi capaian kinerja;

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

4.01. Sekretariat Daerah

Alokasi anggaran fungsi Sekretariat Daerah sebesar Rp61.936.486.961,00 dengan realisasi mencapai Rp60.226.928.437,00 atau 97,24%. Pelaksanaan urusan pada Sekretariat Daerah.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Program Perekonomian dan Pembangunan;

Pencapaian kinerja urusan Tenaga Kerja :

- Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan target sebesar 3,8 atau kategori tinggi, realisasi saat ini belum dapat disampaikan hasilnya karena menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri;
- Nilai Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel (SAKIP) dengan target 82,50 (A) realisasi 75,22 (BB).

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Kabupaten Malang dalam penyusunan LPPD sudah menggunakan sistem informasi yang disebut e-LPPD Kabupaten Malang;
- Sinergitas antara penyusun LPPD dan Tim APIP selaku yang mereviu LPPD Kabupaten Malang berjalan dengan baik;
- Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan dalam pencapaian kinerja LPPD Kabupaten Malang
- Terjadi perubahan IKK sehingga perlu adanya penyesuaian pada program dan kegiatan OPD penyusun LPPD;
- Terdapat program, kegiatan dari Perangkat Daerah yang tidak memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD sehingga capaian kinerja tidak tercapai;
- Persepsi pemahaman perhitungan rumus IKK dan pemenuhan bukti dukung masih belum sesuai;
- Evaluasi SAKIP dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya, dan Kabupaten Malang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

- Namun belum tercapainya Nilai SAKIP Kabupaten Malang yang dinilai dari pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan akuntabilitas kinerja penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Menyatukan persepsi dan meningkatkan kualitas pemahaman bagi Tim Penyusun LPPD yang ada di seluruh Perangkat Daerah dan APIP (Inspektorat Daerah Kabupaten Malang) terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) melalui Sosialisasi Penyusunan LPPD dengan Narasumber dari Penyusun LPPD Provinsi Jawa Timur;
- Melakukan Asistensi dan Supervisi terhadap kinerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara teknis urusan melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Penyusun LPPD Kabupaten Malang;
- Melakukan evaluasi terhadap capaian LPPD dengan Tim Nasional;
- Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Tim Penyusunan LPPD Kabupaten Malang dengan para penyusun LPPD pada OPD guna optimalnya data capaian kinerja dan data pendukung LPPD;
- Mereviu kembali perencanaan kinerja pada seluruh unit kerja sehingga dapat merumuskan sasaran strategisnya lebih berorientasi outcome dan memberikan *continuous improvement* pada pencapaian kinerja yang ditetapkan;
- Memastikan keselarasan perencanaan kinerja di tingkat pemerintah daerah dengan memastikan seluruh sasaran strategis pada materi perubahan RPJMD yang telah diperjanjikan;
- Melakukan reviu terhadap dokumen IKU pada tingkat pemerintah daerah dan memastikan adanya definisi operasional dan formulasi perhitungan pada sasaran strategis;

- Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan target kinerja tahun sebelumnya;
- Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memastikan rekomendasi yang diberikan menjawab seluruh temuan yang ada.

4.02. Sekretariat DPRD

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi Sekretariat DPRD sebesar Rp81.584.916.322,00 dengan realisasi mencapai Rp73.129.136.269,00 atau 89,64%. Pelaksanaan urusan pada Sekretariat DPRD.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Permasalahan/Pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Produktivitas Sekretariat DPRD telah melaksanakan tanggung jawab dalam usaha mencapai target. Selain itu ada beberapa inovasi untuk menunjang keberhasilan kinerja seperti e-form reses, laporan komisi dan Sinatra;
- Kualitas layanan dalam fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yaitu legalisasi, anggaran dan pengawasan;
- Responativasi dengan menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung melalui kegiatan reses DPRD dan Rapat Dengar Pendapat Umum;
- Responsibilitas dengan menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung menerapkan prinsip-prinsip administrasi yaitu berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku;
- Akuntabilitas, Sekretariat DPRD telah melakukan pertanggungjawaban melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Agar lebih memperhatikan penetapan target baik kinerja maupun penganggaran agar pencapaian dan penyerapan anggaran bisa lebih maksimal, efektif dan efisien, bila ada

kesalahan penentuan target sehingga capaian kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan agar bisa dilakukan penyesuaian pada renja perubahan.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.01. Perencanaan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi perencanaan sebesar Rp12.910.602.762,00 dengan realisasi mencapai Rp12.506.368.259,00 atau 96,87%. Pelaksanaan urusan pada Badan Perencanaan kegiatan Daerah.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pencapaian kinerja fungsi penunjang perencanaan :

- Persentase kesesuaian antara Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan target 100% realisasi 100% atau mencapai 100%;
- Persentase capaian target program prioritas $\geq 80\%$ dengan target 95,47% realisasi 91% atau mencapai 95,32%;
- Persentase kesesuaian antara Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah dengan target 100% realisasi 100% atau mencapai 100%.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan:

- Adanya pengurangan anggaran pada Perangkat Daerah, karena prioritas pendanaan pada pembangunan infrastruktur. Selain itu prioritas pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan sebagai Langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, telah dilaksanakan Langkah-langkah berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan salah satunya dengan melakukan pemantapan dan pengembangan aplikasi perencanaan (SIPD, e-money) demi terwujudnya sinkronisasi dan integrasi data perencanaan yang akuntabel;
- Mengoptimalkan pendokumentasian dan pemanfaatan data-data informasi, hasil kajian, analisis, serta assesment yang tersedia sebagai bahan dasar penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis bukti (*evidence based*);
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi yang optimal di tingkat internal dan eksternal (lintas program dan lintas sektor) dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan;
- Meningkatkan pengembangan kompetensi baik manajerial maupun teknis aparatur perencana;
- Memberikan arahan dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah akan pentingnya konsistensi perencanaan;
- Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi oleh Tim mulai dari tahap penyusunan rancangan awal dokumen perencanaan sampai dengan rancangan akhir dokumen perencanaan ditetapkan;
- Mengoptimalkan proses verifikasi oleh Tim dalam menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dalam mempedomani rencana program prioritas pembangunan pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan induk jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun dan RKPD sebagai dokumen perencanaan induk jangka tahunan atau periode waktu 1 (satu) tahun yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- Menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dari temuan hasil verifikasi adanya ketidaksesuaian/penyimpangan oleh Kepala BAPPEDA;
- Memberikan ruang kepada Perangkat Daerah untuk melakukan penyempurnaan penyusunan dokumen

perencanaan 5 (lima) tahunan maupun penyusunan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan dalam menjamin konsistensi serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

- Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) didukung dengan pemanfaatan aplikasi perencanaan yakni SIPD, sehingga terdapat kesesuaian/keselarasan dan sinergitas antara dokumen Renja PD dan Renstra PD;
- Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) telah memperhatikan kesesuaian program dan kegiatan;
- Koordinasi dan sinkronisasi yang optimal di tingkat internal dan eksternal (lintas program dan lintas sektor) dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
- Pengoptimalan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- Pengendalian dan evaluasi yang optimal terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan salah satunya dengan melakukan pemantapan dan pengembangan aplikasi perencanaan (SIPD, e-money) demi terwujudnya sinkronisasi dan integrasi data perencanaan yang akuntabel;
- Mengoptimalkan pendokumentasian dan pemanfaatan data-data informasi, hasil kajian, analisis, serta assesment yang tersedia sebagai bahan dasar penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis bukti (evidence based);
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi yang optimal di tingkat internal dan eksternal (lintas program dan lintas sektor) dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan;
- Meningkatkan pengembangan kompetensi baik manajerial maupun teknis aparatur perencana;

- Memberikan arahan dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah akan pentingnya konsistensi perencanaan;
- Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi oleh Tim mulai dari tahap penyusunan rancangan awal dokumen perencanaan sampai dengan rancangan akhir dokumen perencanaan ditetapkan;
- Mengoptimalkan proses verifikasi oleh Tim dalam menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dalam mempedomani rencana program prioritas pembangunan pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan induk jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun dan RKPD sebagai dokumen perencanaan induk jangka tahunan atau periode waktu 1 (satu) tahun yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- Menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dari temuan hasil verifikasi adanya ketidaksesuaian/penyimpangan oleh Kepala BAPPEDA;
- Memberikan ruang kepada Perangkat Daerah untuk melakukan penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan maupun penyusunan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan dalam menjamin konsistensi serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

5.02. Keuangan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi keuangan sebesar Rp942.264.605.844,00 dengan realisasi mencapai Rp906.436.539.340,00 atau 96,20%. Pelaksanaan urusan tersebar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pencapaian kinerja fungsi penunjang keuangan :

- Nilai opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan target WTP realisasi Dalam Proses Audit BPK;
- Indeks pengelolaan keuangan Daerah dengan target 92,5% realisasi 90,47% atau mencapai 97,81%;
- Indeks pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target 92,5% realisasi 88,5% atau mencapai 95,68%;

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target:

- Terbatasnya potensi pajak daerah yang menyebabkan terbatasnya pajak asli daerah yang berdampak juga pada terbatasnya pendapatan daerah;
- Inventarisasi barang milik daerah belum dilaksanakan secara maksimal dan penilaian terhadap aset itu sendiri belum berjalan secara keseluruhan yang berdampak nilai pada neraca tidak sesuai dengan kondisi yang ada;
- Sumber daya manusia yang masih belum kompeten terutama terkait dengan tenaga fungsional dalam rangka persiapan perdaerahan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah seperti tenaga penilaian objek bangunan, juru sita pajak belum memadai;
- Diperlukan pengamanan dan kejelasan kepemilikan yang lebih terhadap barang milik daerah melalui stiker *barcode*;
- Diperlukan peningkatan kompetensi SDM pengelola BMD;

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Meningkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah;
- Meningkatkan produktifitas kinerja aparatur sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal;
- Meningkatkan koordinasi baik secara internal maupun eksternal;
- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya;
- Meningkatkan *interpreneurship* khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktifitas dunia usaha serta meningkatkan pelayanan publik terutama kemudahan-kemudahan dalam rangka peningkatan investasi;

- Pengembangan dan pengimplementasian pemberian stiker *barcode* pada BMD untuk memudahkan pengguna barang mengetahui informasi dan identitas BMD secara *real time*;
- Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis pengelolaan BMD (sosialisasi dan *Focus Group Discussion*).

5.03. Kepegawaian

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi kepegawaian sebesar Rp2.529.323.127,00 dengan realisasi mencapai Rp2.370.514.255,00 atau 93,72%. Pelaksanaan urusan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Kepegawaian Daerah.

Pencapaian kinerja fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan :

- Nilai sistem merit dengan target 325 realisasi 329 atau mencapai 101,23%;

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan

- Perencanaan implementasi Manajemen Talenta, Talent Pool dan rencana suksesi pada pengisian jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional setara pengawas serta pelaksana sesuai kebutuhan instansi.
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memberikan himbauan, informasi digital, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Tugas Belajar PNS dilingkungan Pemkab Malang secara berkala dan berkelanjutan.
- Terlaksananya seleksi kompetensi PPPK Guru, Tenaga Kesehatan dan Teknis Tahun Anggaran 2022 di Tahun 2023 sejumlah 1.495 peserta dan diangkatnya PPPK Teknis Tahun Anggaran 2022 hasil optimalisasi sejumlah 63 peserta.
- Terkelolanya data dan informasi kepegawaian secara berkelanjutan;
- Terprosesnya pelaksanaan mutasi sejumlah 1.459 PNS, kenaikan gaji berkala sejumlah 982 ASN, kenaikan pangkat

sejumlah 1.407 PNS dan promosi dan rotasi sejumlah 811 PNS;

- Terlaksananya penilaian kinerja bagi Pejabat Fungsional, Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi sesuai ketentuan;
- Terlaksananya pembinaan dan pemberian sanksi pelanggaran disiplin PNS.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Menyusun peta jabatan talenta bagi sebagian kecil pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional setara pengawas serta pelaksana dan dikelola dalam aplikasi MATARESI.
- Menyusun rencana pelaksanaan pemutakhiran aplikasi MATARESI;
- Pengangkatan Seleksi PPPK Tahun 2024 masih menunggu Surat Keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- Data dan informasi kepegawaian telah dikelola sebagian besar secara berkelanjutan.
- Pemrosesan dan/atau penerbitan mutasi dan promosi memerlukan monitoring dan evaluasi secara optimal.
- Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja bagi ASN perlu dilaksanakan secara optimal.
- Monitoring dan evaluasi penanganan penyelesaian pelanggaran disiplin PNS perlu dilaksanakan secara optimal.

5.04. Pendidikan dan Pelatihan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp11.507.481.928,00 dengan realisasi mencapai Rp11.054.806.902,00 atau 96,07%. Pelaksanaan urusan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pencapaian kinerja fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan :

- Indeks profesionalitas ASN dengan target 67 IP ASN realisasi 67 IP ASN atau mencapai 100%.
- Nilai Sistem Merit dengan target 325 realisasi 325 atau mencapai 101,23%;

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan

- Realiasi kinerja dan anggaran tidak dapat terealisasi sesuai target karena terdapat kegiatan yang sub kegiatannya tidak dianggarkan pada saat PAK karena refocussing dan dialokasikan untuk kegiatan mandatory.
- Pelaksanaan akselerasi SDM melalui pendidikan dan pelatihan dengan memberikan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dilakukan melalui seleksi administrasi dan akademik berbasis CAT pada kegiatan ASN Berprestasi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang sehingga dapat meningkatkan potensi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Penyusunan perencanaan berikutnya lebih memperhatikan tingkat efisiensi dan kebutuhan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
- Akselerasi SDM dilaksanakan dalam bentuk pendidikan melalui pemrosesan administrasi tugas belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan biaya mandiri/APBN/APBD/sumber lain sesuai ketentuan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- Informasi dan ketentuan terkait penyusunan rencana kebutuhan, monev dan pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan disampaikan tiap triwulan secara daring dan/atau luring. Hasil pelaksanaan tersebut dilaporkan kepada PPK dan instansi/pihak terkait secara berkelanjutan.

5.05. Penelitian dan Pengembangan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan sebesar Rp6.995.963.552,00 dengan realisasi mencapai Rp6.767.305.583,00 atau 96,73%. Pelaksanaan urusan pada Badan Penelitian dan Pengembangan.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Pencapaian kinerja fungsi penunjang penelitian dan pengembangan :

- Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun dengan target 100% realisasi 100% atau mencapai 100%;
- Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang dengan target 83% realisasi 100% atau mencapai 120%.

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Dalam komunikasi dan koordinasi terdapat kesamaan persepsi mengenai hasil kajian yang dibutuhkan /diharapkan SKPD;
- Semakin baiknya tahap perencanaan yang telah dilaksanakan sampai tahap evaluasi;
- Refokusing anggaran secara signifikan mengurangi jumlah kajian yang akan dilaksanakan;

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Melaksanakan kajian yang prioritas, sedangkan yang lain diganti dengan FGD untuk pendalaman data;
- Peningkatan sosialisasi tentang IGA dan pendampingan penginputan inovasi melalui aplikasi MADANI untuk mengetahui lebih awal kematangan inovasi.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

6.01. Inspektorat Daerah

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi pengawasan penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp23.762.970.519,00 dengan

realisasi mencapai Rp22.625.895.160,00 atau 95,21%. Pelaksanaan urusan pada Inspektorat Daerah

Program pembangunan yang dilaksanakan :

- Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Pencapaian kinerja fungsi pengawasan :

- Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun dengan target 100% realisasi 94,14% atau mencapai 94,14%;
- Persentase Penyelesaian Dokumen Pemeriksaan Secara Tepat Waktu dengan target 86% realisasi 99,83% atau mencapai 116,08%;
- Persentase Penyelesaian Dokumen Evaluasi Secara Tepat Waktu dengan target 100% realisasi 97,99% atau mencapai 97,99%;

Permasalahan/pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan

- Program belum mencapai target kinerja dan anggaran karena kebutuhan terkait dengan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran.
- Program yang sudah mencapai target kinerja tetapi belum mencapai target penyerapan anggaran karena terdapat kegiatan yang masih akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan adanya pengurangan anggaran sehingga anggaran dialihkan untuk pelaksanaan kegiatan yang di mandat untuk MCP.
- Beberapa sub kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya pengurangan anggaran, anggaran dialihkan untuk kegiatan yang dimandat untuk MCP dan belum mencapai target penyerapan anggaran karena penggunaan anggaran menyesuaikan kebutuhan.

Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan :

- Optimalisasi capaian pada periode perencanaan berikutnya sehingga lebih efisien dan efektif.
- Program telah terlaksana dipertahankan capaian kinerjanya dan sebagai bahan evaluasi perencanaan berikutnya.

- Beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan sangat penting dalam rangka pengawasan, diprioritaskan pada penganggaran berikutnya.

7. Unsur Kewilayahan

7.01. Kecamatan

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi Kewilayahan sebesar Rp133.348.683.684,00 dengan realisasi mencapai Rp118.205.922.863,00 atau 88,64%. Pelaksanaan urusan pada Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Pakis, Kecamatan Jabung, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Wajak, Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wagir, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Pagak, Kecamatan Kalipare, dan Kecamatan Donomulyo.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

8. Unsur Pemerintahan Umum

8.01. Kesatuan Bangsa dan Politik

Alokasi anggaran penyelenggaraan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp85.944.194.018,00 dengan realisasi mencapai Rp85.011.354.750,00 atau 98,91%. Pelaksanaan urusan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
- Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Pencapaian kinerja fungsi penunjang penelitian dan pengembangan :

- Persentase Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Ipoleksosbud dan Keagamaan dengan target 40% realisasi 58,33% atau mencapai 145,83%;

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Dalam upaya meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah, maka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan Pemerintah Kabupaten Malang mengenal adanya dua entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Malang adalah semua Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran dalam APBD.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Pada Pemerintah Kabupaten Malang pelaksana entitas pelaporan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang bertindak sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan SAL
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan tersebut merupakan kompilasi dari seluruh Laporan Keuangan Perangkat daerah yang tidak hanya mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi, namun juga dilengkapi data dari unit-unit yang terkait.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang adalah Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual secara penuh untuk pengakuan Aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kabupaten Malang menggunakan istilah sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa Perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

2. Basis Akrual (*Accrual Basis*)

Untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi akuntansi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Untuk Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Prinsip Nilai Perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi.

Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk dapat diakui menjadi unsur-unsur dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan adalah:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dan atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos atau akun dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menggunakan nilai perolehan historis. Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan

menggunakan nilai tukar bank central yang berlaku pada tanggal transaksi.

Koreksi Kesalahan

Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pelaporan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan keuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan.

Kesalahan adalah penyajian akun-akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Periode berjalan adalah periode sebelum laporan keuangan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Periode sebelumnya adalah periode akuntansi dimana laporan keuangan telah diterbitkan dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Terhadap kesalahan yang terjadi harus dilakukan koreksi dan diungkapkan/dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Bultek atas SAP tersebut dan memperhatikan ISAP yang terkait langsung. Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari :

1. Pendapatan

Pendapatan -LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Hal-hal yang berhubungan dengan Pendapatan -LRA antara lain:

- 1) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran basis kas dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Pendapatan Transfer;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan – LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Kas atas Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD;
 - c. Kas atas Pendapatan yang berasal dari hibah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - d. Pendapatan-LRA atas Pendapatan Asli Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun BUD berdasarkan dokumen penerimaan pendapatan daerah yang sah;
 - e. Pendapatan-LRA atas Pendapatan Transfer diakui pada saat diterimanya pendapatan transfer pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan dokumen Nota Kredit dari Bank atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - f. Pendapatan-LRA atas jasa pelayanan maupun pendukung layanan pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diakui pada saat diterima Rekening Kas BLUD tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD;

- g. Pendapatan-LRA atas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui pada saat pendapatan tersebut diterima Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat sebesar nilai nominal kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), sedangkan Pendapatan LRA pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diukur dan dicatat sebesar nilai nominal kas yang masuk ke Rekening Kas BLUD.

Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hal-hal yang berhubungan dengan Pendapatan -LO antara lain:

- 1) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah-LO;
 - b. Pendapatan Transfer-LO;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau;
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
- 3) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), namun dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2. Belanja dan Beban LO

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran;
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi atas belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja diakui pada saat:

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, namun Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- b. Belanja pada satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah diakui pada saat pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas BLUD disahkan oleh Bendahara Umum Daerah;
- c. Belanja transfer diakui pada saat pengeluaran kas atas belanja tersebut dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Transfer yang diterima dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi oleh satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah (seperti Dana BOS), serta Dana Desa diakui dan dicatat pada saat disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Sedangkan untuk pengukuran belanja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- c. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian

tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA.

- d. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Beban LO

Beban LO adalah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasi diklasifikasikan menjadi:

- 1) Beban Pegawai;
- 2) Beban Persediaan;
- 3) Beban Jasa;
- 4) Beban Pemeliharaan;
- 5) Beban Perjalanan Dinas;
- 6) Beban Bunga;
- 7) Beban Subsidi;
- 8) Beban Hibah;
- 9) Beban Bantuan Sosial;
- 10) Beban Penyusutan dan Amortisasi;
- 11) Beban Penyisihan Piutang
- 12) Beban Transfer;
- 13) Beban Lain – lain.

Beban LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban, artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- b. Terjadinya konsumsi aset, artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas, yaitu apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, yaitu apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas, yaitu apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Beban diukur berdasarkan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah, yaitu semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, yaitu semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, sedangkan penerimaan kembali dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan.

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Lancar dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kas di Kas Daerah
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah
 - e. Kas di Bendahara FKTP
 - f. Kas Dana BOS
 - g. Kas Lainnya
 - h. Setara Kas.
- 2) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang

merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Piutang disajikan dalam kelompok Aset Lancar dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Daerah
- b. Piutang Retribusi Daerah
- c. Piutang Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- d. Piutang PAD Lainnya Yang Sah
- e. Piutang Transfer Pemerintah
- f. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi/Antar Daerah
- g. Piutang Lainnya

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.

Kualitas piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun atau akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 3) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah.
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan inventarisasi fisik atau stok opname apabila menggunakan metode periodik dan/atau saldo catatan

persediaan apabila menggunakan metode perpetual.

Persediaan Pemerintah Daerah dinilai dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali dan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang sangat terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi diklasifikasikan menjadi:

1. Investasi jangka pendek; yaitu investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek terdiri dari:
 - a. Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - b. Surat Utang Negara (SUN);

- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
 - d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
2. Investasi jangka Panjang, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i). Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa:

- a. Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/keompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir;
- d. Investasi non permanen lainnya.

(ii). Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas atau non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;

- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

- a. Metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. Metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

c. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Yang termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

- a. Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.
- c. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Yang tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi properti investasi aset-aset sebagai berikut:

- a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- b. Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
- c. Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan dimasa depan sebagai properti yang digunakan sendiri.
- d. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
- e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa dibawah harga pasar.
- f. Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Properti investasi merupakan bagian dari akun investasi.

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/ direklasifikasi dari persediaan menjadi properti investasi.

d. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan/difungsikan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dan dapat dinilai secara handal. Klasifikasi aset tetap antara lain:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu (i) tanah untuk gedung dan bangunan, dan (ii) tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen maupun bangunan menara.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Irigasi dan Jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga, hewan ternak maupun tanaman.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya dan dinilai sebesar dana yang sudah dicairkan/dikeluarkan dari Kasda melalui penerbitan SP2D.

Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, di satu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, di sisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal, sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, bahwa aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

e. Dana Cadangan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan Dana Cadangan sebagai dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana Cadangan diakui ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mengeluarkan kas dari Kas Daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan. Mutasi tambah atas saldo dana cadangan ketika SP2D guna pembentukan dana cadangan diperlukan dan mutasi kurang timbul pada saat Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana cadangan. Hasil yang diterima dari pengelolaan dana cadangan yaitu pendapatan bunga diakui menambah saldo dana cadangan, sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, misalnya administrasi deposito.

Apabila saat terjadinya penutupan Dana Cadangan dan masih terdapat sisa bunga dana cadangan yang tidak direalisasikan, maka harus dialihkan (direklasifikasikan ke Kasda) sebagai aset lancar.

f. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari:

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran,

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran ini diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran yang didukung dengan bukti/dokumen penjualan/berita acara serah terima barang atau bukti/dokumen lain yang dipersamakan serta dapat diukur dengan andal.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah,

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu antara lain:

1. Tuntutan Perbendaharaan (TP), yaitu suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya;
2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yaitu suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui pada saat ditetapkan Tuntutan Perbendaharaan (TP) atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan dapat diukur dengan andal. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dinilai sebesar nilai nominal sesuai Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah, sedangkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinilai sebesar nilai nominal sesuai Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk Kemitraan antara lain:

1. Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun, Guna, Serah (BGS), yaitu suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan

aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi);

2. Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG), yaitu pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut;
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP), yaitu pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah non pajak atau sumber pembiayaan daerah lainnya;
4. Sewa, yaitu pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Barang milik daerah yang disewakan atau disebut sebagai aset sewa merupakan aset yang tercantum dalam kontrak sewa dimana hak untuk mengendalikan aset tersebut telah diberikan pemerintah daerah kepada penyewa dalam jangka waktu tertentu.

Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

d. Aset Tak Berwujud;

Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software computer, lisensi dan franchise,

hak cipta (copyright), hak paten, hak merk, goodwill dan hak lainnya, hasil riset dan pengembangan, dan aset tak berwujud lainnya.

Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas;
2. mempunyai potensi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang;
3. tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk seperti halnya aset tetap.

Aset Tak Berwujud meliputi:

1. Software computer, yang merupakan aset tak berwujud adalah software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware computer tertentu;
2. Lisensi, yaitu merupakan izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu;
3. Hak cipta, adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Hak paten, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya;
5. Hak Merk, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pembuat/pemegang merk (merk dagang) untuk selama jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi dan secara prosedur mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku;
6. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara

nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih Perusahaan;

7. Hasil kajian/penelitian yang termasuk dalam kategori aset tak berwujud adalah hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, artinya suatu kajian atau penelitian tersebut dapat memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka hasil kajian tersebut tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud;

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset Tak Berwujud yang dibangun secara mandiri atau swakelola, pengakuan atas perolehan Aset Tak Berwujud dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

- 1) Tahap penelitian atau riset
- 2) Tahap pengembangan

Jika tidak dapat membedakan tahap penelitian atau riset dengan tahap pengembangan maka atas aktivitas kegiatan untuk menghasilkan ATB, pemerintah daerah memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian atau riset.

e. Aset Lain-lain.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud

Aset Lain – lain merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset

Lainnya (Aset Lain-lain) karena:

1. Aset tetap, rusak berat, usang, dan tidak dapat difungsikan lagi;
2. Aset tetap hilang dan masih dalam proses penelusuran;
3. Aset tetap *Idle* (tidak difungsikan dalam jangka yang lama) sehingga tidak lagi memenuhi sebagai parameter Aset Tetap

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau sudah tidak dapat memberikan sumber daya ekonomi dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap dan masih memiliki sisa manfaat disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap atau dibebankan seluruhnya pada saat penghapusan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Proses penghapusan terhadap aset lain–lain dilakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan penghapusan aset pemerintah daerah

Aset tetap lainnya sesuai dengan PSAP 07 paragraf 52 bahwa asset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap dikurangi penyusutan. Asset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodic, melainkan diterapkan penghapusan pada saat asset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

g. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*).

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan

sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran.

- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*).

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah karena pemerintah daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul

dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi:

- a. Kewajiban Jangka Pendek, yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah daerah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang, yaitu semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim dari pihak ketiga dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah daerah/perangkat daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat pembayaran SP2D-LS yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.

Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, baik berupa utang luar negeri, utang obligasi, utang jangka panjang kepada bank, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut

terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman.

Utang bunga dicatat dan diakui sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Utang bunga diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Jaminan Kesehatan, Taspen dan Taperum, yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran maupun oleh Bendahara Umum Daerah namun belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan saat tanggal pelaporan.

Utang PFK diakui pada saat potongan PFK oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah belum disetorkan kepada pihak ketiga, pemerintah atau badan hukum penerima.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Akun Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah adanya aliran masuk sumber daya ekonomi pemerintah daerah, yang pada umumnya berasal dari pendapatan daerah non perpajakan dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Pendapatan diterima dimuka diakui apabila pada akhir periode pelaporan keuangan masih terdapat hak dari pihak ketiga yang

belum dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Utang Beban

Utang beban merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah beban oleh pemerintah daerah/perangkat daerah kepada pihak lain atas pemanfaatan barang/jasa dari penyedia jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat dibayar.

Utang Beban diakui sebesar jumlah beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan pada dokumen tagihan, surat perjanjian kontrak, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori seperti yang telah diuraikan diatas. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

h. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Pemerintahan Kabupaten Malang telah dilakukan secara bertahap, sampai dengan akhir tahun 2014 Kebijakan Akuntansi yang diterapkan masih berbasis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual / CTA*), namun demikian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kebijakan Akuntansi yang

diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2023 telah sepenuhnya berbasis Akrual. Sebagai penjelasan Kebijakan Akuntansi secara umum sebagai berikut :

1. Penerapan kebijakan akuntansi pendapatan LRA mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu dengan mengakui pendapatan pada saat kas dan setara kas diterima dan masuk ke rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan.
2. Penerapan Kebijakan Akuntansi pendapatan LO, yaitu mengakui pendapatan pada saat Hak Daerah telah ditetapkan/terjadi, dan kewajiban pihak ketiga telah timbul untuk membayar, walaupun belum ada aliran dana masuk.
3. Penerapan kebijakan akuntansi belanja juga telah mengadopsi kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Belanja diakui ketika terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan/atau rekening bendahara pengeluaran ketika belanja tersebut telah definitif dan dinyatakan sah oleh pihak yang berwenang.
4. Penyetoran atas pengembalian realisasi belanja ke rekening kas umum daerah yang terjadi pada tahun berkenaan diakui mengurangi realisasi belanja yang bersangkutan. Sedangkan penerimaan atas pengembalian realisasi belanja tahun sebelumnya ke rekening kas umum daerah diakui sebagai pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja.
5. Terkait dengan kebijakan akuntansi atas belanja modal, Pemerintah Kabupaten Malang telah mengakui realisasi belanja modal berdasarkan prinsip harga perolehan, dan pada saat yang sama diakui menambah aset tetap pemerintah daerah. Jika pada akhir tahun pelaporan terdapat aset yang masih dalam proses pengerjaan, maka dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengurangi realisasi pertambahan aset dan memindahkannya ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
6. Penerapan Kebijakan Akuntansi Beban telah mengadopsi kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Beban diakui ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat juga berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

7. Perlakuan atas transaksi pembiayaan juga telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dengan kebijakan akuntansi yang setara dengan kebijakan akuntansi pendapatan LRA, pendapatan LO, dan belanja dan beban yang telah dibahas di atas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan-LRA

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan-LRA	4.375.225.182.406,89	4.018.953.724.121,51

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang TA 2023 sebesar Rp4.375.225.182.406,89 atau mencapai 97,19% dari anggaran pendapatan sebesar Rp4.501.832.816.808,00. Bila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang mengalami peningkatan sebesar Rp356.271.548.285,38 atau 8,86%. Peningkatan tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang sudah pulih pasca pandemi, adapun Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Pendapatan	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.025.586.055.284,00	838.906.956.543,89	81,80	763.117.874.061,91
2.	Pendapatan Transfer	3.178.842.234.524,00	3.239.566.166.862,00	101,91	2.947.583.745.285,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	297.404.527.000,00	296.752.059.001,00	99,78	308.252.104.774,60
Jumlah		4.501.832.816.808,00	4.375.225.182.406,89	97,19	4.018.953.724.121,51

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	838.906.956.543,89	763.117.874.061,91

Pada TA 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp1.025.586.055.284,00 dan direalisasikan sebesar Rp838.906.956.543,89 atau 81,80% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp75.789.082.481,98 atau 9,93%. Peningkatan tersebut merupakan kontribusi dari pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Rincian Pendapatan Asli Daerah meliputi:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	454.120.555.692,00	402.323.511.146,00

Pada TA 2023 Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp476.666.164.778,00 dan direalisasikan sebesar Rp454.120.555.692,00 atau 95,27% dari target anggaran. Bila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Malang mengalami peningkatan sebesar Rp51.797.044.546,00 atau 12,87%. Hal ini dikarenakan pulihnya kembali aktifitas masyarakat, tingginya kunjungan wisatawan serta pemuktahiran data yang menunjang peningkatan penerimaan Pajak Daerah, adapun Pajak Daerah dirinci lebih lanjut sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 8. Rincian Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Pajak Hotel	12.118.052.760,00	7.309.950.785,00	60,32	4.915.325.933,00
2.	Pajak Restoran	19.506.320.295,00	18.355.907.991,00	94,10	14.304.331.246,00
3.	Pajak Hiburan	20.804.676.107,00	10.689.929.767,00	51,38	9.952.494.630,00
4.	Pajak Reklame	15.847.547.444,00	4.887.412.488,00	30,84	4.697.276.309,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	92.288.473.463,00	101.110.861.202,00	109,56	95.517.650.627,00
6.	Pajak Parkir	6.217.983.189,00	2.060.005.088,00	33,13	1.925.235.773,00
7.	Pajak Air Tanah	6.813.563.530,00	2.537.372.182,00	37,24	2.376.581.637,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.944.547.990,00	983.493.078,00	33,40	528.027.950,00
9.	PBB-P2	140.000.000.000,00	123.730.945.220,00	88,38	94.190.717.582,00
10.	BPHTB	160.125.000.000,00	182.454.677.891,00	113,95	173.915.869.459,00
	Jumlah	476.666.164.778,00	454.120.555.692,00	95,27	402.323.511.146,00

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel TA 2023 terealisasikan sebesar Rp7.309.950.785,00 atau 60,32% dari anggaran sebesar Rp12.118.052.760,00. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp2.394.624.852,00 atau 48,72%, dikarenakan meningkatnya pengunjung/wisatawan yang menginap di hotel yang ada di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2023. Rincian Pajak Hotel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Rincian Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Pajak Hotel	Realisasi	
		TA 2023	TA 2022
1.	Pajak Hotel	5.494.649.649,00	3.779.011.385,00
2.	Pajak Losmen	1.815.301.136,00	1.136.314.548,00
Jumlah		7.309.950.785,00	4.915.325.933,00

- 2) Pajak Restoran TA 2023 direalisasikan sebesar Rp18.355.907.991,00 atau 94,10% dari anggaran sebesar Rp19.506.320.295,00. Adanya peningkatan usaha/objek pajak restoran dan pengunjung di Kabupaten Malang berdampak pada penerimaan pajak restoran yang jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp4.051.576.745,00 atau 28,32%. Realisasi tersebut merupakan penerimaan pajak atas pelayanan restoran yang berasal dari rumah makan dan katering. Rincian Pajak Restoran TA 2023 dan 2022 adalah:

Tabel 10. Rincian Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Pajak Restoran	Realisasi	
		TA 2023	TA 2022
1.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	12.566.893.137,00	9.622.190.144,00
2.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.789.014.854,00	4.682.141.102,00
Jumlah		18.355.907.991,00	14.304.331.246,00

- 3) Realisasi Pajak Hiburan TA 2023 adalah sebesar Rp10.689.929.767,00 atau 51,38% dari anggaran sebesar Rp20.804.676.107,00. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasinya mengalami peningkatan drastis sebesar Rp737.435.137,00 atau 7,41%. Salah satu faktor meningkatnya realisasi tersebut karena adanya pembayaran piutang Pajak Hiburan di tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan TA 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Pajak Hiburan	Realisasi	
		TA 2023	TA 2022
a.	Pajak Tontonan Film/ Bioskop	45.067.500,00	45.437.500,00
b.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari	195.776.116,00	515.383.865,00

c.	Pajak Pameran	8.560.135.487,00	7.838.225.574,00
d.	Pajak Diskotik/Karaoke/Klab Malam	159.494.030,00	164.515.215,00
e.	Pajak Biliard & Bowling	6.871.600,00	3.860.441,00
f.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.075.215.432,00	395.658.258,00
g.	Pajak Panti Pijat / Refleksi, Mandi Uap/Spa & Pusat Kebugaran	38.229.551,00	47.269.702,00
h.	Pajak Pertandingan Olah raga	609.140.051,00	942.144.075,00
Jumlah		10.689.929.767,00	9.952.494.630,00

- 4) Realisasi Pajak Reklame TA 2023 adalah sebesar Rp4.887.412.488,00 atau 30,84% dari anggaran sebesar Rp15.847.547.444,00. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp190.136.179,00 atau 4,05%. Adanya peningkatan pemasangan reklame insidental, merupakan salah satu faktor kenaikan realisasi penerimaan. Realisasi penerimaan TA 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Pajak Reklame	Realisasi	
		TA 2023	TA 2022
a.	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/Megatron	3.824.286.412,00	3.511.795.899,00
b.	Pajak Reklame Kain	1.001.722.538,00	1.134.023.570,00
c.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	19.721.625,00	0,00
d.	Pajak Reklame Berjalan	41.681.913,00	51.456.840,00
Jumlah		4.887.412.488,00	4.697.276.309,00

Disamping PAD Pajak Reklame, terdapat titipan uang Biaya Jaminan Bongkar (BJB) reklame berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian, dan Pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar Reklame. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Tahun 2023	:	3.113.956.362,00
Jumlah Penerimaan Tahun 2023	:	813.498.465,20
Jumlah Pengeluaran Tahun 2023	:	365.751.323,00
Saldo Akhir Tahun 2023	:	3.561.703.504,20

Saldo akhir Tahun 2023 sebesar Rp3.561.703.504,20 merupakan BJB yang belum jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.468.534.048,20 dan BJB yang sudah jatuh tempo per 31

Desember 2023 dan baru disetorkan ke rekening kas daerah pada 9 Januari 2024 sebesar Rp93.169.456,00. Saldo akhir tersebut berupa kas di Rekening Koran Nomor 0041029711 pada Bank Jatim.

- 5) Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2023 adalah sebesar Rp101.110.861.202,00 atau 109,56% dari anggaran sebesar Rp92.288.473.463,00. Adanya kenaikan tarif dasar listrik sesuai kebijakan PT.PLN menyebabkan realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp5.593.210.575,00 atau 5,86%. Realisasi penerimaan TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Pajak Penerangan Jalan	Realisasi	
		TA 2023	TA 2022
a.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.377.869.022,00	1.245.322.858,00
b.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	99.732.992.180,00	94.272.327.769,00
Jumlah		101.110.861.202,00	95.517.650.627,00

Pajak Penerangan Jalan PLN merupakan penerimaan pajak atas penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Malang dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang dan Area Mojokerto.

- 6) Realisasi Pajak Parkir TA 2023 adalah sebesar Rp2.060.005.088,00 atau 33,13% dari anggaran sebesar Rp6.217.983.189,00. Pajak Parkir merupakan penerimaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan di wilayah Kabupaten Malang. Jika dibandingkan TA 2022 realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp134.769.315,00 atau 7%, karena adanya penambahan objek parkir.
- 7) Realisasi Pajak Air Tanah TA 2023 adalah sebesar Rp2.537.372.182,00 atau 37,24% dari anggaran sebesar Rp6.813.563.530,00. Pada tahun 2023 terdapat pemutakhiran data objek pajak air tanah, sehingga jika dibandingkan TA 2022 realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp160.790.545,00 atau 6,77%.
- 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 direalisasikan sebesar Rp983.493.078,00 atau 33,40% dari anggaran sebesar Rp2.944.547.990,00. Jika dibandingkan TA 2022 realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp455.465.128,00 atau 86,26%, karena adanya peningkatan produksi di penambangan rakyat. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 dan 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi	
		TA 2023	TA 2022
a.	Batu Kapur	9.980.400,00	6.184.568,00
b.	Batu Granit / Andesit	0,00	0,00
c.	Marmer	0,00	2.268.000,00
d.	Pasir / Kerikil	221.398.550,00	208.991.022,00
e.	Tanah Serap (Fullers Earth)	2.281.840,00	11.897.440,00
f.	Pajak Mineral Logam & Batuan Lainnya	749.832.288,00	298.686.920,00
Jumlah		983.493.078,00	528.027.950,00

9) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2023 adalah sebesar Rp123.730.945.220,00 atau 88,38% dari anggaran sebesar Rp140.000.000.000,00. PBB-P2 merupakan penerimaan pajak atas bumi dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan Kabupaten Malang. Jika dibandingkan TA 2022 realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp29.540.227.638,00 atau 31,36%. Peningkatan tersebut dikarenakan banyak faktor beberapa diantaranya yaitu hasil dari perbaikan data subjek dan objek, peningkatan metode penagihan, perbaikan data dibuka pada pelayanan di UPT, Desa dan program Bapenda Menyapa Warga (BMW) serta perluasan kanal pembayaran non tunai.

10) Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2023 adalah sebesar Rp182.454.677.891,00 atau 113,95% dari anggaran sebesar Rp160.125.000.000,00. Terdapat adanya peningkatan jual beli properti yang dilakukan baik oleh wajib pajak perorangan maupun korporat dan nilai transaksi di tahun 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sehingga jika dibandingkan TA 2022 realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp8.538.808.432,00 atau 4,91%.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	34.597.374.072,00	34.668.963.079,00

Pada TA 2023 Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp119.529.323.105,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp34.597.374.072,00 atau 28,94% dari target anggaran. Jika dibandingkan dengan TA 2022, realisasi pendapatan Retribusi Daerah

mengalami penurunan sebesar Rp71.589.007,00 atau 0,21%. Hal ini dikarenakan menurunnya kepatuhan wajib retribusi dalam pembayaran retribusi, penurunan perhitungan tarif retribusi 2023, kondisi cuaca dan iklim serta persaingan berbasis aplikasi. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Retribusi Jasa Umum	75.652.183.247,00	24.261.371.892,00	32,07	24.495.548.279,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	27.779.613.727,00	7.434.001.380,00	26,76	9.063.627.000,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	16.097.526.131,00	2.902.000.800,00	18,03	1.109.787.800,00
	Jumlah	119.529.323.105,00	34.597.374.072,00	28,94	34.668.963.079,00

Berdasarkan tabel di atas, Retribusi Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 adalah Rp24.261.371.892,00 atau 32,07% dari anggaran sebesar Rp75.652.183.247,00. Jika dibandingkan dengan TA 2022, realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum mengalami penurunan sebesar Rp234.176.387,00 atau 0,96%. Hal ini dikarenakan pada retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat belum terdapat permohonan baru Pelayanan Pemakaman Jenazah (PPJ) dan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara tarif retribusi PPJ baru dengan tarif retribusi PPJ perpanjangan. Selain itu pada retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor dikarenakan menurunnya kepatuhan jukir terhadap kewajiban menyetorkan retribusi parkir dan adanya regulasi dari Kementerian Perhubungan terkait ODOL (*Over Dimensi Over Loading*) yang batas akhirnya pada tanggal 31 Desember 2022, sedangkan kondisi riil di lapangan untuk Tahun 2023 masih banyak kendaraan dengan kondisi ODOL, otomatis kendaraan dimaksud tidak pernah diujikan kembali. Pada retribusi pelayanan tera/tera ulang penurunan dikarenakan sidang pasar tidak dapat dilaksanakan karena kendala SDM. Sedangkan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi penurunannya dikarenakan adanya penurunan perhitungan tarif retribusi dan bertambahnya jumlah bongkar

menara di tahun 2023. Rincian realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan 2022 dimuat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 16. Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi	
		TA 2023	TA 2022
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.882.554.000,00	1.650.201.500,00
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.063.263.832,00	4.405.821.829,00
c.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengubuan Mayat	486.000.130,00	757.551.250,00
d.	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	2.809.109.000,00	2.826.443.000,00
e.	Retribusi Pelayanan Pasar	9.118.083.410,00	8.839.880.700,00
f.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	3.071.260.000,00	3.235.380.000,00
g.	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	467.419.800,00	509.334.000,00
h.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.363.681.720,00	2.270.936.000,00
Jumlah		24.261.371.892,00	24.495.548.279,00

2) Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 adalah sebesar Rp7.434.001.380,00 atau 26,76% dari anggaran sebesar Rp27.779.613.727,00. Jika dibandingkan dengan TA 2022, realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan sebesar Rp1.629.625.620,00 atau 17,98%. Hal ini dikarenakan pada realisasi retribusi tempat pelelangan turun yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan iklim yang tidak menentu, kurangnya sarana penyimpanan ikan dan harga ikan yang murah. Selain itu Retribusi tempat rekreasi dan olahraga menurun dikarenakan tidak adanya pendapatan dari sewa stadion dan sewa kios karena adanya renovasi stadion Kanjuruhan. Rincian realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 dan 2022 dimuat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi	
		TA 2023	TA 2022
a.	Retribusi Pemakaian Kelcaayaan Daerah	546.182.870,00	450.007.115,00
b.	Retribusi Tempat Pelelangan	3.540.544.173,00	4.931.461.617,00
c.	Retribusi Terminal	721.336.475,00	635.062.275,00
d.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.225.030.000,00	1.117.694.000,00
e.	Retribusi Rumah Potong Hewan	264.455.000,00	259.499.000,00
f.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.136.452.862,00	1.669.902.993,00
Jumlah		7.434.001.380,00	9.063.627.000,00

3) Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 sebesar Rp2.902.000.800,00 atau 18,03% dari anggaran sebesar Rp16.097.526.131,00. Jika dibandingkan dengan TA 2022, realisasi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu mengalami peningkatan sebesar Rp1.792.213.000,00 atau 161,49%. Adapun penurunan retribusi izin trayek dikarenakan adanya peraturan baru dan persaingan angkutan berbasis aplikasi. Rincian realisasi TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi	
		TA 2023	TA 2022
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.890.068.800,00	1.097.093.800,00
b.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	11.932.000,00	12.694.000,00
c.	Retribusi Perpanjangan IMTA	0,00	0,00
Jumlah		2.902.000.800,00	1.109.787.800,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	25.482.015.537,05	23.505.888.225,95

Pada TA 2023 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp46.849.399.240,00 dan direalisasikan sebesar Rp25.482.015.537,05 atau 54,39% dari target anggaran. Bila dibandingkan dengan TA 2022, realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp1.976.127.311,10 atau 8,41%. Hal ini dikarenakan adanya pemulihan kondisi keuangan BUMD pasca pandemi COVID-19 yang semakin baik. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut berasal dari bagian laba/dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Nama BUMD	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertuan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.129.004.632,00	13.465.505.775,05	89,00	13.216.943.038,95

No.	Nama BUMD	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.038.427.500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	30.681.967.108,00	12.016.509.762,00	33,97	10.288.945.187,00
Jumlah		46.849.399.240,00	25.482.015.537,05	54,39	23.505.888.225,95

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	324.707.011.242,84	302.619.511.610,96

Pada TA 2023 Lain-lain PAD yang Sah dianggarkan sebesar Rp382.541,168,161,00 dan direalisasikan sebesar Rp324.707.011.242,84 atau 84,88% dari target anggaran. Jika dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp22.085.624.631,88 atau 7,30%. Lain-lain PAD yang Sah dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 20. Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi TA 2023	%	
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	785.152.500,00	940.449.200,00	119,78	801.635.550,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	8.463.631.612,00	6.264.299.428,00	74,01	3.186.747.828,36
3.	Jasa Giro	13.822.985.774,00	5.240.393.966,25	37,91	15.789.270.881,58
4.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	1.132.270.844,77	100,00	0,00
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	35.335.333,33	100,00	39.171.000,00
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	6.233.657.128,07	100,00	5.884.056.086,69

No	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi TA 2023	%	
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	566.664.972,27	100,00	1.019.512.258,51
8.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	2.642.967.169,94	100,00	1.902.489.813,00
9.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.013.100.000,00	448.521.950,00	44,27	503.132.100,00
10.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	93.169.456,00	100,00	68.472.668,00
11.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	2.246.836.065,00	100,00	2.716.368.722,26
12.	Pendapatan BLUD	358.456.298.275,00	298.862.445.729,21	83,37	270.297.460.800,38
13.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	411.193.902,18
	Jumlah	382.541.168.161,00	324.707.011.242,84	84,88	302.619.511.610,96

Berdasarkan tabel di atas, Lain-lain PAD yang Sah dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada TA 2023 sebesar Rp940.449.200,00 atau 119,78% dari anggaran sebesar Rp785.152.500,00. Jika dibandingkan dengan TA 2022, realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp138.813.650,00 atau 17,32%. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan merupakan penerimaan dari:

Tabel 21. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	152.394.000,00
2.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	202.620.000,00	203.055.000,00	100,21	200.027.000,00
3.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	582.532.500,00	737.394.200,00	126,58	449.214.550,00
	Jumlah	785.152.500,00	940.449.200,00	119,78	801.635.550,00

Hasil Penjualan Aset tetap lainnya merupakan penjualan hasil perikanan pada Dinas Perikanan, sedangkan Hasil Penjualan Aset

Lainnya merupakan hasil penjualan susu, keju, ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga penjualan drum bekas merupakan drum bekas tempat penyimpanan aspal pada Dinas PU Bina Marga, serta penjualan aset lainnya pada BKAD.

- 2) Realisasi pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp6.264.299.428,00 atau 74,01% dari anggaran sebesar Rp8.463.631.612,00. Pendapatan tersebut berasal dari:

- a. Hasil Sewa BMD sebesar Rp632.209.718,00 yang terdiri dari:

<i>(dalam Rupiah)</i>		
No	Uraian	Realisasi
1.	Sewa tanah dan bangunan Bagian Perencanaan Keuangan	11.781.197,00
2.	Sewa tanah dan bangunan Bagian Perencanaan Keuangan	2.225.317,00
3.	Sewa tanah dan bangunan Kec. Lawang	21.284.748,00
4.	Sewa tanah milik Pemkab Malang Kel. Penarukan	115.865.698,00
5.	Sewa tanah milik Pemkab Malang Kel. Penarukan	29.330.144,00
6.	Sewa tanah Kec. Lawang Kel. Kalirejo	2.115.850,00
7.	Sewa tanah Kec. Lawang Kel. Kalirejo	4.318.945,00
8.	Sewa tanah Kec. Lawang Kel. Kalirejo	44.327.546,00
9.	Sewa tanah eks bengkok Candirenggo Kec. Singosari	7.224.020,00
10.	Sewa tanah eks bengkok Candirenggo Kec. Singosari	44.892.016,00
11.	Sewa tanah eks bengkok Candirenggo Kec. Singosari	5.177.226,00
12.	Sewa tanah bangunan STIKES Kepanjen	340.835.611,00
13.	Sewa tanah bangunan kantin Kepanjen Sekda	2.831.400,00
Jumlah		632.209.718,00

- b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD berasal dari pemanfaatan sumber mata air di wilayah Kabupaten Malang sebesar Rp5.632.089.710,00

- 3) Realisasi pendapatan Jasa Giro TA 2023 sebesar Rp5.240.393.966,25 atau 37,91% dari anggaran sebesar Rp13.822.985.774,00. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp10.548.876.915,33 atau 66,81%. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan Jasa Giro sebesar Rp1.508.544.651,29 dan pendapatan bunga deposito sebesar Rp3.731.849.314,96. Hal ini dikarenakan menyesuaikan kemampuan kas daerah. Pendapatan Jasa Giro merupakan penerimaan jasa atas penempatan dana Kas Daerah pada Bank Jatim Nomor 0041029711 dan rekening giro Perangkat Daerah. Pendapatan bunga deposito merupakan penerimaan bunga atas simpanan dalam bentuk deposito pada Bank Jatim. Realisasi pendapatan merupakan

akumulasi penerimaan bunga dari deposito bulanan yang diperpanjang secara otomatis. Realisasi tersebut berasal dari:

(dalam Rupiah)

No	Nomor Deposito	Realisasi
1.	Deposito Nomor Seri 0438646 (Bank Jatim Kapanjen)	1.420.547.945,16
2.	Deposito Nomor Seri 0438803 (Bank Jatim Kapanjen)	1.251.712.328,72
3.	Deposito Nomor Seri 438857 (Bank Jatim Kapanjen)	1.059.589.041,08
Jumlah		3.731.849.314,96

- 4) Realisasi pendapatan dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.132.270.844,77 atau 100% dari anggaran sebesar Rp00,00 yang berasal dari bunga TDF dan bunga deposito.
- 5) Realisasi pendapatan dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TGR) pada TA 2023 sebesar Rp35.335.333,33 atau 100% dari anggaran sebesar Rp00,00 yang merupakan pembayaran dari tuntutan ganti kerugian barang.
- 6) Realisasi pendapatan dari Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp6.233.657.128,07 atau 100% dari anggaran sebesar Rp00,00. Pendapatan ini untuk menampung pengembalian belanja tahun lalu, kelebihan pembayaran pajak dan retribusi serta pendapatan lain-lain yang belum diketahui rekeningnya.
- 7) Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp566.664.972,27 atau 100% dari anggaran sebesar Rp00,00.
- 8) Realisasi pendapatan dari Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp2.642.967.169,94 atau 100% dari anggaran sebesar Rp00,00. Pendapatan tersebut berasal dari:

**Tabel 22. Pendapatan Denda Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	
		Anggaran	Realisasi
a.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	14.381.242,00
b.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	49.306.686,00
c.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	42.437.593,00
d.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	30.069.588,00
e.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	1.941.280,00
f.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	19.354.838,00
g.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	2.743.273,94
h.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	1.807.222,00
i.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	2.157.664.552,00

No	Uraian	2023	
		Anggaran	Realisasi
j.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	323.260.895,00
Jumlah		0,00	2.642.967.169,94

- 9) Realisasi pendapatan dari Pendapatan Denda Retribusi Daerah pada TA 2023 terealisasi sebesar Rp448.521.950,00 atau 44,27% dari anggaran sebesar Rp1.013.100.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp442.979.400,00 dan Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp5.542.550,00.
- 10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa pada TA 2023 terealisasi sebesar Rp93.169.456,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp00,00.
- 11) Pendapatan dari Pengembalian TA 2023 terealisasi sebesar Rp2.246.836.065,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp00,00. Pendapatan tersebut berasal dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji & Tunjangan sebesar Rp1.791.711.558,00 serta dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp455.124.507,00
- 12) Realisasi pendapatan dari BLUD TA 2023 sebesar Rp298.862.445.729,21 atau 83,37% dari anggaran sebesar Rp358.456.298.275,00 yang berasal dari 43 BLUD. Realisasi Pendapatan BLUD TA 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 23. Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Nama BLUD	Realisasi	
		TA 2023	TA 2022
1.	RSUD Kanjuruhan	115.399.793.063,05	98.006.646.654,28
2.	Dana Bergulir	381.057.594,38	0,00
3.	Lumbung Desa Modern (LDM)	122.438.000,00	373.352.000,00
4.	RSUD Lawang	48.137.297.752,14	66.787.831.746,25
5.	UPTD Puskesmas Ampelgading	3.963.575.575,86	3.265.252.701,63
6.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	2.061.657.831,34	1.498.808.551,86
7.	UPTD Puskesmas Bantur	2.679.721.785,42	1.993.349.330,34
8.	UPTD Puskesmas Bululawang	3.914.249.760,61	3.072.450.717,65
9.	UPTD Puskesmas Dampit	3.962.477.357,89	3.225.437.134,19
10.	UPTD Puskesmas Dau	2.377.320.073,47	1.946.647.884,45
11.	UPTD Puskesmas Donomulyo	5.278.167.219,27	4.096.561.866,38
12.	UPTD Puskesmas Gedangan	3.497.044.237,32	2.434.012.454,01
13.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	3.410.799.469,78	2.738.064.264,13
14.	UPTD Puskesmas Jabung	3.560.174.165,09	2.951.101.761,92
15.	UPTD Puskesmas Kalipare	3.780.072.061,37	2.886.987.184,01
16.	UPTD Puskesmas Karangploso	3.092.506.065,44	2.589.949.030,60

No	Nama BLUD	Realisasi	
		TA 2023	TA 2022
17.	UPTD Puskesmas Kasembon	1.715.533.371,06	1.703.982.315,47
18.	UPTD Puskesmas Kepanjen	4.069.198.367,38	3.098.896.532,50
19.	UPTD Puskesmas Ketawang	2.136.533.675,23	1.520.441.907,35
20.	UPTD Puskesmas Kromengan	1.953.795.176,32	1.419.051.413,65
21.	UPTD Puskesmas Lawang	3.539.817.943,30	2.380.510.955,20
22.	UPTD Puskesmas Ngajum	2.742.464.626,97	2.395.250.958,19
23.	UPTD Puskesmas Ngantang	2.994.607.132,88	2.558.745.414,92
24.	UPTD Puskesmas Pagak	2.008.673.384,08	1.363.144.782,48
25.	UPTD Puskesmas Pagelaran	3.454.553.343,91	2.706.348.621,88
26.	UPTD Puskesmas Pakis	5.967.339.282,20	4.931.849.237,22
27.	UPTD Puskesmas Pakisaji	4.038.918.461,55	3.186.874.960,33
28.	UPTD Puskesmas Pamotan	3.713.031.051,61	2.923.343.994,13
29.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	5.665.410.107,23	4.846.263.180,71
30.	UPTD Puskesmas Pujon	3.599.439.034,71	2.554.498.550,77
31.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Kulon	1.918.521.977,59	1.321.351.980,89
32.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	3.321.589.938,70	2.369.030.140,18
33.	UPTD Puskesmas Singosari	3.673.547.889,53	3.068.412.277,46
34.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	2.317.901.205,76	1.706.476.409,56
35.	UPTD Puskesmas Sumberpucung	3.346.944.214,92	2.410.360.920,34
36.	UPTD Puskesmas Tajinan	2.564.741.086,14	1.864.106.807,28
37.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	3.997.039.289,11	3.294.370.542,70
38.	UPTD Puskesmas Tumpang	5.104.041.983,17	4.359.631.492,67
39.	UPTD Puskesmas Turen	5.999.474.801,99	4.439.582.522,45
40.	UPTD Puskesmas Wagir	4.013.929.313,52	2.743.104.936,21
41.	UPTD Puskesmas Wajak	4.341.118.389,77	3.416.107.441,13
42.	UPTD Puskesmas Wonokerto	2.944.660.907,04	2.117.462.273,13
43.	UPTD Puskesmas Wonosari	2.101.267.761,11	1.731.806.949,88
	Jumlah	298.862.445.729,21	270.297.460.800,38

Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasi pendapatan BLUD mengalami peningkatan sebesar Rp28.564.984.928,83 atau 10,57%. Hal ini dikarenakan pada TA 2022 BLUD Dana Bergulir dengan realisasi sebesar Rp411.193.902,18 masih diklasifikasikan sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, sedangkan di TA 2023 diklasifikasikan sebagai BLUD Dana Bergulir. Peningkatan realisasi BLUD 2023 juga dikarenakan adanya peningkatan dan optimalisasi unit layanan seperti *Universal Health Coverage* (UHC) serta penambahan layanan baru yang berdampak pada meningkatnya kunjungan pasien.

- 13) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan pada TA 2023 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direklas sebagai BLUD Dana Bergulir sebesar Rp381.057.594,38. Sedangkan pada TA 2022 Pendapatan BLUD Dana Bergulir masih diklasifikasikan sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

dengan realisasi sebesar Rp411.193.902,18. Kendala pendapatan terjadi karena hutang nasabah yang susah untuk ditagih.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer	3.239.566.166.862,00	2.947.583.745.285,00

Pendapatan Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.178.842.234.524,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.239.566.166.862,00 atau 101,91% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan TA 2022, realisasi Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp291.982.421.577,00 atau 9,91%. Hal ini sesuai dengan PMK 198 Tahun 2021, PMK 204 Tahun 2022, PMK 211 Tahun 2022 dan PMK 110 tahun 2023. Pendapatan transfer terdiri dari dua pos penerimaan, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Besarannya sangat tergantung pada kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, rinciannya adalah:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.812.521.313.441,00	2.600.577.353.091,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.801.416.277.603,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.812.521.313.441,00 atau 100,40% dari anggaran. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

1. Dana Perimbangan

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Dana Perimbangan	2.326.982.353.441,00	2.189.795.776.691,00

Dana Perimbangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.315.877.317.603,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.326.982.353.441,00 atau 100,48%. Dibandingkan TA 2022, realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp137.186.576.750,00 atau 6,26%. Selain sudah sesuai dengan PMK, hal ini juga dikarenakan ada tambahan Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan pengendalian inflasi. Dana Perimbangan meliputi:

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	183.654.704.394,00	151.828.619.465,00

Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dianggarkan sebesar Rp173.411.948.393,00 dan direalisasikan sebesar Rp183.654.704.394,00 atau 105,91%. Dibandingkan TA 2022, realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp31.826.084.929,00 atau 20,96%. Hal ini sesuai dengan PMK 211 tahun 2022. Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak bersifat *blockgrant*, yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 24. Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Dana Bagi Hasil	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
a	Pajak Bumi dan Bangunan	10.811.527.157,00	14.736.075.721,00	136,30	25.548.924.533,00
b	DBH PPh Pasal 21	29.875.424.438,00	34.412.586.000,00	115,19	30.734.148.777,00
c	PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	5.895.856.752,00	4.682.511.000,00	79,42	6.782.395.772,00
d	Cukai Hasil Tembakau	126.829.140.046,00	129.823.531.673,00	102,36	88.763.150.383,00
	Jumlah	173.411.948.393,00	183.654.704.394,00	105,91	151.828.619.465,00

b) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	40.113.424.787,00	82.234.364.350,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 dianggarkan sebesar Rp46.584.186.278,00 dan direalisasikan sebesar Rp40.113.424.787,00 atau 86,11%. Dibandingkan TA 2022, realisasi mengalami penurunan sebesar Rp42.120.939.563,00 atau 51,22%. Hal ini sesuai dengan PMK 211 tahun 2022. Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam bersifat

blockgrant, yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada tabel berikut:

Tabel 25. Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Dana Bagi Hasil	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
a	Sumber Daya Alam Minyak Bumi	41.496.229.487,00	33.912.726.005,00	81,72	72.285.342.293,00
b	Sumber Daya Alam Gas Bumi	4.786.186.188,00	2.484.734.246,00	51,91	4.175.690.966,00
c	Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	40.527.127,00	43.192.808,00	106,58	71.843.831,00
d	Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landent	(1.599.540.636,00)	969.401.490,00	(60,60)	3.053.435.270,00
e	Sumber Daya Alam Kehutanan -Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	479.164.114,00	656.769.027,00	137,07	689.740.990,00
f	Sumber Daya Alam Perikanan	1.381.619.998,00	2.046.601.211,00	148,13	1.958.311.000,00
	Jumlah	46.584.186.278,00	40.113.424.787,00	86,11	82.234.364.350,00

c) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.666.245.288.928,00	1.529.615.967.555,00

DAU TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.655.177.855.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.666.245.288.928,00 atau 100,67% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2022 DAU mengalami peningkatan sebesar Rp136.629.321.373,00 atau 8,93%. Hal ini sesuai dengan PMK 211 Tahun 2022 dan PMK 110 Tahun 2023. DAU digunakan terutama untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Diutamakan untuk Gaji dan Tunjangan, selebihnya untuk membiayai kegiatan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.498.658.682.928,00
2.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.400.000.000,00
3.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	165.186.606.000,00
Jumlah		1.666.245.288.928,00

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)

1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	88.582.620.305,00	99.424.460.305,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 terealisasi sebesar Rp88.582.620.305,00 atau 97,19% dari target anggaran sebesar Rp91.141.827.000,00. Realisasi DAK Fisik tersebut menurun sebesar Rp10.841.840.000,00 atau 10,90% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. DAK Fisik merupakan pendapatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa alokasi dana untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 26. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Bidang	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Pendidikan	30.920.173.000,00	29.454.453.000,00	95,26	18.259.551.700,00
2.	Kesehatan	41.580.085.000,00	41.124.598.000,00	98,90	22.169.650.713,00
3.	Keluarga Berencana	1.672.708.000,00	1.659.809.545,00	99,23	967.000.000,00
4.	Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	9.778.861.000,00	9.186.866.238,00	93,95	7.837.431.697,00
5.	Infrastruktur Jalan/ Jebatan	0,00	0,00	0,00	39.216.193.925,00
6.	Infrastruktur Irigasi	0,00	0,00	0,00	2.154.071.028,00
7.	Pertanian	7.190.000.000,00	7.156.893.522,00	99,54	2.315.806.286,00
8.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	2.954.750.000,00
9.	Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	3.550.004.956,00
Jumlah DAK Fisik		91.141.827.000,00	88.582.620.305,00	97,19	99.424.460.305,00

2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	348.386.315.027,00	326.692.365.016,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2023 terealisasi sebesar Rp348.386.315.027,00 atau 99,66% dari target anggaran sebesar Rp349.561.500.932,00. Realisasi DAK Non Fisik tersebut meningkat sebesar Rp21.693.950.011,00 atau 6,64% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini sesuai PMK 204 Tahun 2022. DAK Non Fisik merupakan pendapatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa alokasi dana untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 27. Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Bidang	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Kesehatan	58.942.518.711,00	58.942.518.711,00	100,00	55.181.820.896,00
2.	Pendidikan	288.945.958.944,00	287.770.773.039,00	99,59	269.150.322.100,00
3.	Koperasi / UKM	505.800.000,00	505.800.000,00	100,00	404.200.000,00
4.	Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	1.008.096.800,00
5.	Penanaman Modal	342.886.500,00	342.886.500,00	100,00	386.728.220,00
6.	Perlindungan Perempuan dan Anak	321.338.400,00	321.338.400,00	100,00	382.199.000,00
7.	Ketahanan Pangan dan Pertanian	502.998.377,00	502.998.377,00	100,00	178.998.000,00
Jumlah DAK Non Fisik		349.561.500.932,00	348.386.315.027,00	99,66	26.692.365.016,00

2. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	22.916.865.000,00	1.351.964.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp22.916.865.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp22.916.865.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp21.564.901.000,00 atau 1.595,08%. Hal ini dikarenakan ada tambahan Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan pengendalian inflasi.

3. Dana Desa

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Dana Desa	462.622.095.000,00	409.429.612.400,00

Dana Desa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp462.622.095.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp462.622.095.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Penyaluran Dana Desa ditransfer secara langsung dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas desa (RKD) masing-masing desa tanpa melalui rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten Malang. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer antar Daerah	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	427.044.853.421,00	347.006.392.194,00

Tahun 2023 Pendapatan Transfer antar Daerah dianggarkan sebesar Rp377.425.956.921,00 dan direalisasikan sebesar Rp427.044.853.421,00 atau 113,15% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp80.038.461.227,00 atau 23,07% sesuai dengan Keputusan Gubernur. Pendapatan Transfer antar Daerah meliputi:

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	408.901.791.900,00	328.002.339.194,00

Pendapatan Bagi Hasil TA 2023 dianggarkan sebesar Rp359.282.895.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp408.901.791.900,00 atau 113,81% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022, Pendapatan Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar Rp80.899.452.706,00 atau 24,66% sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/180/KPTS/013/2023; Nomor 188/288/KPTS/013/2023; Nomor 188/293/KPTS/ Nomor 188/443/KPTS/013/2023; Nomor 88/525/KPTS/013/2023; Nomor 188/568/KPRS/013/2023 dan Nomor 188/688/KPTS/013/2023. Rincian Pendapatan Bagi Hasil disajikan pada tabel berikut:

Tabel 28. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan Bagi Hasil	TA 2023			Realisasi TA 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Pajak Kendaraan Bermotor	105.708.353.700,00	109.886.255.100,00	103,95	89.905.464.580,00
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	57.506.161.700,00	58.360.624.400,00	101,49	54.846.737.520,00
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	91.523.578.000,00	120.000.828.500,00	131,11	83.172.933.740,00
d.	Pajak Air Permukaan	2.850.373.000,00	3.320.480.600,00	116,49	2.157.865.040,00
e.	Pajak Rokok	101.694.429.000,00	117.333.603.300,00	115,38	97.919.338.314,00
Jumlah		359.282.895.400,00	408.901.791.900,00	113,81	328.002.339.194,00

2. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dari Provinsi	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	18.143.061.521,00	19.004.053.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur yang penggunaannya sudah ditentukan. Pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp18.143.061.521,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.143.061.521,00 atau 100% sesuai Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 440/785/102.1/2023; Nomor 412.2/304/112.3/2023; Nomor 045.2/1010/201.4/2023; Nomor 140/2812/112.2/2023; Nomor 045.2/42880/201.1/2023 dan Surat Perintah Pencairan Dana No. LS/0011625/2023.

Tabel 29. Rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	BK Penyelenggaraan Pendidikan	9.438.600.000,00	9.438.600.000,00	100,00	9.192.600.000,00
b.	BK Peningkatan Pelayanan Kesehatan	6.241.311.521,00	6.241.311.521,00	100,00	8.402.003.000,00
c.	Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) dan Honorarium Aparatur Pemdes	2.463.150.000,00	2.463.150.000,00	100,00	1.409.450.000,00
Jumlah		18.143.061.521,00	18.143.061.521,00	100,00	19.004.053.000,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	296.752.059.001,00	308.252.104.774,60

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp297.404.527.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp296.752.059.001,00 atau 99,78% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan TA 2022, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp11.500.045.773,60 atau 3,73%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan Rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	21.723.499.500,00	43.097.603.455,00

Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp22.999.297.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp21.723.499.500,00 atau 94,45%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp21.374.103.955,00 atau 49,59%. Realisasi Pendapatan Hibah tersebut lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	21.723.499.500,00	43.067.603.455,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp22.708.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp21.723.499.500,00 atau 95,66%. Realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp21.344.103.955,00 atau 49,56%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30. Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Hibah Air Minum Perkotaan	10.500.000.000,00	9.948.000.000,00	94,74	13.500.000.000,00
b.	Hibah Tanaman Pangan	12.208.500.000,00	11.775.499.500,00	96,45	15.589.472.000,00
c.	Hibah Sanitasi / Air Limbah Setempat	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00

No	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
d.	Hibah RSUD Kanjuruhan	0,00	0,00	0,00	13.774.131.455,00
	Jumlah	22.708.500.000,00	21.723.499.500,00	95,66	43.067.603.455,00

a) Hibah Air Minum Perkotaan.

Realisasi Hibah Air Minum Perkotaan sebesar Rp9.948.000.000,00. Hibah tersebut merupakan hibah untuk kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum pada PDAM (Perumda Tirta Kanjuruhan) Kabupaten Malang. Pencatatan berdasarkan pada Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-67/MK.7/DTK.03/AMK/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Malang untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2023.

b) Hibah Upland – Tanaman Pangan

Realisasi Hibah Upland (Tanaman Pangan) sebesar Rp11.775.499.500,00. Hibah tersebut untuk kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan sektor pertanian di dataran tinggi, serta kegiatan penguatan system kelembagaan petani. Pencatatan berdasarkan pada perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-07/MK.7/DTK.03/UPLAND/2021 tanggal 24 Maret 2021 untuk Program Hibah *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)*.

c) Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat)

Tahun 2023 tidak dianggarkan untuk Hibah Sanitasi sehingga tidak ada realisasi untuk Hibah Sanitasi.

d) Hibah RSUD Kanjuruhan

Tahun 2023 tidak dianggarkan untuk Hibah RSUD Kanjuruhan sehingga tidak ada realisasi untuk Hibah RSUD Kanjuruhan.

2) Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga /Sejenis	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	00,00	30.000.000,00

Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis TA 2023 dianggarkan sebesar Rp290.797.000,00 dan terealisasi sebesar Rp00,00 atau 0%. Sedangkan TA 2022 terealisasi sebesar Rp30.000.000,00.

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	275.028.559.501,00	265.154.501.319,60

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp274.405.230.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp275.028.559.501,00 atau 100,23%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut lebih rinci sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	275.028.559.501,00	265.129.001.319,60

Pendapatan Hibah Dana BOS TA 2023 dianggarkan sebesar Rp274.405.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp275.028.559.501,00 atau 100,23%. Besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah setiap Tahun Anggaran dihitung berdasarkan jumlah siswa peserta didik pada masing-masing sekolah. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp265.129.001.319,60 maka realisasi TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.899.558.181,40 atau 3,73% sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 31. Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Pendapatan Hibah Dana BOS	274.405.230.000,00	275.028.559.501,00	100,23	265.129.001.319,60
	Jumlah	274.405.230.000,00	275.028.559.501,00	100,23	265.129.001.319,60

Pendapatan Hibah Dana Bos TA 2023 terdiri dari:

- a) Dana BOS SD terealisasi sebesar Rp163.616.626.411,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp165.617.673.582,00 Dana BOS pada SD TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.001.047.171,00 atau 1,21%.
- b) Dana BOS SMP terealisasi sebesar Rp101.581.933.090,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar

Rp99.511.327.737,60 Dana BOS pada SMP TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.070.605.352.40 atau 2,08%.

c) Dana BOS Kinerja terealisasi sebesar Rp9.830.000.000,00.

2) Pendapatan atas Pengembalian Hibah

Pendapatan atas Pengembalian Hibah	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	00,00	25.500.000,00

Pendapatan atas Pengembalian Hibah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar 0,00 atau 0%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32. Pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00

Tahun 2023 tidak dianggarkan untuk Pendapatan atas Pengembalian Hibah sehingga tidak ada realisasi untuk Pendapatan atas Pengembalian Hibah.

5.1.2. BELANJA DAERAH dan BELANJA TRANSFER

Belanja Daerah dan Belanja Transfer	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	4.303.906.080.736,83	4.330.508.442.323,56

Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.303.906.080.736,83 mencapai 91,46% dari anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.705.964.209.126,00. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Malang mengalami penurunan sebesar Rp26.602.361.586,71 atau 0,61%.

Belanja Daerah di Kabupaten Malang terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, yang dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	2.994.600.953.868,83	2.892.120.918.526,99

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.350.964.020.286,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.994.600.953.868,83 atau 89,37% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian Belanja Operasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33. Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Pegawai	1.674.608.074.660,00	1.456.092.249.859,91	86,95	1.399.095.815.915,55
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.315.004.900.532,00	1.181.742.699.245,92	89,87	1.191.289.001.640,92
3.	Belanja Hibah	330.958.045.094,00	327.264.685.763,00	98,88	238.335.909.970,52
4.	Belanja Bantuan Sosial	30.393.000.000,00	29.501.319.000,00	97,07	63.400.191.000,00
	Jumlah	3.350.964.020.286,00	2.994.600.953.868,83	89,37	2.892.120.918.526,99

Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Malang mengalami kenaikan sebesar Rp102.480.035.341,84 atau 3,54% dari tahun 2022. Adapun rincian kenaikan/penurunan Belanja Operasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 34. Rincian Kenaikan/Penurunan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	1.456.092.249.859,91	1.399.095.815.915,55	56.996.433.944,36	4,07
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.181.742.699.245,92	1.191.289.001.640,92	(9.546.302.395,00)	(0,80)
3.	Belanja Hibah	327.264.685.763,00	238.335.909.970,52	88.928.775.792,48	37,31
4.	Belanja Bantuan Sosial	29.501.319.000,00	63.400.191.000,00	(33.898.872.000,00)	(53,47)
	Jumlah	2.994.600.953.868,83	2.892.120.918.526,99	102.480.035.341,84	3,54

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan belanja operasi disampaikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan di Tahun 2023 yang antara lain disebabkan karena:
 - Penyesuaian anggaran komponen belanja tunjangan perbaikan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas ASN, kondisi kerja ASN, prestasi kerja ASN, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian ASN dan honorarium pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2023.
 - Penambahan tenaga ASN terutama tenaga kontrak yang di diterima menjadi pegawai PPPK serta karyawan yang dulunya kontrak BLUD di angkat menjadi PPPK.
 - Adanya kenaikan pendapatan di beberapa puskesmas sehingga ada kenaikan jasa pelayanan untuk ASN.
2. Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan di Tahun 2023 yang antara lain disebabkan karena:
 - Realisasi belanja sudah terpenuhi di tahun 2022 dan sudah sesuai dengan kebutuhan OPD. Jika ada realisasi yang kurang di tahun 2022 kebanyakan OPD melakukan penambahan penganggaran untuk belanja di tahun 2023.
 - Adanya efisiensi anggaran belanja dan penyesuaian belanja operasional pendukung belanja modal serta keterbatasan waktu pelaksanaan dengan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

- Untuk puskesmas ada beberapa belanja BOK yang tidak terserap 100%
 - Beberapa puskesmas ada yang melaksanakan akreditasi sehingga merencanakan belanja barang dan jasa lebih banyak dari tahun 2022
3. Belanja Hibah mengalami kenaikan di Tahun 2023 yang antara lain disebabkan karena:
- Peningkatkan kemajuan kebudayaan Kabupaten Malang sehingga perlu memberikan bantuan untuk para penggiat seni yang ada di Kabupaten Malang terutama di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .
 - Adanya usulan Proposal Usulan untuk TP PKK pada Tahun 2023 di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
 - Adanya pemenuhan ketentuan menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Rincian untuk masing-masing jenis Belanja Operasi diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	1.456.092.249.859,91	1.399.095.815.915,55

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.674.608.074.660,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.456.092.249.859,91 atau 86,95% dari anggaran. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp56.996.433.944,40 atau 4,07%. Rincian Belanja Pegawai disajikan sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uralan	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Gaji Pokok ASN	739.913.688.850,00	629.347.315.701,00	85,06	607.917.005.438,50
2.	Tunjangan Keluarga ASN	73.016.713.468,00	57.294.261.675,00	78,47	52.299.980.240,40

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
3.	Tunjangan Jabatan ASN	10.604.506.396,00	10.243.043.153,00	96,59	10.397.738.809,00
4.	Tunjangan Fungsional ASN	33.104.687.595,00	32.444.949.550,00	98,01	35.031.209.778,00
5.	Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.620.759.267,00	15.884.219.616,00	73,47	10.910.623.992,00
6.	Tunjangan Beras ASN	46.237.159.350,00	35.734.176.104,00	77,28	31.662.209.262,00
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.225.801.293,00	3.060.231.270,00	94,87	3.417.741.643,00
8.	Pembulatan Gaji ASN	12.331.391,00	9.235.688,00	74,90	8.579.927,00
9.	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	48.868.937.929,00	39.256.186.988,00	80,33	37.465.924.725,00
10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.545.966.146,00	1.307.232.809,00	84,56	1.246.710.452,00
11.	Iuran Jaminan Kematian ASN	4.635.525.725,00	3.919.378.669,00	84,55	3.740.011.182,00
12.	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.449.309.500,00	0,00	0,00	0,00
13.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	96.238.615.377,00	86.250.179.945,00	89,62	75.684.796.814,53
14.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	4.575.284.381,00	3.401.487.322,00	74,34	3.622.805.436,74
15.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	33.128.571.830,00	31.160.617.537,00	94,06	16.775.967.741,93
16.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.225.872.483,00	2.898.801.270,00	89,86	2.412.777.776,98
17.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	136.387.763.305,00	125.406.173.464,00	91,95	113.383.632.383,34
18.	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.202.478.004,00	7.202.085.459,00	99,99	6.883.265.624,53
19.	Insentif	1.448.556.273,00	0,00	0,00	271.064.235,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
	Pemungutan Retribusi Daerah				
20.	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	228.731.403.900,00	225.225.066.709,00	98,47	231.092.330.400,00
21.	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	8.249.500.500,00	7.516.500.000,00	91,11	5.545.250.000,00
22.	Honorarium	490.474.000,00	416.878.124,00	84,99	7.316.655.045,00
23.	Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	186.425.000,00
24.	Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.112.685.000,00	99,86	1.109.535.000,00
25.	Tunjangan Keluarga DPRD	200.592.000,00	136.781.400,00	68,19	136.182.900,00
26.	Tunjangan Beras DPRD	101.520.000,00	88.153.200,00	86,33	87.645.600,00
27.	Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.350.500,00	99,84	95.035.500,00
28.	Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.613.393.250,00	99,86	1.608.825.750,00
29.	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.006.400,00	151.459.200,00	99,64	151.093.080,00
30.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	26.445.825,00	9.987.600,00	37,77	16.991.550,00
31.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.805.300.000,00	99,83	8.775.900.000,00
32.	Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.190.300.000,00	99,33	2.190.300.000,00
33.	Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.498.779,00	549.954,00	15,72	544.418,00
34.	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.436.236.176,00	7.414.487.708,00	99,71	7.390.925.808,00
35.	Tunjangan Transportasi DPRD	5.575.200.000,00	5.565.100.000,00	99,82	5.544.900.000,00
36.	Uang Jasa Pengabdian DPRD	18.900.000,00	6.300.000,00	33,33	4.725.000,00
37.	Gaji Pokok KDH/WKDH	55.185.000,00	54.600.000,00	98,94	54.600.000,00
38.	Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.518.500,00	5.460.000,00	98,94	5.460.000,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
39.	Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.333.000,00	98.280.000,00	98,94	98.280.000,00
40.	Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.098.972,00	4.055.520,00	98,94	3.476.160,00
41.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.010.626,00	1.964.548,00	97,71	1.950.320,00
42.	Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.698,00	1.680,00	98,94	1.440,00
43.	Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.496.660,00	5.428.800,00	98,77	5.428.800,00
44.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.724,00	112.320,00	98,77	112.320,00
45.	Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	341.172,00	336.960,00	98,77	336.960,00
46.	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	802.332.000,00	802.332.000,00	100,00	854.966.250,00
47.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
48.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.538.379.083,00	1.538.379.083,00	100,00	1.474.543.092,00
59.	Belanja Pegawai BLUD	137.423.393.082,00	108.020.310.083,91	78,60	111.818.230.060,60
	Jumlah	1.674.608.074.660,00	1.456.092.249.859,91	86,95	1.399.095.815.915,55

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Malang mengalami kenaikan sebesar Rp56.996.433.944,36 atau 4,07% dari tahun 2022. Adapun rincian kenaikan/penurunan Belanja Pegawai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 36. Rincian Kenaikan/Penurunan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	Gaji Pokok ASN	629.347.315.701,00	607.917.005.438,50	21.430.310.262,50	3,53

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
2.	Tunjangan Keluarga ASN	57.294.261.675,00	52.299.980.240,40	4.994.281.434,60	9,55
3.	Tunjangan Jabatan ASN	10.243.043.153,00	10.397.738.809,00	(154.695.656,00)	(1,49)
4.	Tunjangan Fungsional ASN	32.444.949.550,00	35.031.209.778,00	(2.586.260.228,00)	(7,38)
5.	Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.884.219.616,00	10.910.623.992,00	4.973.595.624,00	45,58
6.	Tunjangan Beras ASN	35.734.176.104,00	31.662.209.262,00	4.071.966.842,00	12,86
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.060.231.270,00	3.417.741.643,00	(357.510.373,00)	(10,46)
8.	Pembulatan Gaji ASN	9.235.688,00	8.579.927,00	655.761,00	7,64
9.	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	39.256.186.988,00	37.465.924.725,00	1.790.262.263,00	4,78
10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.307.232.809,00	1.246.710.452,00	60.522.357,00	4,85
11.	Iuran Jaminan Kematian ASN	3.919.378.669,00	3.740.011.182,00	179.367.487,00	4,80
12.	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	86.250.179.945,00	75.684.796.814,53	10.565.383.130,47	13,96
14.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	3.401.487.322,00	3.622.805.436,74	(221.318.114,74)	(6,11)
15.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	31.160.617.537,00	16.775.967.741,93	14.384.649.795,07	85,75
16.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.898.801.270,00	2.412.777.776,98	486.023.493,02	20,14
17.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	125.406.173.464,00	113.383.632.383,34	12.022.541.080,66	10,60
18.	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.202.085.459,00	6.883.265.624,53	318.819.834,47	4,63
19.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	271.064.235,00	(271.064.235,00)	(100,00)
20.	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	225.225.066.709,00	231.092.330.400,00	(5.867.263.691,00)	(2,54)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
21.	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	7.516.500.000,00	5.545.250.000,00	1.971.250.000,00	35,55
22.	Honorarium	416.878.124,00	7.316.655.045,00	(6.899.776.921,00)	(94,30)
23.	Jasa Pengelolaan BMD	0,00	186.425.000,00	(186.425.000,00)	(100,00)
24.	Uang Representasi DPRD	1.112.685.000,00	1.109.535.000,00	3.150.000,00	0,28
25.	Tunjangan Keluarga DPRD	136.781.400,00	136.182.900,00	598.500,00	0,44
26.	Tunjangan Beras DPRD	88.153.200,00	87.645.600,00	507.600,00	0,58
27.	Uang Paket DPRD	95.350.500,00	95.035.500,00	315.000,00	0,33
28.	Tunjangan Jabatan DPRD	1.613.393.250,00	1.608.825.750,00	4.567.500,00	0,28
29.	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.459.200,00	151.093.080,00	366.120,00	0,24
30.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	9.987.600,00	16.991.550,00	(7.003.950,00)	(41,22)
31.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.805.300.000,00	8.775.900.000,00	29.400.000,00	0,34
32.	Tunjangan Reses DPRD	2.190.300.000,00	2.190.300.000,00	0,00	0,00
33.	Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	549.954,00	544.418,00	5.536,00	1,02
34.	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.414.487.708,00	7.390.925.808,00	23.561.900,00	0,32
35.	Tunjangan Transportasi DPRD	5.565.100.000,00	5.544.900.000,00	20.200.000,00	0,36
36.	Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000,00	4.725.000,00	1.575.000,00	33,33
37.	Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
38.	Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00
39.	Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
40.	Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	3.476.160,00	579.360,00	16,67
41.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.964.548,00	1.950.320,00	14.228,00	0,73

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenalkan / (Penurunan) (Rp)	%
42.	Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.680,00	1.440,00	240,00	16,67
43.	Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.428.800,00	5.428.800,00	0,00	0,00
44.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
45.	Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00
46.	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	802.332.000,00	854.966.250,00	(52.634.250,00)	(6,16)
47.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	0,00
48.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.538.379.083,00	1.474.543.092,00	63.835.991,00	4,33
59.	Belanja Pegawai BLUD	108.020.310.083,91	111.818.230.060,60	(3.797.919.976,69)	(3,40)
	Jumlah	1.456.092.249.859,91	1.399.095.815.915,55	56.996.433.944,36	4,07

Realisasi Belanja Pegawai dalam tabel diatas, didalamnya termasuk realisasi Belanja Pegawai BOS dan realisasi Belanja Pegawai BLUD. Adapun realisasi Belanja Pegawai BLUD dapat disajikan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 37. Rincian Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	RSUD Kanjuruhan	75.200.000.000,0	48.062.758.682,75	63,91	67.189.092.775,47
2.	RSUD Lawang	4.360.512.456	3.522.112.484,48	80,77	4.676.385.542,60
3.	Dana Bergulir UMKM	80.000.000	72.000.000,00	90,00	48.000.000,00
4.	UPTD Puskesmas Ampelgading	1.621.744.111	1.603.349.094,00	98,87	834.350.595,00
5.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	858.233.251	801.093.425,00	93,34	620.336.933,51
6.	UPTD Puskesmas Bantur	990.013.890	969.932.981,00	97,97	638.766.564,00
7.	UPTD Puskesmas Bululawang	1.640.048.064	1.545.507.716,00	94,24	1.082.099.915,00
8.	UPTD Puskesmas Dampit	2.010.290.008	1.896.222.302,00	94,33	1.248.705.069,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
9.	UPTD Puskesmas Dau	858.927.135	844.499.611,00	98,32	687.862.539,00
10.	UPTD Puskesmas Donomulyo	2.127.044.172	2.127.044.171,38	100,00	1.410.864.908,59
11.	UPTD Puskesmas Gedangan	1.470.337.427	1.458.565.971,00	99,20	943.876.778,00
12.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	1.249.655.087	1.249.145.246,45	99,96	974.192.188,69
13.	UPTD Puskesmas Jabung	1.669.871.667	1.664.132.607,00	99,66	1.208.217.517,00
14.	UPTD Puskesmas Kalipare	1.535.031.167	1.515.037.878,21	98,70	1.162.649.579,00
15.	UPTD Puskesmas Karangploso	1.546.543.667	1.454.728.617,00	94,06	1.106.276.277,00
16.	UPTD Puskesmas Kasembon	902.913.492	791.777.650,00	87,69	865.507.309,00
17.	UPTD Puskesmas Kepanjen	2.130.920.045	2.065.862.860,00	96,95	1.364.546.960,00
18.	UPTD Puskesmas Ketawang	747.860.708	747.421.648,56	99,94	520.030.180,31
19.	UPTD Puskesmas Kromengan	850.070.104	848.025.049,00	99,76	531.460.884,99
20.	UPTD Puskesmas Lawang	1.424.591.408	1.410.505.297,00	99,01	1.023.464.662,00
21.	UPTD Puskesmas Ngajum	1.212.978.202	1.123.539.742,00	92,63	897.806.210,28
22.	UPTD Puskesmas Ngantang	1.530.861.997	1.368.650.392,00	89,40	947.360.775,00
23.	UPTD Puskesmas Pagak	894.115.574	846.543.708,00	94,68	482.550.016,80
24.	UPTD Puskesmas Pagelaran	1.392.378.455	1.378.385.463,00	99,00	1.102.454.039,00
25.	UPTD Puskesmas Pakis	2.611.538.921	2.462.374.544,00	94,29	1.842.870.752,00
26.	UPTD Puskesmas Pakisaji	1.498.644.245	1.493.520.754,59	99,66	1.027.443.561,00
27.	UPTD Puskesmas Pamotan	1.541.000.000	1.469.206.173,00	95,34	969.649.634,00
28.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	2.389.086.838	2.337.696.700,00	97,85	2.009.523.423,00
29.	UPTD Puskesmas Pujon	1.553.951.996	1.550.872.989,05	99,80	959.565.603,24
30.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Kulon	666.211.436	664.920.938,00	99,81	416.292.030,00
31.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	1.333.330.261	1.261.410.519,00	94,61	669.438.635,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
32.	UPTD Puskesmas Singosari	1.715.559.617	1.705.860.849,97	99,43	1.293.039.104,00
33.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	1.061.828.990	1.039.345.453,00	97,88	526.583.862,00
34.	UPTD Puskesmas Sumberpucung	1.623.012.183	1.622.976.053,00	100,00	1.059.231.730,00
35.	UPTD Puskesmas Tajinan	1.236.084.162	1.218.616.925,37	98,59	762.415.611,00
36.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	1.491.261.113	1.514.483.302,00	101,56	1.123.370.766,00
37.	UPTD Puskesmas Tumpang	2.452.848.485	2.448.563.689,00	99,83	1.833.639.676,00
38.	UPTD Puskesmas Turen	2.611.622.988	2.580.974.582,88	98,83	1.696.449.440,98
39.	UPTD Puskesmas Wagir	1.741.617.201	1.740.315.474,00	99,93	1.224.586.320,00
40.	UPTD Puskesmas Wajak	1.931.107.154	1.926.377.597,00	99,76	1.457.327.037,00
41.	UPTD Puskesmas Wonokerto	1.009.745.405	965.950.944,00	95,66	846.209.553,14
42.	UPTD Puskesmas Wonosari	650.000.000	649.999.999,22	100,00	533.735.103,00
	Jumlah	137.423.393.082,00	108.020.310.083,91	78,60	111.818.230.060,60

Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Malang mengalami penurunan sebesar Rp3.797.919.976,69 atau 3,40% dari tahun 2022. Adapun rincian kenaikan/penurunan Belanja Pegawai BLUD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 38. Rincian Kenaikan/Penurunan Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	RSUD Kanjuruhan	48.062.758.682,75	67.189.092.775,47	(19.126.334.092,72)	(28,47)
2.	RSUD Lawang	3.522.112.484,48	4.676.385.542,60	(1.154.273.058,12)	(24,68)
3.	Dana Bergulir UMKM	72.000.000,00	48.000.000,00	24.000.000,00	50,00
4.	UPTD Puskesmas Ampelgading	1.603.349.094,00	834.350.595,00	768.998.499,00	92,17
5.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	801.093.425,00	620.336.933,51	180.756.491,49	29,14
6.	UPTD Puskesmas Bantur	969.932.981,00	638.766.564,00	331.166.417,00	51,84
7.	UPTD Puskesmas	1.545.507.716,00	1.082.099.915,00	463.407.801,00	42,82

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenalkan / (Penurunan) (Rp)	%
	Bululawang				
8.	UPTD Puskesmas Dampit	1.896.222.302,00	1.248.705.069,00	647.517.233,00	51,86
9.	UPTD Puskesmas Dau	844.499.611,00	687.862.539,00	156.637.072,00	22,77
10.	UPTD Puskesmas Donomulyo	2.127.044.171,38	1.410.864.908,59	716.179.262,79	50,76
11.	UPTD Puskesmas Gedangan	1.458.565.971,00	943.876.778,00	514.689.193,00	54,53
12.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	1.249.145.246,45	974.192.188,69	274.953.057,76	28,22
13.	UPTD Puskesmas Jabung	1.664.132.607,00	1.208.217.517,00	455.915.090,00	37,73
14.	UPTD Puskesmas Kalipare	1.515.037.878,21	1.162.649.579,00	352.388.299,21	30,31
15.	UPTD Puskesmas Karangploso	1.454.728.617,00	1.106.276.277,00	348.452.340,00	31,50
16.	UPTD Puskesmas Kasembon	791.777.650,00	865.507.309,00	(73.729.659,00)	(8,52)
17.	UPTD Puskesmas Kepanjen	2.065.862.860,00	1.364.546.960,00	701.315.900,00	51,40
18.	UPTD Puskesmas Ketawang	747.421.648,56	520.030.180,31	227.391.468,25	43,73
19.	UPTD Puskesmas Kromengan	848.025.049,00	531.460.884,99	316.564.164,01	59,56
20.	UPTD Puskesmas Lawang	1.410.505.297,00	1.023.464.662,00	387.040.635,00	37,82
21.	UPTD Puskesmas Ngajum	1.123.539.742,00	897.806.210,28	225.733.531,72	25,14
22.	UPTD Puskesmas Ngantang	1.368.650.392,00	947.360.775,00	421.289.617,00	44,47
23.	UPTD Puskesmas Pagak	846.543.708,00	482.550.016,80	363.993.691,20	75,43
24.	UPTD Puskesmas Pagelaran	1.378.385.463,00	1.102.454.039,00	275.931.424,00	25,03
25.	UPTD Puskesmas Pakis	2.462.374.544,00	1.842.870.752,00	619.503.792,00	33,62
26.	UPTD Puskesmas Pakisaji	1.493.520.754,59	1.027.443.561,00	466.077.193,59	45,36
27.	UPTD Puskesmas Pamotan	1.469.206.173,00	969.649.634,00	499.556.539,00	51,52
28.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	2.337.696.700,00	2.009.523.423,00	328.173.277,00	16,33
29.	UPTD Puskesmas Pujon	1.550.872.989,05	959.565.603,24	591.307.385,81	61,62
30.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Kulon	664.920.938,00	416.292.030,00	248.628.908,00	59,72
31.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	1.261.410.519,00	669.438.635,00	591.971.884,00	88,43
32.	UPTD Puskesmas Singosari	1.705.860.849,97	1.293.039.104,00	412.821.745,97	31,93
33.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	1.039.345.453,00	526.583.862,00	512.761.591,00	97,38
34.	UPTD Puskesmas Sumberpucung	1.622.976.053,00	1.059.231.730,00	563.744.323,00	53,22
35.	UPTD Puskesmas Tajinan	1.218.616.925,37	762.415.611,00	456.201.314,37	59,84
36.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	1.514.483.302,00	1.123.370.766,00	391.112.536,00	34,82
37.	UPTD Puskesmas Tumpang	2.448.563.689,00	1.833.639.676,00	614.924.013,00	33,54
38.	UPTD Puskesmas Turen	2.580.974.582,88	1.696.449.440,98	884.525.141,90	52,14
39.	UPTD Puskesmas Wagir	1.740.315.474,00	1.224.586.320,00	515.729.154,00	42,11

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
40.	UPTD Puskesmas Wajak	1.926.377.597,00	1.457.327.037,00	469.050.560,00	32,19
41.	UPTD Puskesmas Wonokerto	965.950.944,00	846.209.553,14	119.741.390,86	14,15
42.	UPTD Puskesmas Wonosari	649.999.999,22	533.735.103,00	116.264.896,22	21,78
	Jumlah	108.020.310.083,91	111.818.230.060,60	(3.797.919.976,69)	(3,40)

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.181.742.699.245,92	1.191.289.001.640,92

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.315.004.900.532,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.181.742.699.245,92 atau 89,87% dari anggaran. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp9.546.302.395,00 atau 0,80%. Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut:

Tabel 39. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Barang Pakai Habis	142.619.394.521,00	132.710.402.885,00	93,05	143.891.289.153,55
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	245.000.000,00	237.448.000,00	96,92	38.739.000,00
3.	Belanja Jasa Kantor	244.663.800.415,00	224.853.499.065,00	91,90	253.124.015.917,18
4.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	107.465.033.320,00	75.352.731.864,00	70,12	87.513.479.096,00
5.	Belanja Sewa Tanah	270.000.000,00	259.000.000,00	95,93	237.500.000,00
6.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.513.242.625,00	5.112.586.142,00	92,73	2.827.312.237,00
7.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.601.809.159,00	14.929.528.998,00	89,93	25.059.680.150,00
8.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	67.850.000,00	67.766.250,00	99,88	23.826.300,00
9.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	24.990.041.707,00	24.634.975.688,00	98,58	21.758.343.829,00
10.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.480.008.500,00	2.868.491.310,00	82,43	4.988.064.786,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	42.600.000,00	42.600.000,00	100,00	272.600.000,00
12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.338.989.000,00	5.501.981.695,00	74,97	5.632.327.839,00
13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.361.827.773,00	1.361.827.773,00	100,00	1.025.000.000,00
14.	Belanja Pemeliharaan Tanah	140.000.000,00	139.100.300,00	99,36	0,00
15.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.387.635.863,00	13.360.336.866,00	92,86	13.292.116.390,48
16.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.341.281.654,00	26.566.076.695,00	97,16	9.181.828.575,00
17.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.494.086.000,00	61.685.428.105,00	98,71	74.343.294.506,67
18.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.325.741.600,00	1.034.148.770,00	78,01	637.633.000,00
19.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00	39.800.000,00	99,50	0,00
20.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	122.068.484.955,00	110.259.949.798,00	90,33	121.413.184.519,00
21.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	12.602.900,00	12.602.900,00	100,00	142.240.000,00
22.	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.737.522.823,00	32.485.453.450,00	99,23	27.158.440.779,00
23.	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.164.600.000,00	14.153.600.000,00	99,92	8.307.683.787,00
24.	Belanja Barang dan Jasa BOS	261.682.938.692,00	261.746.059.346,61	100,02	218.309.274.042,01
25.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	223.950.409.025,00	172.327.303.345,31	76,95	172.111.127.734,03
	Jumlah	1.315.004.900.532,00	1.181.742.699.245,92	89,87	1.191.289.001.640,92

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Malang mengalami penurunan sebesar Rp9.546.302.395,00 atau 0,80% dari tahun 2022. Adapun rincian kenaikan/penurunan Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 40. Rincian Kenaikan/Penurunan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	Belanja Barang Pakai Habis	132.710.402.885,00	143.891.289.153,55	(11.180.886.268,55)	(7,77)
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	237.448.000,00	38.739.000,00	198.709.000,00	512,94
3.	Belanja Jasa Kantor	224.853.499.065,00	253.124.015.917,18	(28.270.516.852,18)	(11,17)
4.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	75.352.731.864,00	87.513.479.096,00	(12.160.747.232,00)	(13,90)
5.	Belanja Sewa Tanah	259.000.000,00	237.500.000,00	21.500.000,00	9,05
6.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.112.586.142,00	2.827.312.237,00	2.285.273.905,00	80,83
7.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.929.528.998,00	25.059.680.150,00	(10.130.151.152,00)	(40,42)
8.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	67.766.250,00	23.826.300,00	43.939.950,00	184,42
9.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	24.634.975.688,00	21.758.343.829,00	2.876.631.859,00	13,22
10.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.868.491.310,00	4.988.064.786,00	(2.119.573.476,00)	(42,49)
11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	42.600.000,00	272.600.000,00	(230.000.000,00)	(84,37)
12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.501.981.695,00	5.632.327.839,00	(130.346.144,00)	(2,31)
13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.361.827.773,00	1.025.000.000,00	336.827.773,00	32,86
14.	Belanja Pemeliharaan Tanah	139.100.300,00	0,00	139.100.300,00	0,00
15.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.360.336.866,00	13.292.116.390,48	68.220.475,52	0,51
16.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.566.076.695,00	9.181.828.575,00	17.384.248.120,00	189,33

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
17.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.685.428.105,00	74.343.294.506,67	(12.657.866.401,67)	(17,03)
18.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.034.148.770,00	637.633.000,00	396.515.770,00	62,19
19.	Belanja Pemeliharaan Ase Tidak Berwujud	39.800.000,00	0,00	39.800.000,00	0,00
20.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.259.949.798,00	121.413.184.519,00	(11.153.234.721,00)	(9,19)
21.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	12.602.900,00	142.240.000,00	(129.637.100,00)	(91,14)
22.	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.485.453.450,00	27.158.440.779,00	5.327.012.671,00	19,61
23.	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.153.600.000,00	8.307.683.787,00	5.845.916.213,00	70,37
24.	Belanja Barang dan Jasa BOS	261.746.059.346,61	218.309.274.042,01	43.436.785.304,60	19,90
25.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	172.327.303.345,31	172.111.127.734,03	216.175.611,28	0,13
	Jumlah	1.181.742.699.245,92	1.191.289.001.640,92	(9.546.302.395,00)	(0,80)

Sedangkan realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 41. Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Dinas Pendidikan	2.807.997.823	2.784.900.000,00	99,18	269.825.000,00
2.	Dinas Kesehatan	60.000.000	60.000.000,00	100,00	77.400.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	13.750.000	13.750.000,00	100,00	0,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	6.813.511.000	6.813.511.000,00	100,00	6.083.468.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	18.857.000	18.782.050,00	99,60	18.719.000,00
6.	Dinas Sosial	17.162.400.000	16.935.600.000,00	98,68	15.170.400.000,00
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00

No	Perangkat Daerah	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
	Perlindungan Anak				
8.	Dinas Ketahanan Pangan	1.050.000	1.043.400,00	99,37	47.500.000,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	600.000.000	600.000.000,00	100,00	41.602.000,00
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	31.131.000,00
13.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	920.500.000	920.500.000,00	100,00	4.561.500.000,00
14.	Dinas Perikanan	54.239.000	52.200.000,00	96,24	23.500.000,00
15.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3.343.100.000	3.343.100.000,00	100,00	749.240.779,00
17.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	900.000.000	900.000.000,00	100,00	21.510.000,00
18.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	16.162.000	16.162.000	100,00	0,00
19.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00
20.	Badan Pendapatan Daerah	5.631.000	5.580.000,00	99,09	6.850.000,00
21.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.575.000	7.575.000,00	100,00	34.045.000,00
22.	Kecamatan Ngantang	12.750.000	12.750.000	100,00	0,00
	JUMLAH	32.737.522.823,00	32.485.453.450,00	99,23	27.158.440.779,00

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Malang mengalami kenaikan sebesar Rp5.327.012.671,00 atau 19,61% dari tahun 2022. Adapun rincian kenaikan/penurunan Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 42. Rincian Kenaikan/Penurunan Belanja Uang yang
Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan	2.784.900.000,00	269.825.000,00	2.515.075.000,00	932,11
2.	Dinas Kesehatan	60.000.000,00	77.400.000,00	(17.400.000,00)	(22,48)
3.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00	100,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	6.813.511.000,00	6.083.468.000,00	730.043.000,00	12,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	18.782.050,00	18.719.000,00	63.050,00	0,34
6.	Dinas Sosial	16.935.600.000,00	15.170.400.000,00	1.765.200.000,00	11,64
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
8.	Dinas Ketahanan Pangan	1.043.400,00	47.500.000,00	(46.456.600,00)	(97,80)
9.	Dinas Lingkungan Hidup	600.000.000,00	41.602.000,00	558.398.000,00	1342,24
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	31.131.000,00	(31.131.000,00)	(100,00)
13.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	920.500.000,00	4.561.500.000,00	(3.641.000.000,00)	(79,82)
14.	Dinas Perikanan	52.200.000,00	23.500.000,00	28.700.000,00	122,13
15.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3.343.100.000,00	749.240.779,00	2.593.859.221,00	346,20
17.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	900.000.000,00	21.510.000,00	878.490.000,00	4084,10
18.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	16.162.000	0,00	16.162.000,00	100,00
19.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	12.750.000,00	(12.750.000,00)	(100,00)
20.	Badan Pendapatan Daerah	5.580.000,00	6.850.000,00	(1.270.000,00)	(18,54)
21.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.575.000,00	34.045.000,00	(26.470.000,00)	(77,75)
22.	Kecamatan	12.750.000	0,00	12.750.000,00	100,00

No	Perangkat Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Ngantang				
	JUMLAH	32.485.453.450,00	27.158.440.779,00	5.327.012.671,00	19,61

Sedangkan realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 43. Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	44.145.500,00
2.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.164.600.000	14.153.600.000,00	99,92	8.258.538.287,00
3.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	JUMLAH	14.164.600.000,00	14.153.600.000,00	99,92	8.307.683.787,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS dapat dilihat di **Lampiran 28**.

Adapun belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44. Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	RSUD Kanjuruhan	75.246.653.699	60.264.538.746,75	80,09	64.633.416.034,27
2.	RSUD Lawang	74.300.620.737	42.383.472.965,42	57,04	45.579.409.724,37
3.	UPT Pengelola Dana Bergulir UMKM	462.271.227	366.474.584,00	79,28	347.878.363,00
4.	UPT Lumbung Desa Modern	1.493.473.419	111.489.400,00	7,47	0,00
5.	UPTD Puskesmas Ampelgading	2.438.948.804	2.173.982.642,00	89,14	1.689.703.702,00
6.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	1.011.680.045	981.571.015,28	97,02	859.298.464,00
7.	UPTD Puskesmas Bantur	1.525.174.078	1.524.894.054,61	99,98	1.282.093.148,29
8.	UPTD Puskesmas Bululawang	2.114.881.104	2.015.767.528,00	95,31	1.768.354.692,00
9.	UPTD Puskesmas	1.750.297.027	1.745.978.182,00	99,75	1.738.959.611,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
	Dampit				
10.	UPTD Puskesmas Dau	1.490.483.111	1.383.551.305,06	92,83	1.240.525.884,74
11.	UPTD Puskesmas Donomulyo	2.426.247.578	2.426.247.564,50	100,00	2.737.055.106,06
12.	UPTD Puskesmas Gedangan	1.860.660.090	1.859.932.961,00	99,96	1.477.191.431,00
13.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	1.784.887.158	1.784.642.106,55	99,99	1.589.733.067,31
14.	UPTD Puskesmas Jabung	1.805.846.873	1.610.746.232,00	89,20	1.432.879.735,00
15.	UPTD Puskesmas Kalipare	2.106.052.697	2.104.520.558,94	99,93	1.758.490.269,00
16.	UPTD Puskesmas Karangploso	1.715.608.190	1.457.981.688,00	84,98	1.385.599.451,00
17.	UPTD Puskesmas Kasembon	1.058.951.534	924.655.146,00	87,32	848.690.268,50
18.	UPTD Puskesmas Kepanjen	1.924.384.963	1.906.394.363,00	99,07	1.651.729.655,00
19.	UPTD Puskesmas Ketawang	1.265.073.226	1.264.965.457,09	99,99	1.003.237.603,34
20.	UPTD Puskesmas Kromengan	899.242.379	895.825.626,00	99,62	928.315.059,83
21.	UPTD Puskesmas Lawang	1.628.452.265	1.627.453.404,66	99,94	1.337.492.777,88
22.	UPTD Puskesmas Ngajum	1.660.512.804	1.526.579.181,00	91,93	1.417.976.017,70
23.	UPTD Puskesmas Ngantang	1.715.740.242	1.605.256.020,00	93,56	1.524.715.568,90
24.	UPTD Puskesmas Pagak	1.124.449.008	911.389.560,20	81,05	845.428.272,96
25.	UPTD Puskesmas Pagelaran	1.932.501.928	1.861.489.214,94	96,33	1.713.692.198,18
26.	UPTD Puskesmas Pakis	3.504.464.740	3.275.312.965,00	93,46	3.000.392.710,00
27.	UPTD Puskesmas Pakisaji	2.632.934.913	2.531.506.261,58	96,15	2.143.981.948,00
28.	UPTD Puskesmas Pamotan	1.950.536.924	1.922.488.818,00	98,56	1.927.897.648,00
29.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	3.087.486.719	2.779.365.952,16	90,02	2.540.043.154,00
30.	UPTD Puskesmas Pujon	2.053.556.794	1.852.898.518,46	90,23	1.573.372.758,68
31.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Kulon	1.108.613.619	1.108.314.837,00	99,97	820.825.636,00
32.	UPTD	1.987.722.978	1.728.984.055,00	86,98	1.481.825.858,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
	Puskesmas Sumbermanjing Wetan				
33.	UPTD Puskesmas Singosari	1.950.251.268	1.960.103.905,63	100,51	1.545.762.052,00
34.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	1.096.754.822	1.096.656.729,00	99,99	1.003.354.052,00
35.	UPTD Puskesmas Sumberpucung	1.610.857.778	1.584.412.802,00	98,36	1.318.323.635,00
36.	UPTD Puskesmas Tajinan	1.309.372.491	1.288.055.508,87	98,37	1.015.663.033,34
37.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	2.257.636.343	2.241.723.330,00	99,30	2.092.380.854,00
38.	UPTD Puskesmas Tumpang	2.821.412.683	2.626.890.252,00	93,11	2.452.193.234,00
39.	UPTD Puskesmas Turen	2.924.239.173	2.889.450.153,41	98,81	2.589.539.718,91
40.	UPTD Puskesmas Wagir	1.774.129.829	1.739.877.676,42	98,07	1.630.276.585,44
41.	UPTD Puskesmas Wajak	2.195.143.204	2.157.919.896,00	98,30	1.922.354.721,80
42.	UPTD Puskesmas Wonokerto	1.561.668.260	1.448.009.911,00	92,72	1.070.162.132,51
43.	UPTD Puskesmas Wonosari	1.380.532.301	1.375.532.266,78	99,64	1.190.911.897,02
	Jumlah	223.950.409.025,00	172.327.303.345,31	76,95	172.111.127.734,03

Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Malang mengalami kenaikan sebesar Rp216.175.611,28 atau 0,13% dari tahun 2022. Adapun rincian kenaikan/penurunan Belanja Barang dan Jasa BLUD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 45. Rincian Kenaikan/Penurunan Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	RSUD Kanjuruhan	60.264.538.746,75	64.633.416.034,27	(4.368.877.287,52)	(6,76)
2.	RSUD Lawang	42.383.472.965,42	45.579.409.724,37	(3.195.936.758,95)	(7,01)
3.	UPT Pengelola Dana Bergulir UMKM	366.474.584,00	347.878.363,00	18.596.221,00	5,35
4.	UPT Lumbung Desa Modern	111.489.400,00	0,00	111.489.400,00	100,00

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
5.	UPTD Puskesmas Ampelgading	2.173.982.642,00	1.689.703.702,00	484.278.940,00	28,66
6.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	981.571.015,28	859.298.464,00	122.272.551,28	14,23
7.	UPTD Puskesmas Bantur	1.524.894.054,61	1.282.093.148,29	242.800.906,32	18,94
8.	UPTD Puskesmas Bululawang	2.015.767.528,00	1.768.354.692,00	247.412.836,00	13,99
9.	UPTD Puskesmas Dampit	1.745.978.182,00	1.738.959.611,00	7.018.571,00	0,40
10.	UPTD Puskesmas Dau	1.383.551.305,06	1.240.525.884,74	143.025.420,32	11,53
11.	UPTD Puskesmas Donomulyo	2.426.247.564,50	2.737.055.106,06	(310.807.541,56)	(11,36)
12.	UPTD Puskesmas Gedangan	1.859.932.961,00	1.477.191.431,00	382.741.530,00	25,91
13.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	1.784.642.106,55	1.589.733.067,31	194.909.039,24	12,26
14.	UPTD Puskesmas Jabung	1.610.746.232,00	1.432.879.735,00	177.866.497,00	12,41
15.	UPTD Puskesmas Kalipare	2.104.520.558,94	1.758.490.269,00	346.030.289,94	19,68
16.	UPTD Puskesmas Karangploso	1.457.981.688,00	1.385.599.451,00	72.382.237,00	5,22
17.	UPTD Puskesmas Kasembon	924.655.146,00	848.690.268,50	75.964.877,50	8,95
18.	UPTD Puskesmas Kepanjen	1.906.394.363,00	1.651.729.655,00	254.664.708,00	15,42
19.	UPTD Puskesmas Ketawang	1.264.965.457,09	1.003.237.603,34	261.727.853,75	26,09
20.	UPTD Puskesmas Kromengan	895.825.626,00	928.315.059,83	(32.489.433,83)	(3,50)
21.	UPTD Puskesmas Lawang	1.627.453.404,66	1.337.492.777,88	289.960.626,78	21,68
22.	UPTD Puskesmas Ngajum	1.526.579.181,00	1.417.976.017,70	108.603.163,30	7,66
23.	UPTD Puskesmas Ngantang	1.605.256.020,00	1.524.715.568,90	80.540.451,10	5,28
24.	UPTD Puskesmas Pagak	911.389.560,20	845.428.272,96	65.961.287,24	7,80
25.	UPTD Puskesmas Pagelaran	1.861.489.214,94	1.713.692.198,18	147.797.016,76	8,62
26.	UPTD Puskesmas Pakis	3.275.312.965,00	3.000.392.710,00	274.920.255,00	9,16
27.	UPTD Puskesmas Pakisaji	2.531.506.261,58	2.143.981.948,00	387.524.313,58	18,07
28.	UPTD Puskesmas Pamotan	1.922.488.818,00	1.927.897.648,00	(5.408.830,00)	(0,28)
29.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	2.779.365.952,16	2.540.043.154,00	239.322.798,16	9,42
30.	UPTD Puskesmas Pujon	1.852.898.518,46	1.573.372.758,68	279.525.759,78	17,77
31.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Kulon	1.108.314.837,00	820.825.636,00	287.489.201,00	35,02
32.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	1.728.984.055,00	1.481.825.858,00	247.158.197,00	16,68
33.	UPTD Puskesmas Singosari	1.960.103.905,63	1.545.762.052,00	414.341.853,63	26,81
34.	UPTD Puskesmas Sitarjo	1.096.656.729,00	1.003.354.052,00	93.302.677,00	9,30
35.	UPTD Puskesmas Sumberpucung	1.584.412.802,00	1.318.323.635,00	266.089.167,00	20,18
36.	UPTD Puskesmas Tajinan	1.288.055.508,87	1.015.663.033,34	272.392.475,53	26,82
37.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	2.241.723.330,00	2.092.380.854,00	149.342.476,00	7,14

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
38.	UPTD Puskesmas Tumpang	2.626.890.252,00	2.452.193.234,00	174.697.018,00	7,12
39.	UPTD Puskesmas Turen	2.889.450.153,41	2.589.539.718,91	299.910.434,50	11,58
40.	UPTD Puskesmas Wagir	1.739.877.676,42	1.630.276.585,44	109.601.090,98	6,72
41.	UPTD Puskesmas Wajak	2.157.919.896,00	1.922.354.721,80	235.565.174,20	12,25
42.	UPTD Puskesmas Wonokerto	1.448.009.911,00	1.070.162.132,51	377.847.778,49	35,31
43.	UPTD Puskesmas Wonosari	1.375.532.266,78	1.190.911.897,02	184.620.369,76	15,50
	Jumlah	172.327.303.345,31	172.111.127.734,03	216.175.611,28	0,13

c. Belanja Hibah

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Belanja Hibah	(Rp)	(Rp)
	327.264.685.763,00	238.335.909.970,52

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp330.958.045.094,00 dan direalisasikan sebesar Rp327.264.685.763,00 atau 98,88% dari anggaran. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, realisasi Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp88.928.775.792,48 atau 37,31%. Adapun Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 46. Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.162.008.000,00	2.000.008.000,00	92,51	1.783.360.300,00
2.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.050.000.000,00	2.049.272.900,00	99,96	1.222.492.495,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	112.115.112.486,00	110.949.578.250,00	98,96	102.469.141.536,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
4.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.191.785.381,00	14.937.535.150,00	98,33	11.663.508.750,00
5.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	34.691.222.315,00	33.780.807.651,00	97,38	36.579.292.482,52
6.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	36.526.984.412,00	35.536.643.000,00	97,29	2.269.050.000,00
7.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	118.772.770.000,00	118.562.678.312,00	99,82	72.900.901.907,00
8.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	9.448.162.500,00	9.448.162.500,00	100,00	9.448.162.500,00
	Jumlah	330.958.045.094,00	327.264.685.763,00	98,88	238.335.909.970,52

Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Malang mengalami kenaikan sebesar Rp88.928.775.792,48 atau 37,31% dari tahun 2022. Adapun rincian kenaikan/penurunan Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 47. Rincian Kenaikan/Penurunan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.000.008.000,00	1.783.360.300,00	216.647.700,00	12,15
2.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.049.272.900,00	1.222.492.495,00	826.780.405,00	67,63
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga	110.949.578.250,00	102.469.141.536,00	8.480.436.714,00	8,28

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenalkan / (Penurunan) (Rp)	%
	yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
4.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.937.535.150,00	11.663.508.750,00	3.274.026.400,00	28,07
5.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	33.780.807.651,00	36.579.292.482,52	(2.798.484.831,52)	(7,65)
6.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	35.536.643.000,00	2.269.050.000,00	33.267.593.000,00	1.466,15
7.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	118.562.678.312,00	72.900.901.907,00	45.661.776.405,00	62,64
8.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	9.448.162.500,00	9.448.162.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	327.264.685.763,00	238.335.909.970,52	88.928.775.792,48	37,31

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	29.501.319.000,00	63.400.191.000,00

Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp30.393.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp29.501.319.000,00 atau 97,07% dari anggaran. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp33.898.872.000,00 atau 53,47%. Adapun rincian belanja bantuan sosial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 48. Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	19.474.300.000,00	18.843.920.000,00	96,76	42.745.190.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu	0,00	0,00	0,00	468.260.000,00
3.	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga	5.619.200.000,00	5.579.200.000,00	99,29	4.035.000.000,00
4.	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Keluarga	1.905.000.000,00	1.874.099.000,00	98,38	3.811.741.000,00
5.	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	3.394.500.000,00	3.204.100.000,00	94,39	12.200.000.000,00
6.	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00
	Jumlah	30.393.000.000,00	29.501.319.000,00	97,07	63.400.191.000,00

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Malang mengalami penurunan sebesar Rp33.898.872.000,00 atau 53,47% dari tahun 2022. Adapun rincian kenaikan/penurunan Belanja Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 49. Rincian Kenaikan/Penurunan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	18.843.920.000,00	42.745.190.000,00	(23.901.270.000,00)	(55,92)
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu	0,00	468.260.000,00	(468.260.000,00)	(100,00)
3.	Belanja	5.579.200.000,00	4.035.000.000,00	1.544.200.000,00	38,27

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga				
4.	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Keluarga	1.874.099.000,00	3.811.741.000,00	(1.937.642.000,00)	(50,83)
5.	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	3.204.100.000,00	12.200.000.000,00	(8.995.900.000,00)	(73,74)
6.	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya)	0,00	140.000.000,00	(140.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	29.501.319.000,00	63.400.191.000,00	(33.898.872.000,00)	(53,47)

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	549.383.173.460,00	757.708.145.130,07

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp578.498.629.921,00 dan direalisasikan sebesar Rp549.383.173.460,00 atau 94,97% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp208.324.971.670,07 atau 27,49%. Adapun rincian Belanja Modal disajikan pada tabel berikut:

Tabel 50. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Modal Tanah	38.638.690.145,00	34.438.052.554,00	89,13	51.734.609.648,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan	172.014.334.731,00	159.628.882.616,00	92,80	197.586.057.830,33

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
	Mesin				
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.098.598.585,00	39.738.698.978,00	80,94	29.271.450.718,53
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	314.608.356.110,00	311.839.906.693,00	99,12	446.762.102.403,21
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.140.238.750,00	1.976.231.659,00	92,34	29.469.854.142,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	1.998.411.600,00	1.761.400.960,00	88,14	2.884.070.388,00
	Jumlah	578.498.629.921,00	549.383.173.460,00	94,97	757.708.145.130,07

Tabel 51. Rincian Kenaikan/Penurunan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	Belanja Modal Tanah	34.438.052.554,00	51.734.609.648,00	(17.296.557.094,00)	(33,43)
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.628.882.616,00	197.586.057.830,33	(37.957.175.214,33)	(19,21)
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.738.698.978,00	29.271.450.718,53	10.467.248.259,47	35,76
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	311.839.906.693,00	446.762.102.403,21	(134.922.195.710,21)	(30,20)
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.976.231.659,00	29.469.854.142,00	(27.493.622.483,00)	(93,29)
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	1.761.400.960,00	2.884.070.388,00	(1.122.669.428,00)	(38,93)
	Jumlah	549.383.173.460,00	757.708.145.130,07	(208.324.971.670,07)	(27,49)

Rincian untuk masing-masing jenis Belanja Modal diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Belanja Modal Tanah	(Rp)	(Rp)
	34.438.052.554,00	51.734.609.648,00

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp38.638.690.145,00 dan direalisasikan sebesar Rp34.438.052.554,00 atau 89,13% dari anggaran. Realisasi tersebut merupakan belanja keseluruhan pengadaan tanah non persil lainnya

oleh Dinas Pertanahan. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp17.296.557.094,00 atau 33,43% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin	159.628.882.616,00	197.586.057.830,33

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp172.014.334.731,00 dan direalisasikan sebesar Rp159.628.882.616,00 atau 92,80% dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp37.957.175.214,33 atau 19,21% dibandingkan realisasi TA 2022. Adapun Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan sebagai berikut:

**Tabel 52. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.959.585.000,00	1.956.755.000,00	99,86	2.931.378.800,00
2.	Belanja Modal Alat Bantu	75.252.000,00	64.803.125,00	86,11	4.154.912.318,00
3.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.980.224.600,00	8.750.651.730,00	97,44	57.259.211.222,00
4.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	66.658.500,00
5.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	113.696.000,00	108.875.125,00	95,76	145.977.369,00
6.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	88.570.000,00	85.595.235,00	96,64	2.003.538,00
7.	Belanja Modal Alat Ukur	1.563.927.300,00	1.382.753.844,00	88,42	427.652.893,00
8.	Belanja Modal Alat Pengolahan	677.832.600,00	656.357.778,00	96,83	54.318.000,00
9.	Belanja Modal Alat Kantor	981.007.300,00	910.507.195,00	92,81	6.655.056.312,00
10.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.451.537.363,00	3.078.415.053,00	89,19	7.093.485.473,00
11.	Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	702.092.179,00	642.764.554,00	91,55	404.951.292,00
12.	Belanja Modal Alat Studio	1.210.588.700,00	1.079.192.950,00	89,15	2.339.984.850,00
13.	Belanja Modal Alat	359.303.000,00	338.591.050,00	94,24	190.213.600,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
	Komunikasi				
14.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	16.710.000,00	16.650.000,00	99,64	542.571.951,00
15.	Belanja Modal Alat Kedokteran	79.085.141.802,00	77.313.425.590,00	97,76	53.536.563.176,00
16.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	23.821.001.284,00	23.474.100.000,00	98,54	5.039.500.000,00
17.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	5.216.709.432,00	5.002.257.272,00	95,89	2.808.694.445,00
18.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	503.500.000,00
19.	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	109.467.150,00
20.	Belanja Modal Komputer Unit	6.493.674.021,00	6.274.238.750,00	96,62	11.000.619.074,00
21.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.465.805.404,00	7.317.089.948,00	86,43	4.220.788.472,00
22.	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	179.000.362,00
23.	Belanja Modal Alat Pelindung	46.631.400,00	43.225.000,00	92,70	169.328.400,00
24.	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
25.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	3.595.323.500,00
26.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	220.305.000,00	214.537.600,00	97,38	643.720.971,00
27.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	59.375.000,00	59.371.875,00	99,99	0,00
28.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.701.000,00	6.549.000,00	97,73	16.796.500,00
29.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11.097.540.960,00	11.094.271.967,00	99,97	21.017.685.685,33
30.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.321.123.386,00	9.757.902.975,00	56,34	12.471.393.977,00
	Jumlah	172.014.334.731,00	159.628.882.616,00	92,80	197.586.057.830,33

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik
2. Menambah fasilitas kendaraan guna penjemputan akseptor untuk tiap-tiap kecamatan
3. Tiap puskesmas melaksanakan akreditasi sehingga memerlukan sarana dan prasana untuk pemenuhan kebutuhan reakreditasi, dan
4. Terdapat penurunan disebabkan adanya efisiensi anggaran belanja dan masih terpeliharanya aset peralatan dan mesin yang berfungsi dengan maksimal

Tabel 53. Rincian Kenaikan/Penurunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.956.755.000,00	2.931.378.800,00	(974.623.800,00)	(33,25)
2.	Belanja Modal Alat Bantu	64.803.125,00	4.154.912.318,00	(4.090.109.193,00)	(98,44)
3.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.750.651.730,00	57.259.211.222,00	(48.508.559.492,00)	(84,72)
4.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	66.658.500,00	(66.658.500,00)	(100,00)
5.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	108.875.125,00	145.977.369,00	(37.102.244,00)	(25,42)
6.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	85.595.235,00	2.003.538,00	83.591.697,00	4.172,20
7.	Belanja Modal Alat Ukur	1.382.753.844,00	427.652.893,00	955.100.951,00	223,34
8.	Belanja Modal Alat Pengolahan	656.357.778,00	54.318.000,00	602.039.778,00	1.108,36
9.	Belanja Modal Alat Kantor	910.507.195,00	6.655.056.312,00	(5.744.549.117,00)	(86,32)
10.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.078.415.053,00	7.093.485.473,00	(4.015.070.420,00)	(56,60)
11.	Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	642.764.554,00	404.951.292,00	237.813.262,00	58,73
12.	Belanja Modal Alat Studio	1.079.192.950,00	2.339.984.850,00	(1.260.791.900,00)	(53,88)
13.	Belanja Modal Alat Komunikasi	338.591.050,00	190.213.600,00	148.377.450,00	78,01
14.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	16.650.000,00	542.571.951,00	(525.921.951,00)	(96,93)
15.	Belanja Modal Alat Kedokteran	77.313.425.590,00	53.536.563.176,00	23.776.862.414,00	44,41
16.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	23.474.100.000,00	5.039.500.000,00	18.434.600.000,00	365,80
17.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	5.002.257.272,00	2.808.694.445,00	2.193.562.827,00	78,10
18.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	503.500.000,00	(503.500.000,00)	(100,00)
19.	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektron ika	0,00	109.467.150,00	(109.467.150,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
20.	Belanja Modal Komputer Unit	6.274.238.750,00	11.000.619.074,00	(4.726.380.324,00)	(42,96)
21.	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.317.089.948,00	4.220.788.472,00	3.096.301.476,00	73,36
22.	Belanja Modal Sumur	0,00	179.000.362,00	(179.000.362,00)	(100,00)
23.	Belanja Modal Alat Pelindung	43.225.000,00	169.328.400,00	(126.103.400,00)	(74,47)
24.	Belanja Modal Alat SAR	0,00	5.300.000,00	(5.300.000,00)	(100,00)
25.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	3.595.323.500,00	(3.595.323.500,00)	(100,00)
26.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	214.537.600,00	643.720.971,00	(429.183.371,00)	(66,67)
27.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	59.371.875,00	0,00	59.371.875,00	100,00
28.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.549.000,00	16.796.500,00	(10.247.500,00)	(61,01)
29.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11.094.271.967,00	21.017.685.685,33	(9.923.413.718,33)	(47,21)
30.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.757.902.975,00	12.471.393.977,00	(2.713.491.002,00)	(21,76)
	Jumlah	159.628.882.616,00	197.586.057.830,33	(37.957.175.214,33)	(19,21)

Pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2023 sempat terjadi kesalahan input belanja pada RSUD Lawang. Hal tersebut dikarenakan belanja yang dimaksud tidak termasuk dalam kapitalisasi asset tetap. Belanja Modal yang diinput awal masuk pada rekening Alat Kedokteran Umum namun seharusnya masuk pada rekening Belanja Pemeliharaan Hepafier sebesar Rp146.700.000,00. Kesalahan jurnal ini telah dikoreksi di LKPD Unaudited.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	39.738.698.978,00	29.271.450.718,53

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp49.098.598.585,00 dan direalisasikan sebesar Rp39.738.698.978,00 atau 80,94% dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp10.467.248.259,47 atau 35,76% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 54. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	33.642.866.585,00	31.836.869.768,00	94,63	27.709.942.783,53
2.	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.375.000.000,00	2.373.659.750,00	99,94	0,00
3.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	00,00	1.167.908.685,00
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	13.080.732.000,00	5.528.169.460,00	42,26	393.599.250,00
	Jumlah	49.098.598.585,00	39.738.698.978,00	80,94	29.271.450.718,53

Adanya penjelasan atas kenaikan dan penurunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang disampaikan dikarenakan sudah terlaksananya kegiatan pengelolaan atas pemeliharaan aset Gedung dan Bangunan dan pengalokasian untuk belanja pengawasan pemeliharaan aset-aset tersebut.

Tabel 55. Rincian Kenaikan/Penurunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	31.836.869.768,00	27.709.942.783,53	4.126.926.984,47	14,89
2.	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.373.659.750,00	0,00	2.373.659.750,00	100,00
3.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	1.167.908.685,00	(1.167.908.685,00)	(100,00)
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.528.169.460,00	393.599.250,00	5.134.570.210,00	1.304,52
	Jumlah	39.738.698.978,00	29.271.450.718,53	10.467.248.259,47	35,76

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	311.839.906.693,00	446.762.102.403,21

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp314.608.356.110,00 dan direalisasikan sebesar Rp311.839.906.693,00 atau 99,12% dari anggaran. Realisasi belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp134.922.195.710,21 atau 30,20% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 56. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Modal Jalan	256.132.058.010,00	255.303.503.490,00	99,68	299.826.926.974,33
2.	Belanja Modal Jembatan	26.853.869.500,00	26.382.731.700,00	98,25	28.309.459.000,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	30.721.148.600,00	29.295.228.542,00	95,36	32.337.666.977,88
4.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	14.616.037.000,00
5.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	644.280.000,00	640.231.000,00	99,37	784.136.000,00
6.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	200.000.000,00	195.711.961,00	97,86	54.815.585.067,00
7.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
8.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	118.704.598,00
9.	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	15.607.325.000,00
10.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	57.000.000,00	22.500.000,00	39,47	46.261.786,00
	Jumlah	314.608.356.110,00	311.839.906.693,00	99,12	446.762.102.403,21

Adanya penjelasan atas kenaikan dan penurunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disampaikan dikarenakan sudah terlaksananya kegiatan pengelolaan atas aset Jalan, Irigasi dan

Jaringan. Sehingga terdapat penurunan karena adanya efisiensi anggaran belanja dan masih terpeliharanya aset peralatan dan mesin yang berfungsi dengan maksimal.

Tabel 57. Rincian Kenaikan/Penurunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	Belanja Modal Jalan	255.303.503.490,00	299.826.926.974,33	(44.523.423.484,33)	(14,85)
2.	Belanja Modal Jembatan	26.382.731.700,00	28.309.459.000,00	(1.926.727.300,00)	(6,81)
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	29.295.228.542,00	32.337.666.977,88	(3.042.438.435,88)	(9,41)
4.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	14.616.037.000,00	(14.616.037.000,00)	(100,00)
5.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	640.231.000,00	784.136.000,00	(143.905.000,00)	(18,35)
6.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	195.711.961,00	54.815.585.067,00	(54.619.873.106,00)	(99,64)
7.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
8.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	118.704.598,00	(118.704.598,00)	(100,00)
9.	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	15.607.325.000,00	(15.607.325.000,00)	(100,00)
10.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	22.500.000,00	46.261.786,00	(23.761.786,00)	(51,36)
	Jumlah	311.839.906.693,00	446.762.102.403,21	(134.922.195.710,21)	(30,20)

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	1.976.231.659,00	29.469.854.142,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.140.238.750,00 dan direalisasikan sebesar

Rp1.976.231.659,00 atau 92,34% dari anggaran. Realisasi belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp27.493.622.483,00 atau 93,29% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 58. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	185.900.000,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	60.342.000,00
3.	Belanja Modal Tanda Penghargaan	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Tanaman	70.333.600,00	70.198.110,00	99,81	0,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	24.844.017.642,00
6.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	2.042.935.150,00
7.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.048.455.150,00	1.891.033.549,00	92,32	2.329.444.350,00
8.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	7.215.000,00
	Jumlah	2.140.238.750,00	1.976.231.659,00	92,34	29.469.854.142,00

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disampaikan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2022 program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 (Dinas Koperasi)
2. BKPSDM pada tahun 2022 mengadakan belanja pengembangan Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja (SiapKerja) dan pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Terpadu (SIAPTEL), sedangkan di tahun 2023 BKPSDM tinggal menjalankan Aplikasinya saja.

Tabel 59. Rincian Kenaikan/Penurunan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	185.900.000,00	(185.900.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	15.000.000,00	60.342.000,00	(45.342.000,00)	(75,14)
3.	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Tanaman	70.198.110,00	0,00	70.198.110,00	100,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	24.844.017.642,00	(24.844.017.642,00)	(100,00)
6.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	2.042.935.150,00	(2.042.935.150,00)	(100,00)
7.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.891.033.549,00	2.329.444.350,00	(438.410.801,00)	(18,82)
8.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	7.215.000,00	(7.215.000,00)	(100,00)
	Jumlah	1.976.231.659,00	29.469.854.142,00	(27.493.622.483,00)	(93,29)

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	1.761.400.960,00	2.884.070.388,00

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.998.411.600,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.761.400.960,00 atau 88,14% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.122.669.428,00 atau 38,93%. Adapun rincian Belanja Modal Aset Lainnya disajikan sebagai berikut:

**Tabel 60. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.998.411.600,00	1.761.400.960,00	88,14	0,00
2.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	2.884.070.388,00
	Jumlah	1.998.411.600,00	1.761.400.960,00	88,14	2.884.070.388,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.379.689.219,00	3.838.813.700,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.209.649.650,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.379.689.219,00 atau 42,99% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 menurun sebesar Rp2.459.124.481,00 atau 64,06% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 61. Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi TA 2023
1.	Penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Malang	495.775.435,00
2.	Penanganan Bencana Alam Banjir dan Tanah Lonsor di Kabupaten Malang	274.264.134,00
3.	Pembayaran kembali sisa dana bantuan keuangan Provinsi ke RKUD Provinsi Jawa Timur	609.649.650,00
	Jumlah	1.379.689.219,00

5.1.3. TRANSFER

Transfer	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	758.542.264.189,00	676.840.564.966,50

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp758.542.264.189,00 atau mencapai 98,09% dari anggaran sebesar Rp773.291.909.269,00. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp81.701.699.222,50 atau 12,07% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian Transfer Pemerintah Kabupaten Malang dimuat pada tabel berikut:

Tabel 62. Rincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak	38.937.769.132,00	32.543.249.560,00	83,58	31.497.987.875,00
2.	Transfer Bagi Hasil Retribusi	12.613.571.637,00	4.258.707.593,00	33,76	5.360.721.198,50
3.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	721.740.568.500,00	721.740.307.036,00	100,00	639.981.855.893,00
	Jumlah	773.291.909.269,00	758.542.264.189,00	98,09	676.840.564.966,50

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.801.957.153,00 mencapai 71,39% dari anggaran sebesar Rp51.551.340.769,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 terjadi penurunan sebesar Rp56.751.920,50 atau 0,15% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022. Belanja Bagi Hasil Kabupaten Malang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, dengan uraian sebagai berikut:

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pajak

Transfer Bagi Hasil Pajak	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	32.543.249.560,00	31.497.987.875,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp38.937.769.132,00 dan direalisasikan sebesar Rp32.543.249.560,00 atau 83,58% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.045.261.685,00 atau 3,32% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

5.1.3.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi

Transfer Bagi Hasil Retribusi	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	4.258.707.593,00	5.360.721.198,50

Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp12.613.571.637,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.258.707.593,00 atau 33,76% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.102.013.605,50 atau 20,56% dibandingkan realisasi Tahun 2022. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah merupakan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

5.1.3.3 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	721.740.307.036,00	639.981.855.893,00

Akun Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan akun yang digunakan untuk mencatat Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp721.740.307.036,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp721.740.568.500,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp81.758.451.143,00 atau 12,78% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022. Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang merupakan Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Adapun rincian Bantuan Keuangan Umum Daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 63. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	259.118.212.036,00	259.118.212.036,00	100,00	230.552.243.493,00
2.	Bantuan Dana Desa	462.622.356.464,00	462.622.095.000,00	100,00	409.429.612.400,00
	Jumlah	721.740.568.500,00	721.740.307.036,00	100,00	639.981.855.893,00

5.1.4 Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit)	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	71.319.101.670,06	(311.554.718.202,05)

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dan belanja, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp71.319.101.670,06 yang merupakan selisih kurang antara realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.375.225.182.406,89 dengan realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp4.303.906.080.736,83.

5.1.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, yang diuraikan sebagai berikut:

5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	216.131.392.318,25	541.921.302.534,30

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp216.131.392.318,00 dan direalisasikan sebesar Rp216.131.392.318,25 atau 100,00%. Pada penerimaan pembiayaan disini terdapat realisasi pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sedangkan untuk Penerimaan Pinjaman Daerah tidak ada realisasi pada tahun 2023.

Adapun realisasi Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

**Tabel 64. Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	216.131.392.318,25	541.921.302.534,30
	Jumlah	216.131.392.318,25	541.921.302.534,30

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	12.000.000.000,00	14.235.192.014,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp12.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp12.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.235.192.014,00 atau 18,63%.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 65. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
1.	Penyertaan Modal Daerah	12.000.000.000,00	13.500.000.000,00
2.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	735.192.014,00
	Jumlah	12.000.000.000,00	14.235.192.014,00

Penjelasan atas Pengeluaran Pembiayaan tersebut sebagai berikut:

- a. Realisasi pengeluaran daerah untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp12.000.000.000,00 merupakan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023. Sesuai surat perjanjian Nomor: PDH-67/MK.7/DTK.03/AMK/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp.10.500.000.000,00 dan SK Bupati Nomor: 188.45/727KEP/35.07.013/2022 tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp1.500.000.000,00.
- b. Realisasi pengeluaran daerah untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo di tahun 2023 tidak ada realisasi di karenakan sudah lunas atas pengembalian kelebihan setor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.

5.1.5.3 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	204.131.392.318,25	527.686.110.520,30

Pembiayaan netto merupakan selisih lebih/ (kurang) antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp204.131.392.318,25 merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp216.131.392.318,25 dikurangi dengan realiasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp12.000.000.000,00.

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	275.450.493.988,31	216.131.392.318,25

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

Realisasi SILPA Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp275.450.493.988,31 dibandingkan Tahun Anggaran 2022, SILPA mengalami kenaikan sebesar Rp59.319.101.670,04 atau 27,45%.

Adapun rincian SILPA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 66. Rincian SILPA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
1.	Kas di Kas Daerah	235.373.738.882,70	179.528.904.728,10
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	373.756.064,00	206.185.650,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.880.000,00	2.948.798.920,92
4.	Kas di BLUD	39.625.224.400,63	33.376.359.217,91
5.	Kas Dana BOS	73.396.525,71	71.143.801,32
6.	Kas Lainnya	2.498.115,27	0,00
	Jumlah	275.450.493.988,31	216.131.392.318,25

Nilai SILPA pada TA 2022 sebesar Rp216.131.392.318,25 tidak sama nilainya dengan jumlah akun Kas dan Setara Kas pada Neraca TA 2022 yang sebesar Rp216.175.355.447,52. Adapun selisihnya sebesar Rp43.963.129,27 merupakan saldo akun Kas Lainnya per 31 Desember 2022. Selisih tersebut disebabkan pelaporan keuangan TA 2022 yang menggunakan aplikasi SIMDA tidak memperhitungkan Kas Lainnya sebagai bagian dari SILPA.

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 67. Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
1.	Sisa Anggaran Lebih Awal	216.131.392.318,25	541.921.302.534,30
2.	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	216.131.392.318,25	541.921.302.534,30
3.	SUB TOTAL (1-2)	0,00	0,00
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	275.450.493.988,31	216.131.392.318,25
5.	SUB TOTAL (3+4)	275.450.493.988,31	216.131.392.318,25
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7.	Lain-Lain	0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (5+6+7)	275.450.493.988,31	216.131.392.318,25

Nilai saldo awal merupakan nilai Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022 yang digunakan sebagai saldo awal di Tahun Anggaran 2023. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan sisa lebih dari kas seluruh entitas Tahun Anggaran 2023.

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1. ASET

Neraca menggambarkan posisi Keuangan suatu entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2023. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 68. Rincian Neraca per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
5.3.1.1.	Aset Lancar	420.584.628.781,76	386.486.958.960,94
5.3.1.2.	Investasi Jangka Panjang	360.373.613.168,05	351.616.176.857,35
5.3.1.3.	Aset Tetap	5.312.343.950.703,29	5.116.413.915.729,60
5.3.1.4.	Dana Cadangan	0,00	86.875.665,95
5.3.1.5.	Aset Lainnya	28.079.631.731,93	33.669.751.047,28
5.3.1.	Jumlah Aset	6.121.381.824.385,03	5.888.273.678.261,12
5.3.2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	46.493.732.037,88	71.582.819.978,04
5.3.2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
5.3.2.	Jumlah Kewajiban	46.493.732.037,88	71.582.819.978,04
5.3.3.	Ekuitas	6.074.888.092.347,15	5.816.690.858.283,08
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		6.121.381.824.385,03	5.888.273.678.261,12

5.3.1.1. Aset Lancar

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lancar	(Rp)	(Rp)
	420.584.628.781,76	386.486.958.960,94

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa Kas atau Setara Kas. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari:

Tabel 69. Rincian Aset Lancar per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Kas di Dnerah	235.373.738.882,70	179.528.904.728,10
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.880.000,00	2.948.798.920,92
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	373.756.064,00	206.185.650,00
4.	Kas di BLUD	39.625.224.400,63	33.376.359.217,91
5.	Kas di Bendahara BOS	73.396.525,71	71.143.801,32
6.	Kas Lainnya	2.498.115,27	43.963.129,27

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
7.	Piutang Pajak Daerah	85.465.150.514,00	99.900.328.706,00
8.	Piutang Retribusi Daerah	4.344.304.238,00	2.507.940.048,00
9.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	30.220.429.732,98	19.273.266.291,04
10.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
11.	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	18.280.748.400,00
12.	Penyisihan Piutang	(49.214.003.102,40)	(49.952.443.356,59)
13.	Beban Dibayar Dimuka	40.333.333,33	84.333.333,33
14.	Piutang Lainnya	1.196.990.356,00	1.646.327.360,36
15.	Persediaan	73.080.929.721,54	78.571.102.731,27
	Jumlah Aset Lancar	420.584.628.781,76	386.486.958.960,94

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	235.373.738.882,70	179.528.904.728,10

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Pemerintah Kabupaten Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp235.373.738.882,70 dan Rp179.528.904.728,10 merupakan kas yang disimpan dalam bentuk giro pada Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jatim dengan nomor rekening 0041029711.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.880.000,00	2.948.798.920,92

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran. Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran posisi 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 70. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Sisa UP/GU/TU	0,00	172.667.693,00
2.	Sisa Kas	0,00	0,00
3.	Sisa Belanja	1.880.000,00	2.775.944.009,00
4.	Jasa Giro (Jagir)	0,00	187.218,92
	Jumlah	1.880.000,00	2.948.798.920,92

Sisa Belanja, Jasa Giro dan sisa UP/GU/TU per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 71. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	31 Desember 2023	Sumber	Tanggal Penyetoran Sisa Kas
1.	Kecamatan Bululawang	1.875.000,00	Review Inspektorat	27-03-2024
2.	Kelurahan Dampit	5.000,00	Sisa Belanja	19-01-2024
	Jumlah	1.880.000,00		

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo Kas sebesar Rp1.875.000,00 di Kecamatan Bululawang merupakan temuan inspektorat atas uang tunai pada bendahara pengeluaran atas alokasi pemungutan pajak PPh 21 pada belanja transportasi untuk masyarakat TA 2022 dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 27 Maret 2024
- Saldo Kas sebesar Rp5.000,00 di Kelurahan Dampit merupakan sisa belanja pemeliharaan Komputer yang baru disetorkan ke Kas Daerah pada 19 Januari 2024 dengan STS No.006/STS/35.07.05/2023

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	373.756.064,00	206.185.650,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun. Untuk Tahun Anggaran 2023 penerimaan pendapatan yang masuk ke rekening umum Kas Daerah di *cut off* pada tgl 30 Desember 2022 pukul 15:00 WIB, untuk setoran pendapatan penerimaan yang masuk diatas pukul 15:00 WIB diakui sebagai Kas Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp373.756.064,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 72. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Dinas Kesehatan	8.295.000,00	0,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup	4.984.000,00	4.900.000,00
3.	Dinas Perhubungan	34.882.000,00	5.862.000,00
4.	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.280.000,00	0,00
5.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20.446.000,00	25.951.000,00
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40.133.400,00	18.926.200,00
7.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1.737.000,00	0,00
8.	Badan Pendapatan Daerah	257.998.664,00	150.546.450,00
	Jumlah	373.756.064,00	206.185.650,00

Sedangkan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Kas sebesar Rp8.295.000,00 di Dinas Kesehatan merupakan Pendapatan Retribusi UPT Kalibrasi Alat Kesehatan yang masuk di tanggal 30 Desember 2023. Kas atas Pendapatan Retribusi yang ada di rekening tampungan penerimaan Dinas Kesehatan sudah di debet oleh Bank Jatim pada 2 Januari 2024.
2. Saldo kas sebesar Rp4.984.000,00 di Dinas Lingkungan Hidup merupakan Pendapatan Retribusi sampah yang masuk di tanggal 30 dan 31 Desember 2023. Kas atas Pendapatan Retribusi yang ada di rekening tampungan penerimaan Dinas Lingkungan Hidup sudah di debet oleh Bank Jatim pada 2 Januari 2024.
3. Saldo Kas tunai sebesar Rp34.882.000 di Dinas Perhubungan merupakan penjumlahan dari Pendapatan Retribusi Penyedia Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Rp26.203.000,00, Pendapatan Retribusi Penyedia Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Rp1.762.000,00 dan Retribusi Pelayanan Tempat Parkir Khusus Rp6.917.000,00 yang diterima tanggal 29 sampai 31 Desember 2023 dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah pada 2 Januari 2024.
4. Saldo Kas Tunai sebesar Rp5.280.000,00 di Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan pendapatan atas Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang masuk di tanggal 31

Desember 2023 atas review inspektorat dan sudah disetorkan ke Kas Daerah pada 2 Februari 2024.

5. Saldo Kas tunai sebesar Rp20.446.000,00 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Pendapatan Taman Rekreasi Wendit untuk tanggal 26-31 Desember 2023 yang sudah terdebit ke Kas Daerah pada 2 Januari 2024.
6. Saldo Kas tunai sebesar Rp40.133.400 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan pendapatan retribusi Kios yang diterima tanggal 31 Desember 2023 dan sudah disetorkan ke Kas Daerah pada 2 Januari 2024.
7. Saldo Kas tunai sebesar Rp1.737.000,00 di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan merupakan Pendapatan retribusi pelayanan pasar kios STA Mantung yang diterima tanggal 30 dan 31 Desember 2023 dan sudah disetorkan ke Kas Daerah pada 2 Januari 2024.
8. Saldo Kas sebesar Rp257.998.664,00 di Badan Pendapatan Daerah merupakan Pendapatan Pajak yang diterima tanggal 30 dan 31 Desember tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pajak Rumah makan Rp1.382.450,00 di rekening tampungan sudah didebet oleh Bank Jatim ke Kas Daerah pada Januari 2024
 - b) Pajak Jasa Boga Katering Rp9.145.930,00 di rekening tampungan sudah didebet oleh Bank Jatim ke Kas Daerah pada Januari 2024
 - c) Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan Rp32.909,00 di rekening tampungan sudah didebet oleh Bank Jatim ke Kas Daerah pada Januari 2024
 - d) Pajak Parkir Rp.285.000,00 di rekening tampungan sudah didebet oleh Bank Jatim ke Kas Daerah pada Januari 2024
 - e) Pendapatan Denda Pajak Parkir Rp8.400,00 di rekening tampungan sudah didebet oleh Bank Jatim ke Kas Daerah pada Januari 2024
 - f) Pendapatan Pajak Air Tanah Rp405.927,00 di rekening tampungan sudah didebet oleh bank Jatim ke Kas Daerah pada Januari 2024
 - g) Pajak Pasir dan Kerikil Rp180.000,00 di rekening tampungan sudah didebet oleh bank Jatim ke Kas Daerah pada Januari 2024

- h) Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil Rp7.200,00 di rekening tampungan sudah didebet oleh Bank Jatim ke Kas Daerah pada Januari 2024
- i) Pajak Bumi dan Bangunan Rp112.393.610,00 di rekening tampungan sudah didebet oleh Bank Jatim ke Kas Daerah pada Januari 2024
- j) Pendapatan Denda PBB Rp1.747.782,00 di rekening tampungan sudah didebet oleh Bank Jatim ke Kas Daerah pada Januari 2024
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp39.240.000,00 di rekening tampungan sudah didebet oleh Bank Jatim ke Kas Daerah pada Januari 2024
- l) Pendapatan atas Jasa Bongkar Rp93.169.456,00 di rekening tampungan sudah didebet oleh Bank Jatim ke Kas Daerah pada Januari 2024

d. Kas di BLUD

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di BLUD	(Rp)	(Rp)
	39.625.224.400,63	33.376.359.217,91

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023 merupakan akumulasi dari sisa Kas BLUD dan sisa Kas di anggaran BOK. Adapun Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022, sebagaimana berikut:

a. Kas BLUD

Tabel 73. Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	No. Rekening Bank	Bank
1.	Puskesmas Ampelgading	844.124.454,98	855.316.815,12	0601018888	Bank Jatim
2.	Puskesmas Ardimulyo	260.559.621,52	21.322.030,46	0601018853	Bank Jatim
3.	Puskesmas Bantur	88.589.187,40	15.982.467,59	0601019043	Bank Jatim
4.	Puskesmas Bululawang	467.073.565,55	591.478.367,94	0601018942	Bank Jatim

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	No. Rekening Bank	Bank
5.	Puskesmas Dampit	531.720.788,68	540.092.134,79	0601004453	Bank Jatim
6.	Puskesmas Dau	262.789.128,24	122.586.345,83	0601004381	Bank Jatim
7.	Puskesmas Donomulyo	659.197.733,77	134.322.250,38	0601004518	Bank Jatim
8.	Puskesmas Gedangan	121.274.295,93	3.618.516,61	0601019094	Bank Jatim
9.	Puskesmas Gondanglegi	188.011.968,92	70.772.848,14	0601004470	Bank Jatim
10.	Puskesmas Jabung	454.663.575,60	245.625.739,51	0601019124	Bank Jatim
11.	Puskesmas Kalipare	104.842.188,52	32.659.064,30	0601018870	Bank Jatim
12.	Puskesmas Karangploso	446.787.267,47	-370.744.157,03	0601019116	Bank Jatim
13.	Puskesmas Kasembon	2.186.401,04	3.085.825,98	0601004496	Bank Jatim
14.	Puskesmas Kepanjen	20.877.642,01	10.074.162,63	0601004372	Bank Jatim
15.	Puskesmas Ketawang	107.695.903,23	2.049.333,65	0601019078	Bank Jatim
16.	Puskesmas Kromengan	155.714.522,32	2.344.083,00	0601018900	Bank Jatim
17.	Puskesmas Lawang	460.403.084,60	3.378.672,96	0601018918	Bank Jatim
18.	Puskesmas Ngajum	59.335.313,69	26.979.509,72	0601018896	Bank Jatim
19.	Puskesmas Ngantang	27.199.260,24	11.634.439,36	0601019035	Bank Jatim
20.	Puskesmas Pagak	226.921.297,53	9.558.881,65	0601018926	Bank Jatim
21.	Puskesmas Pagelaran	173.906.625,06	12.971.983,09	0601019086	Bank Jatim
22.	Puskesmas Pakis	335.257.584,11	271.619.060,91	0601019108	Bank Jatim
23.	Puskesmas Pakisaji	6.930.000,55	14.688.555,17	0601018985	Bank Jatim
24.	Puskesmas Pamotan	281.584.734,75	53.168.124,14	0601018934	Bank Jatim
25.	Puskesmas Poncokusumo	820.973.512,17	526.266.813,10	0601018951	Bank Jatim
26.	Puskesmas Pujon	300.576.866,75	132.678.189,55	0601018861	Bank Jatim
27.	Puskesmas Sumbermanjing Kulon	228.549.357,79	101.263.155,20	0601018993	Bank Jatim
28.	Puskesmas Sumbermanjing Wetan	387.134.503,82	279.600.839,12	0601018845	Bank Jatim
29.	Puskesmas Singosari	126.087.081,93	297.134.985,00	0601004461	Bank Jatim

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	No. Rekening Bank	Bank
30.	Puskesmas Sitiarjo	285.930.835,43	159.166.983,67	0601019027	Bank Jatim
31.	Puskesmas Sumberpucung	157.288.821,26	17.733.461,34	0601004429	Bank Jatim
32.	Puskesmas Tajinan	26.869.704,47	28.513.052,57	0601018969	Bank Jatim
33.	Puskesmas Tirtoyudho	230.456.488,61	39.223.000,50	0601018977	Bank Jatim
34.	Puskesmas Tumpang	56.793.810,29	68.031.268,12	0601004437	Bank Jatim
35.	Puskesmas Turen	384.330.026,65	41.103.910,95	0601004402	Bank Jatim
36.	Puskesmas Wagir	530.924.393,78	58.388.230,68	0601019060	Bank Jatim
37.	Puskesmas Wajak	169.155.543,37	5.185.858,60	0601019019	Bank Jatim
38.	Puskesmas Wonokerto	626.299.634,07	190.508.682,03	0601019051	Bank Jatim
39.	Puskesmas Wonosari	51.500.495,99	765.000,88	0601019001	Bank Jatim
40.	RSUD Kanjuruhan	2.894.907.627,05	3.246.653.698,50	0601000164	Bank Jatim
41.	RSUD Lawang	22.851.222.561,59	24.548.126.771,62	0591001159	Bank Jatim
42.	Dana Bergulir UMKM	126.606.019,24	94.284.527,28	0051010015213 05	Bank BRI
43.	Lumbung Desa Modern	36.867.537,66	115.657.419,24	0602148505	Bank Jatim
	Jumlah	36.580.120.967,63	33.376.359.217,91		

b. Kas BOK

**Tabel 74. Rincian Kas Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	No. Rekening Bank	Bank
1.	Puskesmas Ampelgading	68.957.915,00	0,00	1590053686	BNI
2.	Puskesmas Ardimulyo	94.679.762,00	0,00	1590053697	BNI
3.	Puskesmas Bantur	46.125.230,00	0,00	1590053472	BNI
4.	Puskesmas Bululawang	66.890.451,00	0,00	1590106028	BNI
5.	Puskesmas Dampit	74.258.577,00	0,00	1590053563	BNI
6.	Puskesmas Dau	67.006.438,00	0,00	1590106017	BNI
7.	Puskesmas Donomulyo	52.650.781,00	0,00	1590053619	BNI
8.	Puskesmas Gedangan	80.384.085,00	0,00	1590053552	BNI

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	No. Rekening Bank	Bank
9.	Puskesmas Gondanglegi	61.955.106,00	0,00	1590053574	BNI
10.	Puskesmas Jabung	64.928.405,00	0,00	1590106051	BNI
11.	Puskesmas Kalipare	61.574.432,00	0,00	1590053620	BNI
12.	Puskesmas Karangploso	54.276.077,00	0,00	1590106006	BNI
13.	Puskesmas Kasembon	71.440.021,00	0,00	1590053507	BNI
14.	Puskesmas Kepanjen	80.615.210,00	0,00	1590053766	BNI
15.	Puskesmas Ketawang	52.688.791,00	0,00	1590053530	BNI
16.	Puskesmas Kromengan	43.662.786,00	0,00	1590053541	BNI
17.	Puskesmas Lawang	487.249.612,00	0,00	1590053744	BNI
18.	Puskesmas Ngajum	45.594.074,00	0,00	1590053608	BNI
19.	Puskesmas Ngantang	51.080.219,00	0,00	1590053653	BNI
20.	Puskesmas Pagak	39.658.254,00	0,00	1590053461	BNI
21.	Puskesmas Pagelaran	152.849.823,00	0,00	1590053664	BNI
22.	Puskesmas Pakis	62.065.932,00	0,00	1590106073	BNI
23.	Puskesmas Pakisaji	129.182.486,00	0,00	1590053722	BNI
24.	Puskesmas Pamotan	127.672.077,00	0,00	1590053518	BNI
25.	Puskesmas Poncokusumo	91.281.406,00	0,00	1590106062	BNI
26.	Puskesmas Pujon	67.008.362,00	0,00	1590053631	BNI
27.	Puskesmas Sumbermanjing Kulon	39.670.433,00	0,00	1590053450	BNI
28.	Puskesmas Sumbermanjing Wetan	108.992.046,00	0,00	1590053596	BNI
29.	Puskesmas Singosari	51.551.183,00	0,00	1590053711	BNI
30.	Puskesmas Sitarjo	43.424.750,00	0,00	1590053494	BNI
31.	Puskesmas Sumberpucung	40.498.068,00	0,00	1590053529	BNI
32.	Puskesmas Tajinan	61.020.417,00	0,00	1590053642	BNI
33.	Puskesmas Tirtoyudho	50.504.460,00	0,00	1590053700	BNI
34.	Puskesmas Tumpang	57.836.610,00	0,00	1590106039	BNI
35.	Puskesmas Turen	63.229.932,00	0,00	1590053755	BNI
36.	Puskesmas Wagir	50.554.667,00	0,00	1590106040	BNI
37.	Puskesmas Wajak	88.034.982,00	0,00	1590053733	BNI

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	No. Rekening Bank	Bank
38.	Puskesmas Wonokerto	41.565.528,00	0,00	1590053483	BNI
39.	Puskesmas Wonosari	52.484.045,00	0,00	1590053585	BNI
	Jumlah	3.045.103.433,00	0,00		

Adapun Perhitungan Rinci Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 75. Rincian Perhitungan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Per 31 Desember Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	1 Januari 2023	Koreksi Kas Tunai	Pendapatan	Belanja	31 Desember 2023
1.	Puskesmas Ampelgading	855.316.815,12	0,00	3.963.575.575,86	3.974.767.936,00	844.124.454,98
2.	Puskesmas Ardimulyo	21.322.030,46	201.000,00	2.061.882.831,34	1.822.645.240,28	260.559.621,52
3.	Puskesmas Bantur	15.982.467,59	1.560.000,00	2.679.721.785,42	2.607.115.065,61	88.589.187,40
4.	Puskesmas Buhulawang	591.478.367,94	918.000,00	3.914.249.760,61	4.038.654.563,00	467.073.565,55
5.	Puskesmas Dampit	540.092.134,79	6.924.000,00	3.964.012.357,89	3.972.383.704,00	531.720.788,68
6.	Puskesmas Dau	122.586.345,83	1.438.000,00	2.378.167.073,47	2.237.964.291,06	262.789.128,24
7.	Puskesmas Donomulyo	134.322.250,38	1.006.000,00	5.280.432.219,27	4.755.556.735,88	659.197.733,77
8.	Puskesmas Gedangan	3.618.516,61	420.000,00	3.498.314.237,32	3.380.658.458,00	121.274.295,93
9.	Puskesmas Gondanglegi	70.772.848,14	1.880.000,00	3.415.958.469,78	3.298.719.349,00	188.011.968,92
10.	Puskesmas Jabung	245.625.739,51	660.000,00	3.560.694.165,09	3.351.656.329,00	454.663.575,60
11.	Puskesmas Kalipare	32.659.064,30	3.580.000,00	3.780.072.061,37	3.707.888.937,15	104.842.188,52
12.	Puskesmas Karangploso	370.744.157,03	589.000,00	3.092.506.065,44	3.016.462.955,00	446.787.267,47
13.	Puskesmas Kasembon	3.085.825,98	0,00	1.715.533.371,06	1.716.432.796,00	2.186.401,04
14.	Puskesmas Keparjens	10.074.162,63	262.000,00	4.074.073.367,38	4.063.269.888,00	20.877.642,01
15.	Puskesmas Ketawang	2.049.333,65	638.000,00	2.136.533.675,23	2.030.887.105,65	107.695.903,23
16.	Puskesmas Kromengan	2.344.083,00	0,00	1.953.795.176,32	1.800.424.737,00	155.714.522,32
17.	Puskesmas Lawang	3.378.672,96	1.045.000,00	3.540.440.943,30	3.083.416.531,66	460.403.084,60
18.	Puskesmas Ngajum	26.979.509,72	0,00	2.742.464.626,97	2.710.108.823,00	59.335.313,69
19.	Puskesmas Ngantang	11.634.439,36	0,00	2.994.607.132,88	2.979.042.312,00	27.199.260,24
20.	Puskesmas Pagak	9.558.881,65	0,00	2.008.673.384,08	1.791.310.968,20	226.921.297,53
21.	Puskesmas Pabelaran	12.971.983,09	10.910.000,00	3.455.013.343,91	3.294.078.701,94	173.906.625,06

No	Nama SKPD	1 Januari 2023	Koreksi Kas Tunai	Pendapatan	Belanja	31 Desember 2023
22.	Puskesmas Pakis	271.619.060,91	0,00	5.969.419.284,20	5.905.780.761,00	335.257.584,11
23.	Puskesmas Pakisaji	14.688.555,17	0,00	4.038.918.461,55	4.046.677.016,17	6.930.000,55
24.	Puskesmas Pamotan	53.168.124,14	680.000,00	3.713.031.051,61	3.484.614.441,00	281.584.734,75
25.	Puskesmas Poncokusumo	526.266.813,10	0,00	5.665.410.107,23	5.370.703.408,16	820.973.512,17
26.	Puskesmas Pujon	132.678.189,55	0,00	3.599.439.034,71	3.431.540.357,51	300.576.866,75
27.	Puskesmas Sumbermanjing Kulon	101.263.155,20	0,00	1.918.521.977,59	1.791.235.775,00	228.549.357,79
28.	Puskesmas Sumbermanjing Wetan	279.600.839,12	1.005.000,00	3.321.589.938,70	3.214.056.274,00	387.134.503,82
29.	Puskesmas Singosari	297.134.985,00	365.000,00	3.675.037.889,53	3.846.085.792,60	126.087.081,93
30.	Puskesmas Sitiarjo	159.166.983,67	1.794.000,00	2.317.901.205,76	2.191.137.354,00	285.930.835,43
31.	Puskesmas Sumberpucung	17.733.461,34	719.000,00	3.348.689.214,92	3.209.133.855,00	157.288.821,26
32.	Puskesmas Tajinan	28.513.052,57	0,00	2.564.741.086,14	2.566.384.434,24	26.869.704,47
33.	Puskesmas Tirtoyudho	39.223.000,50	3.645.000,00	3.997.179.289,11	3.805.945.801,00	230.456.488,61
34.	Puskesmas Tumpang	68.031.268,12	0,00	5.104.041.983,17	5.115.279.441,00	56.793.810,29
35.	Puskesmas Turen	41.103.910,95	6.799.000,00	5.999.474.801,99	5.656.248.686,29	384.330.026,65
36.	Puskesmas Wagir	58.388.230,68	1.030.000,00	4.015.019.313,52	3.542.483.150,42	530.924.393,78
37.	Puskesmas Wajak	5.185.858,60	0,00	4.341.118.389,77	4.177.148.705,00	169.155.543,37
38.	Puskesmas Wonorejo	190.508.682,03	2.555.000,00	2.944.660.907,04	2.508.869.955,00	626.299.634,07
39.	Puskesmas Wonosari	765.000,88	0,00	2.101.267.761,11	2.050.532.266,00	51.500.495,99
40.	RSUD Kanjaruhan	3.246.653.698,50	243.770.121,90	115.399.793.063,05	115.751.539.134,50	2.894.907.627,05
41.	RSUD Lawang	24.548.126.771,62	34.503.710,73	48.134.799.636,87	49.831.703.846,90	22.851.222.561,59
42.	Dana Bergulir UMKM	94.284.527,28	80.223,80	381.057.594,38	438.474.584,00	36.867.537,66
43.	Lumbung Desa Modern	115.657.419,24	0,00	122.438.000,00	111.489.400,00	126.606.019,24
	Jumlah	33.376.359.217,91	328.977.056,43	298.884.271.615,94	295.680.509.866,22	36.580.120.967,63

Koreksi atas Kas BLUD pada Puskesmas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo kas tunai pada Puskesmas Ardimulyo senilai Rp201.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.

2. Saldo kas tunai pada Puskesmas Bantur senilai Rp1.560.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
3. Saldo kas tunai pada Puskesmas Bululawang senilai Rp918.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
4. Saldo kas tunai pada Puskesmas Dampit senilai Rp6.924.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
5. Saldo kas tunai pada Puskesmas Dau senilai Rp1.438.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
6. Saldo kas tunai pada Puskesmas Donomulyo senilai Rp1.006.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
7. Saldo kas tunai pada Puskesmas Gedangan senilai Rp420.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
8. Saldo kas tunai pada Puskesmas Gondanglegi senilai Rp1.880.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
9. Saldo kas tunai pada Puskesmas Jabung senilai Rp660.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
10. Saldo kas tunai pada Puskesmas Kalipare senilai Rp3.580.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
11. Saldo kas tunai pada Puskesmas Karangploso senilai Rp589.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.

12. Saldo kas tunai pada Puskesmas Kepanjen senilai Rp262.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
13. Saldo kas tunai pada Puskesmas Ketawang senilai Rp638.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
14. Saldo kas tunai pada Puskesmas Lawang senilai Rp1.045.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
15. Saldo kas tunai pada Puskesmas Pagelaran senilai Rp10.910.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
16. Saldo kas tunai pada Puskesmas Pamotan senilai Rp680.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
17. Saldo kas tunai pada Puskesmas Sumbermanjingwetan senilai Rp1.005.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
18. Saldo kas tunai pada Puskesmas Singosari senilai Rp365.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
19. Saldo kas tunai pada Puskesmas Sitiarjo senilai Rp1.794.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
20. Saldo kas tunai pada Puskesmas Sumberpucung senilai Rp719.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.

21. Saldo kas tunai pada Puskesmas Tirtoyudo senilai Rp3.645.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
22. Saldo kas tunai pada Puskesmas Turen senilai Rp6.799.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
23. Saldo kas tunai pada Puskesmas Wagir senilai Rp1.030.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
24. Saldo kas tunai pada Puskesmas Wonokerto senilai Rp2.555.000,00 adalah Pendapatan BLUD tanggal 31 Desember 2023 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada bulan Januari 2024.
25. Saldo kas tunai pada RSUD Kanjuruhan senilai Rp243.770.121,90 adalah pendapatan BLUD tanggal 30 dan 31 Desember 2023
26. Saldo kas tunai pada RSUD Lawang senilai Rp34.503.710,73 adalah pendapatan BLUD tanggal 30 dan 31 Desember 2023
27. Saldo kas tunai pada Dana Bergulir UMKM senilai Rp80.223,80 adalah Kas tunai di BLUD Pengelola Dana Bergulir

c. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BOS	(Rp)	(Rp)
	73.396.525,71	71.143.801,32

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas dari Saldo Awal Tahun Anggaran 2022 ditambah Pendapatan BOSNAS dikurangi Pengeluaran BOSNAS, dan Dana BOS terdiri dari Dana BOS Reguler dan BOS Afirmasi Kinerja. Adapun rincian Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut.

**Tabel 76. Rincian Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember
Tahun 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Jenjang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	BOS Reguler	72.943.787,71	70.691.063,32
2.	BOS Afirmasi Kinerja	452.738,00	452.738,00
	Jumlah	73.396.525,71	71.143.801,32

Berikut mutasi rekapitulasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Malang sebagai berikut:

**Tabel 77. Rincian Perhitungan Kas di Bendahara BOS
Per 31 Desember Tahun 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2023	71.143.801,32
	Koreksi saldo awal atas pengembalian Dana BOS REG karena Lembaga sudah tidak beroperasi	-
2.	Ditambah:	
	a. Penerimaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2023	196.427.341.421,00
	b. Penerimaan Dana BOS Afirmasi Kinerja Tahun Anggaran 2023	9.830.000.000,00
3.	Dikurangi:	
	a. Penggunaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2023	(196.425.088.696,61)
	b. Penggunaan Dana BOS Afirmasi Kinerja Tahun Anggaran 2023	(9.830.000.000,00)
4.	Saldo Akhir 31 Desember 2023 (1+2-3)	73.396.525,71

Penjelasan informasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS rinci disajikan dalam **Lampiran 28**

f. Kas Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas Lainnya	(Rp)	(Rp)
	<u>2.498.115,27</u>	<u>43.963.129,27</u>

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.498.115,27. Adapun Rincian Kas Lainnya per Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 78. Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember Tahun 2023
dan 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Dinas Pendidikan	0,00	33.337.377,27
2.	RSUD Lawang	2.498.115,27	0,00
3.	Kecamatan Pujon	0,00	0,00
4.	Kecamatan Ngantang	0,00	0,00

No.	Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
5.	Kecamatan Kasembon	0,00	0,00
6.	Kecamatan Singosari	0,00	9.721.325,00
7.	Kecamatan Poncokusumo	0,00	904.427,00
8.	Kecamatan Bululawang	0,00	0,00
9.	Kecamatan Pagelaran	0,00	0,00
10.	Kecamatan Gedangan	0,00	0,00
11.	Kecamatan Wajak	0,00	0,00
12.	Kecamatan Ngajum	0,00	0,00
13.	Kecamatan Wagir	0,00	0,00
14.	Kecamatan Sumberpucung	0,00	0,00
15.	Kecamatan Wonosari	0,00	0,00
16.	Kecamatan Pagak	0,00	0,00
17.	Kecamatan Donomulyo	0,00	0,00
18.	Kelurahan Pendarukan	0,00	0,00
19.	Kelurahan Cempokomulyo	0,00	0,00
20.	Kelurahan Dampit	0,00	0,00
	Jumlah	2.498.115,27	43.963.129,27

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo kas tunai pada RSUD Lawang senilai Rp2.498.115,27 adalah merupakan pajak atas PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa lahan ATM Bank Jatim yang belum dibayarkan di tahun 2023 dan sudah dibayarkan di tanggal 5 Maret 2024.

g. Piutang Pajak

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Piutang Pajak	85.465.150.514,00	99.900.328.706,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan atau Dokumen yang disejajarkan yang telah diterbitkan untuk Pajak Daerah selain PBB pada tahun 2023 dengan memperhitungkan saldo awal Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan realisasi pembayaran Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) menggunakan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang digunakan untuk memberitahukan besaran PBB yang terutang kepada wajib pajak, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum dilunasi oleh wajib pajak daerah, sehingga masih menjadi hak yang harus ditagihkan kepada wajib pajak. Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu:

Tabel 79. Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek Piutang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Piutang Pajak Hotel dan Penginapan	360.000,00	360.000,00
2.	Piutang Pajak Rumah Makan	272.158.596,00	19.678.359,00
3.	Piutang Pajak Pameran	3.587.426.273,00	4.449.966.825,00
4.	Piutang Pajak Reklame	339.708.177,00	467.392.335,00
5.	Piutang Pajak Mineral bukan logam dan batuan	16.960.200,00	16.960.200,00
6.	Piutang Pajak Parkir	58.521.300,00	35.097.000,00
7.	Piutang Pajak Air Tanah	50.050.365,00	55.674.135,00
8.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	8.154.675.089,00
9.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	81.139.965.603,00	86.700.524.763,00
	Jumlah Piutang Pajak	85.465.150.514,00	99.900.328.706,00

Penjelasan informasi Piutang Pajak rinci disajikan dalam **Lampiran VIII**.

Mutasi Piutang Pajak Daerah tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 80. Rincian Perhitungan Piutang Pajak Daerah
Per 31 Desember 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo awal per 1 Januari 2023	99.900.328.706,00
2.	Ditambah:	
	a. Piutang Pajak Hotel dan Penginapan	7.309.950.785,00
	b. Piutang Pajak Rumah Makan	18.656.380.102,00
	c. Piutang Pajak Hiburan	9.828.920.146,00
	d. Piutang Pajak Reklame	4.802.115.445,00
	e. Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.377.869.022,00
	f. Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN	91.578.317.091,00
	g. Piutang Pajak Mineral bukan Logam	983.493.078,00
	h. Piutang Pajak Parkir	2.083.429.388,00
	i. Piutang Pajak Air Tanah	2.531.748.412,00
	j. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	129.906.604.595,00
	k. Koreksi kesalahan system pada Pajak Reklame	19.370,00
	l. Terdapat Reklasifikasi dari Piutang Penerimaan Komisi, Potongan.	7.422.200,00
3.	Dikurangi:	
	a. Realisasi Pajak Hotel dan Penginapan	(7.309.950.785,00)
	b. Realisasi Pajak Rumah Makan	(18.355.907.991,00)
	c. Realisasi Pajak Hiburan	(10.689.929.767,00)
	d. Realisasi Pajak Reklame	(4.887.412.488,00)
	e. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN	(1.377.869.022,00)
	f. Realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN	(99.732.992.180,00)
	g. Realisasi Pajak Mineral bukan Logam	(983.493.078,00)
	h. Realisasi Pajak Parkir	(2.060.005.088,00)
	i. Realisasi Pajak Air Tanah	(2.537.372.182,00)
	j. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	(123.730.945.220,00)
	k. Koreksi pemberian keringanan Pokok Pajak Rumah	(55.414.074,00)
	l. Koreksi pemberian keringanan Pokok Pajak Hiburan	(1.530.931,00)
	m. Koreksi pemberian keringanan Pokok Pajak Reklame	(42.406.485,00)
	n. Koreksi piutang terdiri atas SK Penghapusan Piutang, fasum, pembatalan, pengurangan dan keberatan permohonan WP th 2023	(11.736.218.535,00)
4.	Saldo akhir 31 Desember 2023 (1+2-3)	85.465.150.514,00

Khusus untuk Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 81. Rincian Perhitungan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo awal per 1 Januari 2023	86.700.524.763,00
2.	Ditambah:	
	a. SKP/SPT PBB yang diterbitkan Tahun 2023	158.455.121.029,00
	b. Lain-Lain	19.226.671,00
3.	Dikurangi:	
	a. Pembayaran Pokok atas Piutang PBB-P2 2003 s.d 2022	(10.326.797.173,00)

b. Pembayaran Pokok atas SPPT PBB-P2 Tahun 2023	(113.373.199.359,00)
c. Pengurangan atas kompensasi lebih bayar Tahun 2022	(569.883.769,00)
d. Pengurangan Ketetapan (Kebijakan KDH)	(27.978.632.665,00)
e. Kelebihan Bayar	(30.948.688,00)
1) Fasum	(274.671.221,00)
2) Pembatalan	(413.193.089,00)
3) SK Penghapusan Piutang	(4.944.622.585,00)
4) Pengurangan dan keberatan atas permohonan	(4.914.046.897,00)
5) Hasil Verifikasi	(907.250.684,00)
6) Sismiop	(301.660.730,00)
4. Saldo akhir 31 Desember 2023 (1+2-3)	81.139.965.603,00

Adapun Rincian atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per Tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 82. Rincian Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak s.d 2010	11.914.795.094,00
2.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011	388.735.224
3.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012	832.203.183
4.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013	3.134.084.802
5.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014	2.851.604.516
6.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015	3.123.290.178
7.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016	3.989.139.291
8.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017	5.097.398.612
9.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018	6.293.037.523
10.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019	7.864.528.200
11.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020	10.623.420.304
12.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021	9.939.464.853
13.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022	3.787.362.739
14.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023	11.300.901.084,00
	Jumlah	81.139.965.603,00

h. Piutang Retribusi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Retribusi	(Rp)	(Rp)
	4.344.304.238,00	2.507.940.048,00

Piutang Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.344.304.238,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.507.940.048,00. Adapun rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 83. Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember
Tahun 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Dinas Kesehatan	19.150.000,00	0,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup	664.756.240,00	322.202.690,00
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.019.300,00	58.072.500,00
4.	Dinas Perhubungan	226.725.975,00	102.916.500,00
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	75.700.000,00	156.950.000,00
6.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	218.000,00	218.000,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informasi	626.642.400,00	112.297.000,00
8.	Dinas Perikanan	2.626.192.323,00	1.733.842.553,00
9.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4.900.000,00	21.440.805,00
	Jumlah	4.344.304.238,00	2.507.940.048,00

Penjelasan tabel rincian piutang retribusi:

a. Rincian Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.507.940.048,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp322.202.690,00.
2. Piutang Retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat dua Piutang Retribusi antara lain Sewa Tempat Pemakaman/ Pengabuan Mayat sebesar Rp4.715.000,00 dan Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp53.357.500,00
3. Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan antara lain Piutang Retribusi Tepi Jalan Umum sebesar Rp10.977.000,00, Piutang Retribusi Terminal sebesar Rp33.509.500,00 dan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp58.430.000,00.
4. Piutang Retribusi Pelataran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp156.950.000,00
5. Piutang Retribusi Sewa Kios STA Mantung pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp218.000,00.
6. Piutang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp112.297.000,00.

7. Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan sebesar Rp1.733.842.553,00.
 8. Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp21.440.805,00.
- b. Rincian Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.344.304.238,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis pada Dinas Kesehatan sebesar Rp19.150.000,00.
 2. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp664.756.240,00.
 3. Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp100.019.300,00.
 4. Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan antara lain Piutang Retribusi Tepi Jalan Umum sebesar Rp102.971.000,00, Piutang Retribusi Terminal sebesar Rp11.174.975,00 dan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp112.580.000,00.
 5. Piutang Retribusi Pelataran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp75.700.000,00.
 6. Piutang Retribusi Sewa Kios STA Mantung pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp218.000,00.
 7. Piutang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp626.642.400,00.
 8. Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan sebesar Rp2.626.192.323,00.
 9. Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp4.900.000,00.

**Tabel 84. Rincian Piutang Retribusi per Jenis Per 31
Desember Tahun 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Nama SKPD BLUD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis	19.150.000,00	0,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	664.756.240,00	322.202.690,00
3.	Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman / Pengabuan Mayat	0,00	4.715.000,00
4.	Piutang Retribusi Tepi Jalan Umum	102.971.000,00	10.977.000,00
5.	Piutang Retribusi Pelataran	75.700.000,00	156.950.000,00
6.	Piutang Retribusi Sewa Kios	218.000,00	218.000,00
7.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	626.642.400,00	112.297.000,00
8.	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	2.626.192.323,00	1.733.842.553,00
9.	Piutang Retribusi Terminal	11.174.975,00	33.509.500,00
10.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	112.580.000,00	58.430.000,00
11.	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	4.900.000,00	21.440.805,00
12.	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.019.300,00	53.357.500,00
	Jumlah	4.344.304.238,00	2.507.940.048,00

Berikut mutasi Piutang Retribusi Tahun 2023 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 85. Rincian Perhitungan Piutang Retribusi Per 31
Desember 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo awal per 1 Januari 2023	2.507.940.048,00
2.	Penambahan:	
	a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan	1.901.704.000,00
	b. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	5.405.383.664,00
	c. Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman/ Pengabuan Mayat.	481.285.130,00
	d. Piutang Retribusi IMB	2.936.730.600,00
	e. Piutang Retribusi Tepi Jalan Umum	2.901.103.000,00
	f. Piutang Retribusi Terminal	699.001.950,00
	g. Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.279.180.000,00
	h. Piutang Retribusi Pelataran	2.229.387.900,00
	i. Piutang Retribusi Sewa Kios STA Mantung	379.247.500,00
	j. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.917.199.000,00
	k. Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	4.432.893.943,00
	l. Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.125.637.057,00
	m. Koreksi penetapan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	433.718,00
	n. Koreksi koreksi saldo awal 2021 Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	43.526.120,00
3.	Pengurangan:	
	a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan	(1.882.554.000,00)
	b. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	(5.063.263.832,00)
	c. Pendapatan Retribusi Sewa Tempat Pemakaman/ Pengabuan Mayat.	(486.000.130,00)

No.	Uraian	Jumlah
	d. Pendapatan Retribusi IMB	(2.890.068.800,00)
	e. Pendapatan Retribusi Tepi Jalan Umum	(2.809.109.000,00)
	f. Pendapatan Retribusi Terminal	(721.336.475,00)
	g. Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir	(1.225.030.000,00)
	h. Piutang retribusi Pelataran	(2.310.637.900,00)
	i. Pendapatan Retribusi Sewa Kios STA Mantung	(379.247.500,00)
	j. Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(1.363.681.720,00)
	k. Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	(3.540.544.173,00)
	l. Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	(1.142.177.862,00)
	m. Koreksi penetapan dan pembongkaran Menara	(82.698.000,00)
4.	Saldo Akhir 31 Desember 2023 (1+2-3)	4.344.304.238,00

Daftar setoran Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 ke Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 86. Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Nama SKPD BLUD	Piutang per 31 Desember 2022	Jumlah yang disetorkan	Sisa Piutang 2022 Per 31 Desember 2023
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	322.202.690,00	322.202.690,00	0,00
2.	Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman/ Pengabuan Mayat	4.715.000,00	4.715.000,00	0,00
3.	Piutang Retribusi Tepi Jalan Umum	10.977.000,00	10.977.000,00	0,00
4.	Piutang Retribusi Pelataran	156.950.000,00	81.250.000,00	75.700.000,00
5.	Piutang Retribusi Sewa Kios	218.000,00	218.000,00	0,00
6.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	112.297.000,00	94.151.600,00	18.145.400,00
7.	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	1.733.842.553,00	0,00	1.733.842.553,00
8.	Piutang Retribusi Terminal	33.509.500,00	33.509.500,00	0,00
9.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	58.430.000,00	58.430.000,00	0,00
10.	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	21.440.805,00	16.540.805,00	4.900.000,00
11.	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	53.357.500,00	45.345.000,00	8.012.500,00
	Jumlah	2.507.940.048,00	667.339.595,00	1.840.600.453,00

i. Piutang Lain - lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	30.220.429.732,98	19.273.266.291,04

Adapun Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

**Tabel 87. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek Piutang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.136.453.200,00	0,00
2.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	319.705.427,00	321.232.427,00
3.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.345.608.851,48	828.714.793,74
4.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	16.532.228,50	6.082.568,50
5.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	11.894.274,00	64.057.591,80
6.	Piutang Pendapatan BLUD	27.390.235.752,00	18.053.178.910,00
	Jumlah Piutang Pajak	30.220.429.732,98	273.266.291,04

1. Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.136.453.200,00	0,00

Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.136.453.200,00 merupakan Piutang hasil kerja antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Malang tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dari Mata Air Sumber Wendit dan Sumber Pitu di Wilayah Kabupaten Malang.

**2. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian
Keuangan Daerah**

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	319.705.427,00	321.232.427,00

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp319.705.427,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 88. Rincian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Tahun Anggaran 2023**

(dalam Rupiah)

No	Nama Pegawai	Keterangan Jenis Kasus	Pembebanan TMT	Nilai Pembebanan	Total Sisa Angsuran 2023
1.	Ir. Hendro Samsanto, MM Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan	Pelelangan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung KIGUMAS	2004	223.568.381,00	170.000.000,00
2.	Dwijo Siswoyo Penasihat ASN Dinas Pendidikan Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Nomor: K.951/6218/35.07.101/20 21 Tanggal 30 Desember 2021	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja TA 2008 2009 2010 tidak didukung dengan SK Bupati Malang	2010	253.640.000,00	72.421.250,00
3.	Edy Tri Poetranto UPPD Pasar Karangploso	Pungutan Liar Retribusi Bedak Pasar dan Retribusi Sampah	2005	64.461.000,00	57.961.000,00
4.	Tutuk Handayani, SE, MM Kepala UPT Pengujian kendaraan bermotor SKTJM Tgl 28 Oktober 2021	kehilangan 9 unit komputer tablet merk Apple	2021	55.605.177,00	6.948.177,00
5.	Zakky Ghifari Arfanayah Bag. Umum Setda SKTJM Tgl Oktober 2023	Kehilangan kendaraan dinas honda CBR 150	2023	13.500.000,00	12.375.000,00
JUMLAH				610.774.558,00	319.705.427,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi selama Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.527.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 89. Rincian Perhitungan Piutang Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2023	321.232.427,00
2.	Ditambah:	
	a. Penerbitan pembebanan Tahun Anggaran 2023	34.208.333,00
3.	Dikurangi:	
	a. Realisasi sampai dengan Tahun 2023	(35.735.333,00)
4.	Saldo Akhir 31 Desember 2023 (1+2-3)	319.705.427,00

3. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	(Rp)	(Rp)
	1.345.608.851,48	828.714.793,74

Piutang Denda Pajak Daerah selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.345.608.851,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90. Rincian Piutang Denda Pajak Daerah Per 31 Desember Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No.	Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Piutang Denda Pajak Hotel dan Penginapan	0,00	0,00
2.	Piutang Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	16.211.461,00	1.667.375,00
3.	Piutang Denda Pajak Pameran	1.262.108.666,00	792.664.649,60
4.	Piutang Denda Pajak Reklame	46.990.746,00	27.103.941,68
5.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	93.867,00
6.	Piutang Denda Pajak Parkir	18.259.392,00	7.019.400,00
7.	Piutang Denda Pajak Air Tanah	2.038.586,48	165.560,46
	Jumlah	1.345.608.851,48	828.714.793,74

4. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	16.532.228,50	6.082.568,50

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.532.228,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 91. Rincian Piutang Denda Retribusi Daerah Per 31 Desember Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No.	Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal	924.188,50	924.188,50
2.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	15.608.040,00	5.158.380,00
	Jumlah	16.532.228,50	6.082.568,50

5. Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang Pendapatan dari Pengembalian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	11.894.274,00	64.057.591,80

Piutang Pendapatan dari Pengembalian selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.894.274,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 92. Rincian Piutang Pendapatan dari Pengembalian
Per 31 Desember Tahun 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji	11.894.274,00	43.837.591,80
2.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas	0,00	500.000,00
3.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas	0,00	13.350.000,00
4.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	5.870.000,00
5.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas	0,00	500.000,00
	Jumlah	11.894.274,00	64.057.591,80

- a. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp11.894.274,00 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

No.	Naman SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Dinas Pendidikan	0,00	10.140.491,80
2.	Dinas PUSDA	0,00	1.268.200,00
3.	Kecamatan Gondanglegi	0,00	32.428.900,00
4.	Kecamatan Bululawang	1.387.800,00	0,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.506.474,00	0,00
	Jumlah	11.894.274,00	43.837.591,80

- b. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp0,00 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

No.	Naman SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Kecamatan Singosari	0,00	500.000,00
	Jumlah	0,00	500.000,00

- c. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp0,00 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

No.	Naman SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Dinas Pendidikan	0,00	13.350.000,00
	Jumlah	0,00	13.350.000,00

- d. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp0,00 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

No.	Naman SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	5.870.000,00
	Jumlah	0,00	5.870.000,00

- e. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Paket meeting Dalam Kota sebesar Rp0,00 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

No.	Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	0,00	500.000,00
	Jumlah	0,00	500.000,00

6. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan BLUD	(Rp)	(Rp)
	27.390.235.752,00	18.053.178.910,00

Piutang Pendapatan BLUD Per 31 Desember 2023 merupakan Piutang yang terdiri dari Piutang Pendapatan pada UPT BLUD sebesar Rp27.390.235.752,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 93. Rincian Piutang Pendapatan BLUD Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	RSUD Kanjuruhan	20.653.372.948,00	10.261.263.218,00
2.	RSUD Lawang	5.252.006.504,00	6.981.374.492,00
3.	BLUD LDM	83.019.700,00	87.834.700,00
4.	Puskesmas Ardimulyo	760.000,00	760.000,00
5.	Puskesmas Bantur	54.300.000,00	32.280.000,00
6.	Puskesmas Bululawang	46.627.000,00	21.383.000,00
7.	Puskesmas Dampit	20.820.000,00	30.725.000,00
8.	Puskesmas Dau	604.000,00	1.670.000,00
9.	Puskesmas Donomulyo	99.183.000,00	60.582.500,00
10.	Puskesmas Gedangan	37.680.000,00	29.740.000,00
11.	Puskesmas Gondanglegi	27.965.000,00	820.000,00
12.	Puskesmas Jabung	0,00	7.920.000,00
13.	Puskesmas Kalipare	100.352.000,00	25.850.000,00
14.	Puskesmas Karangploso	900.000,00	0,00
15.	Puskesmas Kasembon	44.345.000,00	15.815.000,00
16.	Puskesmas Kepanjen	26.860.000,00	12.965.000,00
17.	Puskesmas Ketawang	93.450.000,00	8.160.000,00
18.	Puskesmas Kromengan	28.500.000,00	10.990.000,00
19.	Puskesmas Lawang	23.855.000,00	4.260.000,00
20.	Puskesmas Ngajum	12.645.000,00	8.680.000,00
21.	Puskesmas Ngantang	35.435.000,00	22.320.000,00
22.	Puskesmas Pagak	25.823.000,00	17.525.000,00
23.	Puskesmas Pagelaran	71.700.000,00	26.820.000,00
24.	Puskesmas Pakis	5.786.500,00	13.076.000,00
25.	Puskesmas Pakisaji	45.820.000,00	18.195.000,00
26.	Puskesmas Pamotan	77.315.000,00	35.965.000,00
27.	Puskesmas Poncokusumo	91.530.000,00	19.325.000,00
28.	Puskesmas Pujon	29.065.000,00	2.000.000,00
29.	Puskesmas Sumbermanjing Kulon	5.450.000,00	45.615.000,00
30.	Puskesmas Sumbermanjing Wetan	20.160.000,00	13.390.000,00
31.	Puskesmas Singosari	0,00	0,00
32.	Puskesmas Sitiarjo	30.977.500,00	30.502.500,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
33.	Puskesmas Sumberpucung	1.680.000,00	33.310.000,00
34.	Puskesmas Tajinan	17.185.000,00	10.682.500,00
35.	Puskesmas Tirtoyudo	50.690.000,00	26.847.500,00
36.	Puskesmas Tumpang	69.565.000,00	1.487.500,00
37.	Puskesmas Turen	62.358.000,00	44.475.000,00
38.	Puskesmas Wagir	59.165.000,00	34.535.000,00
39.	Puskesmas Wajak	27.492.500,00	23.200.000,00
40.	Puskesmas Wonokerto	43.826.000,00	29.120.000,00
41.	Puskesmas Wonosari	11.967.100,00	1.715.000,00
	Jumlah	27.390.235.752,00	18.053.178.910,00

Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp27.390.235.752,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 94. Rincian Perhitungan Piutang Pendapatan BLUD Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2023	18.053.178.910,00
2.	Penambahan:	
	a. Piutang RSUD Kanjuruhan	125.791.902.793,05
	b. Piutang RSUD Lawang	46.407.929.764,14
	c. Piutang Dagang BLUD LDM	117.623.000,00
	d. Piutang Puskesmas Ampelgading	3.963.575.575,86
	e. Piutang Puskesmas Ardimulyo	2.061.657.831,34
	f. Piutang Puskesmas Bantur	2.701.741.785,42
	g. Piutang Puskesmas Bululawang	3.939.493.760,61
	h. Piutang Puskesmas Dampit	3.952.572.357,89
	i. Piutang Puskesmas Dau	2.376.254.073,47
	j. Piutang Puskesmas Donomulyo	5.316.767.719,27
	k. Piutang Puskesmas Gedangan	3.504.984.237,32
	l. Piutang Puskesmas Gondanglegi	3.437.944.469,78
	m. Piutang Puskesmas Jabung	3.552.254.165,09
	n. Piutang Puskesmas Kalipare	3.854.574.061,37
	o. Piutang Puskesmas Karangploso	3.093.406.065,44
	p. Piutang Puskesmas Kasembon	1.744.063.371,06
	q. Piutang Puskesmas Kepanjen	4.083.093.367,38
	r. Piutang Puskesmas Ketawang	2.221.823.675,23
	s. Piutang Puskesmas Kromengan	1.971.305.176,32
	t. Piutang Puskesmas Lawang	3.559.412.943,30
	u. Piutang Puskesmas Ngajum	2.746.429.626,97
	v. Piutang Puskesmas Ngantang	3.007.722.132,88
	w. Piutang Puskesmas Pagak	2.016.971.384,08
	x. Piutang Puskesmas Pagelaran	3.499.433.343,91
	y. Piutang Puskesmas Pakis	5.960.049.782,20
	z. Piutang Puskesmas Pakisaji	4.066.543.461,55
	aa. Piutang Puskesmas Pamotan	3.754.381.051,61
	bb. Piutang Puskesmas Poncokusumo	5.737.615.107,23
	cc. Piutang Puskesmas Pujon	3.626.504.034,71
	dd. Piutang Puskesmas Sumbermanjing Kulon	1.878.356.977,59
	ee. Piutang Puskesmas Sumbermanjing Wetan	3.328.359.938,70
	ff. Piutang Puskesmas Singosari	3.673.547.889,53
	gg. Piutang Puskesmas Sitarjo	2.318.376.205,76
	hh. Piutang Puskesmas Sumberpucung	3.315.314.214,92
	ii. Piutang Puskesmas Tajinan	2.571.243.586,14
	jj. Piutang Puskesmas Tirtoyudo	4.020.881.789,11
	kk. Piutang Puskesmas Tumpang	5.172.119.483,17
	ll. Piutang Puskesmas Turen	6.017.357.801,99
	mm. Piutang Puskesmas Wagir	4.038.559.313,52
	nn. Piutang Puskesmas Wajak	4.345.410.889,77
	oo. Piutang Puskesmas Wonokerto	2.959.366.907,04
	pp. Piutang Puskesmas Wonosari	2.111.519.861,11
3.	Pengurangan:	
	a. Piutang RSUD Kanjuruhan	(115.399.793.063,05)
	b. Piutang RSUD Lawang	(48.137.297.752,14)

	c. Piutang Dagang BLUD LDM	(122.438.000,00)
	d. Piutang Puskesmas Ampelgading	(3.963.575.575,86)
	e. Piutang Puskesmas Ardimulyo	(2.061.657.831,34)
	f. Piutang Puskesmas Bantur	(2.679.721.785,42)
	g. Piutang Puskesmas Bululawang	(3.914.249.760,61)
	h. Piutang Puskesmas Dampit	(3.962.477.357,89)
	i. Piutang Puskesmas Dau	(2.377.320.073,47)
	j. Piutang Puskesmas Donomulyo	(5.278.167.219,27)
	k. Piutang Puskesmas Gedangan	(3.497.044.237,32)
	l. Piutang Puskesmas Gondanglegi	(3.410.799.469,78)
	m. Piutang Puskesmas Jabung	(3.560.174.165,09)
	n. Piutang Puskesmas Kalipare	(3.780.072.061,37)
	o. Piutang Puskesmas Karangploso	(3.092.506.065,44)
	p. Piutang Puskesmas Kasembon	(1.715.533.371,06)
	q. Piutang Puskesmas Kepanjen	(4.069.198.367,38)
	r. Piutang Puskesmas Ketawang	(2.136.533.675,23)
	s. Piutang Puskesmas Kromengan	(1.953.795.176,32)
	t. Piutang Puskesmas Lawang	(3.539.817.943,30)
	u. Piutang Puskesmas Ngajum	(2.742.464.626,97)
	v. Piutang Puskesmas Ngantang	(2.994.607.132,88)
	w. Piutang Puskesmas Pagak	(2.008.673.384,08)
	x. Piutang Puskesmas Pagelaran	(3.454.553.343,91)
	y. Piutang Puskesmas Pakis	(5.967.339.282,20)
	z. Piutang Puskesmas Pakisaji	(4.038.918.461,55)
	aa. Piutang Puskesmas Pamotan	(3.713.031.051,61)
	bb. Piutang Puskesmas Poncokusumo	(5.665.410.107,23)
	cc. Piutang Puskesmas Pujon	(3.599.439.034,71)
	dd. Piutang Puskesmas Sumbermanjing Kulon	(1.918.521.977,59)
	ee. Piutang Puskesmas Sumbermanjing Wetan	(3.321.589.938,70)
	ff. Piutang Puskesmas Singosari	(3.673.547.889,53)
	gg. Piutang Puskesmas Sitarjo	(2.317.901.205,76)
	hh. Piutang Puskesmas Sumberpucung	(3.346.944.214,92)
	ii. Piutang Puskesmas Tajinan	(2.564.741.086,14)
	jj. Piutang Puskesmas Tirtoyudo	(3.997.039.289,11)
	kk. Piutang Puskesmas Tumpang	(5.104.041.983,17)
	ll. Piutang Puskesmas Turen	(5.999.474.801,99)
	mm. Piutang Puskesmas Wagir	(4.013.929.313,52)
	nn. Piutang Puskesmas Wajak	(4.341.118.389,77)
	oo. Piutang Puskesmas Wonokerto	(2.944.660.907,04)
	pp. Piutang Puskesmas Wonosari	(2.101.267.761,11)
4.	Saldo Akhir 31 Desember 2023 (4=1+2-3)	27.390.235.752,00

j. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	0,00	18.280.748.400,00

Pengakuan Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022

<i>(dalam Rupiah)</i>			
No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
2.	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00
3.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00
4.	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	0,00
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	18.280.748.400,00
	Jumlah	0,00	18.280.748.400,00

Piutang Transfer merupakan Piutang yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Bagi Hasil Pajak Daerah, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 96. Rincian Perhitungan Piutang Transfer Per 31 Desember Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2023	18.280.748.400,00
2.	Penambahan:	
	a. Pajak Kendaraan Bermotor	109.886.255.100,00
	b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	58.360.624.400,00
	c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	120.000.828.500,00
	d. Pajak Air Permukaan	3.320.480.600,00
	e. Pajak Rokok	99.052.854.900,00
3.	Pengurangan:	
	a. Pajak Kendaraan Bermotor	(109.886.255.100,00)
	b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	(58.360.624.400,00)
	c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	(120.000.828.500,00)
	d. Pajak Air Permukaan	(3.320.480.600,00)
	e. Pajak Rokok	(117.333.603.300,00)
4.	Saldo Akhir 31 Desember 2023 (1+2-3)	0,00

k. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	(49.214.003.102,40)	(49.952.443.356,59)

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang, Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan atau korporasi dan atau entitas lainnya.

Penyajian Nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodic terhadap nilai perolehan dana bergulir. Penatausahaan dan Penyajian selayaknya akun Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan umur Dana Bergulir sesuai dengan jatuh

temponya (*Aging Schedule*) untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas Dana Bergulir.

Terhadap mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 97. Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	45.557.319.840,21	47.025.858.119,82
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	1.876.694.831,93	1.134.035.988,07
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	755.451.894,66	679.189.645,84
4.	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	91.403.742,00
6.	Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	0,00	1.000.000.000,00
7.	Penyisihan Piutang TPTGR	0,00	0,00
8.	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	1.024.536.535,60	21.955.860,86
	Jumlah	49.214.003.102,40	49.952.443.356,59

Perhitungan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 secara rinci disajikan dalam **Lampiran IX**.

1. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	40.333.333,33	84.333.333,33

Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.333.333,33 merupakan Beban Sewa Gedung dibayar di muka yang tersisa untuk periode 1 Januari 2024 sampai 30 November 2024 berupa sewa Gudang Penyimpanan Aset Lainnya dalam kondisi rusak berat oleh RSUD Kanjuruhan dengan periode sewa 1 Desember 2022 sampai dengan 30 November 2024 senilai Rp88.000.000,00.

m. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.196.990.356,00	1.646.327.360,36

Piutang Lainnya per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp1.196.990.356,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98. Rincian Piutang Lainnya Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang- Investasi Non Permanen Kepada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.	Piutang Kendaraan Bermotor	3.310.000,00	3.310.000,00
3.	Piutang SKPP (BKAD)	6.000.000,00	39.869.304,00
4.	Koreksi Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	584.817.873,00
5.	Piutang kelebihan pembayaran honor Kelurahan Losari	0,00	1.225.500,00
6.	Piutang kelebihan Belanja Kec. Singosari	0,00	8.836.785,84
7.	Piutang Kelebihan Pembayaran Belanja Dinas Pendidikan	0,00	2.844.000,00
8.	Pengakuan DBH/DAU yang disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF (Treasury Deport Facility)	0,00	5.423.897,52
9.	Mencatat Piutang Tuntutan Ganti Rugi Kendaraan Dinas (Badan Bendpatan Daerah)	5.700.000,00	0,00
10.	Dinas Pendidikan (SMP N 1 Pujon)	612.270,00	0,00
11.	Kec. Bululawang	181.368.086,00	0,00
	Jumlah	1.196.990.356,00	1.646.327.360,36

Adapun Piutang Lainnya berupa Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang- Investasi Non Permanen Kepada BUMD per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan pinjaman kepada PT KIGUMAS yang diberikan dalam tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap I berdasarkan Berita Acara Nomor 900/962/421.021/2004 tanggal 24 Juni 2004 Rp375.000.000,00;
- b. Tahap II berdasarkan Berita Acara Nomor 900/1083/421.033/2004 tanggal 03 Agustus 2004 Rp312.500.000,00;
- c. Tahap III berdasarkan Berita Acara Nomor 900/1195/421.033/2004 tanggal 08 September 2004 sebesar Rp312.500.000,00.

Atas pinjaman tersebut telah dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100%.

Adapun rekapitulasi pembayaran Piutang Lainnya selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 99. Rincian Pembayaran Piutang Lainnya Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Koreksi Nilai Saldo Awal	Penyetoran 2023	Saldo 31 Desember 2023
1.	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Kepada BUMD	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00
2.	Piutang Kendaraan Bermotor	3.310.000,00	-	-	3.310.000,00
3.	Piutang SKPP (BKAD)	39.869.304,00	19.069.304,00	14.800.000,00	6.000.000,00
4.	Koreksi Pengajuan Perhitungan Pihak Ketiga	584.817.873,00	-	584.817.873,00	-
5.	Piutang kelebihan pembayaran honor Kelurahan Losari	1.225.500,00	-	1.225.500,00	-
6.	Piutang kelebihan pembayaran Belanja Kec. Singosari	8.836.785,84	-	8.836.785,84	-
7.	Piutang Kelebihan Pembayaran Belanja Dinas Pendidikan	2.844.000,00	-	2.844.000,00	-
8.	Pengakuan DBH/DAU yang disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF (Treasury Deport Facility)	5.423.897,52	-	5.423.897,52	-
9.	Mencatat Piutang terkait Tuntutan Ganti Rugi Kendaraan Dinas (Bapenda)	-	-	-	5.700.000,00
10.	Dinas Pendidikan (SMP N 1 Pujon)	-	-	-	612.270,00
11.	Kec. Bululawang	-	-	-	181.368.086,00
Jumlah		1.646.327.360,36	19.069.304,00	637.017.360,36	1.196.990.356,00

Khusus untuk rincian pembayaran Piutang Lainnya berupa Piutang SKPP selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 100. Rincian Pembayaran Piutang SKPP Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Nama	Saldo 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Pembayaran Dapem Induk	Saldo 31 Desember 2023
Piutang SKPP Sebelum 2019					
1.	Ilham Wahyudi	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
2.	Suntanah	6.800.000,00		3.600.000,00	3.200.000,00
3.	Wira'i	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
4.	YP Kalis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
5.	Sulkanaji	2.069.304,00	2.069.304,00	0,00	0,00
Piutang SKPP 2019					
6.	Li'anah	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00
Piutang SKPP 2020					
7.	Suhadi Rofiq	10.600.000,00	600.000,00	7.200.000,00	2.800.000,00
8.	Suri Wahyudi	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00
		39.869.304,00	19.069.304,00	14.800.000,00	6.000.000,00

n. Persediaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan	(Rp)	(Rp)
	<u>73.080.929.721,54</u>	<u>78.571.102.731,27</u>

Pemerintah Kabupaten Malang menyajikan saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*), yaitu untuk Jenis persediaan secara satuan nilai/satuan harga adalah relatif kecil dan secara akumulasi nilai, nilainya juga tidak besar, berupa barang yang tidak membahayakan dan sebagai persediaan akhir biasanya secara kuantitas juga tidak banyak (persediaan ATK, Alat Listrik dan Elektronika, blangko), sedangkan persediaan atas barang yang relatif nilai/harga satuan besar, secara akumulasi nilai/harga juga besar, secara kuantitas juga banyak, barang berbahaya, dikenal dengan batasan waktu penggunaannya, selain dengan perhitungan fisik juga pencatatannya dilakukan secara periodik (untuk obat, alat kedokteran/ kesehatan, benih bibit). Adapun Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 101. Rincian Persediaan Per 31 Desember Tahun
2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	527.703.825,79	345.905.510,36
2.	Bahan Kimia	1.518.159.070,25	1.656.497.332,37
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	741.001.868,73	596.489.793,22
4.	Bahan Baku	14.423.720,00	2.809.940,00
5.	Bahan/Bibit Tanaman	750.980.571,04	777.621.951,04
6.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.122.166,67	7.452.500,00
7.	Isi Tabung Gas	7.353.459,48	12.103.316,34
8.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	14.618.047,50	496.100,00
9.	Bahan Lainnya	18.988.297.651,15	30.011.938.218,32
10.	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	5.126.000,00
11.	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	3.000.000,00
12.	Suku Cadang Alat Laboratorium	91.772.823,00	0,00
13.	Alat tulis kantor	442.610.318,97	446.257.243,78
14.	Kertas dan Cover	223.022.916,39	242.356.493,85
15.	Bahan Cetak	2.145.798.630,33	2.505.073.928,36
16.	Benda Pos	11.800.440,00	7.063.000,00
17.	Bahan Komputer	1.491.044.849,00	1.489.195.714,00
18.	Perabot Kantor	424.067.028,23	1.076.079.663,67
19.	Alat listrik	202.798.613,63	56.923.087,01
20.	Perlengkapan Dinas	1.377.825.565,99	1.458.775.936,59
21.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.632.000,00	5.572.144,00
22.	Souvenir/Cencera Mata	106.557.740,00	86.052.030,00
23.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.019.650.545,44	16.280.049.616,34
24.	Obat	27.743.004.733,60	3.855.667.536,83

No	Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
25.	Obat-Obatan Lainnya	5.634.482.596,00	10.009.880.402,87
26.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahan Kepada Masyarakat	6.242.251.190,36	7.221.813.313,00
27.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahan Lainnya	0,00	0,00
28.	Natura	1.269.900.349,99	214.738.588,32
29.	Pakan	64.000.000,00	192.294.121,00
30.	Natura dan Pakan Lainnya	17.049.000,00	3.869.250,00
	Jumlah	73.080.929.721,54	78.571.102.731,27

Rincian lebih lanjut atas Persediaan yang disajikan per jenis Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 102. Rincian Persediaan per Jenis Persediaan Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Bahan Baku Bangunan			
1.	Dinas Pendidikan	422.300,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	230.000,00	147.200,00
3.	RSUD Kanjuruhan	74.172.565,79	59.084.596,07
4.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	450.849.460,00	103.553.714,29
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	183.120.000,00
6.	UPTD Lumbung Desa Modern	2.029.500,00	0,00
	Jumlah	527.703.825,79	345.905.510,36
Bahan Kimia			
1.	Dinas Kesehatan	193.842.824,22	223.724.451,17
2.	UPTD Puskesmas Ampelgading	3.319.788,00	0,00
3.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	891.052,50	750.000,00
4.	UPTD Puskesmas Bantur	27.396.547,00	41.557.040,00
5.	UPTD Puskesmas Bululawang	1.888.050,00	8.181.905,00
6.	UPTD Puskesmas Dampit	21.489.600,00	22.770.617,00
7.	UPTD Puskesmas Dau	8.477.736,00	6.286.762,50
8.	UPTD Puskesmas Donomulyo	86.463.042,00	86.302,50
9.	UPTD Puskesmas Gedangan	28.691.000,00	28.798.000,00
10.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	3.716.495,00	5.252.235,00
11.	UPTD Puskesmas Jabung	11.751.832,00	33.228.697,00
12.	UPTD Puskesmas Kalipare	796.980,00	2.546.340,00
13.	UPTD Puskesmas Karangploso	14.625.000,00	192.500,00
14.	UPTD Puskesmas Ketawang	0,00	425.000,00
15.	UPTD Puskesmas Kromengan	0,00	3.959.965,00
16.	UPTD Puskesmas Lawang	349.650,00	4.942.462,45
17.	UPTD Puskesmas Ngantang	1.893.993,00	9.204.736,00
18.	UPTD Puskesmas Pagak	637.000,00	13.503.794,00
19.	UPTD Puskesmas Pagelaran	0,00	1.367.000,00
20.	UPTD Puskesmas Pakis	16.662.570,33	6.318.042,30
21.	UPTD Puskesmas Pakisasji	14.292.000,00	888.000,00
22.	UPTD Puskesmas Pamotan	1.243.200,00	0,00
23.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	2.712.793,00	1.100.000,00
24.	UPTD Puskesmas Pujon	9.512.616,75	11.160.409,00
25.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Kulon	440.619,00	1.992.550,00
26.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	41.306.899,63	11.662.926,82

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
27.	UPTD Puskesmas Singosari	19.275.678,00	6.451.025,00
28.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	4.816.950,00	0,00
29.	UPTD Puskesmas Sumberpucung	917.500,00	0,00
30.	UPTD Puskesmas Tumpang	5.594.400,00	0,00
31.	UPTD Puskesmas Turen	222.000,00	1.143.300,00
32.	UPTD Puskesmas Wagir	364.080,00	0,00
33.	UPTD Puskesmas Wajak	875.000,00	3.025.000,00
34.	UPTD Puskesmas Wonokerto	7.874.125,00	0,00
35.	UPTD Puskesmas Wonosari	7.001.697,00	0,00
36.	RSUD Kanjuruhan Kanjuruhan	647.422.973,18	756.505.047,00
37.	RSUD Lawang	295.069.678,64	432.820.589,63
38.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	27.810.000,00	0,00
39.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.513.700,00	16.652.635,00
	Jumlah	1.518.159.070,25	1.656.497.332,37
Bahan Bakar dan Pelumas			
1.	UPTD Puskesmas Kalipare	388.444,00	0,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	54.511.750,00	34.146.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	199.176.049,73	263.790.174,22
4.	Dinas Lingkungan Hidup	486.925.625,00	298.553.619,00
	Jumlah	741.001.868,73	596.489.793,22
Bahan Baku			
1.	RSUD Lawang	14.423.720,00	2.809.940,00
	Jumlah	14.423.720,00	2.809.940,00
Bahan/Bibit Tanaman			
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	735.935.571,04	735.935.571,04
2.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.045.000,00	41.686.380,00
	Jumlah	750.980.571,04	777.621.951,04
Isi Tabung Pemadam Kebakaran			
1.	UPTD Puskesmas Bantur	2.497.500,00	2.497.500,00
2.	UPTD Puskesmas Kalipare	4.624.666,67	4.955.000,00
	Jumlah	7.122.166,67	7.452.500,00
Isi Tabung Gas			
1.	UPTD Puskesmas Bantur	1.019.992,00	270.000,00
2.	UPTD Puskesmas Donomulyo	0,00	1.265.000,00
3.	UPTD Puskesmas Kalipare	505.079,00	693.750,00
4.	UPTD Puskesmas Kasembon	40.000,00	619.716,86
5.	UPTD Puskesmas Kepanjen	0,00	170.000,00
6.	UPTD Puskesmas Ketawang	690.000,00	0,00
7.	UPTD Puskesmas Lawang	0,00	991.000,00
8.	UPTD Puskesmas Ngantang	1.065.000,00	1.695.000,00
9.	UPTD Puskesmas Pagak	0,00	150.000,00
10.	UPTD Puskesmas Pagelaran	1.150.000,00	360.000,00
11.	UPTD Puskesmas Pujon	1.080.718,08	270.179,48
12.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	450.000,00	2.610.000,00
13.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	589.998,40	200.000,00
14.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	0,00	190.000,00
15.	UPTD Puskesmas Tumpang	562.672,00	351.670,00
16.	UPTD Puskesmas Wonokerto	200.000,00	345.000,00
17.	UPTD Puskesmas Wonosari	0,00	800.000,00
18.	Dinas Pertanahan	0,00	22.000,00
19.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	1.100.000,00
	Jumlah	7.353.459,48	12.103.316,34
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			
1.	Dinas Perikanan	14.618.047,50	0,00
2.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	496.100,00

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Jumlah	14.618.047,50	496.100,00
Bahan Lainnya			
1.	Dinas Pendidikan	9.122.500,00	3.649.600,00
2.	Dinas Kesehatan	2.142.639.612,00	15.204.251.983,86
3.	UPTD Puskesmas Ampelgading	287.434.311,68	179.238.002,50
4.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	301.067.148,16	173.595.179,00
5.	UPTD Puskesmas Bantur	264.283.059,32	166.986.000,74
6.	UPTD Puskesmas Bululawang	66.714.078,71	88.920.060,20
7.	UPTD Puskesmas Dampit	325.021.926,18	210.071.494,48
8.	UPTD Puskesmas Dau	314.804.331,00	160.543.275,90
9.	UPTD Puskesmas Donomulyo	256.722.370,42	286.164.201,63
10.	UPTD Puskesmas Gedangan	335.280.111,07	136.661.403,40
11.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	178.012.868,89	226.143.661,16
12.	UPTD Puskesmas Jabung	207.800.128,03	97.572.491,00
13.	UPTD Puskesmas Kalipare	260.913.248,42	124.106.105,00
14.	UPTD Puskesmas Karangploso	54.732.883,50	129.611.839,56
15.	UPTD Puskesmas Kasembon	179.323.471,84	110.806.577,00
16.	UPTD Puskesmas Kepanjen	327.224.629,60	118.598.983,90
17.	UPTD Puskesmas Ketawang	107.758.660,17	138.361.587,60
18.	UPTD Puskesmas Kromengan	227.901.283,00	252.783.544,94
19.	UPTD Puskesmas Lawang	561.132.647,50	194.369.711,14
20.	UPTD Puskesmas Ngajum	307.622.931,80	159.989.212,00
21.	UPTD Puskesmas Ngantang	331.603.995,94	301.312.886,48
22.	UPTD Puskesmas Pagak	197.440.504,91	127.018.520,00
23.	UPTD Puskesmas Pagelaran	311.747.350,95	142.351.749,05
24.	UPTD Puskesmas Pakis	581.692.891,96	138.255.324,47
25.	UPTD Puskesmas Pakisasji	329.195.081,38	174.071.593,00
26.	UPTD Puskesmas Pamotan	376.667.369,64	215.998.196,22
27.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	559.977.145,18	268.497.357,90
28.	UPTD Puskesmas Pujon	484.539.252,54	187.091.701,00
29.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Kulon	131.825.572,35	146.514.225,00
30.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	375.039.430,15	423.756.463,90
31.	UPTD Puskesmas Singosari	510.770.957,73	150.608.478,00
32.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	277.338.522,67	233.481.544,56
33.	UPTD Puskesmas Sumberpucung	125.866.055,55	167.626.291,00
34.	UPTD Puskesmas Tajinan	204.662.782,85	83.925.810,00
35.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	362.057.771,16	196.570.627,45
36.	UPTD Puskesmas Tumpang	393.900.917,12	131.909.741,81
37.	UPTD Puskesmas Turen	128.355.122,44	198.033.785,00
38.	UPTD Puskesmas Wagir	70.397.758,32	105.690.226,05
39.	UPTD Puskesmas Wajak	421.643.411,48	216.945.632,84
40.	UPTD Puskesmas Wonokerto	227.793.938,41	134.204.860,28
41.	UPTD Puskesmas Wonosari	35.947.801,29	32.262.712,00
42.	RSUD Kanjuruhan	330.038.936,74	0,00
43.	RSUD Lawang	1.092.744.606,20	2.657.308.277,71
44.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	0,00	152.000,00
45.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	761.648.125,00	1.755.702.708,00
46.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.922.756.113,00	1.358.189.230,00
47.	Dinas Sosial	18.380.500,00	247.591.595,00
48.	Dinas Pertanahan	90.800,00	101.000,00
49.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	19.619.250,00
50.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	407.180,00	0,00
51.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	638.759.945,00	870.937.230,00
52.	Dinas Perhubungan	7.417.200,00	189.500,00
53.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	36.000,00

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
54.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	243.000,00
55.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.500.000,00	244.000,00
56.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	328.200,00	0,00
57.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.055.490.423,50	1.159.769.693,00
58.	Sekretariat Daerah	0,00	194.250,00
59.	Inspektorat Daerah	85.000,00	278.740,00
60.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	195.600,00	0,00
61.	Badan Pendapatan Daerah	80.186,40	828.903,60
62.	Sekretariat DPRD	1.352.000,00	1.900.200,00
63.	Kecamatan Pakis	47.000,00	0,00
64.	Kecamatan Poncokusumo	0,00	100.000,00
	Jumlah	18.988.297.651,15	30.011.938.218,33
Suku Cadang Alat Angkutan			
1.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	0,00	5.126.000,00
	Jumlah	0,00	5.126.000,00
Suku Cadang Alat Kedokteran			
1.	UPTD Puskesmas Gedangan	0,00	3.000.000,00
	Jumlah	0,00	3.000.000,00
Suku Cadang Alat Laboratorium			
1.	UPTD Puskesmas Ampelgading	68.971.338,00	0,00
2.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.470.000,00	0,00
3.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.136.485,00	0,00
4.	Sekretariat DPRD	195.000,00	0,00
	Jumlah	91.772.823,00	0,00
Alat Tulis kantor			
1.	Dinas Pendidikan	1.183.000,00	1.971.000,00
2.	Dinas Kesehatan	5.313.633,34	4.591.170,00
3.	UPTD Puskesmas Ampelgading	0,00	87.000,00
4.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	1.110.416,66	1.774.633,33
5.	UPTD Puskesmas Bululawang	10.460.731,07	9.101.313,74
6.	UPTD Puskesmas Dampit	0,00	417.050,00
7.	UPTD Puskesmas Dau	0,00	673.400,00
8.	UPTD Puskesmas Donomulyo	691.585,00	697.000,00
9.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	1.163.900,00	1.896.300,00
10.	UPTD Puskesmas Jabung	925.500,00	1.995.000,00
11.	UPTD Puskesmas Kalipare	77.397,00	390.000,00
12.	UPTD Puskesmas Karangploso	1.064.000,00	2.550.600,00
13.	UPTD Puskesmas Kepanjen	2.596.287,00	9.091.900,00
14.	UPTD Puskesmas Ketawang	1.375.806,15	3.232.100,00
15.	UPTD Puskesmas Kromengan	1.938.404,00	5.610.083,00
16.	UPTD Puskesmas Lawang	0,00	3.262.755,00
17.	UPTD Puskesmas Ngantang	642.820,00	591.100,00
18.	UPTD Puskesmas Pagak	0,00	997.400,00
19.	UPTD Puskesmas Pagelaran	1.780.000,00	87.000,00
20.	UPTD Puskesmas Pakis	431.116,00	1.225.372,00
21.	UPTD Puskesmas Pakisasji	558.970,00	1.270.500,00
22.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	13.554.532,50	15.056.644,00
23.	UPTD Puskesmas Pujon	2.913.720,20	1.658.303,80
24.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	3.632.250,38	1.907.375,00
25.	UPTD Puskesmas Singosari	1.007.100,00	200.400,00
26.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	647.500,00	87.000,00
27.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	3.121.300,00	3.336.750,00
28.	UPTD Puskesmas Tumpang	2.643.760,00	761.000,00
29.	UPTD Puskesmas Turen	121.300,00	238.000,00

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
30.	UPTD Puskesmas Wagir	7.818.750,00	5.183.325,00
31.	UPTD Puskesmas Wajak	0,00	886.500,00
32.	UPTD Puskesmas Wonosari	2.790.200,00	0,00
33.	RSUD Kanjuruhan	153.944.386,34	159.254.774,00
34.	RSUD Lawang	67.723.318,33	22.358.549,67
35.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	6.667.700,00	10.843.000,00
36.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	1.897.000,00	905.000,00
37.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	36.007.300,00	57.059.646,25
38.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	362.000,00	472.000,00
39.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	189.000,00
40.	Dinas Sosial	207.600,00	518.000,00
41.	Dinas Tenaga Kerja	276.800,00	414.000,00
42.	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	134.000,00
43.	Dinas Ketahanan Pangan	3.068.400,00	2.802.000,00
44.	Dinas Pertanahan	668.200,00	1.335.800,00
45.	Dinas Lingkungan Hidup	946.700,00	231.600,00
46.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.891.290,00	4.175.400,00
47.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	470.400,00	308.000,00
48.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.073.240,00	2.489.563,50
49.	Dinas Perhubungan	5.672.650,00	4.444.690,00
50.	Dinas Koperasi dan UMKM	2.769.900,00	281.100,00
51.	Upt Pengelola Dana Bergulir	72.500,00	82.140,00
52.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.550.900,00	364.000,00
53.	Dinas Pemuda dan Olahraga	99.800,00	2.674.500,00
54.	Dinas Perputakaan dan Kearsipan	2.409.850,00	6.510.600,00
55.	Dinas Perikanan	41.696.600,00	35.311.800,00
56.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.387.000,00	2.966.193,14
57.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	93.653,00	497.808,00
58.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	301.100,00	0,00
59.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	1.883.000,00	97.680,00
60.	Sekretariat Daerah	1.836.150,00	2.731.800,00
61.	Inspektorat Daerah	100.000,00	163.500,00
62.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.827.400,00	2.530.200,00
63.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.106.337,00	4.856.587,00
64.	Badan Pendapatan Daerah	10.108.590,00	17.727.737,35
65.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	341.500,00	453.700,00
66.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.956.100,00	7.229.600,00
67.	Sekretariat DPRD	8.933.200,00	7.453.100,00
68.	Kecamatan Ngantang	0,00	153.400,00
69.	Kecamatan Kasembon	939.200,00	205.600,00
70.	Kecamatan Singosari	409.300,00	0,00
71.	Kecamatan Jabung	0,00	58.000,00
72.	Kecamatan Pakis	115.000,00	0,00
73.	Kecamatan Poncokusumo	0,00	1.582.600,00
74.	Kecamatan Bululawang	259.400,00	0,00
75.	Kecamatan Turen	120.000,00	0,00
76.	Kecamatan Ampelgading	122.700,00	0,00

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
77.	Kecamatan Tirtoyudo	1.227.200,00	0,00
78.	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	0,00	276.500,00
79.	Kecamatan Pakisaji	28.000,00	369.000,00
80.	Kecamatan Wagir	1.299.375,00	1.805.000,00
81.	Kecamatan Sumberpucung	604.500,00	0,00
82.	Kecamatan Kromengan	758.700,00	330.800,00
83.	Kecamatan Wonosari	52.800,00	68.000,00
84.	Kecamatan Kalipare	216.200,00	0,00
85.	Kecamatan Donomulyo	710.200,00	0,00
86.	Badan Kesatuan Bangsa Politik	833.200,00	713.300,00
	Jumlah	442.610.318,97	446.257.243,78
Kertas dan Cover			
1.	Dinas Pendidikan	8.381.500,00	4.751.000,00
2.	Dinas Kesehatan	19.378.150,00	4.219.000,00
3.	UPTD Puskesmas Ampelgading	0,00	248.000,00
4.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	1.156.000,00	627.000,00
5.	UPTD Puskesmas Bululawang	6.559.780,00	8.954.770,00
6.	UPTD Puskesmas Dau	560.800,00	754.600,00
7.	UPTD Puskesmas Donomulyo	111.000,00	124.320,00
8.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	0,00	928.000,00
9.	UPTD Puskesmas Jabung	1.680.000,00	1.090.000,00
10.	UPTD Puskesmas Kalipare	112.000,00	0,00
11.	UPTD Puskesmas Karangploso	1.637.000,00	1.184.500,00
12.	UPTD Puskesmas Kepanjen	1.345.500,00	895.000,00
13.	UPTD Puskesmas Ketawang	2.939.413,89	3.177.000,00
14.	UPTD Puskesmas Kromengan	1.454.000,00	4.194.000,00
15.	UPTD Puskesmas Lawang	0,00	789.215,00
16.	UPTD Puskesmas Ngantang	599.000,00	2.400.750,00
17.	UPTD Puskesmas Pagak	0,00	1.060.142,00
18.	UPTD Puskesmas Pagelaran	3.558.000,00	248.000,00
19.	UPTD Puskesmas Pakisaji	1.104.450,00	1.576.500,00
20.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	8.168.116,39	18.930.000,00
21.	UPTD Puskesmas Pujon	1.793.710,35	764.752,60
22.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	1.800.001,76	2.100.000,00
23.	UPTD Puskesmas Singosari	1.470.000,00	352.000,00
24.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	575.400,00	730.000,00
25.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	747.000,00	673.400,00
26.	UPTD Puskesmas Tumpang	1.737.000,00	0,00
27.	UPTD Puskesmas Turen	675.100,00	592.000,00
28.	UPTD Puskesmas Wagir	7.367.500,00	6.848.630,00
29.	UPTD Puskesmas Wajak	0,00	404.000,00
30.	UPTD Puskesmas Wonokerto	2.293.000,00	0,00
31.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	3.308.000,00	3.331.000,00
32.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	4.052.000,00	7.079.900,00
33.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	11.623.500,00	0,00
34.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.148.000,00	2.880.000,00
35.	Satuan Polisi Pamong Praja	427.350,00	394.000,00
36.	Dinas Sosial	997.500,00	766.000,00
37.	Dinas Tenaga Kerja	320.000,00	245.000,00
38.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	134.000,00	0,00
39.	Dinas Ketahanan Pangan	94.500,00	0,00
40.	Dinas Pertanahan	609.000,00	1.050.000,00
41.	Dinas Lingkungan Hidup	6.914.300,00	1.472.000,00
42.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	11.535.000,00	35.615.500,00
43.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	967.500,00	1.160.000,00

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
44.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.268.500,00	1.500.720,00
45.	Dinas Perhubungan	13.940.250,00	17.606.444,00
46.	Dinas Komunikasi dan Informatika	520.000,00	6.414.000,00
47.	Dinas Koperasi dan UMKM	3.352.000,00	866.800,00
48.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	3.970.000,00	0,00
49.	Upt Pengelola Dana Bergulir	0,00	659.700,00
50.	Dinas Pemuda dan Olahraga	932.000,00	2.801.000,00
51.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.453.900,00	2.570.000,00
52.	Dinas Perikanan	3.904.500,00	2.624.000,00
53.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.226.000,00	0,00
54.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.549.000,00	0,00
55.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.408.000,00	448.000,00
56.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.325.500,00	4.352.000,00
57.	Sekretariat Daerah	10.748.600,00	2.648.412,00
58.	Inspektorat Daerah	720.000,00	930.000,00
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.722.400,00	3.283.100,00
60.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.148.700,00	3.052.945,00
61.	Badan Pendapatan Daerah	14.258.800,00	52.403.593,25
62.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	192.000,00	230.000,00
63.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.796.700,00	8.786.000,00
64.	Sekretariat DPRD	7.181.000,00	4.905.400,00
65.	Kecamatan Pujon	195.000,00	0,00
66.	Kecamatan Ngantang	0,00	280.000,00
67.	Kecamatan Kasembon	128.000,00	179.000,00
68.	Kecamatan Lawang	448.000,00	0,00
69.	Kecamatan Singosuri	445.394,00	0,00
70.	Kecamatan Dau	281.400,00	0,00
71.	Kecamatan Pakis	220.000,00	245.000,00
72.	Kecamatan Jabung	0,00	229.400,00
73.	Kecamatan Bantur	16.000,00	0,00
74.	Kecamatan Turen	573.000,00	0,00
75.	Kecamatan Ampelgading	320.000,00	0,00
76.	Kecamatan Tirtoyudo	629.000,00	64.000,00
77.	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	0,00	249.000,00
78.	Kecamatan Ngajum	404.000,00	0,00
79.	Kecamatan Wagir	6.148.500,00	0,00
80.	Kecamatan Sumberpucung	735.000,00	0,00
81.	Kecamatan Kromengan	1.180.000,00	320.000,00
82.	Kecamatan Wonosari	38.700,00	256.000,00
83.	Kecamatan Kalipare	201.000,00	0,00
84.	Kecamatan Donomulyo	695.000,00	0,00
85.	Bada Kesatuan Bangsa dan Politik	1.413.000,00	1.842.000,00
	Jumlah	223.022.916,39	242.356.493,85
Bahan Cetak			
1.	Dinas Pendidikan	47.500,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	7.115.500,00	3.711.650,00
3.	UPTD Puskesmas Ampelgading	0,00	177.700,00
4.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	20.132.558,25	10.553.125,00
5.	UPTD Puskesmas Bantur	3.821.564,15	980.000,00
6.	UPTD Puskesmas Bululawang	7.737.529,00	0,00
7.	UPTD Puskesmas Dampit	3.806.060,00	3.806.060,00
8.	UPTD Puskesmas Dau	2.348.775,00	3.524.174,40
9.	UPTD Puskesmas Donomulyo	32.500,00	325.000,00

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
10.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	9.912.500,00	7.281.000,00
11.	UPTD Puskesmas Kalipare	162.500,00	523.750,00
12.	UPTD Puskesmas Karangploso	1.591.000,00	1.957.975,00
13.	UPTD Puskesmas Kasembon	3.125.206,75	5.506.351,25
14.	UPTD Puskesmas Kepanjen	471.750,00	300.000,00
15.	UPTD Puskesmas Ketawang	13.634.659,50	911.870,00
16.	UPTD Puskesmas Kromengan	2.545.700,00	2.785.800,00
17.	UPTD Puskesmas Ngantang	11.264.691,50	2.506.300,00
18.	UPTD Puskesmas Pagelaran	6.576.032,05	5.613.270,80
19.	UPTD Puskesmas Pakis	661.550,00	6.013.750,00
20.	UPTD Puskesmas Pakisasji	2.695.200,00	1.115.000,00
21.	UPTD Puskesmas Pujon	1.281.842,00	91.520,00
22.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	4.754.700,00	2.293.976,00
23.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	4.444.990,00	82.000,00
24.	UPTD Puskesmas Sumberpucung	0,00	2.584.345,40
25.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	4.721.491,00	150.400,00
26.	UPTD Puskesmas Turen	0,00	218.800,00
27.	UPTD Puskesmas Wagir	12.408.201,55	11.733.400,00
28.	UPTD Puskesmas Wajak	0,00	2.137.360,00
29.	UPTD Puskesmas Wonokerto	7.178.334,30	311.270,80
30.	RSUD Kepanjen	65.645.391,20	88.220.202,98
31.	RSUD Lawang	119.102.845,00	93.672.444,80
32.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	5.320.000,00	0,00
33.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	925.000,00	0,00
34.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	4.788.248,00	0,00
35.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	33.885.500,00
36.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	765.005.567,00	507.638.491,00
37.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	317.900,00	37.000,00
38.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	840.000,00	1.165.500,00
39.	Dinas Perhubungan	160.868.719,00	467.112.989,13
40.	Dinas Komunikasi dan Informatika	94.800,00	7.620.000,00
41.	Dinas Koperasi dan UMKM	112.500,00	486.000,00
42.	Upt Pengelola Dana Bergulir	0,00	277.500,00
43.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	111.774.136,00	122.177.700,00
44.	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.163.400,00	22.484.720,00
45.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.794.200,00	1.844.850,00
46.	Dinas Perikanan	42.403.850,00	42.567.600,00
47.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	175.390.673,00	155.229.090,00
48.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7.619.610,00	2.945.700,00
49.	Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan	67.094.538,00	43.376.746,00
50.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	223.760.635,28	461.540.052,80
51.	Sekretariat Daerah	625.000,00	3.165.000,00
52.	Inspektorat Daerah	1.757.500,00	956.500,00
53.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.086.000,00	4.831.200,00
54.	Badan Pendapatan Daerah	239.127.982,80	362.551.833,00
55.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	363.000,00	632.500,00
56.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.548.000,00	1.140.000,00
57.	Kecamatan Singosari	1.618.400,00	0,00

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
58.	Kecamatan Tirtoyudo	117.600,00	0,00
59.	Kecamatan Tirtoyudo	2.775.700,00	0,00
60.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.285.100,00	2.318.960,00
	Jumlah	2.145.798.630,33	2.505.073.928,36
Benda Pos			
1.	Dinas Pendidikan	134.400,00	220.000,00
2.	Dinas Kesehatan	120.000,00	0,00
3.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	4.000,00	0,00
4.	UPTD Puskesmas Jabung	300.000,00	200.000,00
5.	UPTD Puskesmas Jabung	70.000,00	0,00
6.	UPTD Puskesmas Karangploso	500.000,00	500.000,00
7.	UPTD Puskesmas Ngantang	470.000,00	200.000,00
8.	UPTD Puskesmas Pagelaran	300.000,00	0,00
9.	UPTD Puskesmas Pakisaji	0,00	100.000,00
10.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	1.150.000,00	1.000.000,00
11.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	200.000,00	20.000,00
12.	UPTD Puskesmas Sitarjo	200.000,00	100.000,00
13.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	36.000,00	83.000,00
14.	UPTD Puskesmas Ketawang	0,00	50.000,00
15.	UPTD Puskesmas Wonokerto	1.250.000,00	200.000,00
16.	RSUD Lawang	1.180.000,00	0,00
17.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	300.000,00
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	222.000,00	0,00
19.	Dinas Pertanahan	1.070.000,00	150.000,00
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	390.000,00	200.000,00
21.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150.000,00	220.000,00
22.	Dinas Perhubungan	70.000,00	0,00
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	180.000,00	880.000,00
24.	Dinas Perikanan	0,00	52.000,00
25.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.240.000,00	710.000,00
26.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	165.000,00
27.	Sekretariat Daerah	250.000,00	0,00
28.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	0,00	0,00
29.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	44.000,00	66.000,00
30.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	275.000,00
31.	Sekretariat DPRD	1.657.000,00	1.098.000,00
32.	Kecamatan Lawang	10.000,00	0,00
33.	Kecamatan Jabung	0,00	44.000,00
34.	Kecamatan Wagir	80.000,00	230.000,00
35.	Kecamatan Sumberpucung	120.000,00	0,00
36.	Kecamatan Kromengan	220.000,00	0,00
37.	Kecamatan Donomulyo	183.040,00	0,00
	Jumlah	11.800.440,00	7.063.000,00
Bahan Komputer			
1.	Dinas Pendidikan	1.972.500,00	912.000,00
2.	Dinas Kesehatan	8.078.000,00	5.132.000,00
3.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	3.119.000,00	2.020.000,00
4.	UPTD Puskesmas Bantur	0,00	410.000,00
5.	UPTD Puskesmas Bululawang	0,00	1.231.080,00
6.	UPTD Puskesmas Donomulyo	189.900,00	1.749.000,00
7.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	267.300,00	730.000,00
8.	UPTD Puskesmas Kalipare	190.000,00	0,00
9.	UPTD Puskesmas Karangploso	952.000,00	1.002.500,00

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
10.	UPTD Puskesmas Kepanjen	3.205.000,00	3.148.750,00
11.	UPTD Puskesmas Kromengan	1.125.000,00	4.485.000,00
12.	UPTD Puskesmas Ngantang	905.000,00	413.000,00
13.	UPTD Puskesmas Pagak	0,00	535.000,00
14.	UPTD Puskesmas Pakis	245.000,00	430.000,00
15.	UPTD Puskesmas Pakisasji	0,00	175.000,00
16.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	7.015.870,00	12.570.000,00
17.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	3.995.375,00	1.675.000,00
18.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	294.000,00	0,00
19.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	619.000,00	580.000,00
20.	UPTD Puskesmas Tumpang	584.000,00	0,00
21.	UPTD Puskesmas Wagir	5.515.000,00	6.410.000,00
22.	UPTD Puskesmas Wajak	0,00	648.000,00
23.	UPTD Puskesmas Wonokerto	3.670.000,00	178.000,00
24.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	635.000,00	744.000,00
25.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	4.864.000,00	5.134.000,00
26.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	18.819.202,00	0,00
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	550.000,00	1.520.000,00
28.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	340.000,00
29.	Dinas Sosial	306.000,00	0,00
30.	Dinas Ketahanan Pangan	1.265.000,00	0,00
31.	Dinas Lingkungan Hidup	230.000,00	102.000,00
32.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.167.125.250,00	1.191.428.500,00
33.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	770.000,00	1.111.000,00
34.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.294.260,00
35.	Dinas Perhubungan	185.951.600,00	84.997.000,00
36.	Dinas Koperasi dan UMKM	1.128.000,00	976.750,00
37.	UPT Dana Bergulir	114.000,00	0,00
38.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.251.000,00	0,00
39.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.540.000,00	608.000,00
40.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	152.000,00	3.116.000,00
41.	Dinas Perikanan	950.000,00	102.000,00
42.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	981.000,00	0,0
43.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	437.000,00	111.776,00
44.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.150.000,00	570.000,00
45.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.814.000,00	550.000,00
46.	Sekretariat Daerah	2.227.600,00	1.108.980,00
47.	Inspektorat Daerah	771.000,00	300.000,00
48.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000,00	1.642.000,00
49.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	452.000,00	435.508,00
50.	Badan Pendapatan Daerah	32.564.080,00	139.940.010,00
51.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	329.000,00	168.000,00
52.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	862.000,00	3.800.000,00
53.	Sekretariat DPRD	0,00	1.743.600,00
54.	Kecamatan Kasembon	1.000.000,00	100.000,00
55.	Kecamatan Pakis	0,00	105.000,00
56.	Kecamatan Jabung	0,00	280.000,00

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
57.	Kecamatan Bululawang	1.364.000,00	0,00
58.	Kecamatan Turen	269.000,00	0,00
59.	Kecamatan Dampit	435.000,00	0,00
60.	Kecamatan Ampelgading	462.000,00	0,00
61.	Kecamatan Tirtoyudo	0,00	114.000,00
62.	Kecamatan Sumbermanking Wetan	0,00	556.000,00
63.	Kecamatan Pakisaji	52.000,00	0,00
64.	Kecamatan Ngajum	260.000,00	0,00
65.	Kecamatan Wagir	1.160.172,00	0,00
66.	Kecamatan Kromengan	460.000,00	228.000,00
67.	Kecamatan Wonosari	1.900.000,00	0,00
68.	Kecamatan Donomulyo	460.000,00	0,00
69.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	842.000,00	1.535.000,00
	Jumlah	1.491.044.849,00	1.489.195.714,00
Perabot Kantor			
1.	Dinas Pendidikan	4.249.000,00	2.134.000,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	205.799,00
3.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	380.450,00	1.916.000,00
4.	UPTD Puskesmas Dau	2.931.900,00	0,00
5.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	165.000,00	498.500,00
6.	UPTD Puskesmas Kalipare	157.000,00	154.250,00
7.	UPTD Puskesmas Kepanjen	12.801.607,50	6.984.575,00
8.	UPTD Puskesmas Ketawang	916.559,97	1.406.500,00
9.	UPTD Puskesmas Ngantang	301.500,00	40.000,00
10.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	3.972.270,00	2.593.300,00
11.	UPTD Puskesmas Pujon	300.000,00	0,00
12.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	0,00	254.000,00
13.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	2.559.800,00	2.005.300,00
14.	UPTD Puskesmas Wagir	0,00	4.597.000,00
15.	UPTD Puskesmas Wajak	0,00	677.750,00
16.	RSUD Kanjuruhan	0,00	440.079.194,64
17.	RSUD Lawang	357.534.907,00	251.756.370,00
18.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	1.882.200,00	842.000,00
19.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	374.500,00	214.280,00
20.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	14.000.000,00
21.	Dinas Tenaga Kerja	159.000,00	123.000,00
22.	Dinas Pertanahan	229.000,00	216.000,00
23.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	327.376.371,43
24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.060.000,00	0,00
25.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.971.500,00	0,00
26.	Dinas Perhubungan	4.229.925,00	1.765.500,00
27.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.699.025,00	1.321.150,00
28.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.192.000,00	0,00
29.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.028.000,00	1.340.000,00
30.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.675.900,00	0,00
31.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.752.320,00	2.664.840,00
32.	Sekretariat Daerah	1.628.814,00	2.893.104,00
33.	Inspektorat Daerah	0,00	61.800,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	483.000,00
35.	Badan Pendapatan Daerah	8.456.349,76	5.870.079,60
36.	Sekretariat DPRD	220.000,00	1.506.000,00
37.	Kecamatan Pujon	155.000,00	0,00
38.	Kecamatan Kasembon	3.127.000,00	0,00
39.	Kecamatan Singosari	63.000,00	0,00
40.	Kecamatan Pakis	40.000,00	38.000,00

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
41.	Kecamatan Bululawang	390.000,00	0,00
42.	Kecamatan Poncokusumo	0,00	62.000,00
43.	Kecamatan Turen	251.000,00	0,00
44.	Kecamatan Wagir	162.500,00	0,00
45.	Kecamatan Sumberpucung	50.000,00	0,00
	Jumlah	424.067.028,23	1.076.079.663,67
Alat Listrik			
1.	Dinas Pendidikan	884.200,00	3.513.700,00
2.	Dinas Kesehatan	1.459.500,00	1.782.067,00
3.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	589.500,00	252.308,33
4.	UPTD Puskesmas Donomulyo	6.000,00	87.000,00
5.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	382.000,00	119.000,00
6.	UPTD Puskesmas Kepanjen	564.625,00	1.464.060,00
7.	UPTD Puskesmas Ketawang	461.490,63	660.166,67
8.	UPTD Puskesmas Ngantang	32.500,00	14.000,00
9.	UPTD Puskesmas Pakisaji	0,00	167.500,00
10.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	2.163.300,00	1.282.750,00
11.	UPTD Puskesmas Pujon	555.000,00	226.500,00
12.	UPTD Puskesmas Singosari	1.950.000,00	0,00
13.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	452.550,00	104.000,00
14.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	329.500,00	550.000,00
15.	UPTD Puskesmas Tumpang	645.500,00	0,00
16.	UPTD Puskesmas Wagir	0,00	939.800,00
17.	UPTD Puskesmas Wajak	0,00	591.000,00
18.	UPTD Puskesmas Wonokerto	2.375.000,00	0,00
19.	RSUD Kanjuruhan	26.909.653,50	33.879.759,01
20.	RSUD Lawang	42.975.409,50	6.074.253,00
21.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	425.200,00	255.800,00
22.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	113.619.660,00	806.300,00
23.	Dinas Pertanahan	42.000,00	12.400,00
24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	357.700,00	0,00
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	835.000,00	315.000,00
26.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	270.000,00	0,00
27.	Dinas Perhubungan	1.563.325,00	206.000,00
28.	Dinas Koperasi dan UMKM	33.600,00	501.700,00
29.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	224.500,00	437.500,00
30.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	870.000,00	0,00
31.	Sekretariat Daerah	0,00	649.350,00
32.	Inspektorat Daerah	75.000,00	467.950,00
33.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	467.700,00	0,00
34.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	71.928,00
35.	Badan Pendapatan Daerah	139.600,00	304.695,00
36.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	288.000,00
37.	Sekretariat DPRD	125.000,00	396.600,00
38.	Kecamatan Kasembon	25.200,00	0,00
39.	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	0,00	194.000,00
40.	Kecamatan Wagir	914.400,00	308.000,00
44.	Kecamatan Sumberpucung	50.000,00	0,00
45.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.000,00	0,00
	Jumlah	202.798.613,63	56.923.087,01
Perlengkapan Dinas			
1.	Dinas Kesehatan	4.200.000,00	0,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Lawang	48.923.680,68	101.302.451,70
3.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	22.341.641,31	29.196.624,89

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
4.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	0,00	321.200,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	985.600,00	985.600,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	760.000,00
7.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.114.660,00	28.389.360,00
8.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.298.147.484,00	1.297.820.700,00
9.	Sekretariat DPRD	112.500,00	0,00
	Jumlah	1.377.825.565,99	1.458.775.936,59
Perlengkapan Pendukung Olahraga			
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	696.000,00	696.000,00
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.604.144,00
3.	Badan Pendapatan Daerah	2.936.000,00	2.272.000,00
	Jumlah	3.632.000,00	5.572.144,00
Souvenir / Cinderamata			
1.	UPTD Puskesmas Pujon	0,00	782.000,00
2.	RSUD Kanjuruhan Kapanjen	9.701.400,00	0,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	4.979.340,00	9.633.600,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	1.425.000,00	0,00
5.	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.051.000,00	0,00
6.	Dinas Perikanan	0,00	1.875.000,00
7.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	800.000,00	0,00
8.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	386.000,00	940.000,00
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	480.000,00
10.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.273.580,00
11.	Badan Pendapatan Daerah	83.715.000,00	70.195.850,00
12.	Sekretariat Daerah	2.500.000,00	872.000,00
	Jumlah	106.557.740,00	86.052.030,00
Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya			
1.	Dinas Kesehatan	92.514.150,00	12.136.969.534,50
2.	UPTD Puskesmas Ampelgading	106.619.440,65	134.560.308,64
3.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	77.315.337,00	93.598.598,00
4.	UPTD Puskesmas Bantur	101.245.279,72	107.582.153,72
5.	UPTD Puskesmas Bululawang	72.465.364,00	90.498.223,00
6.	UPTD Puskesmas Dampit	91.992.236,00	106.787.378,00
7.	UPTD Puskesmas Dau	13.907.504,00	29.371.286,00
8.	UPTD Puskesmas Donomulyo	20.940.111,47	1.024.980,00
9.	UPTD Puskesmas Gedangan	82.523.475,00	73.518.197,00
10.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	53.129.780,00	63.871.948,00
11.	UPTD Puskesmas Jabung	123.152.590,18	115.191.413,00
12.	UPTD Puskesmas Kalipare	84.679.827,00	83.594.777,00
13.	UPTD Puskesmas Karangploso	258.597.696,36	13.657.146,00
14.	UPTD Puskesmas Kasembon	85.790.220,16	90.403.093,76
15.	UPTD Puskesmas Kapanjen	12.456.416,00	15.880.974,00
16.	UPTD Puskesmas Ketawang	66.723.557,00	79.914.992,00
17.	UPTD Puskesmas Kromengan	52.858.125,00	80.922.074,00
18.	UPTD Puskesmas Lawang	71.512.256,00	76.095.499,80
19.	UPTD Puskesmas Ngajum	67.001.170,00	76.517.099,00
20.	UPTD Puskesmas Ngantang	75.751.776,00	89.856.114,00
21.	UPTD Puskesmas Pagak	89.954.969,00	90.775.166,00
22.	UPTD Puskesmas Pagelaran	102.796.934,92	138.899.484,48
23.	UPTD Puskesmas Pakis	77.157.475,70	99.284.097,08
24.	UPTD Puskesmas Pakisaji	21.127.925,22	99.012.657,00
25.	UPTD Puskesmas Pamotan	27.905.885,00	37.492.376,00
26.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	83.055.086,00	85.833.218,00
27.	UPTD Puskesmas Pujon	85.289.805,00	165.116.626,00

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
28.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Kulon	57.382.997,00	90.344.685,00
29.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	75.963.983,00	79.767.025,00
30.	UPTD Puskesmas Singosari	25.849.758,00	134.385.718,00
31.	UPTD Puskesmas Sitarjo	37.684.997,00	50.093.519,00
32.	UPTD Puskesmas Sumberpucung	100.854.017,66	190.802.307,72
33.	UPTD Puskesmas Tajinan	66.403.414,00	88.914.330,00
34.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	91.775.643,00	98.779.347,00
35.	UPTD Puskesmas Tumpang	93.709.053,90	144.021.396,00
36.	UPTD Puskesmas Turen	72.841.226,00	162.400.992,00
37.	UPTD Puskesmas Wagir	54.527.762,00	65.984.262,00
38.	UPTD Puskesmas Wajak	10.450.032,00	37.047.444,00
39.	UPTD Puskesmas Wonokerto	55.523.653,00	75.556.501,00
40.	UPTD Puskesmas Wonosari	9.575.680,00	13.736.500,00
41.	RSUD Lawang	166.540.726,50	739.572.056,35
42.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	0,00	73.000,00
43.	Dinas Pertanahan	0,00	94.000,00
44.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	10.809.779,29
45.	Dinas Perhubungan	184.750,00	213.500,00
46.	Dinas Koperasi dan UMKM	0,00	75.600,00
47.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.316.460,00	19.317.490,00
48.	Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah	42.000,00	0,00
49.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.359.750,00
50.	Sekretariat DPRD	0,00	471.000,00
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	560.000,00	0,00
	Jumlah	3.019.650.545,44	16.280.049.616,34
Obat			
1.	Dinas Kesehatan	4.971.713.944,26	(9.341.119.043,63)
2.	UPTD Puskesmas Ampelgading	139.525.243,79	152.723.798,24
3.	UPTD Puskesmas Ardimulyo	144.539.080,74	215.453.260,03
4.	UPTD Puskesmas Bantur	144.077.467,16	224.447.285,53
5.	UPTD Puskesmas Bululawang	149.444.251,86	179.801.080,11
6.	UPTD Puskesmas Dampit	180.458.105,94	232.954.988,12
7.	UPTD Puskesmas Dau	137.363.915,30	225.310.257,78
8.	UPTD Puskesmas Donomulyo	158.527.300,99	219.819.817,04
9.	UPTD Puskesmas Gedangan	167.047.861,48	215.470.476,69
10.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	177.403.695,24	193.995.459,72
11.	UPTD Puskesmas Jabung	207.539.592,22	196.105.544,27
12.	UPTD Puskesmas Kalipare	96.213.533,58	124.335.183,85
13.	UPTD Puskesmas Karangploso	168.820.582,35	241.797.809,98
14.	UPTD Puskesmas Kasembon	106.440.963,82	133.014.984,49
15.	UPTD Puskesmas Kepanjen	225.531.315,06	196.011.882,08
16.	UPTD Puskesmas Ketawang	124.107.907,60	157.757.682,13
17.	UPTD Puskesmas Kromengan	102.560.170,12	197.529.841,04
18.	UPTD Puskesmas Lawang	257.681.671,54	360.168.620,73
19.	UPTD Puskesmas Ngajum	161.277.575,35	259.632.735,93
20.	UPTD Puskesmas Ngantang	181.810.164,02	257.740.642,13
21.	UPTD Puskesmas Pagak	154.974.742,26	174.861.612,54
22.	UPTD Puskesmas Pagelaran	144.538.996,52	192.427.170,23
23.	UPTD Puskesmas Pakis	250.546.747,43	325.743.081,19
24.	UPTD Puskesmas Pakisasji	189.640.193,38	307.929.898,34
25.	UPTD Puskesmas Pamotoan	322.548.796,97	329.593.650,72
26.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	211.739.431,91	228.036.743,34
27.	UPTD Puskesmas Pujon	239.578.979,17	235.628.419,83
28.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Kulon	117.681.760,17	155.524.833,58
29.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	255.678.536,33	230.218.735,28
30.	UPTD Puskesmas Singosari	165.604.436,21	156.807.105,00

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
31.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	143.812.019,81	223.827.053,50
32.	UPTD Puskesmas Sumberpucung	163.591.470,46	160.168.013,55
33.	UPTD Puskesmas Tajinan	91.763.019,63	130.366.998,31
34.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	157.265.023,03	197.948.017,25
35.	UPTD Puskesmas Tumpang	146.859.080,04	246.291.088,25
36.	UPTD Puskesmas Turen	136.161.102,05	184.666.862,00
37.	UPTD Puskesmas Wagir	200.452.884,70	94.245.431,54
38.	UPTD Puskesmas Wajak	182.450.724,05	165.138.393,10
39.	UPTD Puskesmas Wonokerto	156.456.851,98	170.742.868,87
40.	UPTD Puskesmas Wonosari	69.139.826,91	64.355.039,40
41.	RSUD Kanjuruhan	10.442.061.523,31	0,00
42.	RSUD Lawang	5.665.227.524,86	4.643.721.421,78
43.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	332.750,00
44.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	133.146.720,00	594.140.043,00
	Jumlah	27.743.004.733,60	3.855.667.536,83
Obat-Obatan Lainnya			
1.	UPTD Puskesmas Pakisaji	2.403.486,00	0,00
2.	RSUD Kanjuruhan	101.628.328,00	5.905.222.500,87
3.	RSUD Lawang	20.595.606,00	28.210.175,00
4.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.509.855.176,00	4.074.943.727,00
5.	Kecamatan Poncokusumo	0,00	1.504.000,00
	Jumlah	5.634.482.596,00	10.009.880.402,87
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			
1.	Dinas Kesehatan	0,00	939.867.840,00
2.	UPTD Puskesmas Ampelgading	0,00	21.603.887,00
3.	UPTD Puskesmas Bantur	10.394.000,00	8.471.990,00
4.	UPTD Puskesmas Bululawang	22.300.000,00	20.931.003,00
5.	UPTD Puskesmas Dampit	0,00	6.807.600,00
6.	UPTD Puskesmas Dau	10.934.000,00	4.871.879,00
7.	UPTD Puskesmas Gondanglegi	0,00	8.287.850,00
8.	UPTD Puskesmas Kalipare	0,00	15.887.400,00
9.	UPTD Puskesmas Kasembon	10.974.000,00	28.597.663,00
10.	UPTD Puskesmas Kepanjen	17.052.000,00	7.422.720,00
11.	UPTD Puskesmas Ketawang	5.396.000,00	6.046.200,00
12.	UPTD Puskesmas Kromengan	0,00	9.025.320,00
13.	UPTD Puskesmas Lawang	12.420.000,00	0,00
14.	UPTD Puskesmas Ngajum	0,00	17.418.300,00
15.	UPTD Puskesmas Ngantang	18.476.000,00	1.542.000,00
16.	UPTD Puskesmas Pagak	0,00	3.782.100,00
17.	UPTD Puskesmas Pagelaran	3.949.000,00	1.412.158,00
18.	UPTD Puskesmas Poncokusumo	0,00	11.358.300,00
19.	UPTD Puskesmas Pujon	15.670.000,00	1.346.000,00
20.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Kulon	3.227.240,00	4.162.356,00
21.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan	3.340.350,00	10.695.450,00
22.	UPTD Puskesmas Sitiarjo	6.342.887,36	18.553.962,00
23.	UPTD Puskesmas Sumberpucung	0,00	10.600.200,00
24.	UPTD Puskesmas Tajinan	3.537.835,00	0,00
25.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo	1.127.574,00	16.171.650,00
26.	UPTD Puskesmas Turen	4.437.000,00	52.544.372,00
27.	UPTD Puskesmas Wajak	0,00	13.610.400,00
28.	UPTD Puskesmas Wonokerto	0,00	7.564.200,00
29.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5.834.673.304,00	5.834.673.304,00
30.	Dinas Sosial	0,00	22.057.209,00
31.	Dinas Lingkungan Hidup	240.000.000,00	0,00
32.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	18.000.000,00	116.500.000,00

No	Jenis Persediaan - Nama SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Jumlah	6.242.251.190,36	7.221.813.313,00
Natura			
1.	Dinas Pendidikan	364.000,00	2.160.000,00
2.	UPTD Puskesmas Karangploso	10.452.691,20	0,00
3.	UPTD Puskesmas Pujon	2.628.106,00	0,00
4.	RSUD Kanjuruhan	84.943.795,62	111.155.588,70
5.	RSUD Lawang	66.770.145,17	20.663.175,62
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	628.224.950,00	6.634.840,00
7.	Dinas Sosial	0,00	5.755.518,00
8.	Dinas Tenaga Kerja	160.000,00	0,00
9.	Dinas Pertanahan	408.000,00	494.000,00
10.	Dinas Perhubungan	2.618.000,00	1.445.200,00
11.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	181.000,00	101.700,00
12.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	384.000,00
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.000,00	0,00
14.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	172.000,00	130.000,00
15.	Lumbung Desa Modern	0,00	4.037.000,00
16.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	470.251.662,00	61.566.216,00
17.	Inspektorat Daerah	0,00	155.350,00
18.	Kecamatan Pujon	86.500,00	0,00
19.	Kecamatan Kasembon	186.000,00	0,00
20.	Kecamatan Pakis	217.500,00	56.000,00
21.	Kecamatan Wagir	2.134.000,00	0,00
22.	Kecamatan Sumberpucung	76.000,00	0,00
	Jumlah	1.269.900.349,99	214.738.588,32
Pakan			
1.	Dinas Perikanan	1.260.000,00	20.694.721,00
2.	Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan	62.480.000,00	170.831.400,00
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	260.000,00	768.000,00
	Jumlah	64.000.000,00	192.294.121,00
Natura dan Pakan Lainnya			
1.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	16.905.000,00	0,00
2.	Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan	0,00	3.869.250,00
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	144.000,00	0,00
	Jumlah	17.049.000,00	3.869.250,00
	Jumlah	73.080.929.721,54	78.571.102.731,27

Rincian lebih lanjut menjelaskan keterkaitan Persediaan, Belanja Persediaan dan Beban Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 103. Rincian Perhitungan Persediaan Per 31 Desember Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Persediaan	393.816.923.191,48
2.	Belanja Persediaan	132.947.850.885,00
3.	Persediaan Awal Tahun	78.571.102.731,27
4.	Persediaan Akhir Tahun	73.080.929.721,54

No.	Uraian	Jumlah
	Selisih (1-(2+3-4))	255.378.899.296,75
	Penjelasan:	
5.	Belanja Persediaan BOS	106.933.655.371,61
6.	Koreksi saldo awal Persediaan	8.223,39
7.	Reklasifikasi Beban BLUD ke Beban Persediaan	86.472.302.136,90
8.	Reklasifikasi Beban Tak Terduga dan DID	462.695.069,00
9.	GFK Puskesmas dari Dinas Kesehatan	10.712.997.895,22
10.	BTT Puskesmas dari Dinas Kesehatan	69.758.283,25
11.	Dropping Puskesmas dari Dinas Kesehatan	6.508.040.335,44
12.	Hibah vaksin, BMHP, Karcis	29.390.698.835,50
13.	Hibah Barang dari Kementerian / Provinsi	86.114.314.446,60
14.	Hibah dari SKPD lain	3.109.811.901,62
15.	Hibah Barang dari Perusahaan/Swasta	501.537.000,00
16.	Hibah Barang Lembaga/Ormaz/Baznas/ Balitkab	41.245.200,00
17.	Hibah Barang dari Masyarakat	0,00
18.	Hibah Barang ke SKPD Lain	(82.623.595.567,85)
19.	Hutang Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023	12.688.921.753,24
20.	Hutang Beban Tahun Anggaran 2022	(5.787.132.785,12)
21.	Sisa Dana BOS	0,00
22.	Cetak dari Dinas Kesehatan	56.074.590,50
23.	KOPIPU	85.573.538,45
24.	PMT	641.993.069,00
	Total (5-24)	255.378.899.296,75

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	360.373.613.168,05	351.616.176.857,35

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen. Investasi Non Permanen meliputi Investasi Non Permanen Lainnya dan Penyisihan piutang Dana Bergulir diragukan Tertagih. Sedangkan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Jangka Panjang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	5.265.321.172,88	5.088.589.458,19

Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp5.265.321.172,88 tersebut merupakan kegiatan investasi yang terdiri dari Invenstasi Non Permanen lainnya dan Penyisihan Piutang Dana Bergulir diragukan tertagih dengan rincian masing-masing sebagai berikut.

1. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	7.211.659.100,00	7.211.659.100,00

a) Merupakan Dana bergulir yaitu fasilitas pemberian pinjaman lunak Pemerintah Kabupaten Malang yang dilaksanakan oleh BLUD Dana Bergulir UMKM. Dana Bergulir yang dikelola oleh BLUD UMKM sebesar Rp7.211.659.100,00 terdiri dari:

- 1) Dana yang ditransfer dari APBD Kabupaten Malang melalui Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp4.534.329.000,00 yang dicairkan melalui 3 tahap yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 melalui SP2D Nomor 11863/1.20.1.20.05.02/LS/2010, Rp1.853.989.000,00 melalui SP2D Nomor 00770/1.20.1.20.05.02/LS/2010, Rp680.340.000,00 melalui SP2D Nomor 06260/SP2D-LS/4.02.01/2012. Selanjutnya, dana tersebut dikelola oleh BLUD Dana Bergulir dengan memberikan fasilitas pemberian pinjaman lunak kepada pelaku UMKM/Koperasi.
- 2) Pada tahun 2016 dicairkan dana sebesar Rp596.329.538,05 guna penambahan modal pada UPTD Dana Bergulir melalui SP2D Nomor 06297/SP2D LS/1.20.05.02/2016 tanggal 15 Oktober 2016.
- 3) Pada Tahun 2019 Dana Bergulir yang sebelumnya dikelola oleh Pokja Dana Bergulir sebesar Rp1.985.926.624,47 merupakan tunggakan POKJA Tahun 2010 yang menjadi bagian dari Investasi Non Permanen Dana Bergulir. Tim Pokja tersebut diberikan kewenangan bersama kepada enam SKPD yaitu: Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian dan Perkebunan, untuk merekomendasikan Debitur yang akan mendapatkan pinjaman lunak. Setelah Pokja dibubarkan, maka pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada BLUD Dana Bergulir UMKM. Tambahan pendapatan dana Bergulir yang direklasifikasikan ke Investasi non Permanen Dana Bergulir sebesar Rp81.000.561,95.

- 4) Pada tahun 2019 telah dicairkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 guna penambahan Modal pada UPTD Dana Bergulir melalui SP2D Nomor 08013/SP2D LS/1.02.01.02/2019 tanggal 22 November 2019
- 5) Pada Tahun 2020 terdapat Koreksi Tunggakan Pokja yang menjadi bagian dari Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebesar Rp1.072.034.207,16.
- 6) Pada Tahun 2021 terdapat Koreksi atas Investasi Dana Bergulir Pokja yang menjadi bagian dari Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebesar Rp913.892.417,31.

2. Penyisihan Piutang Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Penyisihan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Dana	(Rp)	(Rp)
Bergulir	(1.946.337.927,12)	(2.123.069.641,81)
Diragukan		
Tertagih		

Pemerintah Kabupaten Malang telah menyajikan Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang, dalam hal ini Penyisihan tersebut bukan merupakan penghapusan Dana Bergulir.

Saldo Penyisihan Dana Bergulir perlu disajikan agar nilai Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir dapat disajikan sesuai prinsip *Net Realizable Value (NRV)*

sebagaimana diatur dalam SAP. Perhitungan Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih disajikan lebih rinci dalam **Lampiran X**.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	355.108.291.995,17	346.527.587.399,16

Penilaian pada Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten menggunakan metode ekuitas, Investasi Pemerintah dinilai sebesar biaya perolehan Investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar presentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian Laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai Investasi Pemerintah Daerah. Adapun Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

**Tabel 104. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Investasi Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	PDAM Kabupaten Malang	278.791.385.232,00	260.973.533.219,00
2.	PT Kigumas	2.946.601.040,39	3.829.671.162,89
3.	PT BPR Artha Kanjuruhan	4.983.585.797,81	8.943.135.885,00
4.	PD Jasa Yasa	4.977.858.674,97	9.372.385.882,27
5.	BPD Jawa Timur	63.408.861.250,00	63.408.861.250,00
	Jumlah	355.108.291.995,17	346.527.587.399,16

Perhitungan Penyertaan Modal disajikan lebih rinci dalam **Lampiran XI dan Lampiran XV**.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. PDAM Kabupaten Malang

Pemerintah Kabupaten Malang memiliki prosentase kepemilikan 100% atas Penyertaan Modal pada PDAM, dengan nilai Penyertaan sebesar Rp278.791.385.232,00. Jumlah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

pada PDAM Kabupaten Malang yang telah disetor penuh yang terdiri dari:

Tabel 105. Rincian Penyertaan Modal Dasar pada PDAM Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Malang No. 2 Tahun 1988 tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 1981 Tentang Pendirian PDAM.	623.874.950,00
2.	Penyertaan modal berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Malang No. 1 Tahun 1989, tentang persetujuan Penambahan Modal Dasar PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, antara lain: a) Penyertaan ex Proyek Air Minum Kecamatan Pakis Rp210.456.760,00 b) Penyertaan ex Proyek Inpres PIPANISASI Rp1.103.229.307,00; c) Penyertaan ex Bantuan PT. Madusari Lawang Rp22.219.200,00	1.335.905.267,00
3.	Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Malang sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malang kepada PDAM (Berita Acara Serah terima No. 5/BA/W.13/97 tanggal 5 Juni 1997 tentang Penghibahan Status Tetap Asset Eks. Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sebagai Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang pada PDAM)	10.184.534.433,00
4.	Penyertaan Modal berdasarkan Keputusan Bupati No. 66 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2004, yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara PDAM dengan Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan tanggal 29 September 2004, yaitu Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih di Sumber Ngembul Desa Randugading Kecamatan Tajinan Captering Sumber Ngembul Kec.Tajinan	700.000.000,00
5.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malang yang telah diakui dan dicatat dalam Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Malang sejak tahun 1994 maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang	440.716.000,00
6.	Penyertaan Modal Pemerintah 2.000 SR Hibah 2015	5.000.000.000,00
7.	Penyertaan Modal Pemerintah 8.000 SR Hibah 2016	30.000.000.000,00
8.	Penyertaan Modal Pemerintah 8.000 SR Hibah 2017	30.000.000.000,00
9.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.000 SR Hibah 2018	17.000.000.000,00
10.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari PAK	1.500.000.000,00
11.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.000 SR Hibah 2020	17.000.000.000,00
12.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.000 SR Hibah 2021	13.000.000.000,00
13.	Dikurangi dengan penyerahan Asset ke Pemerintah Kota Batu	(342.270.169,00)
14.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3.000 SR Hibah 2021	9.000.000.000,00
15.	Penyertaan Modal Pemerintah SPAM Malang Selatan Tahun 2021 (Tahap I)	6.017.171.000,00
16.	Penyertaan Modal Pemerintah SPAM Malang Selatan Tahun 2021 (Tahap II)	14.040.068.519,00
17.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.500 SR Hibah 2022 (Tahap I)	10.000.000.000,00

No	Uraian	Jumlah
18.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.000 SR Hibah 2022 (Tahap II)	3.500.000.000,00
19.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3.500 SR Hibah 2023	10.500.000.000,00
20.	Penyertaan Modal Pemerintah SPAM Kaligoro	1.500.000.000,00
	Jumlah (1-13)	181.000.000.000,00

Selain Penyertaan Modal dasar sebesar Rp181.000.000.000,00 tersebut, juga terdapat Penyertaan Modal yang masih belum ditetapkan statusnya sebesar Rp31.292.764.300,00. Adapun rincian dari Penyertaan Modal yang belum ditetapkan statusnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 106. Rincian Penyertaan Modal yang belum ditetapkan statusnya PDAM Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Penyertaan Modal di Curungrejo dan Sumberpucung BAST No. 2/BAST/PK.PAMJT/2010	1.858.541.300,00
2.	Penyertaan Modal di Sendangbiru BA No. 305/BA/P3SP/2003	2.022.572.200,00
3.	Penyertaan Modal di Wagir BAST No. 12/BAST/DK.PAMJT/2010, BAST No. 56/BAST/DK.PAMJT/2010	1.282.944.300,00
4.	Penyertaan Modal di Sumberkemuning I (ik.02.04/130.I/DAB/IKMN/IX/2010)	4.050.647.700,00
5.	Penyertaan Modal di Sumberkemuning II (ik.02.04/132.I/DAB/IKMN/IX/2010)	2.878.058.800,00
6.	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat di Sumber Pitu	19.200.000.000,00
	Jumlah yang belum ditetapkan statusnya	31.292.764.300,00

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Malang menambah Penyertaan Modal melalui pencairan SP2D Nomor 02115/SP2D-LS/5.02.0.0.0.28/2021 sebesar Rp9.000.000.000,00 sebagai pelaksanaan pekerjaan pemasangan 4.000 Sambungan Rumah Baru (SRB) Program Hibah Air Minum APBN, pencairan Tahap ke dua SP2D Nomor 02145/SP2D-LS/5.02.0.0.0.28/2021 sebesar Rp6.017.171.000.000,00 sebagai Penyertaan Modal Pemerintah SPAM Malang Selatan Tahun 2021 (Tahap I) dan pencairan Tahap ke tiga SP2D Nomor 06173/SP2D-LS/5.02.0.0.0.28/2021 sebesar Rp14.040.068.519,00

sebagai Penyertaan Modal Pemerintah SPAM Malang Selatan Tahun 2021 (Tahap II).

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Malang menambah Penyertaan Modal melalui pencairan SP2D Nomor 02485/SP2D-LS/5.02.0.0.0.28/2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 sebagai pelaksanaan pekerjaan pemasangan 4.500 Sambungan Rumah Baru (SRB) Program Hibah Air Minum APBN dan pencairan Tahap ke dua SP2D Nomor 08124/SP2D-LS/5.02.0.0.0.28/2022 sebesar Rp3.500.000.000,00 sebagai pelaksanaan pekerjaan pemasangan 4.500 Sambungan Rumah Baru (SRB) Program Hibah Air Minum APBN.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Malang menambah Penyertaan Modal melalui pencairan SP2D Nomor 05.14/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.02/08/2023 sebesar Rp10.500.000.000,00 sebagai pelaksanaan pekerjaan pemasangan 3.500 Sambungan Rumah Baru (SRB) Program Hibah Air Minum APBN dan pencairan Tahap ke dua SP2D Nomor 05.14/04.0/2/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.04/12/2023 sebesar Rp1.500.000.000,00 sebagai pelaksanaan pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang memanfaatkan sumber mata air Kaligoro.

Berdasarkan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Malang terhadap PDAM sebesar 100%, maka Jumlah Penyertaan Modal menurut Metode Ekuitas disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 107. Rincian Penyertaan Modal PDAM Metode Ekuitas per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
Modal dan Cadangan			
1.	Modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh	181.000.000.000,00	169.000.000.000,00
2.	Penyertaan Modal yang belum ditentukan Statusnya	31.292.764.300,00	31.292.764.300,00
3.	Modal Hibah	5.898.297.359,00	5.898.297.359,00
4.	Cadangan umum	21.147.351.913,00	17.141.848.659,00
5.	Cadangan tujuan	8.817.016.683,00	8.817.016.683,00
6.	Cadangan	1.025.000.000,00	775.000.000,00
7.	Laba(Rugi) yang belum dibagikan	0,00	0,00
8.	Laba(Rugi) Tahun Berjalan	29.610.954.977,00	28.048.606.218,00
9.	Jumlah (1 - 8)	278.791.385.232,00	260.973.533.219,00

No.	Uraian	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
10.	Kepemilikan saham	100%	100%
11.	Penyertaan Modal dg Metode Ekuitas (8 x 9)	278.791.385.232,00	260.973.533.219,00

Perhitungan Laba / Rugi lebih rinci disajikan dalam **Lampiran XVI.**

2. PT Kigumas

Pemerintah Kabupaten Malang memiliki prosentase sebesar 90% atas Penyertaan Modal pada PT Kigumas. Berdasarkan Laporan Keuangan dari PT Kigumas Tahun Buku 2023, maka nilai Penyertaan Modal dengan menggunakan Metode Ekuitas adalah sebesar Rp2.946.601.040,39.

Pada Tahun Anggaran 2014 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2003 tentang PT. Kigumas. Perda tersebut menetapkan Modal dasar Pemerintah Kabupaten Malang kepada PT Kigumas sebesar Rp13.657.200.000,00. PT Kigumas sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 mengalami kerugian dan sudah tidak beroperasi sejak tahun 2010. Pada tahun 2012 dan 2013 Laporan Keuangan PT Kigumas telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo Sutjahjo, Subyantara dan Rekan.

Selanjutnya pada tahun 2021 telah disusun Laporan Keuangan PT. Kigumas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK ETAP). Berdasarkan Laporan Keuangan PT Kigumas Tahun 2023 (*Unaudited*), Jumlah Penyertaan Modal menurut Metode Ekuitas pada pada PT Kigumas dapat dihitung sebagai berikut:

**Tabel 108. Rincian Penyertaan Modal PT. Kigumas
dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2023
(Unaudited) dan 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023 (Unaudited)	Tahun 2022 (Unaudited)
	Modal		
1.	Modal Disetor	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
2.	L/R Ditahan	(20.744.809.819,01)	(19.763.620.794,01)
3.	L/R Berjalan	(981.189.025,00)	(981.189.025,00)
4.	Jumlah Ekuitas (a)	3.274.001.155,99	4.255.190.180,99
5.	Kepemilikan saham (b)	90%	90%
6.	Penyertaan Modal dg Metode Ekuitas (a x b)	2.946.601.040,39	3.829.671.162,89

Perhitungan Laba / Rugi lebih rinci disajikan dalam
Lampiran XVI

3. PT BPR Artha Kanjuruhan

Pemerintah Kabupaten Malang memiliki prosentase sebesar 93,75% atas Penyertaan Modal Pada PT. BPR Artha Kanjuruhan. Berdasarkan Laporan Keuangan dari PT. BPR Artha Kanjuruhan Tahun Buku 2022 (*Unaudited*), maka nilai Penyertaan Modal dengan menggunakan Metode Ekuitas adalah sebesar Rp4.983.585.797,81. Jumlah Penyertaan Modal menurut Metode Ekuitas pada PT. BPR Artha Kanjuruhan dapat dihitung sebagai berikut.

**Tabel 109. Rincian Penyertaan Modal pada PT. BPR
Kanjuruhan dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember
2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
	Modal dan Cadangan		
1.	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00
2.	Penyertaan modal yang belum ditentukan	0,00	0,00
3.	Cadangan Umum	1.471.722.262,00	1.471.722.262,00
4.	Cadangan Tujuan	0,00	0,00
5.	Saldo Laba yang Belum ditentukan tujuannya	(10.155.897.411,00)	(5.932.377.318,00)
6.	Jumlah (a)	5.315.824.851,00	9.539.344.944,00
7.	Kepemilikan saham (b)	93,75%	93,75%
8.	Penyertaan Modal dg Metode Ekuitas (axb)	4.983.585.797,81	8.943.135.885,00

Perhitungan Laba / Rugi lebih rinci disajikan dalam
Lampiran XVI

4. PD Jasa Yasa

Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Malang dengan PD Jasa Yasa telah melakukan rekonsiliasi atas Aset-aset yang dijadikan Penyertaan Modal pada PD Jasa Yasa. Hasil rekonsiliasi tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Jasa Yasa Kabupaten Malang yang menyatakan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malang pada PD Jasa Yasa sebesar Rp13.355.777.379,97, yang terdiri dari:

Tabel 110. Rincian Penyertaan Modal pada PD Jasa Yasa Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1.	Hasil kesepakatan bersama atas pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malang pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa pada tanggal 19 Mei 2014, antara lain: a. Aset Songgoriti Rp11.320.702.125,00 b. Aset Non Songgoriti Rp1.420.216.611,53; c. Akumulasi Penyusutan Aset Wendit Rp254.858.634,44.	12.995.777.379,97
2.	Konversi Piutang Pemerintah Kabupaten Malang pada PD Jasa Yasa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 15 Agustus 2014 Nomor 950/1824/421.119/2014-950/524/421.501/2014 sebesar Rp360.000.000,00.	360.000.000,00
	Jumlah	13.355.777.379,97

Pemerintah Kabupaten Malang memiliki prosentase sebesar 100% atas Penyertaan Modal Pada PD Jasa Yasa. Berdasarkan Laporan Keuangan dari PD Jasa Yasa Tahun Buku 2023 (*Unaudited*), maka nilai Penyertaan Modal dengan menggunakan Metode Ekuitas adalah sebesar Rp4.977.858.674,97 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 111. Rincian Penyertaan Modal pada PD Jasa Yasa Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023 (Unaudited)	Tahun 2022 (Unaudited)
1.	Modal dan Cadangan		
2.	Modal dasar (Modal Disetor)	13.355.777.379,97	13.355.777.379,97
3.	Modal yang belum ditentukan statusnya	0,00	0,00
4.	Laba ditahan	(8.994.560.963,00)	(4.685.309.008,46)
5.	Laba/ rugi tahun berjalan	616.642.258,00	701.917.510,76
6.	Jumlah (a)	4.977.858.674,97	9.372.385.882,27
7.	Kepemilikan saham (b)	100%	100%
8.	Penyertaan Modal dg Metode Ekuitas (acb)	4.977.858.674,97	9.372.385.882,27

Perhitungan Laba / Rugi lebih rinci disajikan dalam **Lampiran XVI**

5. BPD Jawa Timur (Bank Jatim)

Penyertaan Modal pada BPD Jawa Timur (Bank Jatim) dengan prosentase kepemilikan sebesar 2,125% senilai Rp63.408.861.250,00 merupakan saldo penyertaan modal pada BPD Jawa Timur per 31 Desember 2023 yang dicatat menggunakan metode biaya (*cost method*) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 112. Rincian Penyertaan Modal pada BPD Jawa Timur (Bank Jatim) Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saham I Tanggal 31 Desember 2002 Surat Kolektif Saham No. 05.001	1.070.000.000,00
2.	Saham II Tanggal 28 November 2003 Surat Kolektif Saham No. 05.002	2.616.000.000,00
3.	Saham III Tanggal 08 Februari 2005 Surat Kolektif Saham No. 05.003	1.061.000.000,00
4.	Saham IV Tanggal 22 September 2005 Surat Kolektif Saham No. 05.004a	544.000.000,00
5.	Saham V Tanggal 01 Maret 2006 Surat Kolektif Saham No. 05.005	1.000.000,00
6.	Saham VI Tanggal 12 April 2007	1.110.000.000,00
7.	Saham VII Tanggal 12 April 2007	2.500.000.000,00
8.	Saham VIII-IX Tanggal 18 Desember 2007	2.000.000.000,00
9.	Saham X Tanggal 16 Desember 2008 Surat kolektif Saham seri A No.665.611 s/d 666.860	1.250.000.000,00
	Jumlah Kepemilikan Saham 1 - 10	12.152.000.000,00
10.	Sisa Setoran Saham yang belum genap Rp1.000.000,00	27,00
11.	Penyertaan Modal tgl.17 Nop 2009. Sesuai surat dari Bank Jatim No. 048/045/Dir/Djl-Dn tanggal 5 Maret 2010 setoran penyertaan Modal Rp999.973,00 dan Rp27,00 dijadikan satu lembar saham Rp1.000.000,00	999.973,00
	Jumlah 10 - 12	12.153.000.000,00
12.	SP2D tanggal 16 Juni 2011 Nomor 03655/LS/PAD/2011	5.000.000.000,00
13.	SP2D tanggal 9 Pebruari 2012 Nomor: 00107/1.20.1.20.0502/LS/ 2012	27.500.000.000,00
14.	Berdasarkan surat Pimpinan Bank Jatim Nomor: 050/3006/PN/CML /BJ tanggal 23 Juli 2016 diberitahukan bahwa, Cadangan saham Pemda Malang dengan adanya konversian setoran saham mulai tanggal 7 Mei 2012 mendapat tambahan setoran saham Rp18.755.861.250,00 sehingga setoran saham pemda Rp44.653.000.000,00 menjadi Rp63.408.861.250,00	18.755.861.250,00
	Jumlah 13 - 16	63.408.861.250,00

5.3.1.3. ASET TETAP

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap	(Rp)	(Rp)
	5.312.343.950.703,29	5.116.413.915.729,60

Saldo Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.312.343.950.703,29 dan Rp5.116.413.915.729,60 Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap dapat dijelaskan pada **Lampiran 12 dan** Tabel berikut:

**Tabel 113 Rincian Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Per 31 Desember 2022	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Per 31 Desember 2023
1	Tanah	1.607.200.163.776,70	133.482.697.943,55	(64.538.198.960,00)	1.676.144.662.760,25
2	Peralatan dan Mesin	1.909.397.282.476,35	194.394.194.195,88	(34.172.802.260,79)	2.069.618.674.411,44
3	Gedung/ Bangunan	2.350.282.620.147,02	78.038.789.048,91	(34.175.288.816,09)	2.394.146.120.379,84
4	Jaringan Irigasi dan Jembatan	5.190.883.683.503,08	343.152.680.975,00	(2.523.593.871,62)	5.531.512.770.606,46
5	Aset Tetap lainnya	51.109.299.444,62	2.554.534.292,00	(1.746.828.571,00)	51.917.005.165,62
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.689.659.385,00	10.687.710.179,00	(2.498.060.910,00)	11.879.308.654,00
7	Akumulasi Penyusutan	(5.996.148.793.003,17)	-	(426.725.798.271,39)	(6.422.874.591.274,32)
	Jumlah	5.116.413.915.729,60	762.310.606.634,34	(566.380.571.660,88)	5.312.343.950.703,29

Adapun rincian rekapitulasi Aset Tetap dapat dijelaskan pada **Lampiran 12** dan dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tanah	(Rp)	(Rp)
	1.676.144.662.760,25	1.607.200.163.776,70

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai, meliputi harga pembelian dan biaya untuk memperoleh hak/sertifikat, serta biaya yang berhubungan dengan pengukuran, penimbunan, pembongkaran sehingga tanah tersebut siap dipakai. Selama

Tahun Anggaran 2023, terjadi kenaikan nilai Tanah sebesar Rp68.944.498.983,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 114 Aset Tetap Tanah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Per 1 Januari 2023	1.607.200.163.776,70
2	Belanja Modal	34.438.052.554,00
3	Penambahan	
a	Transfer Masuk :	63.188.198.960,00
	1) Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Pertanahan	392.720,00
	2) RSUD Kanjuruhan dari Dinas Pertanahan	5.358.336.730,00
	3) Dinas Kesehatan dari Dinas Ketahanan Pangan	498.200.000,00
	4) Dinas Kesehatan dari Dinas Pertanahan	5.862.840.900,00
	5) Dinas Kesehatan dari Puskesmas Ampelgading	11.536.000,00
	6) Dinas Kesehatan dari Puskesmas Gondanglegl	41.228.000,00
	7) Dinas Kesehatan dari Puskesmas Ketawang	45.450.000,00
	8) Dinas Kesehatan dari Puskesmas Pakis	13.680.000,00
	9) Dinas Kesehatan dari Puskesmas Pakisaji	51.300.000,00
	10) Dinas Ketahanan Pangan dari Dinas Kesehatan	51.300.000,00
	11) Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Pertanahan	9.772.221.090,00
	12) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dari Dinas Pertanahan	27.313.113.196,00
	13) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dari Dinas Pertanahan	2.820.648.039,00
	14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Dinas Pertanahan	30.443.738,00
	15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.321.900.000,00
	16) Dinas Pendidikan dari Dinas Pertanahan	2.614.578.164,00
	17) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Dinas Kesehatan	11.536.000,00
	18) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Dinas Pertanahan	14.590.000,00
	19) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.377.000.000,00
	20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanahan	467.431.152,00
	21) Dinas Sosial dari Dinas Pertanahan	540.000,00
	22) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan dari Dinas Pertanahan	2.715.051,00
	23) Kec. Dampit dari Dinas Pertanahan	2.722.200,00
	24) Kec. Kepanjen dari Kel. Penarukan	1.350.000.000,00
	25) Kec. Lawang dari Dinas Pertanahan	25.307.800,00
	26) Kec. Ngajum dari Dinas Pertanahan	179.900,00
	27) Kec. Pakis dari Dinas Kesehatan	13.680.000,00
	28) Kec. Pujon dari Dinas Pertanahan	241.400,00
	29) Kec. Sumbermanjing Wetan dari Dinas Pertanahan	378.880,00
	30) Kel. Dampit dari Kec. Dampit	2.722.200,00
	31) Kel. Kalirejo dari Kec. Lawang	6.041.800,00
	32) Kel. Lawang dari Kec. Lawang	19.266.000,00
	33) Puskesmas Gondanglegl dari Dinas Kesehatan	45.450.000,00
	34) Puskesmas Pagelaran dari Dinas Kesehatan	41.228.000,00
b	Hibah Tambah :	28.289.605.294,44
	1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga - Hibah dari PG Kebonagung (Eks Lori)	28.289.605.294,44
c	Inventarisasi :	4.335.841.135,11
	1) Dinas Kesehatan Inventarisasi	39.600.000,00
	2) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Inventarisasi	3.213.241.135,11

No	Uraian	Jumlah
3)	Kec. Sumbermanjing Wetan - Inventarisasi	1.083.000.000,00
d	Koreksi Nilai Tambah :	3.231.000.000,00
1)	Dinas Pertanahan - Koreksi Nilai	3.231.000.000,00
	Jumlah Penambahan (a+b+c+d)	99.044.645.389,55
4	Pengurangan	
a	Transfer Keluar:	63.188.198.960,00
1)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Pertanahan	392.720,00
2)	RSUD Kanjuruhan dari Dinas Pertanahan	5.358.336.730,00
3)	Dinas Kesehatan dari Dinas Ketahanan Pangan	498.200.000,00
4)	Dinas Kesehatan dari Dinas Pertanahan	5.862.840.900,00
5)	Dinas Kesehatan dari Puskesmas Ampelgading	11.536.000,00
6)	Dinas Kesehatan dari Puskesmas Gondanglegi	41.228.000,00
7)	Dinas Kesehatan dari Puskesmas Ketawang	45.450.000,00
8)	Dinas Kesehatan dari Puskesmas Pakis	13.680.000,00
9)	Dinas Kesehatan dari Puskesmas Pakisaji	51.300.000,00
10)	Dinas Ketahanan Pangan dari Dinas Kesehatan	51.300.000,00
11)	Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Pertanahan	9.772.221.090,00
12)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dari Dinas Pertanahan	27.313.113.196,00
13)	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dari Dinas Pertanahan	2.820.648.039,00
14)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Dinas Pertanahan	30.443.738,00
15)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.321.900.000,00
16)	Dinas Pendidikan dari Dinas Pertanahan	2.614.578.164,00
17)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Dinas Kesehatan	11.536.000,00
18)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Dinas Pertanahan	14.590.000,00
19)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.377.000.000,00
20)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanahan	467.431.152,00
21)	Dinas Sosial dari Dinas Pertanahan	540.000,00
22)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan dari Dinas Pertanahan	2.715.051,00
23)	Kec. Dampit dari Dinas Pertanahan	2.722.200,00
24)	Kec. Kapanjen dari Kel. Penarukan	1.350.000.000,00
25)	Kec. Lawang dari Dinas Pertanahan	25.307.800,00
26)	Kec. Ngajum dari Dinas Pertanahan	179.900,00
27)	Kec. Pakis dari Dinas Kesehatan	13.680.000,00
28)	Kec. Pujon dari Dinas Pertanahan	241.400,00
29)	Kec. Sumbermanjing Wetan dari Dinas Pertanahan	378.880,00
30)	Kel. Dampit dari Kec. Dampit	2.722.200,00
31)	Kel. Kallrejo dari Kec. Lawang	6.041.800,00
32)	Kel. Lawang dari Kec. Lawang	19.266.000,00
33)	Puskesmas Gondanglegi dari Dinas Kesehatan	45.450.000,00
34)	Puskesmas Pagelaran dari Dinas Kesehatan	41.228.000,00
c	Hibah Kurang :	1.350.000.000,00
1)	Kec. Kapanjen - Hibah ke Madrasah Aliyah KH. Moh Said	1.350.000.000,00
	Jumlah Pengurangan (a+b+c)	64.538.198.960,00
	Jumlah Aset Tetap Tanah (1+2+3 - 4)	1.676.144.662.760,25

Berikut rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 115 Rincian Aset Tetap Tanah*(dalam Rupiah)*

No	Tanah per 31 Desember 2023	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	20.268.804.618,18
2.	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	145.785.486.167,00
3.	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	509.010.246.651,32
4.	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	19.067.622.164,00
5.	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	4.050.000,00
6.	Tanah Persil Lainnya	1.109.907.500,00
7.	Tanah Basah	19.938.729.619,00
8.	Tanah Kering	40.975.141.549,60
9.	Tanah Perkebunan	3.754.503.630,00
10.	Tanah Hutan	13.288.067.145,00
11.	Tanah Pertanian	167.615.047.498,31
12.	Tanah Non Persil Lainnya	34.435.045.954,00
13.	Tanah Lapangan Olahraga	48.399.953.176,21
14.	Tanah Lapangan Parkir	29.363.884.000,00
15.	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	20.174.797.140,00
16.	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	100.700.000,00
17.	Tanah untuk Jalan	428.212.818.662,64
18.	Tanah untuk Bangunan Air	14.182.409.676,58
19.	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	3.082.000.000,00
20.	Tanah untuk Makam	7.151.776.852,41
21.	Tanah untuk Taman	115.765.148.451,00
22.	Tanah Kampung	34.458.522.305,00
	Jumlah	1.676.144.662.760,25

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	(Rp)	(Rp)
	2.069.618.674.411,44	1.909.397.282.476,35

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai dengan mesin tersebut siap difungsikan. Selama Tahun Anggaran 2023, terjadi kenaikan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp 160.221.391.934,88 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 116 Aset Tetap Peralatan dan Mesin*(dalam Rupiah)*

	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Per 1 Januari 2023	1.909.397.282.476,35
2	Belanja Modal (Pengadaan)	159.628.882.616,00
3	Penambahan	
a	Inventarisasi :	719.586.310,00
	1) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Inventarisasi	202.971.210,00
	2) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Inventarisasi	516.615.100,00
b	Reklasifikasi Masuk :	908.818.978,55

Uraian		Jumlah
1)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Reklas dari Belanja Modal ATL	6.786.000,00
2)	Badan Pendapatan Daerah - Reklas Kode Barang	236.047.000,00
3)	Dinas Ketahanan Pangan - Reklas Kode Barang	4.825.000,00
4)	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Reklas dari Barang dan Jasa	17.400.000,00
5)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Reklas Kode Barang	4.400.000,00
6)	Dinas Perikanan - Reklas Kode Barang dari Belanja Modal	525.303.000,00
7)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Reklas GB ke PM	113.131.818,55
8)	Kec. Turen - Reklas Belanja Modal ATL ke PM	926.160,00
c	Hibah Tambah :	559.695.000,00
1)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Hibah dari BNPB	282.772.500,00
2)	Satuan Polisi Pamong Praja - Hibah dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan	42.327.500,00
3)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Cv. Aumireta Anggun	97.650.000,00
4)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Hibah dari Kementerian	24.350.000,00
5)	Dinas Tenaga Kerja - Hibah dari Cv. Aumireta Anggun	37.595.000,00
6)	Kel. Candirenggo - Hibah dari Wachid Foundation	75.000.000,00
d	Transfer Masuk	21.372.941.861,33
1)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Badan Pendapatan Daerah	358.450.000,00
2)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	308.800.000,00
3)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	220.100.000,00
4)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Pemuda dan Olahraga	112.650.000,00
5)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	307.900.000,00
6)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Tenaga Kerja	346.940.000,00
7)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Sekretariat Daerah	21.000.000,00
8)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Sekretariat DPRD	2.048.760.000,00
9)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	762.060.000,00
10)	Badan Penelitian dan Pengembangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	125.000.000,00
11)	Satuan Polisi Pamongpraaja dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	505.400.000,00
12)	Sekretariat Daerah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.762.207.900,00
13)	Sekretariat Daerah dari Dinas Lingkungan Hidup	237.300.000,00
14)	Sekretariat Daerah dari Dinas Ketahanan Pangan	307.900.000,00
15)	Sekretariat Daerah dari Dinas Perhubungan	32.470.000,00
16)	Sekretariat Daerah dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	151.521.000,00
17)	Sekretariat DPRD dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.582.400.000,00
18)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.600.000,00
19)	Dinas Ketahanan Pangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	400.400.000,00
20)	Dinas Komunikasi dan Informatika dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	371.900.000,00
21)	Dinas Komunikasi dan Informatika dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30.295.000,00
22)	Dinas Lingkungan Hidup dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	321.700.000,00
23)	Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	27.000.000,00

	Uraian	Jumlah
24)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Inspektorat Daerah	225.000.000,00
25)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	157.880.000,00
26)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Sekretariat Daerah	178.021.533,33
27)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	490.599.700,00
28)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	478.073.000,00
29)	Dinas Pendidikan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	174.780.000,00
30)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	613.700.000,00
31)	Dinas Pertanahan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	400.400.000,00
32)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dari Sekretariat Daerah	458.000.000,00
33)	Dinas Sosial dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	27.975.000,00
34)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Badan Keuangan dan Aset Daerah	60.000.000,00
35)	Dinas Tenaga Kerja dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	371.900.000,00
36)	Kec. Sumberpucung dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46.500.000,00
37)	Kel Sedayu dari Kec. Turen (Pengalihan Belanja Modal)	19.078.718,00
38)	Kel. Ardirejo dari Kec. Kepanjen (Pengalihan Belanja Modal)	63.850.000,00
39)	Kel. Candirenggo dari Kec. Singosari (Pengalihan Belanja Modal)	29.998.860,00
40)	Kel. Cepokomulyo dari Kec. Kepanjen (Pengalihan Belanja Modal)	75.535.500,00
41)	Kel. Dampit dari Kec. Dampit (Pengalihan Belanja Modal)	172.000,00
42)	Kel. Kalirejo dari Kec. Lawang (Pengalihan Belanja Modal)	29.719.000,00
43)	Kel. Kepanjen dari Kec. Kepanjen (Pengalihan Belanja Modal)	39.000.000,00
44)	Kel. Pagentan dari Kec. Singosari (Pengalihan Belanja Modal)	64.517.400,00
45)	Kel. Penarukan dari Kec. Kepanjen (Pengalihan Belanja Modal)	19.487.250,00
e	Koreksi Nilai :	11.204.269.430,00
1)	Badan Pendapatan Daerah - Koreksi Nilai Akibat Gagal Debet (Bank Jatim)	1.783.784,00
2)	Dinas Pendidikan - Koreksi Nilai (Penyesuaian Belanja Modal Bos)	11.202.485.646,00
	Jumlah Penambahan (a+b+c+d+e)	34.765.311.579,88
4	Pengurangan	
a	Transfer Keluar :	21.372.941.861,33
1)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Badan Pendapatan Daerah	358.450.000,00
2)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	308.800.000,00
3)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	220.100.000,00
4)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Pemuda dan Olahraga	112.650.000,00
5)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	307.900.000,00
6)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Tenaga Kerja	346.940.000,00
7)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Sekretariat Daerah	21.000.000,00
8)	Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Sekretariat Dprd	2.048.760.000,00

	Uraian	Jumlah	
9)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	762.060.000,00	
10)	Badan Penelitian dan Pengembangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	125.000.000,00	
11)	Satuan Polisi Pamongpraja dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	505.400.000,00	
12)	Sekretariat Daerah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.762.207.900,00	
13)	Sekretariat Daerah dari Dinas Lingkungan Hidup	237.300.000,00	
14)	Sekretariat Daerah dari Dinas Ketahanan Pangan	307.900.000,00	
15)	Sekretariat Daerah dari Dinas Perhubungan	32.470.000,00	
16)	Sekretariat Daerah dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	151.521.000,00	
17)	Sekretariat DPRD dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.582.400.000,00	
18)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.600.000,00	
19)	Dinas Ketahanan Pangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	400.400.000,00	
20)	Dinas Komunikasi dan Informatika dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	371.900.000,00	
21)	Dinas Komunikasi dan Informatika dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30.295.000,00	
22)	Dinas Lingkungan Hidup dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	321.700.000,00	
23)	Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	27.000.000,00	
24)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Inspektorat Daerah	225.000.000,00	
25)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	157.880.000,00	
26)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Sekretariat Daerah	178.021.533,33	
27)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	490.599.700,00	
28)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	478.073.000,00	
29)	Dinas Pendidikan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	174.780.000,00	
30)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	613.700.000,00	
31)	Dinas Pertanahan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	400.400.000,00	
32)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dari Sekretariat Daerah	458.000.000,00	
33)	Dinas Sosial dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	27.975.000,00	
34)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Badan Keuangan dan Aset Daerah	60.000.000,00	
35)	Dinas Tenaga Kerja dari Badan Keuangan dan Aset Daerah	371.900.000,00	
36)	Kec. Sumberpucung dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46.500.000,00	
37)	Kel. Sedayu dari Kec. Turen (Pengalihan Belanja Modal)	19.078.718,00	
38)	Kel. Ardirejo dari Kec. Kapanjen (Pengalihan Belanja Modal)	63.850.000,00	
39)	Kel. Candirenggo dari Kec. Singosari (Pengalihan Belanja Modal)	29.998.860,00	
40)	Kel. Cepokomulyo dari Kec. Kapanjen (Pengalihan Belanja Modal)	75.535.500,00	
41)	Kel. Dampit dari Kec. Dampit (Pengalihan Belanja Modal)	172.000,00	
42)	Kel. Kalirejo dari Kec. Lawang (Pengalihan Belanja Modal)	29.719.000,00	
43)	Kel. Kapanjen dari Kec. Kapanjen (Pengalihan Belanja Modal)	39.000.000,00	
44)	Kel. Pagentan dari Kec. Singosari (Pengalihan Belanja Modal)	64.517.400,00	

	Uraian	Jumlah
	45) Kel. Penukutan dari Kec. Kepanjen (Pengalihan Belanja Modal)	19.487.250,00
b	Reklasifikasi Kurang :	1.208.480.400,00
	1) Badan Pendapatan Daerah - Reklas Kode Barang	236.047.000,00
	2) Dinas Ketahanan Pangan - Reklas Kode Barang	4.825.000,00
	3) Dinas Komunikasi dan Informatika - Reklas Belanja Modal PM ke ATB	2.000.000,00
	4) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga - Reklas Belanja Modal PM ke GB	198.523.000,00
	5) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Reklas PM ke Jk	98.812.000,00
	6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Reklas Kode Barang	4.400.000,00
	7) Dinas Perhubungan - Reklas Belanja Modal PM ke ATB	99.653.000,00
	8) Dinas Perikanan - Reklas Kode Barang dari Belanja Modal	525.303.000,00
	9) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Reklas Belanja Modal PM ke ATL	8.985.400,00
	10) Kec. Tirtoyudo - Reklas dari Peralatan Mesin ke Aset Lain-Lain(Rusak Berat)	29.932.000,00
c	Koreksi Kurang :	6.066.932.030,00
	1) Dinas Kesehatan - Koreksi Nilai (Tidak Jadi Belanja Modal)	271.494.990,00
	2) Dinas Pendidikan - Koreksi Nilai (Penyesuaian Belanja Modal BOS)	5.461.537.040,00
	3) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Koreksi Double Catat	333.900.000,00
d	Penghapusan :	3.921.798.802,46
	1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah - Penghapusan Karena Pemusnahan	82.369.100,00
	2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Penghapusan Karena Pemusnahan	137.915.000,00
	3) Inspektorat Daerah - Penghapusan Karena Sebab Lain	95.280.000,00
	4) Sekretariat Daerah - Penghapusan Karena Pemindah Tangan	80.355.140,00
	5) Dinas Ketahanan Pangan - Penghapusan Karena Sebab Lain	7.618.000,00
	6) Dinas Komunikasi dan Dinas Informatika - Penghapusan Karena Penjualan	2.505.953.815,06
	7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Penghapusan Karena Pemusnahan	243.558.800,00
	8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penghapusan Karena Pemusnahan	152.854.235,40
	9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penghapusan Karena Penjualan	57.050.000,00
	10) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Penghapusan Karena Pemusnahan	225.334.285,00
	11) Dinas Perhubungan - Penghapusan Karena Pemusnahan	500.000,00
	12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Penghapusan Karena Sebab Lain	7.300.000,00
	13) Dinas Perpustakaan - Penghapusan Karena Pemusnahan	289.798.428,00
	14) Dinas Sosial - Penghapusan Karena Sebab Lain	15.600.000,00
	15) Dinas Tenaga Kerja - Penghapusan Karena Pemusnahan	8.815.000,00
	16) Kec. Wonosari - Penghapusan Karena Sebab Lain	11.496.999,00
f	Ekstrakomptabel	1.602.649.167,00
	1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Ekstrakomptabel	658.000,00
	2) RSUD Kanjuruhan - Ekstrakomptabel	14.765.000,00
	3) Satuan Polisi Pamong Praja - Ekstrakomptabel	7.310.000,00
	4) Dinas Kesehatan - Ekstrakomptabel	1.315.471.000,00

	Uraian	Jumlah
5)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Ekstrakomptabel	15.294.988,00
6)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga - Ekstrakomptabel	90.959.500,00
7)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Ekstrakomptabel	16.708.180,00
8)	Kec. Gondanglegi - Ekstrakomptabel	11.534.675,00
9)	Kec. Kalipare - Ekstrakomptabel	16.325.000,00
10)	Kel. Candirenggo - Ekstrakomptabel	5.656.560,00
11)	Kel. Dampit - Ekstrakomptabel	172.000,00
12)	Kel. Pagentan - Ekstrakomptabel	3.900.000,00
13)	Kel. Pendarukan - Ekstrakomptabel	5.237.250,00
14)	Kel. Sedayu - Ekstrakomptabel	765.558,00
15)	Puskesmas Jabung - Ekstrakomptabel	9.497.523,00
16)	Puskesmas Bululawang - Ekstrakomptabel	2.668.050,00
17)	Puskesmas Dampit - Ekstrakomptabel	19.080.000,00
18)	Puskesmas Gedangan - Ekstrakomptabel	8.233.814,00
19)	Puskesmas Gondanglegi - Ekstrakomptabel	12.192.996,00
20)	Puskesmas Kromengan - Ekstrakomptabel	980.000,00
21)	Puskesmas Lawang - Ekstrakomptabel	13.042.500,00
22)	Puskesmas Ngajum - Ekstrakomptabel	6.060.000,00
23)	Puskesmas Pagelaran - Ekstrakomptabel	2.830.500,00
24)	Puskesmas Pakis - Ekstrakomptabel	3.258.000,00
25)	Puskesmas Pamotan - Ekstrakomptabel	1.359.750,00
26)	Puskesmas Poncokusumo - Ekstrakomptabel	4.967.000,00
27)	Puskesmas Tirtoyudo - Ekstrakomptabel	5.092.044,00
28)	Puskesmas Tumpang - Ekstrakomptabel	550.000,00
29)	Puskesmas Turen - Ekstrakomptabel	3.139.500,00
30)	Puskesmas Wajak - Ekstrakomptabel	4.009.779,00
31)	Puskesmas Wonosari - Ekstrakomptabel	930.000,00
	Jumlah Pengurangan (a+b+c+d+e+f)	34.172.802.260,79
	Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin (1+2+3 - 4)	2.069.618.674.411,44

Adapun Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Tabel 117 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No	Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	Jumlah
1.	Alat Besar Darat	53.651.108.458,00
2.	Alat Bantu	12.907.441.731,00
3.	Alat Angkutan Darat Bermotor	350.370.064.595,25
4.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	6.530.990.300,00
5.	Alat Angkutan Apung Bermotor	2.171.099.300,00
6.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	732.398.500,00
7.	Alat Bengkel Bermesin	10.350.849.038,34
8.	Alat Bengkel Tak Bermesin	2.107.342.602,96
9.	Alat Ukur	10.131.355.518,00
10.	Alat Pengolahan	19.451.763.477,99
11.	Alat Karitor	102.585.790.452,81
12.	Alat Rumah Tangga	193.268.303.196,06
13.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	41.926.668.356,82
14.	Alat Studio	45.225.576.759,95
15.	Alat Komunikasi	12.046.639.666,01
16.	Peralatan Pemancar	1.156.972.775,00
17.	Peralatan Komunikasi Navigasi	6.850.676,00
18.	Alat Kedokteran	747.809.842.094,57
19.	Alat Kesehatan Umum	24.909.556.450,00
20.	Unit Alat Laboratorium	48.387.775.916,70
21.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1.529.398.200,00
22.	Alat Peraga Praktik Sekolah	74.041.525.498,44

No	Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	Jumlah
23.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.815.843.166,00
24.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	366.214.650,00
25.	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	16.995.000,00
26.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.899.232.500,00
27.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	622.771.853,00
28.	Alat Laboratorium Standarissasi Kalibrasi dan Instrumentasi	175.550.000,00
29.	Senjata Api	99.247.250,00
30.	Persenjataan Non Senjata Api	796.943.625,00
31.	Senjata Sinar	452.260.248,00
32.	Komputer Unit	208.552.887.513,00
33.	Peralatan Komputer	68.065.223.478,72
34.	Sumur	3.000.000,00
35.	Alat Pelindung	58.375.000,00
36.	Alat SAR	1.428.263.402,01
37.	Alat Kerja Penerbangan	155.187.980,00
38.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	123.087.200,00
39.	Unit Peralatan Proses/Produksi	800.000,00
40.	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	11.786.571.761,00
41.	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	71.889.270,00
42.	Peralatan Olahraga	9.829.016.950,81
	Jumlah	2.069.618.674.411,44

Dari nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.069.618.674.411,44 tersebut, di antaranya terdapat 296 unit aset yang telah dijual pada tahun 2023 namun belum keseluruhan dihapuskan dari daftar aset dan masih ada 23 unit aset dengan nilai perolehan sebesar Rp1.606.000.000,00 serta nilai buku sebesar Rp0,00 (telah habis masa manfaatnya) yang belum dihapuskan dari daftar aset. Adapun proses penghapusan atas aset-aset tersebut baru dimulai di tahun 2024 karena untuk melakukan penghapusan BMD menunggu terbitnya SK penghapusan yang saat ini telah diusulkan penerbitannya. Rincian atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang telah terjual dapat dilihat pada **Lampiran 39**.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	2.394.146.120.379,84	2.350.282.620.147,02

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai dengan Gedung dan bangunan tersebut siap difungsikan, diantaranya adalah Biaya Perencanaan DED, Konstruksi, Pengawasan dan Biaya Administrasi lainnya. Selama Tahun Anggaran 2023, terjadi kenaikan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 43.863.500.232,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 118 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2023	2.350.282.620.147,02
2	Belanja Modal (Pengadaan)	39.738.698.978,00
3	Penambahan:	
a	Inventarisasi :	1.302.068.238,00
	1) Dinas Kesehatan - Inventarisasi	116.045.000,00
	2) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan - Inventarisasi	806.382.000,00
	3) Puskesmas Pakisaji - Inventarisasi	379.641.238,00
b	Reklasifikasi Tambah :	7.974.921.522,50
	1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Reklasifikasi Aset Lain-Lain (Rusak Berat) ke Gedung dan Bangunan	10.500.000,00
	2) Dinas Perhubungan - Reklas dari Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel	9.751.000,00
	3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga - Reklas Belanja Modal PM ke GB	198.523.000,00
	4) Dinas Perikanan - Reklasifikasi Split dari JIJ ke GB	105.957.922,50
	5) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Gedung Bnn	98.648.000,00
	6) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Instalasi Kebakaran Pada Gedung Setda	65.142.000,00
	7) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Perencanaan Rehabilitasi Gedung DPRD Kab. Malang	99.660.000,00
	8) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pada Dinas PMPTSP	99.759.000,00
	9) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Perencanaan Pembangunan Kolam Renang Pada Dispora	68.073.500,00
	10) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Perencanaan Pembangunan Prasarana Rusunawa Pada DPKPCK	54.120.000,00
	11) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Perencanaan Rehabilitasi Rumah Contoh Di Perumahan Bumi Kanjuruhan	7.892.500,00
	12) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Smp Negeri 2 Pagak	199.243.250,00
	13) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Lantai 2 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Malang	198.999.850,00
	14) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pasar Sumedang Di Kapanjen	198.796.700,00
	15) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Upt Metrologi Legal Kabupaten Malang	198.530.550,00
	16) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Di Kawasan Kantor Bupati Di Kapanjen	199.711.200,00
	17) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Dau	199.280.550,00
	18) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wagir	198.897.850,00

No	Uraian	Jumlah
19)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Pujon	199.280.200,00
20)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Donomulyo	197.790.100,00
21)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Bantur	195.999.100,00
22)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Pendopo dan Sarpras Kantor Kecamatan Kalipare	198.722.850,00
23)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pagentan Kec. Singosari	198.191.750,00
24)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepokomulyo Kec. Kepanjen	198.399.250,00
25)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Kantor Kelurahan Candirenggo Kec. Singosari	199.192.450,00
26)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Malang	149.646.400,00
27)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Gedung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	147.576.800,00
28)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Sdn 04 Panggungrejo Kec. Kepanjen	147.902.450,00
29)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung SDN 01 Permana Kec. Pakisaji	148.626.900,00
30)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Masjid di Kawasan Perkantoran Jl. Trunojoyo	198.193.250,00
31)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung SDN 2 Ngadas Kec. Poncokusumo	198.556.150,00
32)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	98.896.000,00
33)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Dprd Kab. Malang	2.263.364.400,00
34)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendopo, Rumah Dinas, dan Pringgitan	823.452.550,00
35)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Komisi Pemilihan Umum Kab. Malang yang dipinjam dari Dinas Cipta Karya	199.644.050,00
c	Hibah Tambah :	715.300.000,00
1)	Dinas Sosial - Hibah dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guyub Rukun	30.300.000,00
2)	RSUD Kanjuruhan - Hibah dari Universitas Islam Malang	585.000.000,00
3)	Kel. Candirenggo - Hibah dari Wachid Foundation	100.000.000,00
d	Koreksi Nilai Tambah :	558.544.230,00
1)	RSUD Kanjuruhan - Koreksi Penambahan Nilai dari Belanja Pengawasan dan Perencanaan Gedung	558.544.230,00
e	Transfer Masuk :	27.749.256.080,41
1)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	652.238.088,48
2)	Badan Pendapatan Daerah dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	223.865.618,00

No	Uraian	Jumlah
3)	Sekretariat Daerah dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	9.990.660.704,60
4)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.331.033.200,00
5)	Dinas Kesehatan dari Dinas Ketahanan Pangan	3.604.462.131,00
6)	Dinas Kesehatan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	406.688.075,33
7)	Dinas Kesehatan dari Puskesmas Ampelgading	102.125.000,00
8)	Dinas Kesehatan dari Puskesmas Pakisaji	1.014.311.734,00
9)	Dinas Ketahanan Pangan dari Dinas Kesehatan	2.106.976.734,00
10)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.778.210.002,00
11)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Dinas Kesehatan	102.125.000,00
12)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	198.935.000,00
13)	Kec. Gedangan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	138.167.793,00
14)	Kec. Turen dari Dinas Perhubungan	99.457.000,00
	Jumlah Penambahan (a+b+c+d+e)	38.300.090.070,91
4	Pengurangan	
a	Transfer Keluar :	27.749.256.080,41
1)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	652.238.088,48
2)	Badan Pendapatan Daerah dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	223.865.618,00
3)	Sekretariat Daerah dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	9.990.660.704,60
4)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.331.033.200,00
5)	Dinas Kesehatan dari Dinas Ketahanan Pangan	3.604.462.131,00
6)	Dinas Kesehatan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	406.688.075,33
7)	Dinas Kesehatan dari Puskesmas Ampelgading	102.125.000,00
8)	Dinas Kesehatan dari Puskesmas Pakisaji	1.014.311.734,00
9)	Dinas Ketahanan Pangan dari Dinas Kesehatan	2.106.976.734,00
10)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.778.210.002,00
11)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Dinas Kesehatan	102.125.000,00
12)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	198.935.000,00
13)	Kec. Gedangan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	138.167.793,00
14)	Kec. Turen dari Dinas Perhubungan	99.457.000,00
b	Reklasifikasi Kurang :	6.215.586.735,68
1)	Dinas Lingkungan Hidup - Reklas GB ke JJJ	170.523.891
2)	Dinas Kesehatan - Reklas GB ke JJJ	440.672.000,00
3)	Dinas Kesehatan - Reklas GB ke KDP	4.616.704.230,00
4)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Reklas GB ke ATL (ATR)	93.475.000,00
5)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Reklas GB ke ATL (Tanaman)	332.809.813,00
6)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Reklas GB ke JJJ	448.269.983,34
7)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Reklas GB ke PM	113.131.818,34
c	Koreksi Nilai Kurang :	198.895.000,00
1)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Koreksi Nilai Akibat Double Catat	198.895.000,00
d	Ekstrakomptabel :	11.551.000,00
1)	Dinas Perhubungan - Ekstrakomptabel	9.751.000,00
2)	Kec. Pagelaran - Ekstrakomptabel	1.800.000,00
	Jumlah Pengurangan (a+b+c+d)	34.175.288.816,09
	Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan (1+2+3 -4)	2.394.146.120.379,84

Adapun Rincian Gedung/Bangunan per 31 Desember 2023 dirinci sebagai berikut :

Tabel 119 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Bangunan Gedung Kantor	596.575.511.633,72
2.	Bangunan Gudang	45.635.339.129,44
3.	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	534.455.796,00
4.	Bangunan Gedung Instalasi	22.156.307.987,57
5.	Bangunan Gedung Laboratorium	12.064.867.671,50
6.	Bangunan Kesehatan	364.548.612.932,29
7.	Bangunan Oseanarium/Observatorium	914.164.153,00
8.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.933.177.037,05
9.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	37.681.488.713,92
10.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	801.304.279.441,84
11.	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	142.964.992.550,67
12.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	246.261.107.144,31
13.	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	2.297.061.516,53
14.	Bangunan Gedung Garasi/Pool	2.446.234.671,00
15.	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	13.984.618.436,00
16.	Bangunan Gedung Perpustakaan	8.823.132.865,00
17.	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	4.964.860.211,00
18.	Bangunan Pengujian Kelalkan	2.451.495.000,00
19.	Bangunan Peternakan/Perikanan	1.413.161.790,00
20.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	24.959.355.728,22
21.	Bangunan Fasilitas Umum	203.421.862,53
22.	Bangunan Stasiun Bus	238.068.500,00
23.	Taman	2.251.075.350,00
24.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	365.778.000,00
25.	Rumah Negara Golongan I	4.708.635.843,58
26.	Rumah Negara Golongan II	2.929.290.510,00
27.	Rumah Negara Golongan III	4.836.452.670,00
28.	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	10.489.082.734,00
29.	Plat/Rumah Susun	15.441.738.320,00
30.	Tugu	3.183.735.618,00
31.	Bangunan Peninggalan	1.412.162.439,00
32.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	2.437.806.750,00
33.	Bangunan Menara Telekomunikasi	2.317.862.315,33
34.	Tugu/Tanda Batas Administrasi	5.106.183.417,84
35.	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	195.821.623,00
36.	Pagar	1.114.780.017,50
	Jumlah	2.394.146.120.379,84

Dari nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.394.146.120.379,84 tersebut, di antaranya terdapat 1 unit aset berupa bangunan stadion dengan nilai perolehan Rp104.880.534.863,00 dan nilai buku Rp67.835.612.544,06 yang telah dijual sebagian (berupa bongkaran) pada tahun 2023 namun belum dihapuskan dari daftar aset. Proses penghapusan sebagian atas aset tersebut akan dilaksanakan di tahun 2024 menunggu di terbitkannya SK penghapusan. Adapun estimasi nilai wajar atas sebagian bangunan yang dibongkar tersebut adalah sebesar Rp34.758.090.438,67 berdasarkan laporan Konsultan Jasa Penilai nomor 00009/23.070701/PRC/07/1/XI/2023 tanggal 15 November 2023. Rincian

atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang telah terjual dapat dilihat pada **Lampiran 39**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	5.531.512.770.606,46	5.190.883.683.503,08

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan Jalan Irigasi dan Jaringan tersebut siap difungsikan, diantaranya adalah Biaya Perencanaan DED, Konstruksi, Pengawasan dan Biaya Administrasi lainnya. Selama Tahun Anggaran 2023, terjadi kenaikan nilai Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp340.629.087.104,38 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 120 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2023	5.190.883.683.503,08
2.	Belanja Modal	311.839.906.693,00
3.	Penambahan	
a	Transfer Masuk :	182.610.000,00
	1) Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.934.000,00
	2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil	171.676.000,00
b	Reklasifikasi Tambah:	2.922.724.533,00
	1) Dinas Lingkungan Hidup - Reklas GB ke JIJ	170.523.891,00
	2) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Reklas PM ke JIJ	98.812.000,00
	3) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Reklas KDP ke JIJ	586.812.850,00
	4) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga - Reklas KDP ke JIJ	683.056.000,00
	5) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Reklas GB ke JIJ	448.269.982,00
	6) Dinas kesehatan - Reklas GB ke JIJ	440.672.000,00
	7) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke JIJ - Perencanaan Pembangunan Drainase dan Pelebaran Jalan Tembusan Rusunawa	15.626.600,00
	8) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke JIJ - Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah dan Saluran Drainase Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan	59.070.000,00
	9) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke JIJ - Perencanaan Pembangunan Drainase Rusunawa Asn Kabupaten Malang di Kepanjen	14.916.000,00

No	Uraian	Nilai
	10) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Pemasangan Paving di RSUD Kanjuruhan	385.012.750,00
	11) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Jukor BPK - Reklas KDP ke JIJ - Reklasifikasi KDP Dinas PUSDA Berupa Daerah Irigasi (DI) Deling Apus II yang sudah selesai	9.998.450,00
	12) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Jukor BPK - Reklas KDP ke JIJ - Reklasifikasi KDP Dinas PUSDA Berupa Daerah Irigasi di Watugede Yang Sudah Selesai	9.954.010,00
c	Inventarisasi :	22.313.800.000,00
	1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga - Inventarisasi	22.313.800.000,00
d	Hibah :	5.893.639.749,00
	1) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Hibah PSU	5.893.639.749,00
	Jumlah Penambahan (a+b+c+d)	31.312.774.282,00
4	Pengurangan	
a	Transfer Keluar :	182.610.000,00
	1) Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.934.000,00
	2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil	171.676.000,00
b	Reklasifikasi Keluar :	2.235.025.949,00
	1) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Reklas JIJ ke KDP	384.109.949,00
	2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga - Reklas JIJ ke KDP	1.850.916.000,00
c	Koreksi Nilai Kurang :	105.957.922,62
	1) Dinas Perikanan - Koreksi Nilai (Split dari JIJ ke GB)	105.957.922,62
	Jumlah Pengurangan (a+b+c)	2.523.593.871,62
	Aset Tetap Jalan, Irigasi Jaringan (1+2+3-4)	5.531.512.770.606,46

Saldo Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 121 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Jalan, Irigasi, Jaringan	Jumlah
1.	Jalan	3.794.717.195.002,61
2.	Jembatan	552.502.481.804,26
3.	Bangunan Air Irigasi	650.879.236.964,98
4.	Bangunan Pengaliran Pasang Surut	15.787.907.000,00
5.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	6.085.738.156,00
6.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	175.118.897.254,28
7.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	4.491.125.016,00
8.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	119.669.330.530,34
9.	Bangunan Air Kotor	14.912.659.142,05
10.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	42.287.182.268,50
11.	Instalasi Air Kotor	17.303.706.391,00
12.	Instalasi Pengolahan Sampah	3.531.835.761,60

No	Jalan, Irigasi, Jaringan	Jumlah
13.	Instalasi Pembangkit Listrik	17.872.836.594,00
14.	Instalasi Gardu Listrik	7.037.681.953,00
15.	Instalasi Gas	166.311.000,00
16.	Instalasi Pengaman	222.275.000,00
17.	Jaringan Air Minum	12.792.039.484,84
18.	Jaringan Listrik	94.163.800.833,00
19.	Jaringan Telepon	1.729.129.450,00
20.	Jaringan Gas	241.401.000,00
	Jumlah	5.531.512.770.606,46

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	51.917.005.165,62	51.109.299.444,62

Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap selain Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung/Bangunan dan Jalan Irigasi dan Jaringan meliputi : Buku Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian, dan Hewan Ternak dan Tanaman. Selama Tahun Anggaran 2023, terjadi kenaikan saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp807.705.721,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 122 Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2023	51.109.299.444,62
2.	Belanja Modal	1.976.231.659,00
3.	Penambahan	
a	Reklasifikasi Tambah:	435.270.213,00
	1) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Reklas Belanja Modal PM ke ATL	8.985.400
	2) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Reklas Belanja Modal GB ke ATL (Tanaman)	332.809.813
	3) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Reklas Belanja Modal GB ke ATL (ATR)	93.475.000
b	Koreksi Nilai Tambah:	143.032.420,00
	1) Dinas Pendidikan - Koreksi Nilai (Penyesuaian Belanja Modal BOS)	143.032.420,00
	Jumlah Penambahan (a+b)	578.302.633,00
4.	Pengurangan	
a	Reklasifikasi Kurang:	26.712.160,00
	1) Badan kesatuan Bangsa dan Politik - Reklas Belanja Modal ATL ke PM	6.786.000,00
	2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - Reklas ke Barang dan Jasa	15.000.000,00
	3) Dinas Sosial - Reklas ke Barang dan Jasa	4.000.000,00
	4) kec. Turan - Reklas Belanja Modal ATL ke PM	926.160,00
b	Ekstakomptabel :	51.173.391,00
	1) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Ekstrakomptabel	51.173.391,00

No	Uraian	Jumlah
c	Koreksi Nilai :	1.668.496.270,00
	1) Dinas Pendidikan - Koreksi Nilai (Penyesuaian Belanja Modal BOS)	1.668.496.270,00
d	Penghapusan:	446.750,00
	1) Sekretariat DPRD- Penghapusan Karena Pemindah Tangan Dalam Bentuk Hibah	446.750,00
	Jumlah Pengurangan (a+b+c+d)	1.746.828.571,00
	Aset Tetap Lainnya (1+2+3-4)	51.917.005.165,62

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dirinci sebagai berikut :

Tabel 123 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	29.171.174.314,46
2.	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	4.759.938.120,00
3.	Kartografi, Naskah dan Lukisan	3.458.061.050,32
4.	Musik	1.180.145.754,51
5.	Karya Grafika (Graphic Material)	45.490.000,00
6.	Three Dimensional Artifacts and Realita	1.367.000,00
7.	Barang Bercorak Kesenian	755.348.399,95
8.	Alat Bercorak Kebudayaan	337.867.499,83
9.	Tanda Penghargaan	79.238.750,76
10.	Ternak	1.145.670.000,00
11.	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	162.016.000,00
12.	Tanaman	10.093.424.365,79
13.	Aset Tetap Dalam Renovasi	727.263.910,00
	Jumlah	51.917.005.165,62

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	11.879.308.654,00	3.689.659.385,00

Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) merupakan saldo atas aset yang masih belum dapat dipergunakan/difungsikan sebagaimana mestinya dan masih dalam pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2023, sehingga belum ada Berita Acara Serah Terima. Selama Tahun Anggaran 2023, terjadi kenaikan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 8.189.649.269,00 rincian sebagai berikut :

Tabel 124 Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2023	3.689.659.385,00
2.	Penambahan	
a	Reklasifikasi Tambah:	10.687.710.179,00
	1) Dinas kesehatan - Reklas GB ke KDP	4.616.704.230,00
	2) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Reklas JIJ ke KDP	384.109.949,00

No	Uraian	Jumlah
3)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga - Reklas JJJ ke KDP	1.850.916.000,00
4)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Koreksi Atas Pembangunan Pendopo Pada Kec. Sumberpucung	1.935.980.000,00
5)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Koreksi Atas Pembangunan Hanggar Mobil Pemadam Kebakaran	1.900.000.000,00
	Jumlah Penambahan (a)	6.851.730.179,00
3.	Pengurangan	
a	Reklasifikasi Kurang	1.872.728.910,00
1)	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Reklas KDP ke JJJ	586.812.850,00
2)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga - Reklas KDP ke JJJ	683.056.000,00
3)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Gedung BNN	98.648.000,00
4)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Instalasi Kebakaran Pada Gedung Setda	65.142.000,00
5)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Perencanaan Rehabilitasi Gedung DPRD Kab. Malang	99.660.000,00
6)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pada Dinas PMPTSP	99.759.000,00
7)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Perencanaan Pembangunan Kolam Renang Pada Dispora	68.073.500,00
8)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Perencanaan Pembangunan Prasarana Rusunawa Pada DPKPCK	54.120.000,00
9)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke GB - Perencanaan Rehabilitasi Rumah Contoh Di Perumahan Bumi Kanjuruhan	7.892.300,00
10)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke JJJ - Perencanaan Pembangunan Drainase dan Pelebaran Jalan Tembusan Rusunawa	15.626.600,00
11)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke JJJ - Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah dan Saluran Drainase Perumahan Pns Bumi Kanjuruhan	59.070.000,00
12)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya - Jukor BPK - Reklas KDP ke JJJ - Perencanaan Pembangunan Drainase Rusunawa Asn Kabupaten Malang Di Kepanjen	14.916.000,00
13)	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Jukor BPK - Reklas KDP ke JJJ - Reklasifikasi KDP Dinas Pu Sda Berupa Daerah Irigasi (Di) Deling Apus II Yang Sudah Selesai	9.998.450,00
14)	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Jukor BPK - Reklas KDP ke JJJ - Reklasifikasi KDP Dinas PU SDA Berupa Daerah Irigasi (Di) Watugede Yang Sudah Selesai	9.954.010,00
b	Penghapusan:	625.332.000,00
1)	Dinas Pertanahan - Penghapusan Karena Perundang-Undangan	144.104.000,00
2)	RSUD Kanjuruhan - Penghapusan Karena Perundang-Undangan	481.228.000,00
	Jumlah Pengurangan (a+b)	2.498.060.910,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan (1+2-3)	11.879.308.654,00

Adapun rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut.

Tabel 125 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

No	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jumlah
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	2.745.182.816,00
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah untuk Jalan	1.262.997.000,00
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air	-95.137.000,00
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1.559.126.668,00
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	1.900.000.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	4.616.704.230,00
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan- Jalan Desa	-15.626.600,00
8.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	-19.952.460,00
9.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	-14.916.000,00
10.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam- Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	-59.070.000,00
	Jumlah	11.879.308.654,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) didasarkan pada nilai yang telah direalisasikan/dibayarkan atas pekerjaan tersebut sesuai dengan besaran SP2D yang diterbitkan. Rincian terdapat pada **lampiran 20**.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(6.422.874.591.274,32)	(5.996.148.793.003,17)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Akuntansi Penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang. dan dengan memperhatikan Buletin Teknis SAP Nomor 18 Bulan Desember Tahun 2014 bahwa mulai tahun buku 2016 harus sepenuhnya menerapkan akuntansi berbasis akrual, sehingga dalam menghitung Beban Operasional atas Aset Tetap (Konsumsi Aset Tetap) melalui penghitungan Penyusutan Aset Tetap, metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (*straightline method*). Berikut rincian penyusutan Aset Tetap per Jenis Per 31 Desember 2023 dan 2022:

**Tabel 126 Rincian Penyusutan Aset
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022**

(dalam Rupiah)

No	Akumulasi Penyusutan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Peralatan dan Mesin	(1.709.837.951.057,27)	(1.524.092.628.941,14)
2.	Gedung dan Bangunan	(1.032.014.335.513,15)	(984.770.949.956,60)
3.	Jalan, Irigasi dan Jembatan	(3.681.022.304.703,90)	(3.487.285.214.105,44)
4.	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.422.874.591.274,32)	(5.996.148.793.003,17)

Rincian Penyusutan Aset Tetap sebagai koreksi Saldo awal Aset Tetap per 1 Januari 2023 dan Penghitungan Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2022 dijelaskan dalam **Lampiran 26**.

Terhadap nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan masih terdapat nilai penyusutan atas aset tetap yang telah terjual pada Tahun 2023, antara lain:

1. Dari nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.709.837.951.057,33, di antaranya terdapat akumulasi penyusutan atas 296 unit aset sebesar Rp1.606.000.000,00 yang telah dijual pada tahun 2023 namun belum dihapuskan dari daftar akumulasi penyusutan. Adapun proses penghapusan atas aset-aset tersebut baru dimulai di tahun 2024. Rincian atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang telah terjual dapat dilihat pada **Lampiran 39**
2. Dari nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.032.014.335.513,26, di antaranya terdapat akumulasi penyusutan 1 unit bangunan stadion yang telah dijual sebagian (berupa bongkaran) pada tahun 2023 namun belum dihapuskan dari daftar akumulasi penyusutan. Proses penghapusan sebagian atas aset tersebut baru dimulai di tahun 2024. Adapun nilai bagian akumulasi penyusutan atas sebagian bangunan yang dibongkar tersebut adalah sebesar Rp37.044.922.318,94, sebagaimana **Lampiran 39**

5.3.1.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	86.875.665,95

Dana Cadangan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang. Penyediaan dana Cadangan

direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 dialokasikan secara berkesinambungan selama 3 (tiga) tahun anggaran melalui APBD sebagai berikut:

1. Tahun 2017 sebesar Rp15.000.000.000,00 yang dibentuk melalui Pengeluaran Pembiayaan dengan SP2D No 05420/SP2D-LS/4.02.02.02/2017 dana Cadangan ini dalam bentuk Deposito dengan Nomor seri 0330026
2. Tahun 2018 sebesar Rp20.000.000.000,00 yang dibentuk melalui Pengeluaran Pembiayaan dengan SP2D No 04474/SP2D-LS/4.02.02.02/2018 dana Cadangan ini dalam bentuk Deposito dengan Nomor seri 0330261
3. Tahun 2019 sebesar Rp15.000.000.000,00 yang dibentuk melalui Pengeluaran Pembiayaan dengan SP2D No 00333/SP2D-LS/4.02.01.02/2019 dana Cadangan ini dalam bentuk Deposito dengan Nomor seri 0330710

Atas pembentukan Dana Cadangan tersebut terdapat bunga yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang total sebesar Rp6.885.873.816,35 dan pada akhir Tahun 2020 yang dicatat sebagai pendapatan atas bunga deposito Dana Cadangan hanya sebesar Rp6.798.998.150,04, sehingga pada Neraca masih terdapat pencatatan atas Dana Cadangan yang belum ditarik sebesar Rp86.975.665,95.

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Uang serta Nota Kredit dari Bank Jatim diketahui bahwa sebenarnya Bunga Deposito atas Dana Cadangan tersebut telah masuk kedalam Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 29 Juli 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nota Kredit atas Bunga Deposito Nomor Seri 330026 tanggal 19 Juli 2020 sebesar Rp67.143.251,44;
2. Nota Kredit atas Bunga Deposito Nomor Seri 330710 tanggal 19 Juli 2020 sebesar Rp19.732.414,51.

Adapun rincian perhitungan Dana Cadangan dapat dijelaskan pada **Lampiran 13.**

5.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	28.079.631.731,93	33.669.751.047,28

Adapun Saldo Aset Lainnya tersebut terdiri dari:

Tabel 127 Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Lainnya	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-
2.	Aset Tidak Berwujud	38.717.126.315,00	36.854.072.355,00
3.	Aset Lain-lain	23.370.486.178,64	49.153.672.399,64
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-31.680.858.191,85	-26.426.385.097,50
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-22.873.225.569,86	-25.911.608.609,86
6.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	20.546.103.000,00	0,00
	Jumlah	28.079.631.731,93	33.669.751.047,28

Rincian perhitungan penambahan dan pengurangan Aset Lainnya dapat dijelaskan pada **Lampiran 21**.

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan hak yang diperoleh atas suatu bangunan atau aktiva tetap lainnya yang dibangun dengan cara Kemitraan Pemerintah dengan pihak swasta berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini Tanah dan Bangunan yang dikerjasamakan telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah dan atas Bangunan tersebut telah diinventarisir ke dalam Aset tetap Bangunan.

Berdasarkan surat dari PT. BINA HARITA UTAMA No 023/PT.BHU/XII/2019 kepada Bapak Bupati Malang perihal Kerjasama Pembangunan Pasar dan Terminal Baru Dampit, bahwa PT Bina Harita Utama telah melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar dan Terminal Baru Dampit sehingga berdasarkan perihal diatas Bupati Malang menindaklanjuti dengan surat No.032/1599/35.07.204/2020 kepada Inspektur Kabupaten Malang untuk Permintaan Audit atas obyek (Bangun Guna Serah) BGS berupa Pasar dan Terminal Baru Dampit yang diserahkan oleh PT. Bina Harita Utama untuk kemudian dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) C GEDUNG dan Bangunan

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.

Adapun Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 128 Rincian Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Lama	Nilai Kemitraan	
			31-Desember-2023	31-Desember-2022
1.	Pasar Baru Dampit BGS dengan PT Bina Harita Utama Addendum Kontrak No. 180/831/429.013/1998	20 Tahun	0,00	0,00

b. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.036.268.123,15 dan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.427.687.257,50 Rincian aset tak berwujud Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 129 Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Bruto	36.854.072.355,00
2.	Belanja Modal	1.761.400.960,00
3.	Penambahan	
a	Reklasifikasi Tambah :	101.653.000,00
	1) Dinas Perhubungan - Reklasifikasi Belanja Modal PM ke ATB	99.653.000,00
	2) Dinas Komunikasi dan Informatika - Reklas Belanja Modal PM ke ATB	2.000.000,00
	Jumlah Penambahan (a)	101.653.000,00
4.	Saldo Akhir Bruto ATB (1+2+3)	38.717.126.315,00
5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(31.680.858.191,85)
6.	Saldo Akhir Netto (4-5)	7.036.268.123,15

Atas Aset Tidak Berwujud tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang, dilakukan Amortisasi dengan perhitungan tersebut dijelaskan dalam **Lampiran 27**.

Adapun Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut:

**Tabel 130 Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tak Berwujud	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Goodwill	170.381.250,00	1.352.722.050,00
2.	Lisensi dan Franchise	14.070.448.070,00	8.415.924.120,00
3.	Hak Cipta	259.325.000,00	-
4.	Software	23.369.901.995,00	26.746.328.515,00
5.	Kajian	847.070.000,00	1.118.005.000,00
6.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	(778.907.330,00)
7.	Akumulasi Amortisasi - Lisensi dan Franchise	(175.072.200,00)	(8.722.599.690,00)
8.	Akumulasi Amortisasi - Hak Cipta	(141.200.200,00)	(139.700.200,00)
9.	Akumulasi Amortisasi - Software	(25.504.008.857,35)	(5.504.328.758,00)
10.	Akumulasi Amortisasi - Kajian	(5.860.576.934,50)	(228.034.000,00)
11.	Akumulasi Amortisasi Lainnya- Goodwill	-	343.068.000,00
12.	Akumulasi Amortisasi	-	(12.174.790.449,50)
	J u m l a h	7.036.268.123,15	10.427.687.257,50

Berikut rincian Aset Tidak Berwujud pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022:

Tabel 131 Rincian Aset Tidak Berwujud pada masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Aset Tak Berwujud 2023
1.	Dinas Pendidikan	2.748.271.500,00
2.	Dinas Kesehatan	1.604.997.750,00
3.	Puskesmas Bululawang	67.815.000,00
4.	Puskesmas Donomulyo	24.200.000,00
5.	Puskesmas Kalipare	12.500.000,00
6.	Puskesmas Karangploso	12.500.000,00
7.	Puskesmas Kepanjen	150.000.000,00
8.	Puskesmas Pagak	14.255.000,00
9.	Puskesmas Pakis	4.909.091,00
10.	Puskesmas Poncokusumo	80.000.000,00
11.	Puskesmas Sumbermanjing Kulon	8.800.000,00
12.	Puskesmas Singosari	29.050.000,00
13.	Puskesmas Turen	150.000.000,00
14.	Puskesmas Wagir	10.000.000,00
15.	RSUD Kanjuruhan	1.999.970.000,00
16.	RSUD Lawang	11.000.000,00
17.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	570.085.000,00
18.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1.605.980.100,00
19.	Dinas Tenaga Kerja	143.000.000,00
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00
21.	Dinas Ketahanan Pangan	47.550.000,00
22.	Dinas Pertanian	135.470.000,00
23.	Dinas Lingkungan Hidup	486.821.880,00
24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	348.545.000,00
25.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	190.300.000,00
26.	Dinas Perhubungan	1.466.069.100,00
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.642.643.420,00
28.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	419.550.000,00
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	675.891.000,00
30.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	226.143.350,00
31.	Dinas Perikanan	179.555.000,00

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Aset Tak Berwujud 2023
32.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	139.693.500,00
33.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	226.325.000,00
34.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.000.000,00
35.	Sekretariat Daerah	1.245.398.854,00
36.	Inspektorat Daerah	84.095.000,00
37.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	508.710.100,00
38.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	550.202.500,00
39.	Badan Pendapatan Daerah	958.453.970,00
40.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.809.871.700,00
41.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.000.000,00
42.	Kelurahan Candirenggo	2.523.500,00
43.	Kecamatan Tajinan	40.000.000,00
44.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.980.000,00
	Jumlah Aset Tidak Berwujud	38.717.126.315,00

c. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp497.260.608,78 merupakan nilai buku Aset Lain-Lain sebesar Rp23.370.486.178,64 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp22.873.225.569,86. Untuk Dana *Transfer Treasury Deposit Facility*, dimana pada LKPD *Audited 2022* disajikan sebagai aset lain-lain (Non fisik) akan disajikan terpisah di Sub akun tersendiri. Adapun rincian mengenai Aset lain-lain dapat dijelaskan di Tabel Berikut:

Tabel 132 Rincian Aset Lain lain

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal bruto per 1 Januari 2023	26.789.889.218,64
2.	Penambahan	
a	Reklasifikasi tambah:	29.932.000,00
	1) Kec. Tirtoyudo - Reklas dari Peralatan Mesin ke Aset Lain-Lain(Rusak Berat)	29.932.000,00
	Jumlah Penambahan (a)	29.932.000,00
3.	Pengurangan	
a	Reklasifikasi Kurang :	10.500.000,00
	1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Reklas Aset Lain-Lain(Rusak Berat) ke Gedung dan Bangunan	10.500.000,00
b	Penghapusan :	3.438.835.040,00
	1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah - Penghapusan Karena Pemusnahan	3.100.000,00
	2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Penghapusan Karena Pemusnahan	335.025.000,00
	3) Sekretariat Daerah - Penghapusan Karena Pemindah Tanganan	46.665.000,00
	4) Sekretariat Daerah - Penghapusan Karena Sebab Lain	10.320.000,00
	5) Sekretariat DPRD - Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan BMD	78.787.100,00
	6) Dinas Ketahanan Pangan - Penghapusan Karena Sebab Lain	8.939.000,00
	7) Dinas Komunikasi dan Dinas Informatika - Penghapusan Karena Penjualan	1.960.820.000,00
	8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Penghapusan Karena Pemusnahan	2.400.000,00
	9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Penghapusan Karena Sebab Lain	17.600.000,00

No	Uraian	Jumlah
10)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penghapusan Karena Pemusnahan	29.230.000,00
11)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penghapusan Karena Penjualan	2.108.200,00
12)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Penghapusan Karena Pemusnahan	11.655.500,00
13)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Penghapusan Karena Sebab Lain	16.732.438,00
14)	Dinas Perhubungan - Penghapusan Karena Pemusnahan	27.881.000,00
15)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Penghapusan Karena Sebab Lain	11.392.500,00
16)	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan - Penghapusan Karena Sebab Lain	587.680.000,00
17)	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan - Penghapusan Karena Sebab Lain	26.817.000,00
18)	Inspektorat Daerah - Penghapusan Karena Sebab Lain	5.000.000,00
19)	Kec. Bantur - Penghapusan Karena Sebab Lain	11.496.999,00
20)	Kec. Dau - Penghapusan Karena Sebab Lain	22.993.998,00
21)	Kec. Jabung - Penghapusan Karena Sebab Lain	14.154.900,00
22)	Kec. Kepanjen - Penghapusan Karena Sebab Lain	20.000.000,00
23)	Kec. Kromengan - Penghapusan Karena Sebab Lain	3.000.000,00
24)	Kec. Tirtoyudo - Penghapusan Karena Sebab Lain	5.000.000,00
25)	Kec. Turen - Penghapusan Karena Sebab Lain	11.496.999,00
26)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga - Penghapusan	168.539.406,00
	Jumlah Pengurangan (a+b)	3.449.335.040,00
5.	Aset lain-lain (1+2-3)	23.370.486.178,64
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(22.873.225.569,86)
7.	Saldo Akhir Netto (5-6)	497.260.608,78

Berikut rincian Aset Lain-Lain pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Tabel 133 Rincian Aset Lain-Lain pada masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tahun Anggaran 2023
1.	Dinas Pendidikan	7.464.663.369,51
2.	Dinas Kesehatan	86.758.420,00
3.	Puskesmas Ampelgading	3.620.000,00
4.	Puskesmas Ardimulyo	100.000,00
5.	Puskesmas Bululawang	148.152.100,00
6.	Puskesmas Gedangan	5.200.000,00
7.	Puskesmas Gondanglegi	4.937.000,00
8.	Puskesmas Jabung	2.700.000,00
9.	Puskesmas Kalipare	30.000,00
10.	Puskesmas Kasembon	29.092.910,00
11.	Puskesmas Kepanjen	25.610.943,00
12.	Puskesmas Lawang	5.000,00
13.	Puskesmas Ngantang	2.000.000,00
14.	Puskesmas Pagak	3.390.000,00
15.	Puskesmas Pagelaran	1.850.000,00
16.	Puskesmas Poncokusumo	55.350.000,00
17.	Puskesmas Pujon	620.000,00
18.	Puskesmas Sumbermanjing Wetan	1.530.000,00
19.	Puskesmas Sumberpucung	1.260.000,00

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tahun Anggaran 2023
20.	Puskesmas Tirtoyudo	2.000.000,00
21.	Puskesmas Turen	6.264.500,00
22.	Puskesmas Wagir	820.000,00
23.	Puskesmas Wonokerto	975.000,00
24.	RSUD Kanjuruhan	747.564.692,00
25.	RSUD Lawang	5.550.000,00
26.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	243.297.555,55
27.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	3.856.471.900,00
28.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	13.736.500,00
29.	Satuan Polisi Pamong Praja	47.130.250,00
30.	Dinas Sosial	31.479.408,00
31.	Dinas Tenaga Kerja	2.331.600,00
32.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.550.000,00
33.	Dinas Ketahanan Pangan	41.705.000,00
34.	Dinas Pertanahan	73.050.000,00
35.	Dinas Lingkungan Hidup	268.952.500,00
36.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47.925.000,00
37.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	58.512.387,00
38.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	294.725.692,00
39.	Dinas Perhubungan	1.000.000,00
40.	Dinas Komunikasi dan Informatika	35.447.500,00
41.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	180.807.900,00
42.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	350.000,00
43.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.958.887.520,00
44.	Dinas Perikanan	300.000,00
45.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	117.198.000,00
46.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	230.715.477,00
47.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	46.935.750,00
48.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.337.500,00
49.	Sekretariat Daerah	428.374.875,00
50.	Inspektorat Daerah	50.324.000,00
51.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	741.767.950,00
52.	Badan Keuangan dan Aset Daerah (termasuk TDF)	2.476.774.199,72
53.	Badan Pendapatan Daerah	4.550.000,00
54.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	102.575.000,00
55.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	75.555.000,00
56.	Sekretariat DPRD	891.369.883,00
57.	Kecamatan Pujon	16.385.715,00
58.	Kecamatan Kasembon	2.000.000,00
59.	Kecamatan Lawang	12.900.000,00
60.	Kelurahan Lawang	4.340.000,00
61.	Kelurahan Kalirejo	4.375.000,00
62.	Kelurahan Pagentan	8.200.000,00
63.	Kelurahan Candirenggo	8.200.000,00
64.	Kecamatan Karangploso	7.680.000,00
65.	Kecamatan Dau	96.846.700,00
66.	Kecamatan Pakis	131.279.000,00
67.	Kecamatan Jabung	129.345.037,00
68.	Kecamatan Tumpang	117.992.004,00
69.	Kecamatan Poncokusumo	125.481.995,00
70.	Kecamatan Buhulawang	100.010.800,00
71.	Kecamatan Gondanglegi	27.070.000,00
72.	Kecamatan Pagelaran	67.510.220,00
73.	Kecamatan Tajinan	28.839.000,00
74.	Kecamatan Gedangan	17.776.250,00
75.	Kecamatan Wajak	8.986.600,00
76.	Kecamatan Turen	121.157.004,00
77.	Kelurahan Sedayu	207.843.000,00
78.	Kecamatan Dampit	170.766.481,00
79.	Kecamatan Ampelgading	186.918.158,00
80.	Kecamatan Tirtoyudo	74.232.000,00
81.	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	241.489.203,82
82.	Kecamatan Kepanjen	38.666.765,22
83.	Kelurahan Cepokomulyo	7.800.000,00
84.	Kelurahan Kepanjen	9.850.000,00
85.	Kecamatan Pakisaji	14.366.000,00
86.	Kecamatan Ngajum	31.123.800,00
87.	Kecamatan Wagir	3.000.000,00

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tahun Anggaran 2023
88.	Kecamatan Sumberpucung	13.500.000,00
89.	Kecamatan Kromengan	36.770.000,00
90.	Kecamatan Wonosari	33.685.000,00
91.	Kecamatan Pagak	108.852.182,00
92.	Kecamatan Kalipare	7.265.000,00
93.	Kecamatan Donomulyo	160.450.981,82
94.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.350.000,00
	Jumlah	23.370.486.178,64

Saldo Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 134 Rincian Saldo Aset Lain-Lain

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Lain Lain	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Aset Lain Lain	23.370.486.178,64	26.789.889.218,64
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(22.873.225.569,86)	(25.911.608.609,86)
	Jumlah	497.260.608,78	878.280.608,78

Dari nilai Aset Lain-lain sebesar Rp23.370.486.178,6444 tersebut, di antaranya terdapat 32 unit aset dengan nilai perolehan Rp1.111.334.000,00 dan nilai buku Rp0,00 (telah habis masa manfaatnya) yang telah dijual pada tahun 2023 namun belum dihapuskan dari daftar aset. Adapun proses penghapusan atas aset-aset tersebut baru dimulai di tahun 2024. Rincian atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang telah terjual dapat dilihat pada **Lampiran 39**.

d. Dana Transfer Treasury Deposit Facility

Dana Transfer Treasury Deposit Facility	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Rp20.546.103.000,00	Rp22.363.783.181,00

Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* tahun 2022 sebesar Rp22.363.783.181,00 telah dilakukan transfer ke RKUD sebesar Rp22.363.783.181,00. Untuk Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* tahun 2023 yang dicatat sebagai Aset lainnya, berdasarkan surat dari Direktorat Jendral Perbendaharaan No.S-574/WPB.16/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Penyampaian Data Saldo Rekening Treasury Deposit Facility – Transfer ke Daerah (TDF -TKD) Periode 1 Desember 2023 – 12 Januari 2024, sebesar Rp20.546.103.000,00.

5.3.1.6 Ekstrakomptabel

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Malang TA.2023, terdapat beberapa pengadaan BMD berupa Aset Tetap yang diklasifikasikan dalam Ekstrakomptabel. Pengeluaran belanja pengadaan BMD yang memenuhi kriteria berwujud, nilai perolehan dapat diukur secara andal, memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas serta dibangun atau diperoleh dengan maksud untuk dipergunakan sendiri tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Malang, harus dicatat secara terpisah dalam daftar aset tetap (masuk dalam klasifikasi Ekstrakomptabel) akan tetapi tetap dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

Adapun Perangkat Daerah dan nilai hasil pengadaan BMD Pemerintah Kabupaten Malang TA.2023 yang diklasifikasikan Ekstrakomptabel sebagai berikut:

Tabel 135 Rincian Ekstrakomptabel

(dalam Rupiah)

No	Nama Pengguna Barang	Aset			Total
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	
1	Dinas Kesehatan	1.413.362.456,00	-	-	1.413.362.456,00
2	Rumah Sakit Umum Kanjuruhan	14.765.000,00	-	-	14.765.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	90.959.500,00	-	-	90.959.500,00
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	16.708.180,00	-	51.173.391,00	67.881.571,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.310.000,00	-	-	7.310.000,00
6	Dinas Perhubungan	-	9.751.000,00	-	9.751.000,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.294.988,00	-	-	15.294.988,00
8	Kecamatan Singosari	9.556.560,00	-	-	9.556.560,00
9	Kecamatan Gondanglegi	11.534.675,00	-	-	11.534.675,00
10	Kecamatan Pagelaran	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00
11	Kecamatan Turen	765.558,00	-	-	765.558,00
12	Kecamatan Dampit	172.000,00	-	-	172.000,00
13	Kecamatan Kepanjen	5.237.250,00	-	-	5.237.250,00
14	Kecamatan Kalipare	16.325.000,00	-	-	16.325.000,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	658.000,00	-	-	658.000,00
	TOTAL	1.602.649.167,00	11.551.000,00	51.173.391,00	1.665.373.558,00

5.3.1.7 Properti Investasi

Pada Pemerintah Kabupaten Malang, Properti Investasi Masih diklasifikasikan dalam kelompok Aset Tetap dikarenakan pada Aplikasi Laporan Barang Milik Daerah e-BMD belum mengakomodir Kodefikasi Properti Investasi. Adapun Rincian Properti Investasi pada Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 136 Rincian Properti Investasi

No	Objek Sewa	NIBAR	Luas (m2)	Nilai Perolehan (Rp)	Luas Yang Disewa (m2)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120135070000000000 000020111310101040 01000001	27.730,00	74.871.000.000,00	8,40
2	Bangunan klinik laboratorium/puskesmas	120135070500000006 000020091330101060 10000001	529,00	85.783.333,00	
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120135070000000000 000020111310101040 01000001	27.730,00	74.871.000.000,00	8,40
4	Bangunan klinik laboratorium/puskesmas	120135070500000006 000020091330101060 10000001	529,00	85.783.333,00	
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120135070000000000 000020111310101040 01000001	27.730,00	74.871.000.000,00	8,07
6	Bangunan klinik laboratorium/puskesmas	120135070500000006 000020091330101060 10000001	529,00	85.783.333,00	
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120135070000000000 000020111310101040 01000001	27.730,00	74.871.000.000,00	9,24
8	Bangunan klinik laboratorium/puskesmas	120135070500000006 000020091330101060 10000001	529,00	85.783.333,00	
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120135070000000000 000020111310101040 01000001	27.730,00	74.871.000.000,00	6,62
10	Bangunan klinik laboratorium/puskesmas	120135070500000006 000020091330101060 10000001	529,00	85.783.333,00	
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120135070000000000 000020111310101040 01000001	27.730,00	74.871.000.000,00	3,75
12	Bangunan klinik laboratorium/puskesmas	120135070500000006 000020091330101060 10000001	529,00	85.783.333,00	
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120135070000000000 000020111310101040 01000001	27.730,00	74.871.000.000,00	8,40
14	Bangunan klinik laboratorium/puskesmas	120135070500000006 000020091330101060 10000001	529,00	85.783.333,00	
15	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	120135071900000000 000020091330101189 99000001	284,00	1.052.450.000,00	183,52
16	Tanah Bangunan Balai/pertemuan	120135074200000012 000020031310101040 04000001	116,00	23.200.000,00	15,00
17	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	120135074200000012 000019001330101090 01000001	116,00	174.000.000,00	
18	Tanah Bangunan Balai/pertemuan	120135074200000012 000020031310101040 04000001	116,00	23.200.000,00	36,00
19	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	120135074200000012 000019001330101090 01000001	116,00	174.000.000,00	

No	Objek Sewa	NIBAR	Luas (m2)	Nilai Perolehan (Rp)	Luas Yang Disewa (m2)
20	Tanah Bangunan Balai/pertemuan	120135074200000012 000020031310101040 04000001	116,00	23.200.000,00	36,00
21	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	120135074200000012 000019001330101090 01000001	116,00	174.000.000,00	
22	Tanah Bangunan Balai/pertemuan	120135074200000012 000020031310101040 04000001	116,00	23.200.000,00	45,00
23	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	120135074200000012 000019001330101090 01000001	116,00	174.000.000,00	
24	Tanah Usaha	120135075900000017 000019821310102070 01000001	5.592,00	700.258.900,00	5.592,00
25	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000001	8.650,00	719.863.714,90	8.650,00
26	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000002	3.273,00	264.785.937,00	3.273,00
27	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000003	4.900,00	406.724.480,40	4.900,00
28	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000004	3.492,00	327.869.733,90	3.492,00
29	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000005	4.850,00	403.684.730,00	4.850,00
30	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000006	4.767,00	345.501.233,10	4.767,00
31	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000007	3.568,00	286.367.236,00	3.568,00
32	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000010	4.378,00	369.372.231,90	4.378,00
33	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000011	4.950,00	410.874.729,90	4.950,00
34	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000012	3.327,00	215.812.989,40	3.327,00
35	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000008	7.284,00	599.166.470,70	7.284,00
36	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000009	7.036,00	622.513.869,60	7.036,00
37	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000015	3.545,00	553.453.723,00	3.545,00
38	Tanah Usaha	120135075900000017 000020131310102070 01000016	2.003,00	77.521.146,20	2.003,00
39	Sawah ditanami tebu	120135075900000017 000020131310102070 01000013	14.600,00	102.900.224.980,00	14.600,00
40	Sawah ditanami tebu	120135075900000017 000020131310102070 01000017	5.730,00	47.686.462.670,00	5.730,00
41	Sawah Lain-lain	120135074200000011 000020001310102070 01000005	1.020,00	65.280.000,00	1.020,00
42	Sawah Lain-lain	120135074200000011 000020151310102070 01000001	1.520,00	97.280.000,00	1.520,00
43	Tanah Sawah	120135074200000011 000020001310102010 05000001	912,00	43.776.000,00	912,00
44	Tanah Sawah	120135074200000011 000020001310102010 05000002	5.338,00	256.224.000,00	5.338,00
45	Sawah Lain-lain	120135074200000011 000020001310102070 01000002	2.840,00	181.760.000,00	2.840,00

No	Objek Sewa	NIBAR	Luas (m2)	Nilai Perolehan (Rp)	Luas Yang Disewa (m2)
46	Tegalan Lain-lain	120135074200000011 000019831310102070 01000001	3.988,00	680.000.000,00	3.988,00
47	Tegalan Lain-lain	120135074200000011 000020001310102070 01000003	7.699,00	580.000.000,00	7.699,00
48	Tegalan Lain-lain	120135074200000011 000020001310102070 01000004	7.928,00	502.000.000,00	7.928,00
49	Tegalan Lain-lain	120135074200000011 000020001310102070 01000006	3.882,00	415.000.000,00	3.882,00
50	Tegalan Lain-lain	120135074200000011 000020001310102070 01000007	4.004,00	400.000.000,00	4.004,00
51	Tegalan Lain-lain	120135074200000011 000020001310102070 01000008	2.871,00	34.500.000,00	2.871,00
52	Tegalan Lain-lain	120135074200000011 000020001310102070 01000009	2.430,00	270.000.000,00	2.430,00
53	Tegalan Lain-lain	120135074200000011 000020001310102070 01000010	8.000,00	800.000.000,00	8.000,00
54	Tegalan Lain-lain	120135074200000011 000020001310102070 01000011	3.396,00	365.000.000,00	3.396,00
55	Tegalan Lain-lain	120135074200000011 000020001310102070 01000012	2.629,00	280.000.000,00	2.629,00
56	Tegalan Lain-lain	120135074200000011 000019831310102070 01000002	4.113,00	475.000.000,00	4.113,00
57	Tegalan Lain-lain	120135074200000011 000020001310102070 01000013	3.872,00	501.000.000,00	3.872,00
58	Tegalan Lain-lain	120135074200000011 000020001310102070 01000001	4.750,00	300.000.000,00	4.750,00
59	Tanah Sawah	120135074200000011 000020001310102010 05000003	2.860,00	137.280.000,00	2.860,00
60	Tanah Sawah	120135074200000011 000020001310102010 05000004	1.253,00	60.144.000,00	1.253,00
61	Tanah Sawah	120135074200000011 000020001310102010 05000006	5.037,00	181.332.000,00	5.037,00
62	Tanah Sawah	120135074200000011 000020001310102010 05000007	9.086,00	436.128.000,00	9.086,00
63	Tanah Usaha	120135074100000017 000020001310102070 01000004	5.050,00	68.040.300,00	5.050,00
64	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120135070000000000 000020061310101040 01000001	21.570,00	19.414.800.000,00	5.72,00
65	Bangunan klinik laboratorium/puskesmas	120135070800000000 000020221330101010 01000078	123,00	437.667.700,00	
66	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	120135070000000000 000020061310101040 01000001	21.570,00	19.414.800.000,00	5.72,00
67	Bangunan klinik laboratorium/puskesmas	120135070800000000 000020221330101010 01000078	123,00	437.667.700,00	
68	Tanah Bangunan Rumah Sakit	120135070200000000 000020001310101040 03000001	4.765,00	442.800.000,00	4.765,00
69	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120135070200000000 000020031330101100 01000001	2.458,00	6.228.560.000,00	2.458,00

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	46.493.732.037,88	71.582.819.978,04

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek untuk kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan dan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan, adapun penjelasannya akan dirinci sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	46.493.732.037,88	71.582.819.978,04

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.493.732.037,88 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.582.819.978,04 selama Tahun Anggaran 2023 terjadi penurunan saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp25.089.087.940,17. Adapun Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 137 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	24.675.586,00	10.625.752,00
2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
3.	Pendapatan Diterima dimuka	622.173.821,49	561.960.087,42
4.	Utang Belanja	41.427.824.858,39	67.190.958.755,62
5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.419.057.772,00	3.819.275.383,00
	J u m l a h	46.493.732.037,88	71.582.819.978,04

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2023 sebesar Rp24.675.586,00 yang terdiri atas:

1. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2023 pada Puskesmas Donomulyo sebesar Rp6.618.103,00 yang terdiri atas utang

iuran jaminan kesehatan ASN dan PPPK sebesar Rp4.961.506,00, utang iuran jaminan kesehatan non ASN sebesar Rp1.347.310,00, utang iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp137.425,00, serta utang iuran jaminan kematian sebesar Rp171.782,00.

2. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2023 pada Puskesmas Gondanglegi sebesar Rp2.801.444,00 yang terdiri atas utang iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp2.288.394,00 dan utang iuran jaminan kesehatan non ASN sebesar Rp513.050,00.
3. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2023 pada Puskesmas Kromengan sebesar Rp2.711.613,00 yang terdiri atas utang iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp2.027.822,00 dan utang iuran jaminan kesehatan non ASN sebesar Rp683.791,00.
4. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2023 pada Puskesmas Lawang sebesar Rp3.741.966,00 yang terdiri atas utang iuran jaminan kesehatan non ASN sebesar Rp2.668.651,00 dan utang iuran jaminan kesehatan PPPK sebesar Rp1.073.315,00.
5. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2023 pada Puskesmas Wonokerto sebesar Rp8.802.460,00 yang terdiri atas utang iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp5.910.938,00 dan utang iuran jaminan kesehatan non ASN sebesar Rp2.891.522,00.

b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap periode akuntansi. Bagian Lancar Utang jangka panjang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0.

c. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp622.173.821,49 yang terdiri atas:

a. Pendapatan Diterima Dimuka untuk Retribusi:

1. Pendapatan sewa tanah pada Dinas PU Sumber Daya Air Tahun 2023 sebesar Rp10.912.950,00 dan pendapatan yang seharusnya diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp8.107.841,67 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di Tahun 2023 sebesar Rp1.924.233,33.
2. Pendapatan sewa kios sarana olah raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2023 sebesar Rp0.

b. Pendapatan Diterima Dimuka untuk Lain-lain PAD yang Sah:

1. Pendapatan sewa tanah dan bangunan untuk kantor kas RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang berlaku 5 tahun mulai 1 Maret 2019 sampai 29 Februari 2024 sebesar Rp205.500.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp 41.100.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp6.850.000,00.
2. Pendapatan sewa tanah dan bangunan untuk rumah anjungan tunai mandiri di RSUD Kanjuruhan berlaku 5 tahun mulai 1 Agustus 2019 sampai 31 Juli 2024 sebesar Rp49.250.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp9.850.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp5.745.833,33.
3. Pendapatan sewa lahan di luar ruangan dengan Naomi Sih Bingah, SST pada RSUD Kanjuruhan mulai 1 Juni 2023 sampai 31 Mei 2024 sebesar Rp5.400.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp3.150.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp2.250.000,00.
4. Pendapatan sewa lahan di luar ruangan dengan Rasmi pada RSUD Kanjuruhan mulai 1 Juni 2023 sampai 31 Mei 2024 sebesar Rp5.400.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp3.150.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp2.250.000,00.

5. Pendapatan sewa lahan di luar ruangan dengan Celvy Kartikasari pada RSUD Kanjuruhan mulai 1 November 2023 sampai 31 Oktober 2024 sebesar Rp5.400.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp900.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp4.500.000,00.
6. Pendapatan sewa lahan di luar ruangan dengan Nyoto Wasono pada RSUD Kanjuruhan mulai 1 Desember 2023 sampai 29 Februari 2024 sebesar Rp2.475.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp825.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp1.650.000,00.
7. Pendapatan sewa lahan di luar ruangan dengan Karomatul Jamila pada RSUD Kanjuruhan mulai 1 Desember 2023 sampai 30 November 2024 sebesar Rp4.050.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp337.500,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp3.712.500,00.
8. Pendapatan sewa lahan di luar ruangan dengan Sri Wahyuni pada RSUD Kanjuruhan mulai 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp1.800.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp0 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp1.800.000,00.
9. Pendapatan sewa tanah untuk ATM Bank Mandiri di RSUD Lawang berlaku 2 tahun mulai 8 Juni 2022 sampai 7 Juni 2024 sebesar Rp16.422.120,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp8.211.060,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp3.421.275,00.
10. Pendapatan sewa tanah untuk ATM Bank Jatim di RSUD Lawang berlaku 3 tahun mulai 1 November 2022 sampai 31 Oktober 2025 sebesar Rp27.479.268,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp8.327.050,91 sehingga pendapatan yang belum menjadi

hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp15.266.260,00.

11. Pendapatan sewa tanah dan bangunan dengan Ketua Yayasan Pendidikan Masyarakat Keluarga Besar Pemkab Malang untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen berlaku 5 tahun mulai 3 Desember 2018 sampai 2 Desember 2023 sebesar Rp348.716.000,00 dan pendapatan yang seharusnya diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp63.931.266,67 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
12. Pendapatan sewa tanah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Kepanjen untuk Rumah Anjungan Tunai Mandiri di Jalan KH. Agus Salim No.7 berlaku 5 tahun mulai 1 Januari 2020 sampai 31 desember 2024 sebesar Rp52.275.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp10.455.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp10.455.000,00.
13. Pendapatan sewa tanah dan bangunan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Kepanjen untuk Kantor Kas Pemerintah Kabupaten II yang berlokasi di Jalan Panji No 158 Kepanjen berlaku 5 tahun mulai 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp55.670.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp11.134.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp11.134.000,00.
14. Pendapatan sewa tanah dan bangunan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Malang untuk Kantor Kas (Kantor Disbudpar Kecamatan Singosari) berlaku 5 tahun mulai 1 September 2019 sampai 31 Agustus 2024 sebesar Rp196.430.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp39.286.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp26.190.666,67.

15. Pendapatan sewa tanah dan bangunan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Kapanjen untuk Kantor Kas Pemerintah Kabupaten I (komplek Pendopo Kabupaten Malang) berlaku 5 tahun mulai 4 Mei 2020 sampai 3 Mei 2025 sebesar Rp61.455.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp12.291.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp16.388.000,00.
16. Pendapatan sewa tanah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Kapanjen untuk Rumah Anjungan Tunai Mandiri di Jalan Abdul Rozak Desa Pagak Kecamatan Pagak berlaku 5 tahun mulai 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp22.815.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp4.563.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp9.126.000,00.
17. Pendapatan sewa tanah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Malang untuk Anjungan Tunai Mandiri di Kendedes Singosari berlaku 5 tahun mulai 14 Juli 2018 sampai 13 Juli 2023 sebesar Rp47.725.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp4.772.500,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
18. Pendapatan sewa tanah dengan Samsul Heri untuk rest area dan pugasera berlaku 5 tahun mulai 28 Maret 2022 sampai 27 Maret 2027 sebesar Rp30.000.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp6.000.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp19.500.000,00.
19. Pendapatan sewa tanah dengan Kelompok Tani Dewi Ratih untuk pertanian di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kapanjen berlaku 3 Tahun mulai 1 Agustus 2021 sampai 31 Juli 2024 sebesar Rp248.809.800,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp82.936.600,00

- sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp48.379.683,33.
20. Pendapatan sewa tanah dengan Kelompok Tani Tumapel untuk pertanian di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari berlaku 2 Tahun mulai 1 Agustus 2022 sampai 31 Juli 2024 sebesar Rp87.441.400,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp43.720.700,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp25.503.741,67.
 21. Pendapatan sewa tanah dengan Mukti Awijatdy Abrintoro untuk pertanian di Kelurahan Losari Kecamatan Singosari berlaku 3 Tahun mulai 15 Maret 2022 sampai 14 Maret 2025 sebesar Rp13.455.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp4.485.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp5.606.250,00.
 22. Pendapatan sewa sebagian tanah dan bangunan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Malang untuk *Payment Point* di Kecamatan Ngantang berlaku 5 tahun mulai 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp17.275.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp3.455.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp3.455.000,00.
 23. Pendapatan sewa sebagian tanah dan bangunan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Malang untuk *Payment Point* di area kantor Kecamatan Jabung berlaku 5 tahun mulai 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp13.840.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp2.768.000,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp2.768.000,00.
 24. Pendapatan sewa sebagian tanah dan bangunan dengan Agustin Setyawati untuk kios minuman di Jl KH. Agus Salim No. 7 Malang berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp2.472.574,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar

Rp2.472.574,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.

25. Pendapatan sewa sebagian tanah dan bangunan dengan Tiasri untuk kios minuman di Jl KH. Agus Salim No. 7 Malang berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp2.472.574,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp2.472.574,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
26. Pendapatan sewa sebagian tanah dan bangunan dengan Supatmi untuk kios makanan di Jl KH. Agus Salim No. 7 Malang berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp2.374.259,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp2.374.259,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
27. Pendapatan sewa sebagian tanah dan bangunan dengan Khutrotul Muafah untuk kios makanan di Jl KH. Agus Salim No. 7 Malang berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp2.719.831,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp2.719.831,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
28. Pendapatan sewa sebagian tanah dan bangunan dengan Suci Andriani untuk kios makanan di Jl KH. Agus Salim No. 7 Malang berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp1.947.152,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp1.947.152,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
29. Pendapatan sewa sebagian tanah dan bangunan dengan Wulan Puji Prihartini untuk kios gorengan di Jl KH. Agus Salim No. 7 Malang berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023

sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp1.103.828,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp1.103.828,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.

30. Pendapatan sewa sebagian tanah dan bangunan dengan Mery Lutfiana untuk kios makanan di Jl KH. Agus Salim No. 7 Malang berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp2.472.574,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp2.472.574,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
31. Pendapatan sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan UD Mustika Biru berupa bengkel nelayan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan berlaku 5 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2027 sebesar Rp31.626.000,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp6.325.200,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp25.300.800,00.
32. Pendapatan sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan Baruna Antariksa berupa sebagian tanah dan bangunan untuk kuliner UMKM di Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp3.162.940,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp3.162.940,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
33. Pendapatan sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan Hendriadno Raharjo berupa sebagian tanah dan bangunan untuk kuliner UMKM di Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp6.283.337,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp6.283.337,00 sehingga pendapatan yang belum

- menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
34. Pendapatan sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan Moch. Gufron berupa sebagian tanah dan bangunan untuk kuliner UMKM di Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp6.314.414,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp6.314.414,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
 35. Pendapatan sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan Yossa Firdaus berupa sebagian tanah dan bangunan untuk kuliner UMKM di Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp7.889.583,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp7.889.583,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
 36. Pendapatan sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan Supardi berupa tanah untuk pertanian di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp136.122.580,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp136.122.580,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
 37. Pendapatan sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan Ansori berupa tanah untuk pertanian di Desa Panggungrejo berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp33.829.120,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp33.829.120,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
 38. Pendapatan sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kustianto berupa tanah untuk pertanian di Polaman

- berlaku 1 tahun mulai 25 Agustus 2023 sampai 24 Agustus 2024 sebesar Rp2.115.850,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp705.283,33 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp1.410.566,67.
39. Pendapatan sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan Bari berupa tanah untuk pertanian di Sumbergepoh Krajan berlaku 1 tahun mulai 25 Agustus 2023 sampai 24 Agustus 2024 sebesar Rp4.318.945,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp1.439.648,33 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp2.879.296,67.
40. Pendapatan sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pardimin berupa tanah untuk pertanian di Kalirejo berlaku 1 tahun mulai 25 Agustus 2023 sampai 24 Agustus 2024 sebesar Rp44.327.546,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp14.775.848,67 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp29.551.697,33.
41. Pendapatan sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan Gunadji berupa tanah untuk pertanian di Kalirejo berlaku 1 tahun mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp7.224.020,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp7.224.020,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp0,00.
42. Pendapatan sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan Yayasan Pendidikan Masyarakat Keluarga Besar Pemerintah Kabupaten Malang berupa tanah dan bangunan untuk gedung perkuliahan STIKES di Kecamatan Kepanjen berlaku 5 tahun mulai 3 Desember 2023 sampai 2 Desember 2028 sebesar Rp340.835.611,00 dan pendapatan yang harus diterima pada tahun berkenaan sebesar Rp5.680.593,52,00 sehingga pendapatan yang belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2023 sebesar Rp335.155.017,48.

**Tabel 138 Penjelasan Terkait Pendapatan Diterima Dimuka
Tahun Anggaran 2023**

(dalam Rupiah)

No	Nama Satuan Kerja	No Surat Perjanjian Sewa	Masa	TMT	Jatuh Tempo	Pendapatan LRA	Pendapatan LO	Pendapatan Diterima Dimuka	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air								Dijelaskan dalam Lampiran 31
	Sewa Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air					10.912.950,00	8.107.841,67	1.524.233,33	Data dari daftar penyewa tanah dan lokasi sewa di Dinas PU SDA
2	Dinas Pemuda dan Olahraga								Dijelaskan dalam Lampiran 33
	Sewa Kios Sarana Olah Raga Dispora					145.483.496,25	145.483.496,25	0	Data dari daftar penyewa kios by name di Diapom
3	RSUD Kanjuruhan								
	Sewa Tanah dan Bangunan untuk Kantor Kas RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang	No.032/46.86/35.07.204/2021; NO-060/03/BJ/KJV/PKS.	5 Tahun	01/03/19	29/02/24	205.500.000,00	41.100.000,00	6.850.000,00	sewa per bulan 3.425.000 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 58 bulan, 2 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Tanah dan Bangunan untuk Rumah Anjungan Tunai Mandiri (di RSUD Kanjuruhan)	No: 032/4691/35.07.204/2021; NO-060/07/BJ/KJV/PKS.	5 Tahun	01/08/19	31/07/24	49.250.000,00	9.850.000,00	5.745.833,33	sewa per bulan 820.833,33 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 53 bulan, 7 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Lahan di luar ruangan dengan Nami Sih Bingah, SST		1 Tahun	01/06/23	31/05/24	5.400.000,00	3.150.000,00	2.250.000,00	sewa per bulan 450.000,00 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 7 bulan, 5 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Lahan di luar ruangan dengan Raami		1 Tahun	01/06/23	31/05/24	5.400.000,00	3.150.000,00	2.250.000,00	sewa per bulan 450.000,00 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 7 bulan, 5 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)

No	Nama Satuan Kerja	No Surat Perjanjian Sewa	Masa	TMT	Jatuh Tempo	Pendapatan LRA	Pendapatan LO	Pendapatan Diterima Dimuka	Keterangan
	Sewa Lahan di luar ruangan dengan Celvy Kartikasari		1 Tahun	01/11/23	31/10/24	5.400.000,00	900.000,00	4.500.000,00	sewa per bulan 450.000,00 (yang sudah berbak diakui sebagai pendapatan 2 bulan, 10 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Lahan di luar ruangan dengan Nyoto Wacana		3 Bulan	01/12/23	29/02/24	2.475.000,00	825.000,00	1.650.000,00	sewa per bulan 825.000,00 (yang sudah berbak diakui sebagai pendapatan 1 bulan, 2 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Lahan di luar ruangan dengan Karomatal Jamila		1 Tahun	01/12/23	30/11/24	4.050.000,00	337.500,00	3.712.500,00	sewa per bulan 337.500,00 (yang sudah berbak diakui sebagai pendapatan 1 bulan, 11 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Lahan di luar ruangan dengan El. Sri Wahyuni		1 Tahun	01/01/24	31/12/24	1.800.000,00	0	1.800.000,00	sewa per bulan 150.000 (yang sudah berbak diakui sebagai pendapatan 0 bulan, 12 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
4.	RSUD Lawang								
	Sewa Tanah untuk ATM Bank Mandiri	032/816/35.07.204/2023	2 Tahun	08/06/22	07/06/24	16.422.120,00	8.211.060,00	3.421.275,00	Sewa per bulan 684.255 (yang sudah berbak diakui sebagai pendapatan 19 bulan, 5 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Tanah untuk ATM Bank Jatim	000.2.3.2/2849/35.07.403/2023	3 Tahun	01/11/22	31/10/25	27.479.268,00	8.327.000,91	15.266.260,00	sewa per bulan 693.920,91 (yang sudah berbak diakui sebagai pendapatan 14 bulan, 22 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah								
	Sewa Tanah dan Bangunan untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keparjen	028/8241/35.07.204/2018; 024/YYB.P/EMKAB/XI/1/2018.	5 Tahun	03/12/18	02/12/23	348.716.000,00	63.931.266,67	0	Sewa per bulan 5.811.933,33 (yang sudah berbak diakui sebagai pendapatan 60 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)

No	Nama Satuan Kerja	No Surat Pelepasan Sewa	Masa	TMT	Jatuh Tempo	Pendapatan LRA	Pendapatan LO	Pendapatan Diterima Dimuka	Keterangan
	Sewa Tanah untuk Rumah Anjungan Tunai Mandiri di Lingkungan Perkeb. Malang (Lokasi di Komplek Kantor Bupati Malang)	032/0802 /35.07.20 4/2020; NO:059/1 9/BJ/KPJ /PKS	5 Tahun	01/01/20	31/12/24	52.275.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00	sewa per tahun 10.455.000 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 48 bulan, 12 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Tanah dan Bangunan untuk Kantor Kas Pemerintah Kabupaten II (Lokasi di Jalan Panji No 158 Kepanjen-Block Office Kepanjen)	032/0803 /35.07.20 4/2020; NO:059/2 0/BJ/KPJ /PKS	5 Tahun	01/01/20	31/12/24	55.670.000,00	11.134.000,00	11.134.000,00	Sewa per tahun 11.134.000 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 48 bulan, 12 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Tanah dan Bangunan untuk Kantor Kas (Kantor Disbudpar Kec. Singosari)	032/1144 0/35.07.2 04/2021.M 0-060/139 8.4/MLG/ UMAKT/P 5	5 Tahun	01/09/19	31/08/24	196.430.000,00	39.286.000,00	26.190.666,67	Sewa per bulan 3.273.833,3 3 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 52 bulan, 8 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Tanah dan Bangunan untuk Kantor Kas Pemerintah Kabupaten I (Komplek Pendopo Kabupaten Malang)	032/4690 /35.07.20 4/2021; NO:060/0 0/BJ/KPJ /PKS	5 Tahun	04/05/20	03/05/25	61.455.000,00	12.291.000,00	16.388.000,00	Sewa per bulan 1.024.250 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 44 bulan, 16 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Tanah untuk Rumah Anjungan Tunai Mandiri di Jln Abdul Rozak, Desa Pagak Kec. Pagak	032/4692 /35.07.20 4/2021; NO:060/0 8/BJ/KPJ /PKS	5 Tahun	01/01/21	31/12/25	22.815.000,00	4.563.000,00	9.126.000,00	Sewa per bulan 380.250 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 36 bulan, 24 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Tanah untuk Anjungan Tunai Mandiri di Kerdedes Singosari	032/1143 9/35.07.2 04/2020.N 0-059/264 1.3/MLG/ UMAKT/P 5	5 Tahun	14/07/18	13/07/23	47.725.000,00	4.772.000,00	0	Sewa per bulan 795.416,67 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 60 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Torupa Tanah dan Bangunan untuk Rest Area dan Pujasera	032/8496 /35.07.20 4/2022	5 Tahun	28/03/22	27/03/27	30.000.000,00	6.000.000,00	10.500.000,00	Sewa per bulan 500.000,00 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 21 bulan, 39 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)

No	Nama Satuan Kerja	No Surat Perjanjian Sewa	Masa	TMT	Jatuh Tempo	Pendapatan LRA	Pendapatan LO	Pendapatan Diterima Dimuka	Keterangan
	Sewa Tanah untuk Pertanian (di Kel. Ardirejo, Kec. Kepanjen)	032/9034 /35.07.20 4/2022	3 Tahun	01/08/21	31/07/24	248.809.800,00	82.936.600,00	48.379.683,33	Sewa per bulan 6.911.383,33 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 29 bulan, 7 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Tanah untuk Pertanian (di Kel. Pagentan, Kec. Singosari)	032/6766 /35.07.20 4/2022	2 Tahun	01/08/22	31/07/24	87.441.400,00	43.720.700,00	25.503.741,67	Sewa per bulan 3.643.391,67 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 17 bulan, 7 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Tanah untuk Pertanian (di Kel. Losari, Kec. Singosari)	032/6774 /35.07.20 4/2022	3 Tahun	15/03/22	14/03/25	13.455.000,00	4.485.000,00	5.606.250,00	Sewa per bulan 373.750,00 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 21 bulan, 15 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Payment Point (di Kec. Ngantang)	032/8497 /35.07.20 4/2022; 059/519.2 /MLG/UM AKT/78	5 Tahun	01/01/20	31/12/24	17.275.000,00	3.455.000,00	3.455.000,00	Sewa per bulan 287.916,67 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 48 bulan, 12 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Payment Point Di Area Kantor Kec. Jabung	032/7728 /35.07.20 4/2022; 059/787.1 /MLG/UM AKT/2020	5 Tahun	01/01/20	31/12/24	13.840.000,00	2.768.000,00	2.768.000,00	Sewa per bulan 230.666,67 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 48 bulan, 12 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Kios Minuman di Jalan Kh. Agus Salim No. 7 Malang	032/6869 /35.07.20 4/2023	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	2.472.574,00	2.472.574,00	0	Sewa per bulan 206.047,83 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Kios Minuman di Jalan Kh. Agus Salim No. 7 Malang	032/7306 /35.07.20 4/2023	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	2.472.574,00	2.472.574,00	0	Sewa per bulan 206.047,83 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)

No	Nama Satuan Kerja	No Surat Perjanjian Sewa	Masa	TMT	Jatuh Tempo	Pendapatan LRA	Pendapatan LO	Pendapatan Diterima Dimuka	Keterangan
	Sewa Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Kios Makanan di Jalan Kh. Agus Salim No. 7 Malang	032/7304 /35.07.20 4/2023	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	2.374.259,00	2.374.259,00	0	Sewa per bulan 197.854,92 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Kios Makanan di Jalan Kh. Agus Salim No. 7 Malang	032/6872 /35.07.20 4/2023	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	2.719.831,00	2.719.831,00	0	Sewa per bulan 226.652,58 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Kios Makanan di Jalan Kh. Agus Salim No. 7 Malang	032/7305 /35.07.20 4/2023	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	1.947.152,00	1.947.152,00	0	Sewa per bulan 162.262,67 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Kios Gorengan di Jalan Kh. Agus Salim No. 7 Malang	032/6871 /35.07.20 4/2023	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	1.103.828,00	1.103.828,00	0	Sewa per bulan 91.985,67 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Kios Makanan di Jalan Kh. Agus Salim No. 7 Malang	000.2.3.2/ 11128/35. 07.204/20 23	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	2.472.574,00	2.472.574,00	0	sewa per bulan 206.047,83 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Barang Milik Pemkab Malang Berupa Bangkol Nelayan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan	032/3560 /07.204/2 023	5 Tahun	01/01/23	31/12/27	31.626.000,00	6.325.200,00	25.300.800,00	sewa per bulan 585.666,67 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 48 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Barang Milik Pemkab Malang Berupa Sebagian Tanah Dan Bangunan Untuk Kuliner Uskm Di Kel Lawang Kec Lawang	000.2.3.2/ 11469/35. 07.403/20 23	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	3.162.940,00	3.162.940,00	0	sewa per bulan 263.578,33 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)

No	Nama Satuan Kerja	No Surat Perjanjian Sewa	Masa	TMT	Jatuh Tempo	Pendapatan LRA	Pendapatan LO	Pendapatan Diterima Dimuka	Keterangan
									dimuka)
	sewa barang milik Pemkab Malang berupa sebagian tanah dan bangunan untuk kuliner umkm di kel lawang kec lawang	000.2.3.2/11470/35.07.403/2023	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	6.283.337,00	6.283.337,00	0	sewa per bulan 523.611,42 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Barang Milik Pemkab Malang Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Umkm di Kel Lawang Kec Lawang	000.2.3.2/11470/35.07.403/2023	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	6.314.414,00	6.314.414,00	0	sewa per bulan 526.201,17 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Barang Milik Pemkab Malang Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Umkm di Kel Lawang Kec Lawang	000.2.3.2/11467/35.07.403/2023	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	7.889.583,00	7.889.583,00	0	sewa per bulan 657.465,25 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Barang Milik Pemkab Malang Berupa Tanah untuk Pertanian di Kel Pamarukan Kec Kepanjen	000.2.3.2/13199/35.07.403/2023	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	136.122.580,00	136.122.580,00	0	sewa per bulan 11.343.548,33 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Barang Milik Pemkab Malang Berupa Tanah untuk Pertanian di Desa Panggungrejo	000.2.3.2/12721/35.07.403/2023	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	33.829.120,00	33.829.120,00	0	sewa per bulan 2.819.093,33 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)

No	Nama Satuan Kerja	No Surat Perjanjian Sewa	Masa	TMT	Jatuh Tempo	Pendapatan LRA	Pendapatan LO	Pendapatan Diterima Dimuka	Keterangan
	Sewa Barang Milik Pemkab Malang Berupa Tanah untuk Pertanian di Polaman	000.2.3.2/13203/35.07.403/2023	1 Tahun	25/08/23	24/08/24	2.115.850,00	705.283,33	1.410.566,67	sewa per bulan 226.906,67 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 4 bulan, 8 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Barang Milik Pemkab Malang Berupa Tanah untuk Pertanian di Sumbergepoh Kesjèn	000.2.3.2/13208/35.07.403/2023	1 Tahun	25/08/23	24/08/24	4.318.945,00	1.430.648,33	2.879.296,67	sewa per bulan 470.312,50 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 4 bulan, 8 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Barang Milik Pemkab Malang Berupa Tanah untuk Pertanian di Kalirejo	000.2.3.2/13201/35.07.403/2023	1 Tahun	25/08/23	24/08/24	44.327.546,00	14.775.848,67	29.551.697,33	sewa per bulan 5.191.728,92 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 4 bulan, 8 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Barang Milik Pemkab Malang Berupa Tanah untuk Pertanian di Kalirejo	000.2.3.2/13204/35.07.403/2023	1 Tahun	01/01/23	31/12/23	7.224.020,00	7.224.020,00	0	sewa per bulan 602.001,67 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 12 bulan, 0 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
	Sewa Barang Milik Pemkab Malang Berupa Tanah dan Bangunan untuk Gedung Perkuliahan Sikesa di Kec Keparjèn	000.2.3.2/1107/35.07.403/2024	5 Tahun	03/12/23	02/12/28	340.835.611,00	5.680.593,52	335.155.017,48	sewa per bulan 5.680.593,52 (yang sudah berhak diakui sebagai pendapatan 1 bulan, 59 bulan menjadi pendapatan diterima dimuka)
Jumlah						3.315.092.772,25	764.558.375,34	622.173.821,49	

d. Utang Belanja

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Belanja	(Rp)	(Rp)
	41.427.824.858,39	67.190.958.755,62

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.427.824.858,39 terdiri atas:

1. Utang Belanja BLUD Puskesmas Ampelgading (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp182.765.737,00
2. Utang Belanja BLUD Puskesmas Ardimulyo (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar 143.197.242,00
3. Utang Belanja BLUD Puskesmas Bantur (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp18.027.000,00
4. Utang Belanja BLUD Puskesmas Bululawang (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp100.295.900,00
5. Utang Belanja BLUD Puskesmas Dampit (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp66.749.108,00
6. Utang Belanja BLUD Puskesmas Dau (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp23.192.650,00
7. Utang Belanja BLUD Puskesmas Donomulyo (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp301.355.184,00
8. Utang Belanja BLUD Puskesmas Gedangan (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp61.638.114,00
9. Utang Belanja BLUD Puskesmas Gondanglegi (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp93.508.334,00
10. Utang Belanja BLUD Puskesmas Kalipare (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp47.908.570,54
11. Utang Belanja BLUD Puskesmas Karangploso (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp6.492.660,00
12. Utang Belanja BLUD Puskesmas Kasembon (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp1.166.550,00
13. Utang Belanja BLUD Puskesmas Kepanjen (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp14.654.116,00
14. Utang Belanja BLUD Puskesmas Ketawang (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp48.833.887,61
15. Utang Belanja BLUD Puskesmas Kromengan (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp86.899.530,27
16. Utang Belanja BLUD Puskesmas Lawang (pengakuan akrual atas belanja pegawai) sebesar Rp96.251.753,00
17. Utang Belanja BLUD Puskesmas Ngajum (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp1.907.011,08

18. Utang Belanja BLUD Puskemas Pagelaran (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp71.495.468,00
19. Utang Belanja BLUD Puskesmas Pakis (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp48.068.290,00
20. Utang Belanja BLUD Puskemas Pakisaji (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp6.930.000,55
21. Utang Belanja BLUD Puskemas Pamotan (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp49.991.855,00
22. Utang Belanja BLUD Puskemas Pujon (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp36.944.234,09
23. Utang Belanja BLUD Puskemas Sumbermanjing Kulon (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp84.626.168,00
24. Utang Belanja BLUD Puskemas Sumbermanjing Wetan (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp6.181.370,00
25. Utang Belanja BLUD Puskemas Singosari (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp93.639.759,12
26. Utang Belanja BLUD Puskemas Sitarjo (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp19.143.782,00
27. Utang Belanja BLUD Puskemas Sumberpucung (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp81.852.732,00
28. Utang Belanja BLUD Puskemas Tajinan (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp24.689.294,34
29. Utang Belanja BLUD Puskemas Tirtoyudo (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp39.454.002,00
30. Utang Belanja BLUD Puskemas Tumpang (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp53.906.425,00
31. Utang Belanja BLUD Puskemas Turen (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp153.861.111,61
32. Utang Belanja BLUD Puskemas Wagir (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp297.659.685,00
33. Utang Belanja BLUD Puskemas Wajak (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp73.255.838,00
34. Utang Belanja BLUD Puskemas Wonokerto (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp268.859.480,00

35. Utang Belanja RSUD Kanjuruhan (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp 28.248.998.943,01
36. Utang Belanja RSUD Lawang (pengakuan akrual atas belanja pegawai dan barang jasa) sebesar Rp3.152.312.654,17
37. Utang Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah (pengakuan akrual atas belanja pegawai) sebesar Rp 7.321.110.419,00,00

Tabel 139 Penjelasan Terkait Mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal		Mutasi		Saldo Akhir
			Debet	Kredit	Debet	Kredit	
1.	Dana Pendidikan	27.409.765.509,27	-	-	27.409.765.509,27	-	0
2.	Dana Kesehatan	624.882.200,00	-	-	624.882.200,00	-	0
3.	UPTD Puskesmas Ampelgading (BLUD)	443.321.123,00			443.321.123,00	182.765.737,00	182.765.737,00
4.	UPTD Puskesmas Arifanulya (BLUD)	6.436.154,52		225.000,48	6.661.155,00	143.197.242,00	143.197.242,00
5.	UPTD Puskesmas Bantar (BLUD)	13.779.600,00			13.779.600,00	18.027.000,00	18.027.000,00
6.	UPTD Puskesmas Bukitlawang (BLUD)					100.295.900,00	100.295.900,00
7.	UPTD Puskesmas Dampit (BLUD)	76.227.200,00			76.227.200,00	66.749.108,00	66.749.108,00
8.	UPTD Puskesmas Das (BLUD)	2.142.500,00			2.142.500,00	23.192.650,00	23.192.650,00
9.	UPTD Puskesmas Dusunulya (BLUD)	7.081.799,00			7.081.799,00	301.355.184,00	301.355.184,00
10.	UPTD Puskesmas Gedangan (BLUD)	1.962.714,00			1.962.714,00	61.638.114,00	61.638.114,00
11.	UPTD Puskesmas Gondangrejo (BLUD)	20.399.480,07			20.399.480,07	93.508.334,00	93.508.334,00
12.	UPTD Puskesmas Jabung (BLUD)	13.519.969,00			13.519.969,00		0
13.	UPTD Puskesmas Kalipare (BLUD)	6.310.260,00			6.310.260,00	47.908.370,54	47.908.370,54
14.	UPTD Puskesmas Karangdowo (BLUD)					6.492.660,00	6.492.660,00
15.	UPTD Puskesmas Kerinci (BLUD)	669.800,00			669.800,00	1.166.550,00	1.166.550,00
16.	UPTD Puskesmas Kepanjen (BLUD)					14.654.116,00	14.654.116,00
17.	UPTD Puskesmas Krianing (BLUD)	1.018.000,00			1.018.000,00	48.833.887,61	48.833.887,61
18.	UPTD Puskesmas Kromengan (BLUD)					86.899.530,27	86.899.530,27
19.	UPTD Puskesmas Lawang (BLUD)					96.251.753,00	96.251.753,00
20.	UPTD Puskesmas Ngajom (BLUD)	19.189.425,00			19.189.425,00	1.907.011,08	1.907.011,08
21.	UPTD Puskesmas Ngawing (BLUD)	3.013.000,00			3.013.000,00		0
22.	UPTD Puskesmas Pongok (BLUD)	5.800.000,00			5.800.000,00		0
23.	UPTD Puskesmas Puglaran (BLUD)	5.783.250,00			5.783.250,00	71.495.468,00	71.495.468,00
24.	UPTD Puskesmas Ploze (BLUD)	32.191.268,00			32.191.268,00	48.068.290,00	48.068.290,00
25.	UPTD Puskesmas Plozeji (BLUD)	9.318.085,00			9.318.085,00	6.930.000,35	6.930.000,35
26.	UPTD Puskesmas Ponorot (BLUD)	662.799,00			662.799,00	49.991.855,00	49.991.855,00
27.	UPTD Puskesmas Pujon (BLUD)	12.072.280,00			12.072.280,00	36.944.234,09	36.944.234,09
28.	UPTD Puskesmas Sumberejojog Koko (BLUD)	41.325.050,00			41.325.050,00	84.626.168,00	84.626.168,00
29.	UPTD Puskesmas Sumberejojog Wetan (BLUD)	957.150,00			957.150,00	6.181.370,00	6.181.370,00
30.	UPTD Puskesmas Singsari (BLUD)	28.694.660,00			28.694.660,00	93.639.759,12	93.639.759,12

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal		Mutasi		Saldo Akhir
			Debet	Kredit	Debet	Kredit	
31.	UPTD Puskesmas Sitarja (BLUD)	125.981.813,00			125.981.812,00	19.143.781,00	19.143.782,00
32.	UPTD Puskesmas Sumberpajanti (BLUD)	8.586.060,00			8.586.060,00	81.852.732,00	81.852.732,00
33.	UPTD Puskesmas Tajanan (BLUD)	27.539.671,12			27.539.671,12	24.689.294,34	24.689.294,34
34.	UPTD Puskesmas Teroyudo (BLUD)					39.454.002,00	39.454.002,00
35.	UPTD Puskesmas Tumpang (BLUD)	53.906.425,00					53.906.425,00
36.	UPTD Puskesmas Turus (BLUD)	15.532.000,00			15.532.000,00	153.861.111,61	153.861.111,61
37.	UPTD Puskesmas Wagir (BLUD)	26.100.000,00			26.100.000,00	297.659.683,00	297.659.683,00
38.	UPTD Puskesmas Wajak (BLUD)	9.575.234,00			9.575.234,00	73.255.838,00	73.255.838,00
39.	UPTD Puskesmas Wonorejo (BLUD)	6.250.000,00	787.619,00	787.619,00	6.250.000,00	268.859.480,00	268.859.480,00
40.	RSUD Karangasem	10.637.257.326,62			10.637.257.326,62	28.248.998.943,01	28.248.998.943,01
41.	RSUD Lingsar	5.533.138.957,52			5.533.138.957,52	3.152.312.654,17	3.152.312.654,17
42.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.956.129.823,50			21.956.129.823,50	7.321.110.419,00	7.321.110.419,00
	Bagi Hasil Pajak				32.543.249.560,00	32.543.249.560,00	0
	Bagi Hasil Retribusi				2.401.093.988,00	2.401.093.988,00	0
	Bagi Hasil Rta Menteng				147.050.400,00	147.050.400,00	0
	Bagi Hasil Tji Kot Misa				1.676.922.005,00	1.676.922.005,00	0
	Bagi Hasil Pasar Bakoro				33.641.200,00	33.641.200,00	0
43.	Badan Percepatan Daerah	142.034,00			142.034,00		0
44.	Kecamatan Ombalonggi	3.539.700,00			3.539.700,00		0
45.	Kecamatan Rujun	736.386,00	736.386,00				0
	Total Utang Belanja	67.190.968.756,62	1.524.025,00	1.012.619,48	67.136.540.946,10	41.373.918.434,39	41.427.824.858,39

Tabel 140 Perhitungan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Bagi Hasil Pajak	-
	a. Utang bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2022	-
	b. Koreksi saldo awal utang bagi hasil pajak	-
	Saldo awal seharusnya (a+b)	-
2.	Penetapan Bagi Hasil Pajak	32.543.249.560,00
	a. SK No 188.45/656/KEP/35.07.013/2023 Tanggal 21 Juli 2023	5.208.151.615,00
	b. SK No 188.45/710/KEP/35.07.013/2023 Tanggal 18 Agustus 2023	11.134.030.132,00
	c. SK No 188.45/897/KEP/35.07.013/2023 Tanggal 24 November 2023	16.201.067.813,00
3.	Dikurangi yang sudah ditransfer	32.543.249.560,00
	a. SP2D 05.14/04.0/000475/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.02/8/2023 Tanggal 21 Agustus 2023	5.208.151.615,00
	b. SP2D 05.14/04.0/000486/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.02/9/2023 Tanggal 4 September 2023	11.134.030.132,00
	c. SP2D 05.14/04.0/000817/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.04/12/2023 Tanggal 27 Desember 2023	16.201.067.813,00
	Jumlah kurang salur DBH Pajak 2023 (2-3)	0

**Tabel 141 Perhitungan Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi
Tahun Anggaran 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Bagi Hasil Retribusi	-
	a. Utang bagi hasil retribusi Tahun Anggaran 2022	-
	b. Koreksi saldo awal utang bagi hasil retribusi	-
	Saldo awal seharusnya (a+b)	-
2.	Penetapan Bagi Hasil Retribusi	2.401.093.988,00
	a. SK Bupati No 188.45/657/KEP/35.07.013/2023 Tanggal 24 Juli 2023	497.974.076,00
	b. SK Bupati No 188.45/711/KEP/35.07.013/2023 Tanggal 18 Agustus 2023	1.052.127.813,00
	c. SK Bupati No 188.45/898/KEP/35.07.013/2023 Tanggal 24 November 2023	850.992.099,00
3.	Dikurangi yang sudah ditransfer	2.401.093.988,00
	a. SP2D 05.14/04.0/000475/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.02/8/2023 Tanggal 21 Agustus 2023	497.974.076,00
	b. SP2D 05.14/04.0/000486/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.02/9/2023 Tanggal 4 September 2023	1.052.127.813,00
	c. SP2D 05.14/04.0/000817/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.04/12/2023 Tanggal 27 Desember 2023	850.992.099,00
	Jumlah kurang salur DBH Retribusi 2023 (2-3)	0

**Tabel 142 Perhitungan Utang Belanja Bagi Hasil STA Mantung
Tahun Anggaran 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Bagi Hasil STA Mantung	
	a. Utang bagi hasil STA Mantung Tahun Anggaran 2022	85.011.400,00
	b. Koreksi saldo awal utang bagi hasil STA Mantung	-
	Saldo awal seharusnya (a+b)	85.011.400,00
2.	Penetapan Bagi Hasil STA Mantung	147.050.400,00
	a. Surat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan No 900/1732/35.07.114/2023 tentang Permohonan pencairan dana bagi hasil retribusi UPT STA Mantung Bulan Maret sd Desember 2022	85.011.400,00
	b. Surat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan No 900//35.07.114/2023 tentang Permohonan pencairan dana bagi hasil retribusi UPT STA Mantung Bulan Januari sd Juni 2023	62.039.000,00
3.	Dikurangi yang sudah ditransfer	147.050.400,00
	a. SP2D 05.14.03.0/000282/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.02/6/2023 Tanggal 7 Juni 2023	85.011.400,00
	b. SP2D 05.14/04.0/000480/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.02/8/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	62.039.000,00
4.	Jumlah kurang salur DBH STA Mantung 2023 (2-3)	0

**Tabel 143 Perhitungan Utang Belanja Bagi Hasil TPI KUD Mina
Tahun Anggaran 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Bagi Hasil TPI KUD Mina	
a.	Utang bagi hasil TPI KUD Mina Tahun Anggaran 2022	186.417.583,50
b.	Koreksi saldo awal utang bagi hasil TPI KUD Mina	-
	Saldo awal seharusnya (a+b)	186.417.583,50
2.	Penetapan Bagi Hasil TPI KUD Mina	1.676.922.005,00
a.	Surat Dinas Perikanan No 900/2708/35.07.115/2023 tentang Permohonan pencairan dana bagi hasil retribusi TPI kurang salur tahun 2021	46.878.929,00
b.	Surat Dinas Perikanan No 900/6888/35.07.115/2023 tentang Permohonan pencairan dana bagi hasil retribusi TPI bulan Desember 2022	186.417.583,00
c.	Surat Dinas Perikanan No 900/2794/35.07.115/2023 tentang Permohonan pencairan dana bagi hasil retribusi TPI bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei 2023	181.850.424,00
d.	Surat Dinas Perikanan No 900/3343/35.07.115/2023 tentang Permohonan pencairan dana bagi hasil retribusi TPI bulan Juni, Juli dan Agustus 2023	541.407.021,00
e.	Surat Dinas Perikanan No 900/3343/35.07.115/2023 tentang Permohonan pencairan dana bagi hasil retribusi TPI bulan September, Oktober dan November 2023	720.368.048,00
3.	Dikurangi yang sudah ditransfer	1.676.922.005,00
a.	SP2D 05.14/04.0/000494/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.02/9/2023 Tanggal 14 September 2023	46.878.929,00
b.	SP2D 05.14/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.01/3/2023 Tanggal 29 Maret 2023	186.417.583,00
c.	SP2D 05.14/04.0/000495/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.02/9/2023 Tanggal 14 September 2023	181.850.424,00
d.	SP2D 05.14/04.0/000896/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.02/11/2023 Tanggal 1 November 2023	541.407.021,00
e.	SP2D 05.14/04.0/000818/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.04/12/2023 Tanggal 27 Desember 2023	720.368.048,00
4.	Jumlah kurang salur DBH TPI KUD Mina 2023 (2-3)	0

**Tabel 144 Perhitungan Utang Belanja Bagi Hasil Pasar Bakroto
Tahun Anggaran 2023**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Penetapan Bagi Hasil Pasar Bakroto	33.641.200,00
a.	Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 500.2.4.3/4392/35.07.324/2023 tentang Permohonan Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Bakroto Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading	33.641.200,00
2.	Dikurangi yang sudah ditransfer	33.641.200,00
a.	SP2D 05.14/04.0/000707/LS/5.02.0.00.0.00.28.0000/P.03/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023	33.641.200,00
3.	Jumlah kurang salur DBH Pasar Bakroto 2023 (2-3)	0

Tabel 145 Penjelasan Atas Pembayaran Utang Belanja

Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Unit Kerja	Utang Belanja Tahun 2022			Tanggal Pelunasan	Bukti Pelunasan
		Utang Pegawai	Utang Barang dan Jasa	Utang Bagi Hasil		
1.	Dinas Pendidikan		33.337.377,27		27/03/2023	STB
2.	Dinas Kesehatan		624.882.200,00			SP2D
3.	UPTD Puskesmas Ampelgading (BLUD)	305.042.749,00	137.278.374,00		12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
4.	UPTD Puskesmas Ardimulyo (BLUD)	6.661.155,00			12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
5.	UPTD Puskesmas Bantur (BLUD)	6.864.864,00	6.914.736,00		10/12/2022	Formulir Pembayaran
6.	UPTD Puskesmas Dampit (BLUD)	45.063.847,00	31.163.362,00		28/02/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
7.	UPTD Puskesmas Dou (BLUD)	1.414.050,00	728.450,00		28/12/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
8.	UPTD Puskesmas Dosoanulyo (BLUD)	3.610.947,00	3.470.852,00		06/12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
9.	UPTD Puskesmas Gedangan (BLUD)	1.389.902,00	572.812,00		28/12/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
10.	UPTD Puskesmas Gondanglegi (BLUD)	14.145.062,19	6.254.417,88		12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
11.	UPTD Puskesmas Jabung (BLUD)	9.829.355,00	3.690.614,00		28/11/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
12.	UPTD Puskesmas Kalipare (BLUD)	3.681.634,00	2.628.626,00		04/12/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
13.	UPTD Puskesmas Kasembon (BLUD)	488.954,00	180.846,00		28/12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
14.	UPTD Puskesmas Ketawang (BLUD)	662.010,56	355.989,44		27/12/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
15.	UPTD Puskesmas Ngajum (BLUD)	12.158.112,00	7.031.313,00		12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
16.	UPTD Puskesmas Ngantang (BLUD)	1.781.965,00	1.231.035,00		12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
17.	UPTD Puskesmas Pagak (BLUD)	3.482.504,00	2.317.496,00		04/12/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
18.	UPTD Puskesmas Pagelaran (BLUD)	3.837.224,00	1.946.026,00		20/12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
19.	UPTD Puskesmas Pakis (BLUD)	19.314.756,00	12.876.504,00		12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
20.	UPTD Puskesmas Pakisaji (BLUD)	6.058.218,00	3.250.867,00		24/11/2023	Rekapitulasi Pembayaran
21.	UPTD Puskesmas Parotan (BLUD)	450.323,31	212.475,69		28/12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
22.	UPTD Puskesmas Pujon (BLUD)	8.090.602,05	3.981.677,95		12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
23.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Kulon (BLUD)	29.180.850,00	12.144.200,00		12/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
24.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan (BLUD)	615.049,00	342.101,00		01/12/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
25.	UPTD Puskesmas Singosari (BLUD)	16.123.029,00	12.571.631,00		21/12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
26.	UPTD Puskesmas Sitiajo (BLUD)	123.393.889,00	2.587.923,00		12/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
27.	UPTD Puskesmas Sumberpucung (BLUD)	6.330.283,00	2.255.777,00		23/11/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
28.	UPTD Puskesmas Tajinan (BLUD)	18.542.634,59	8.997.036,53		09/02/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
29.	UPTD Puskesmas Tumpang (BLUD)	36.801.014,00	17.105.411,00		-	Belum Terbayar
30.	UPTD Puskesmas Turen (BLUD)	9.212.634,18	6.319.355,82		28/04/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
31.	UPTD Puskesmas Wagir (BLUD)	18.432.197,00	7.667.803,00		06/11/2023	Bukti Setoran Bank Jatim

No	Unit Kerja	Utang Belanja Tahun 2023			Tanggal Pelunasan	Bukti Pelunasan
		Utang Pegawai	Utang Barang dan Jasa	Utang Bagi Hasil		
32.	UPTD Puskesmas Wajak (BLUD)	6.143.951,00	3.431.283,00		04/12/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
33.	UPTD Puskesmas Wonorejo (BLUD)	3.320.312,00	2.929.688,00		12/12/2023	Bukti Setoran Bank Jatim
34.	RSUD Kanjuruhan	5.299.661.707,30	5.337.595.619,32		12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
35.	RSUD Lawang	4.832.381.934,72	700.757.022,80		12/2023	Rekapitulasi Pembayaran
36.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17.977.709.900,00		271.428.983,30		SP2D
37.	Badan Pendapatan Daerah	142.034,00				STS
38.	Kecamatan Gondanglegi	3.550.700,00			30/01/2023	STS

Tabel 146 Penjelasan Atas Pembayaran Utang Belanja Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja Pemerintahan Daerah	Utang Belanja Tahun 2023			KET
		Utang Pegawai	Utang Barang dan Jasa	Utang Bagi Hasil	
1.	UPTD Puskesmas Ampelgading (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	140.921.071,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		41.844.666,00		
2.	UPTD Puskesmas Ardimulyo (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	118.997.258,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		24.199.984,00		
3.	UPTD Puskesmas Bantur (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	14.182.335,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		3.844.665,00		
4.	UPTD Puskesmas Bululawang (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	88.415.068,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		11.880.832,00		
5.	UPTD Puskesmas Dampit (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	29.917.766,00			
	B. Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas		1.590.000,00		
	B. Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya		8.269.500,00		
	B. Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		169.000,00		
	B. Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1.909.500,00		
	B. Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		5.397.900,00		

No	Satuan Kerja Pemerintahan Daerah	Utang Belanja Tahun 2023			KET
		Utang Pegawai	Utang Barang dan Jasa	Utang Bagi Hasil	
	B. Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		122.500,00		
	B. Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		9.600.000,00		
	B. Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		5.772.942,00		
	B. Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		4.000.000,00		
6.	UPTD Puskesmas Dau (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	20.236.667,00			
	B. Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		2.955.983,00		
7.	UPTD Puskesmas Donomulyo (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	127.973.791,00			
	B. Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan bakar dan Pelumas		6.933.080,00		
	B. Barang Pakai Habis-Bahan-lai Tabung Gas		7.919.991,00		
	B. Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya		6.880.477,00		
	B. Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		619.300,00		
	B. Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		2.518.500,00		
	B. Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		3.539.000,00		
	B. Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		666.000,00		
	B. Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya		429.188,00		
	B. Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan		20.601.475,00		
	B. Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura		765.000,00		
	B. Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		44.175.000,00		
	B. Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan		11.600,00		
	B. Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi		5.330.000,00		
	B. Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah		12.737.195,00		
	B. Jasa Kantor-Tagihan Telepon		44.519,00		
	B. Jasa Kantor-Tagihan Air		134.495,00		
	B. Jasa Kantor-Tagihan Listrik		6.426.116,00		
	B. Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan		898.530,00		
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		48.321.927,00		
	B. Pemeliharaan Peralatan dan		700.000,00		

No	Satuan Kerja Pemerintahan Daerah	Utang Belanja Tahun 2023			KET
		Utang Pegawai	Utang Barang dan Jasa	Utang Bagi Hasil	
	Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus				
	B. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Komputer		500.000,00		
	B. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Personal Komputer		730.000,00		
	B. Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		2.500.000,00		
8.	UPTD Puskesmas Gedangan (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	47.636.311,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		13.981.803,00		
9.	UPTD Puskesmas Gondanglegi (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	74.850.653,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		18.657.681,00		
10.	UPTD Puskesmas Kalipare (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	38.277.597,87			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		9.630.972,67		
11.	UPTD Puskesmas Karangloso (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	5.324.799,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		1.167.861,00		
12.	UPTD Puskesmas Kasembon (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	967.793,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		198.757,00		
13.	UPTD Puskesmas Kepanjen (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	10.864.683,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		1.417.918,00		
	B. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan		2.371.515,00		
14.	UPTD Puskesmas Ketawang (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	48.635.851,85			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		198.035,76		
15.	UPTD Puskesmas Kromengan (BLUD)				
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	67.790.323,56			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		19.109.206,71		

No	Satuan Kerja Pemerintahan Daerah	Utang Belanja Tahun 2023			KET
		Utang Pegawai	Utang Barang dan Jasa	Utang Bagi Hasil	
16.	UPTD Puskesmas Lawang (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	96.251.753,00			
17.	UPTD Puskesmas Ngajum (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan		1.907.011,08		
18.	UPTD Puskesmas Pagelaran (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	70.433.717,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		1.061.751,00		
19.	UPTD Puskesmas Pakis (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	29.949.022,00			
	B. Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya		5.297.751,00		
	B. Barang Pakai Habis-Obat-Obatan		4.929.386,00		
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		7.892.131,00		
20.	UPTD Puskesmas Pakisaji (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	5.495.438,55			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		1.434.562,00		
21.	UPTD Puskesmas Pamotan (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	40.037.662,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		9.954.193,00		
22.	UPTD Puskesmas Pujon (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	31.761.342,08			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		5.182.892,01		
23.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Kulon (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	55.002.618,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		29.623.550,00		
24.	UPTD Puskesmas Sumbermanjing Wetan (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	5.061.958,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		1.119.412,00		
25.	UPTD Puskesmas Singosari (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	70.229.820,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		23.409.939,12		

No	Satuan Kerja Pemerintahan Daerah	Utang Belanja Tahun 2023			KET
		Utang Pegawai	Utang Barang dan Jasa	Utang Bagi Hasil	
26.	UPTD Puskesmas Sitarjo (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	13.996.899,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		5.146.883,00		
27.	UPTD Puskesmas Sumberpucung (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	71.214.131,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		10.638.601,00		
28.	UPTD Puskesmas Tajinan (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	15.361.509,49			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		9.327.784,85		
29.	UPTD Puskesmas Tirtoyudo (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	30.142.811,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		9.311.191,00		
30.	UPTD Puskesmas Tumpang (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	36.801.014,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		17.105.411,00		
31.	UPTD Puskesmas Turen (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	119.490.301,67			
	B. Barang Pakai Habi Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		17.780.000,00		
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		16.590.809,94		
32.	UPTD Puskesmas Wagir (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	257.411.036,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		40.248.649,00		
33.	UPTD Puskesmas Wajak (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	49.975.408,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		23.280.430,00		
34.	UPTD Puskesmas Wonokerto (BLUD)				Belum Terbayar
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	224.959.181,00			
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN		43.900.299,00		
35.	RSUD Kanjuruhan				Dijelaskan dalam lampiran 38

No	Satuan Kerja Pemerintahan Daerah	Utang Belanja Tahun 2023			KET
		Utang Pegawai	Utang Barang dan Jasa	Utang Bagi Hasil	
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	15.771.150.062,00			
	B. Barang Pakai Habis Bahan Kimia		1.369.471.199,00		
	B. Barang Pakai Habis Isi Tabung Gas		309.017.122,00		
	B. Barang Pakai Habis Bahan lainnya		4.675.200.201,74		
	B. Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		23.055.000,00		
	B. Barang Pakai Habis obat-obatan		5.027.574.373,47		
	B. Barang Pakai Habis Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		135.118.535,80		
	B. Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan		529.801.580,00		
	B. Kantor-Jasa Tenaga Keamanan		141.098.225,00		
	B. Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah		3.422.833,00		
	B. Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang -Kesehatan		184.688.000,00		
	B. Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Umum		79.401.811,00		
36.	RSUD Lawang				Dijelaskan dalam lampiran 36
	B. Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	2.027.796.435,75			
	B. Barang Pakai Habis Bahan Kimia		127.660.317,00		
	B. Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas		3.444.000,00		
	B. Barang Pakai Habis obat-obatan		841.202.077,15		
	B. Barang Pakai Habis obat-obatan lainnya		41.096.196,00		
	B. Barang Pakai Habis Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		79.110.183,00		
	B. Jasa Kantor - Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		2.498.115,27		
	B. Iuran Jaminan/Asuransi-Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI		6.091.000,00		
	B. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya		23.414.330,00		
37.	Badan Keuangan dan Aset Daerah				Belum Terbayar
	B. Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.321.110.419,00			
	Total Utang Belanja TA 2023		41.427.824.858,39		

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	4.419.057.772,00	3.819.275.383,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.419.057.772,00 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan berdasarkan PMK NO 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023 dan KMK 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 serta Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2022 pada bidang pendidikan serta tahun 2023 pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 147 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2023
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	2.085.307.038,00
	a. Bagi Hasil PPh	0
	b. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	4.411,00
	c. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2.085.302.627,00
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.333,00
	a. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak dan Gas Bumi	
	b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	1.636,00
	c. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	
	d. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan	695,00
	e. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.002,00
3.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	2.333.747.401,00
	a. Bidang pendidikan (tahun 2022)	36.800.000,00
	b. Bidang pendidikan (tahun 2023)	56.000.000,00
	c. Bidang kesehatan (tahun 2023)	2.231.050.621,00
	d. Bidang Lainnya Program Pemberdayaan BUMDesa, Program Jatim Puspa (tahun 2023)	7.896.780,00
	e. Bidang Lainnya Honorarium Bagi Aparatur Pemerintah Desa (tahun 2023)	2.000.000,00
	Jumlah (1+2+3)	4.419.057.772,00

Dari total nilai Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 sebesar Rp46.493.732.037,88 terdapat tagihan-tagihan lainnya yang belum dicatat dalam neraca karena status dan nilainya belum valid berupa:

- a. Tagihan yang menurut pihak BPJS Kesehatan berupa utang iuran dan Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional sebesar

Rp86.253.530.500,00 yang masih dalam proses verifikasi dan audit oleh BPKP.

- b. Tagihan kepada Dinas Pendidikan sebesar Rp27.376.428.182,00 yang merupakan utang Iuran JKN atas Tunjangan Profesi Guru Tahun 2020 dan 2021 dari BPJS Kesehatan yang nilainya belum diverifikasi.
- c. Tagihan kepada RSUD Kanjuruhan sebesar Rp464.458.481,00 yang merupakan utang Iuran JKN atas Jasa Pelayanan Medis Tahun 2020 dari BPJS Kesehatan yang nilainya dalam tahap verifikasi.
- d. Tagihan pajak kendaraan bermotor atas 735 unit kendaraan yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Malang yang belum dibayar sampai dengan tahun 2023 senilai Rp405.344.550,00 (belum termasuk denda) yang tersebar pada 95 OPD.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun Kewajiban Jangka Panjang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	6.074.888.092.347,15	5.816.690.858.283,08

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca Tahun Anggaran 2023 berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pada Tahun Anggaran 2023, Saldo ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban dan disajikan secara rinci dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO. Surplus LO Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp74.876.890.121,65 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.235.099.341,34 nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp89.817.872.666,99. atau 553,23%

Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan Daerah-LO, Beban Daerah, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan.

Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai operasional pemerintah daerah adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pendapatan Operasional seluruhnya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang serta Beban Lain-lain.

5.4.1 Pendapatan Daerah – LO

Pendapatan	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)
Daerah-LO	3.944.972.214.345,56	3.623.350.087.360,96

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali yang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang. Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.944.972.214.345,56 Bila dibandingkan

dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.623.350.087.360,96. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp320.328.010.188,60 atau 8,84%. Adapun Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 148. Pendapatan Daerah LO
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
a.	Pendapatan Asli Daerah-LO	837.303.666.042,77	720.646.736.575,85	16,09
b.	Pendapatan Transfer-LO	2.755.168.211.242,00	2.524.846.488.265,00	9,06
c.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	352.500.337.060,79	377.856.862.520,11	(6,45)
	TOTAL	3.944.972.214.345,56	3.623.350.087.360,96	8,84

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)
	837.303.666.042,77	720.646.736.575,85

Pendapatan Asli Daerah-LO merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pernyataan tersebut dikutip dari Peraturan Bupati Malang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp837.303.666.042,77 sedangkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp720.646.736.575,85 Adapun Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 149. Pendapatan Asli Daerah LO
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
a.	Pajak Daerah-LO	439.678.037.353,00	398.597.477.785,00	10,31
b.	Retribusi Daerah-LO	36.461.923.874,42	35.072.680.682,54	3,96
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	25.482.015.537,05	23.505.888.225,95	8,41
d.	Lain - Lain PAD Yang Sah-LO	335.681.689.278,30	263.470.689.882,36	27,41
TOTAL		837.303.666.042,77	720.646.736.575,85	16,09

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp837.303.666.042,77 sedangkan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp720.646.736.575,85 merupakan Pendapatan Asli Daerah-LRA dikurangi dengan Piutang Pendapatan Asli Daerah awal tahun dan ditambah dengan Piutang Pendapatan Asli Daerah akhir pada Tahun Anggaran 2023.

a. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah -LO	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)
	439.678.037.353,00	398.597.477.785,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp439.678.037.353,00 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp398.597.477.785,00 Bila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Malang mengalami kenaikan sebesar Rp41.080.559.568,00- atau 10,31%, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 150. Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
a.	Pajak Hotel-LO	7.309.950.785,00	4.901.122.629,00	49,15
	1. Pajak Motel - LO	5.494.649.649,00	3.764.808.081,00	45,95

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
	2. Pajak Losmen - LO	1.815.301.136,00	1.136.314.548,00	59,75
b.	Pajak Restoran-LO	18.600.993.528,00	14.279.593.688,00	30,26
	Pajak Rumah			
	1. Makan dan Sejenisnya - LO	12.811.978.674,00	9.597.452.586,00	33,49
	Pajak Jasa Boga/			
	2. Katering dan Sejenisnya - LO	5.789.014.854,00	4.682.141.102,00	23,64
c.	Pajak Hiburan-LO	9.827.389.215,00	12.733.707.943,00	(22,82)
	Pajak Tontonan			
	1. Film - LO	45.067.500,00	45.437.500,00	(0,81)
	Pajak Pagelaran			
	2. Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	195.776.116,00	515.383.865,00	(62,01)
	Pajak Pameran - LO			
	3.	7.697.594.935,00	10.619.438.887,00	(27,51)
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub			
	4. Malam dan Sejenisnya - LO	159.494.030,00	164.515.215,00	(3,05)
	Pajak Permainan			
	5. Biliar dan Bowling-LO	6.871.600,00	3.860.441,00	78,00
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO			
	6.	1.075.215.432,00	395.658.258,00	171,75
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO			
	7.	38.229.551,00	47.269.702,00	(19,12)
	Pajak			
	8. Pertandingan Olahraga - LO	609.140.051,00	942.144.075,00	(35,35)
d.	Pajak Reklame-LO	4.759.728.330,00	4.926.355.370,00	(2,52)
	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron - LO			
	1.	3.690.812.458,00	3.740.874.960,00	(1,34)
	Pajak Reklame Kain - LO			
	2.	1.007.512.334,00	1.134.023.570,00	(11,16)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
	Pajak Rekalme 3. Melekat/Stiker - LO	19.721.625,00	0,00	100,00
	Pajak Reklame 4. Berjalan - LO	41.681.913,00	51.456.840,00	(19,00)
e.	Pajak Penerangan Jalan-LO	92.956.186.113,00	96.366.247.721,00	(3,54)
	Pajak Penerangan 1. Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	1.377.869.022,00	1.245.322.858,00	10,64
	Pajak Penerangan 2. Jalan Sumber Lain - LO	91.578.317.091,00	95.120.924.863,00	(3,72)
f.	Pajak Parkir-LO	2.083.429.388,00	1.930.641.857,00	7,91
g.	Pajak Air Tanah-LO	2.531.802.965,00	2.400.640.978,00	5,46
h.	Pajak Mineral-LO	9.980.400,00	6.184.568,00	86,26
	1. Pajak Batu Kapur - LO	9.980.400,00	6.184.568,00	61,38
i.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	973.512.678,00	521.843.382,00	86,55
	1. Pajak Marmer-LO	0,00	2.268.000,00	(100,00)
	2. Pajak Pasir dan Kerikil-LO	221.398.550,00	208.991.022,00	5,94
	3. Pajak Tanah Serap (<i>Pullers Earth</i>)-LO	2.281.840,00	11.897.440,00	(80,82)
	4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya- LO	749.832.288,00	298.686.920,00	151,04
j.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	118.170.386.060,00	86.615.270.190,00	36,43
k.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	182.454.677.891,00	173.915.869.459,00	4,91
	1. BPHTB- Pemindahan Hak- LO	170.625.825.376,00	159.579.121.009,00	6,92
	2. BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	11.828.852.515,00	14.336.748.450,00	(17,49)
	Total	439.678.037.353,00	398.597.477.785,00	10,31

Pendapatan Pajak-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp454.120.555.692,00 berbeda dengan Pendapatan Pajak-LO

Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp439.678.037.353,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 151. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Pendapatan Pajak -LRA	454.120.555.692,00
b.	Dikurangi :	
	1.Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Awal Piutang Pajak Rumah Makan	19.678.359,00
	2.Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Awal Piutang Pajak Pameran	4.449.966.825,00
	3.Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Awal Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	467.392.335,00
	4. Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Awal Piutang Pajak Penerangan Jalan	8.154.675.089,00
	5.Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Awal Piutang Pajak Parkir	35.097.000,00
	6. Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Awal Piutang Pajak Air Tanah	55.674.135,00
	7. Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Awal Piutang PBBP2	86.700.524.763,00
c.	Jumlah Dikurang (1-7)	99.883.008.506,00
d.	Ditambah :	
	1.Badan Pendapatan Daerah - Saldo Akhir Piutang Pajak Rumah Makan	264.736.396,00
	2.Badan Pendapatan Daerah - Reklasifikasi Rumah Makan dan Sejenisnya	27.500,00
	3. Badan Pendapatan Daerah - Saldo Akhir Piutang Pajak Pameran	3.587.426.273,00
	4.Badan Pendapatan Daerah - Saldo Akhir Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatro Tahun Anggaran 2023	333.918.381,00
	5.Badan Pendapatan Daerah - Saldo Akhir Pajak Reklame Kain Tahun Anggaran 2023	5.789.796,00
	6.Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Akhir Piutang Pajak Parkir	58.521.300,00
	7.Badan Pendapatan Daerah - Saldo Akhir Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023	50.050.365,00
	8.Badan Pendapatan Daerah - Reklasifikasi Pajak Air Tanah	54.553,00
	9.Badan Pendapatan Daerah - Saldo Akhir Piutang PBBP2 Tahun Anggaran 2023	81.139.965.603,00
e.	Jumlah Ditambah (1-9)	85.440.490.167,00
f.	Pendapatan Pajak-LO	439.678.037.353,00
g.	Selisih antara Pendapatan Pajak-LRA dan Pendapatan Pajak-LO (a-f)	14.442.518.339,00

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah -LO	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)
	36.461.923.874,42	35.072.680.682,54

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan yang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang. Pendapatan Retribusi Daerah-LO Kabupaten Malang Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.461.923.874,42 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp35.072.680.682,54. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.389.243.191,88 atau 3,96%. Retribusi Daerah-LO dirinci lebih lanjut sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 152. Pendapatan Retribusi
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Retribusi Jasa Umum-LO	25.143.449.842,00	25.102.907.969,00	0,16
2.	Retribusi Jasa Usaha-LO	8.369.811.432,42	9.068.254.913,54	(7,70)
3.	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	2.948.662.600,00	901.517.800,00	227,08
	TOTAL	36.461.923.874,42	35.072.680.682,54	3,96

Pendapatan Retribusi-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.597.374.072,00 berbeda dengan Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.461.923.874,42 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 153. Rincian Pendapatan Retribusi - LO Tahun Anggaran 2023*(dalam Rupiah)*

No.	Uraian	Nilai
1.	Pendapatan Retribusi -LRA	34.597.374.072,00
2.	Dikurangi :	
	a Dinas Lingkungan Hidup - Menutup Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2022	322.202.690,00
	b Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu - Penyesuaian LO Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	4.715.000,00
	c. Dinas Perhubungan - Menutup Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2022	10.977.000,00
	d Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Menutup Piutang Retribusi Pelataran 2022	156.950.000,00
	e. Dinas Komunikasi dan Informatika - Menutup Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 2022	112.297.000,00
	f. Dinas Pekerjaab Umum Sumber Daya Air - Pendapatan diterima dimuka Tahun 2023	1.924.233,33
	g Dinas Perikanan - Menutup Saldo Awal Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelalangan	1.733.842.553,00
	h Dinas Perhubungan - Menutup Saldo Awal Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	33.509.500,00
	i. Dinas Perhubungan - Menutup Saldo Awal Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	58.430.000,00
	j. Dinas Pemuda dan Olahraga - Menutup Saldo Awal Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	21.440.805,00
	k Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Menutup Saldo Awal Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	53.357.500,00
3.	Jumlah Dikurang (a s/d k)	2.509.646.281,33
4.	Ditambah :	
	a. Dinas Kesehatan - Piutang UPT Kalibrasi 2023	19.150.000,00
	b. Dinas Lingkungan Hidup - Penyesuaian LO Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	664.756.240,00
	c. Dinas Perhubungan - Penyesuaian LO Piutang Retribusi Tepi Jalan Umum	102.971.000,00
	d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Penyesuaian LO Piutang Retribusi Pelataran	75.700.000,00
	e. Dinas Komunikasi dan Informatika - Penyesuaian LO Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	626.642.400,00
	f. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air -	2.910.317,00
	g. Dinas Perikanan - Penyesuaian LO Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelalangan	2.626.192.323,00
	h. Dinas Perhubungan - Penyesuaian LO Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	11.174.975,00

No.	Uraian	Nilai
	i. Dinas Perhubungan - Penyesuaian LO Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	112.580.000,00
	j. Dinas Pemuda dan Olahraga - Penyesuaian LO Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.900.000,00
	k. Dinas Pemuda dan Olahraga - Menutup Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023	27.199.528,75
	l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penyesuaian LO Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	100.019.300,00
5.	Jumlah Ditambah (a s/d l)	4.374.196.083,75
6.	Pendapatan Retribusi-LO	36.461.923.874,42
7.	Selisih Pendapatan Retribusi-LRA dengan Retribusi-LO (1 dan 6)	(1.864.549.802,42)

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2022
	(Rp)	(Rp)
	25.482.015.537,05	23.505.888.225,95

Pada Tahun Anggaran 2023, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp25.482.015.537,05 sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.505.888.225,95. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO mengalami kenaikan sebesar Rp1.976.127.311,10 atau 8,41%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO adalah Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 154. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

No.	Nama BUMD	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
a.	PDAM Kabupaten Malang	12.016.509.762,00	10.288.945.187,00	16,79
b.	PD Jasa Yasa	0,00	0,00	-
c.	PT Bank Jatim	13.465.505.775,05	13.216.943.038,95	1,88
d.	PT BPR Arta Kanjuruhan	0,00	0,00	-
	Jumlah	25.482.015.537,05	23.505.888.225,95	8,41

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.482.015.537,05 sama dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

d. Lain-Lain PAD yang Sah – LO

	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	335.681.689.278,30	263.470.689.882,36

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp335.681.689.278,30 sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp263.470.689.882,36. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp72.210.999.395,94 atau 27,41%. Lain-lain PAD yang Sah-LO dirinci lebih lanjut sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 155. Lain-Lain PAD Yang Sah
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	940.449.200,00	797.070.548,00	17,99
2.	Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	7.296.253.316,51	3.114.258.296,76	134,29
3.	Pendapatan Penerimaan Jasa Giro - LO	5.240.393.966,25	15.789.270.881,58	(66,81)
4.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah – LO	1.126.846.947,25	5.423.897,52	20.675,59
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	39.508.333,33	9.050.000,00	336,56
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Benyuk Lain-LO	6.232.832.855,01	5.822.416.785,53	7,05
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	566.664.972,27	1.019.512.258,51	(44,42)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
8.	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	3.159.861.227,74	2.562.610.687,74	23,31
9.	Pendapatan dari Denda Retribusi Pengujian Kendaraan	458.971.610,00	504.264.484,00	(8,98)
10.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	93.169.456,00	68.472.668,00	36,07
11.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	2.225.055.673,00	2.684.420.958,06	(17,11)
12.	Pendapatan dari BLUD-LO	308.301.681.720,94	230.682.724.514,48	33,65
13.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	411.193.902,18	(100,00)
TOTAL		335.681.689.278,30	263.470.689.882,36	27,41

Berikut dapat disampaikan rincian Pendapatan BLUD yaitu:

Tabel 156. Rincian Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Nama BLUD	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan (%)
		Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	
1.	RSUD Kanjuruhan	125.826.690.293,05	87.497.545.054,38	43,81
2.	RSUD Lawang	46.386.744.113,87	37.271.417.710,25	24,46
3.	Dana Bergulir	381.057.594,38	0,00	100,00
4.	Lumbung Desa Modern (LDM)	205.457.700,00	314.422.050,00	(34,66)
5.	Puskesmas Ampelgading	3.963.575.575,86	3.239.860.601,63	22,34
6.	Puskesmas Ardimulyo	2.061.660.731,34	1.499.568.551,86	37,48
7.	Puskesmas Bantur	2.701.741.785,42	2.025.629.330,34	33,38
8.	Puskesmas Bululawang	3.939.499.560,61	3.086.171.617,65	27,65
9.	Puskesmas Dampit	3.952.618.757,89	3.243.055.034,19	21,88
10.	Puskesmas Dau	2.376.256.973,47	1.945.495.784,45	22,14
11.	Puskesmas Donomulyo	5.316.767.719,27	4.134.984.766,38	28,58
12.	Puskesmas Gedangan	3.504.987.137,32	2.445.987.854,01	43,30
13.	Puskesmas Gondanglegi	3.437.947.369,78	2.729.637.164,13	25,95
14.	Puskesmas Jabung	3.552.257.065,09	2.954.424.661,92	20,24
15.	Puskesmas Kalipare	3.854.576.961,37	2.906.075.084,01	32,64
16.	Puskesmas Karangploso	3.093.406.065,44	2.589.949.030,60	19,44
17.	Puskesmas Kasembon	1.744.066.271,06	1.715.160.215,47	1,69
18.	Puskesmas Kepanjen	4.083.096.267,38	3.106.464.432,50	31,44
19.	Puskesmas Ketawang	2.221.826.575,23	1.527.694.807,35	45,44
20.	Puskesmas Kromengan	1.971.305.176,32	1.430.041.413,65	37,85

No	Nama BLUD	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan (%)
		Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	
21.	Puskesmas Lawang	3.559.415.843,30	2.382.473.855,20	49,40
22.	Puskesmas Ngajum	2.746.429.626,97	2.403.930.958,19	14,25
23.	Puskesmas Ngantang	3.008.244.332,88	2.571.514.114,92	16,98
24.	Puskesmas Pagak	2.016.980.084,08	1.370.592.682,48	47,16
25.	Puskesmas Pagelaran	3.499.439.143,91	2.723.291.521,88	28,50
26.	Puskesmas Pakis	5.960.058.482,20	4.944.925.237,22	20,53
27.	Puskesmas Pakisaji	4.066.546.361,55	3.199.757.860,33	27,09
28.	Puskesmas Pamotan	3.754.381.051,61	2.931.481.894,13	28,07
29.	Puskesmas Poncokusumo	5.737.618.007,23	4.865.588.180,71	17,92
30.	Puskesmas Pujon	3.626.506.934,71	2.556.498.550,77	41,85
31.	Puskesmas Sumbermanjing Kulon	1.878.362.777,59	1.363.699.880,89	37,74
32.	Puskesmas Sumbermanjing Wetan	3.328.362.838,70	2.375.285.940,18	40,12
33.	Puskesmas Singosari	3.673.547.889,53	3.064.025.177,46	19,89
34.	Puskesmas Sitarjo	2.318.379.105,76	1.735.891.809,56	33,56
35.	Puskesmas Sumberpucung	3.315.320.014,92	2.443.670.920,34	35,67
36.	Puskesmas Tajinan	2.571.246.486,14	1.874.092.207,28	37,20
37.	Puskesmas Tirtoyudo	4.020.887.589,11	3.308.030.942,70	21,55
38.	Puskesmas Tumpang	5.172.125.283,17	4.341.899.392,67	19,12
39.	Puskesmas Turen	6.017.360.701,99	4.484.057.522,45	34,19
40.	Puskesmas Wagir	4.038.562.213,52	2.777.639.936,21	45,40
41.	Puskesmas Wajak	4.345.416.689,77	3.430.163.241,13	26,68
42.	Puskesmas Wonokerto	2.959.369.807,04	2.142.420.173,13	38,13
43.	Puskesmas Wonosari	2.111.580.761,11	1.728.207.349,88	22,18
	Jumlah	308.301.681.720,94	230.682.724.514,48	33,65

Lain-Lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp324.707.011.242,84 berbeda dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023 Rp335.681.689.278,30 dan dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 157. Rincian Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun
Anggaran 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
a.	Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA	324.707.011.242,84
b.	Dikurangi :	
	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	2.879.296,67
	2. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	29.551.697,33
	3. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	335.155.017,48
	4. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	10.455.000,00
	5. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	11.134.000,00
	6. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	26.190.666,67
	7. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	16.388.000,00
	8. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	9.126.000,00
	9. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	19.500.000,00
	10. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	48.379.683,33
	11. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	25.503.741,67
	12. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	5.606.250,00
	13. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	3.455.000,00
	14. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	2.768.000,00
	15. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	25.300.800,00
	16. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Sewa Tanah dan Bangunan Tahun 2023	1.410.566,67
	17. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pengeluaran Non Anggaran Pihak ketiga Remunerasi TDF	91.730.348,00
	18. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pengeluaran Non Anggaran Pihak ketiga Remunerasi TDF	69.414.170,00
	19. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pengeluaran Non Anggaran Pihak ketiga Remunerasi TDF	258.374.752,00
	20. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pengeluaran Non Anggaran Pihak ketiga Remunerasi TDF	8.299.520,00

No.	Uraian	Nilai
21.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Menutup Saldo Awal TPTGR	321.232.427,00
22.	Badan Pendapatan Daerah - Reklas Pendapatan Pajak Restoran dan Air Tanah ke Pendapatan Komisi	82.053,06
23.	Dinas Pendidikan - Penyisihan Piutang atas kelebihan pembayaran pada penyedia Belanja Makanan dan Minuman (Belum dipotong Pajak Restoran) TA 2022	473.830,00
24.	Kecamatan Bululawang - Penyisihan Piutang atas kelebihan pembayaran pada penyedia Belanja Makanan dan Minuman (Belum dipotong Pajak Restoran) TA 2022	268.390,00
25.	Badan Pendapatan Daerah - menutup saldo awal Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.592.375,00
26.	Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Awal Piutang Denda Pajak Restoran	75.000,00
27.	Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Awal Pendapatan Denda Pajak Pameran	792.664.649,60
28.	Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Awal Pendapatan Denda Pajak Reklame	27.103.941,68
29.	Badan Pendapatan Daerah - menutup saldo awal Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	93.867,00
30.	Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Awal Pendapatan Denda Pajak Parkir	7.019.400,00
31.	Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Awal Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	165.560,46
32.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Menutup Saldo Awal Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.158.380,00
33.	Kecamatan Gondanglegi - Menutup Saldo Awal Piutang	32.428.900,00
34.	RSUD Kanjuruhan - Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 Atas Sewa Tanah Dan Bangunan Untuk Atm Mandiri RSUD Kanjuruhan	5.745.833,33
35.	RSUD Kanjuruhan - Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 Atas Sewa Tanah Dan Bangunan Untuk Kantor Kas RSUD Kanjuruhan	6.850.000,00
36.	RSUD Kanjuruhan - Menutup Saldo Awal Piutang Pendapatan BLUD	10.261.263.218,00
37.	RSUD Kanjuruhan - Jukor BPK - Pendapatan Dibayar di Muka atas sewa lahan yang dilaksanakan oleh RSUD Kanjuruhan	16.162.500,00
38.	RSUD Lawang - Piutang 2022	6.981.374.492,00
39.	RSUD Lawang - Sewa Lahan ATM Bank Jatim dan Bank Mandiri	21.185.650,27
40.	RSUD Lawang - Jukor BPK - Kelebihan pencatatan piutang klaim dispute pada RSUD Lawang berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kemenkes	41.556.900,00
41.	UPT Puskesmas Ardimulyo - Pelunasan Piutang Puskesmas Ardimulyo Tahun 2022	757.100,00

No.	Uraian	Nilai
42.	UPT Puskesmas Bantur - Atas Penerimaan Piutang Tahun Lalu (2022)	32.280.000,00
43.	UPT Puskesmas Bululawang - Pelunasan Piutang Puskesmas Bululawang Tahun 2022	21.377.200,00
44.	UPT Puskesmas Dampit - Penghapusan Piutang 2022	30.678.600,00
45.	UPT Puskesmas Dau - Penyesuaian Pelunasan Piutang Tahun 2022	1.667.100,00
46.	UPT Puskesmas Donomulyo - Atas Piutang	60.582.500,00
47.	UPT Puskesmas Gedangan - Pembayaran Piutang 2022 Di Th 2023 Puskesmas Gedangan	29.737.100,00
48.	UPT Puskesmas Gondanglegi - Penghapusan Piutang Tahun 2023	817.100,00
49.	UPT Puskesmas Jabung - Pelunasan Piutang Puskesmas Jabung Tahun 2022	7.917.100,00
50.	UPT Puskesmas Kalipare - Pelunasan Piutang Tahun 2022	25.847.100,00
51.	UPT Puskesmas Kasembon - Atas Piutang Tahun 2022	15.812.100,00
52.	UPT Puskesmas Kepanjen - Penghapusan Piutang Di 2023	12.962.100,00
53.	UPT Puskesmas Ketawang - Penghapusan Piutang Tahun 2022	8.157.100,00
54.	UPT Puskesmas Kromengan - Adjustment Atas Pelunasan Piutang 2022	10.990.000,00
55.	UPT Puskesmas Lawang - Pelunasan Piutang 2022	4.257.100,00
56.	UPT Puskesmas Lawang - Jukor BPK - Koreksi atas kelebihan pencatatan piutang pendapatan layanan kesehatan Puskesmas Lawang berdasarkan audit KAP	1.380.000,00
57.	UPT Puskesmas Ngajum - Atas Pelunasan Piutang Tahun 2022	8.680.000,00
58.	UPT Puskesmas Ngantang - Penghapusan Piutang Secara Terinci	21.797.800,00
59.	UPT Puskesmas Pagak - Adjs Atas Pelunasan Piutang	17.516.300,00
60.	UPT Puskesmas Pagelaran - Atas Pelunasan Piutang Tahun 2022	26.814.200,00
61.	UPT Puskesmas Pakis - Penghapusan Piutang 2022 Puskesmas Pakis	13.067.300,00
62.	UPT Puskesmas Pakisaji - Atas Penghapusan Piutang Tahun 2022	18.192.100,00
63.	UPT Puskesmas Pamotan - Mencatat Pelunasan Piutang Puskesmas Pamotan Tahun 2022	35.965.000,00
64.	UPT Puskesmas Poncokusumo - Pelunasan Piutang Tahun 2022	19.322.100,00
65.	UPT Puskesmas Pujon - Atas Piutang Tahun 2022	1.997.100,00
66.	UPT Puskesmas Sitarjo - Penghapusan Piutang Tahun 2022	30.499.600,00
67.	UPT Puskesmas Sumbermanjing Kulon - Penghapusan Piutang 2022	45.609.200,00

No.	Uraian	Nilai
68.	UPT Puskesmas Sumbermanjing Wetan - Jurnal Penghapusan Piutang 2022	13.387.100,00
69.	UPT Puskesmas Sumberpucung - Pembayaran Piutang BPJS Tahun 2022	33.304.200,00
70.	UPT Puskesmas Tajinan - Penghapusan Piutang Tahun 2022	10.679.600,00
71.	UPT Puskesmas Tirtoyudo - Pelunasan Piutang 2022	26.841.700,00
72.	UPT Puskesmas Tumpang - Penghapusan Piutang BPJS Dengan Dipotong Biaya Transfer Bank (2022)	1.481.700,00
73.	UPT Puskesmas Turen - Penerimaan Pembayaran Piutang 2022	44.472.100,00
74.	UPT Puskesmas Wagir - Pelunasan Piutang Tahun 2022	34.532.100,00
75.	UPT Puskesmas Wajak - Adj Pelunasan Piutang 2022	23.194.200,00
76.	UPT Puskesmas Wonokerto - Pembayaran Piutang Puskesmas Wonokerto 2022 Di Tahun 2023	29.117.100,00
77.	UPT Puskesmas Wonosari - Penghapusan Piutang Dengan Mempertimbangkan Biaya Transfer Yang Dipotong BPJS	1.657.000,00
c.	Jumlah Dikurangi (1 S/D 77)	20.246.466.677,22
d.	Ditambah :	
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Menutup Pendapatan diterima dimuka Tahun 2022	468.304.408,33
2.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Penagihan atas Pemanfaatan Sumber Air Wendit	1.136.453.200,00
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Koreksi Saldo Awal atas Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	422.394.892,48
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Saldo Akhir Piutang TPTGR	319.705.427,00
5.	Badan Pendapatan Daerah - Review Inspektorat (Piutang atas Tuntutan Ganti Rugi Kendaraan Dinas)	5.700.000,00
6.	Badan Pendapatan Daerah - Saldo Akhir Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2023	16.211.461,00
7.	Badan Pendapatan Daerah - Saldo Akhir Pendapatan Denda Pajak Pameran Tahun Anggaran 2023	1.262.108.666,00
8.	Badan Pendapatan Daerah - Saldo Akhir Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain Tahun Anggaran 2023	46.990.746,00
9.	Badan Pendapatan Daerah - Saldo Akhir Pendapatan Denda Pajak Parkir Tahun Anggaran 2023	18.259.392,00
10.	Badan Pendapatan Daerah - Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - Saldo Akhir Tahun Anggaran 2023	2.038.586,48
11.	Badan Pendapatan Daerah - Reklasifikasi Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,06
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penyesuaian Saldo Akhir Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.608.040,00
13.	Badan Pendapatan Daerah - Menutup Utang Atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak an. Solikin UPT Turen	142.034,00

No.	Uraian	Nilai
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Saldo Akhir Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	10.506.474,00
15.	RSUD Kanjuruhan - Menutup Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	63.545.833,33
16.	RSUD Kanjuruhan - Saldo Akhir Piutang Pendapatan BLUD	20.653.372.948,00
17.	RSUD Lawang - Piutang 2023	4.643.989.208,00
18.	RSUD Lawang - Jukor BPK - Kurang catat piutang RSUD Lawang berdasarkan penelusuran dari KAP	649.574.196,00
19.	UPT Lumbung Desa Modern - Saldo Akhir Piutang Pendapatan BLUD	83.019.700,00
20.	UPT Puskesmas Ardimulyo - Jukor BPK - Koreksi atas kekurangan pencatatan piutang pendapatan layanan kesehatan Puskesmas Ardimulyo berdasarkan audit KAP	760.000,00
21.	UPT Puskesmas Bantur - Atas Piutang Tahun Ini (2023)	54.300.000,00
22.	UPT Puskesmas Bululawang - Atas Piutang TA 2023	46.627.000,00
23.	UPT Puskesmas Dampit - Pengakuan Piutang 2023	20.820.000,00
24.	UPT Puskesmas Dau - Piutang Tahun 2023	604.000,00
25.	UPT Puskesmas Donomulyo - Atas Piutang	99.183.000,00
26.	UPT Puskesmas Gedangan - Pengakuan Piutang 2023 Puskesmas Gedangan	37.680.000,00
27.	UPT Puskesmas Gondanglegi - Pengakuan Piutang BPJS 2023	27.965.000,00
28.	UPT Puskesmas Kalipare - Piutang Tahun 2023	48.725.000,00
29.	UPT Puskesmas Kalipare - Koreksi atas kekurangan pencatatan Piutang Pendapatan Layanan Kesehatan Puskesmas Kalipare berdasarkan audit KAP	51.627.000,00
30.	UPT Puskesmas Karangploso - Pengakuan Piutang BPJS Th 2023 Puskesmas Karangploso	900.000,00
31.	UPT Puskesmas Kasembon - Atas Piutang Tahun 2023	44.345.000,00
32.	UPT Puskesmas Kepanjen - Mencatat Piutang Klaim Non Kapitasi Bulan November 2023	26.860.000,00
33.	UPT Puskesmas Ketawang - Atas Piutang Tahun 2023	70.485.000,00
34.	UPT Puskesmas Ketawang - Koreksi atas kekurangan pencatatan piutang pendapatan layanan kesehatan Puskesmas Ketawang berdasarkan audit KAP	22.965.000,00
35.	UPT Puskesmas Kromengan - Pengakuan Piutang Pendapatan 2023	28.500.000,00
36.	UPT Puskesmas Lawang - Piutang 2023 Puskesmas Lawang	25.235.000,00
37.	UPT Puskesmas Ngajum - Atas Piutang Tahun 2023	12.645.000,00
38.	UPT Puskesmas Ngantang - Pendapatan Piutang 2023 Secara Terinci	35.435.000,00
39.	UPT Puskesmas Pagak - Adjs Atas Pengakuan Piutang 2023	25.823.000,00
40.	UPT Puskesmas Pagelaran - Atas Piutang Tahun 2023	71.700.000,00

No.	Uraian	Nilai
41.	UPT Puskesmas Pakis - Pengakuan Piutang 2023 Puskesmas Pakis	5.786.500,00
42.	UPT Puskesmas Pakisaji - Pengakuan Piutang BPJS Tahun 2023	45.820.000,00
43.	UPT Puskesmas Pamotan - Atas Piutang Puskesmas Pamotan Tahun 2023	77.315.000,00
44.	UPT Puskesmas Poncokusumo - Piutang Tahun 2023	48.240.000,00
45.	UPT Puskesmas Poncokusumo - Koreksi atas kekurangan pencatatan piutang pendapatan layanan kesehatan Puskesmas Poncokusumo berdasarkan audit KAP	43.290.000,00
46.	UPT Puskesmas Pujon - Atas Piutang Tahun 2023	29.065.000,00
47.	UPT Puskesmas Sitiarjo - Atas Piutang Tahun 2023	30.977.500,00
48.	UPT Puskesmas Sumbermanjing Kulon - Atas Piutang Tahun 2023	5.450.000,00
49.	UPT Puskesmas Sumbermanjing Wetan - Pengakuan Piutang 2023	20.160.000,00
50.	UPT Puskesmas Sumberpucung - Piutang BPJS Tahun 2023	1.680.000,00
51.	UPT Puskesmas Tajinan - Piutang Pendapatan BLUD 2023	17.185.000,00
52.	UPT Puskesmas Tirtoyudo - Atas Piutang Tahun Ini	50.690.000,00
53.	UPT Puskesmas Tumpang - atas Piutang Tahun Ini (2023)	69.565.000,00
54.	UPT Puskesmas Turen - Pengakuan Piutang Klaim BPJS Non-Kapitasi Terverifikasi 2023	62.358.000,00
55.	UPT Puskesmas Wagir - Pengakuan Piutang Tahun 2023	59.165.000,00
56.	UPT Puskesmas Wajak - Adj Pengakuan Piutang 2023	27.492.500,00
57.	UPT Puskesmas Wonokerto - Atas Piutang Tahun 2023	43.826.000,00
58.	UPT Puskesmas Wonosari - Piutang Tahun 2023	11.970.000,00
e.	Jumlah Ditambah (1 S/D 58)	31.221.144.712,68
f.	Lain - Lain PAD Yang Sah - LO	335.681.689.278,30
g.	Selisih Lain - Lain PAD Yang Sah-LRA Dengan Lain -Lain PAD Yang Sah-LO (c dan e)	(10.974.678.035,46)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer-LO	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
	(Rp)	(Rp)
	2.755.168.211.242,00	2.524.846.488.265,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang. Pendapatan transfer-LO yang berasal

dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 2.755.168.211.242,00 Sedangkan Pendapatan Transfer LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.524.846.488.265,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 158. Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
a.	Transfer Pemerintah Pusat	2.348.737.853.622,00	2.174.055.265.881,00	8,03
b.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	406.430.357.620,00	350.791.222.384,00	15,41
TOTAL		2.755.168.211.242,00	2.524.846.488.265,00	9,06

a. Transfer Pemerintah Pusat - LO

Transfer Pemerintah Pusat - LO	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)
	2.348.737.853.622,00	2.174.055.265.881,00

Pendapatan Transfer-LO dari Pemerintah Pusat yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pencairannya didasarkan pada SKO yang diterbitkan Kementerian Keuangan, penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp174.682.587.741,00 atau 8,03%. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 159. Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023
a.	Dana Bagi Hasil	222.606.764.362,00
b.	Dana Alokasi Umum	1.666.245.288.928,00
c.	Dana Alokasi Khusus Fisik	88.582.620.305,00
d.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	348.386.315.027,00
e.	Dana Intensif Daerah	22.916.865.000,00
TOTAL		2.348.737.853.622,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.812.521.313.441,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO per Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.348.737.853.622,00 Selisih sebesar Rp463.783.459.819,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 160. Rincian Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA	2.812.521.313.441,00
b.	Dikurangi :	
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Koreksi atas TDF yang sudah masuk ke RKUD	22.363.783.181,00
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Hutang jangka Pendek 2023	2.085.310.371,00
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 1 untuk 79 Desa	2.039.696.400,00
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 1 untuk 79 Desa	1.977.763.950,00
5.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 1 untuk 79 Desa	87.723.908.400,00
6.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 1 untuk 79 Desa	41.751.330.750,00
7.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 1 untuk 4 Desa	5.198.375.400,00
8.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 1 untuk 4 Desa	2.067.596.550,00
9.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 1 untuk 3 Desa	1.684.281.600,00
10.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 1 untuk 3 Desa	4.270.439.100,00
11.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 1 untuk 1 Desa	2.542.506.300,00
12.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 1 untuk 1 Desa	533.183.850,00
13.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 1 untuk 4 Desa	1.344.596.700,00
14.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 1 untuk 1 Desa	323.603.400,00
15.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 9 Desa	771.300.000,00
16.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 9 Desa	966.600.000,00

No	Uraian	Nilai
17.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 9 Desa	651.600.000,00
18.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 12 Desa	739.800.000,00
19.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 16 Desa	1.004.400.000,00
20.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 16 Desa	307.297.800,00
21.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 8 Desa	1.113.300.000,00
22.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 8 Desa	543.600.000,00
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 28 Desa	1.681.200.000,00
24.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 22 Desa	1.297.800.000,00
25.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 38 Desa	2.388.600.000,00
26.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 35 Desa	4.711.500.000,00
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 35 Desa	2.036.700.000,00
28.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 35 Desa	2.297.700.000,00
29.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 15 Desa	1.020.600.000,00
30.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 4 Desa	673.200.000,00
31.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 4 Desa	307.800.000,00
32.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1	196.200.000,00
33.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 15 Desa	786.600.000,00

No	Uraian	Nilai
34.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan 1 untuk 9 Desa	611.100.000,00
35.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 1 Desa	253.287.900,00
36.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 1 Desa	99.900.000,00
37.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 1 Desa	362.792.250,00
38.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 18 Desa	1.323.000.000,00
39.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 18 Desa	6.222.069.300,00
40.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 18 Desa	1.169.621.650,00
41.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 23 Desa	369.519.250,00
42.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 23 Desa	1.312.200.000,00
43.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 23 Desa	8.529.873.300,00
44.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 63 Desa	19.174.985.700,00
45.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 63 Desa	4.036.500.000,00
46.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 63 Desa	4.127.036.450,00
47.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 35 Desa	2.186.100.000,00
48.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 35 Desa	12.490.647.300,00
49.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 35 Desa	1.022.904.550,00
50.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 13 Desa	5.086.962.750,00
51.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 13 Desa	3.150.900.000,00
52.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 Kabupaten Malang Tahap 2 untuk 13 Desa	13.730.748.300,00
53.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 20 Desa	3.770.100.000,00
54.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 20 Desa	12.777.108.000,00
55.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 20 Desa	7.878.102.400,00

No	Uraian	Nilai
56.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 16 Desa	2.515.788.000,00
57.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 16 Desa	1.044.900.000,00
58.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 16 Desa	3.516.664.050,00
59.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 3 Desa	1.103.760.350,00
60.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 3 Desa	2.309.400.000,00
61.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 3 Desa	10.710.603.000,00
62.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 8 Desa	6.343.803.300,00
63.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 8 Desa	3.504.823.550,00
64.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 8 Desa	1.386.000.000,00
65.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 15 Desa	2.016.000.000,00
66.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 15 Desa	5.789.396.500,00
67.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 15 Desa	5.844.455.700,00
68.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 3 Desa	686.700.000,00
69.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 3 Desa	1.282.252.250,00
70.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 3 Desa	3.361.005.300,00
71.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 1 Desa	256.500.000,00
72.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 1 Desa	678.810.400,00

No	Uraian	Nilai
73.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 1 Desa	995.648.100,00
74.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 1 Desa	800.400.300,00
75.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 1 Desa	291.322.900,00
76.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang Triwulan ke-2 untuk 1 Desa	221.400.000,00
77.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	230.400.000,00
78.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	421.188.000,00
79.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	496.800.000,00
80.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	1.525.749.600,00
81.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	3.026.678.000,00
82.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	1.935.900.000,00
83.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	6.335.816.000,00
84.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	3.289.500.000,00
85.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	4.506.300.000,00
86.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	9.252.839.200,00
87.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	5.814.093.600,00
88.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	2.440.800.000,00
89.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	4.471.200.000,00

No	Uraian	Nilai
90.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	4.887.406.800,00
91.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	416.700.000,00
92.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	2.800.329.200,00
93.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	1.344.600.000,00
94.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	2.933.153.200,00
95.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	3.819.600.000,00
96.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	4.132.752.400,00
97.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	3.944.976.000,00
98.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	731.700.000,00
99.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	977.494.000,00
100.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	4.175.203.200,00
101.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	2.494.393.200,00
102.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	7.186.500.000,00
103.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	977.494.000,00
104.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	1.962.000.000,00
105.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	2.878.977.600,00
106.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	1.396.420.000,00

No	Uraian	Nilai
107.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	116.100.000,00
108.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	1.555.219.200,00
109.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	418.926.000,00
110.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	279.284.000,00
111.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	6.272.192.400,00
112.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	4.959.000.000,00
113.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	7.870.500.000,00
114.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	2.976.552.400,00
115.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	1.954.988.000,00
116.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	1.525.500.000,00
117.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	139.642.000,00
118.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	3.071.711.600,00
119.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	1.081.242.400,00
120.	Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pemindahbukuan Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa Kabupaten Malang	296.100.000,00
c.	Jumlah Dikurangi (1 s/d 120)	487.071.188.552,00
d.	Ditambah :	
	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Mencatat TDF 2023	20.546.103.000,00
	2. Badan Keuangan dan Aset Daerah - Menutup Hutang Kelebihan Bayar atas Dana Bagi Hasil	2.741.625.733,00
e.	Jumlah ditambah (1 s/d 2)	23.287.728.733,00
f.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	2.348.737.853.622,00
g.	Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO (a dan f)	463.783.459.819,00

b. Transfer Antar Daerah - LO

Transfer Antar Daerah - LO	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)
	406.430.357.620,00	350.791.222.384,00

Transfer Antar Daerah - LO merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi yang besarnya telah ditetapkan oleh Gubernur. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi. Transfer Antar Daerah - LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 406.430.357.620,00 Sedangkan Transfer Antar Daerah - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp350.791.222.384,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 161. Transfer Antar Daerah - LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	390.621.043.500,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	15.809.314.120,00
	TOTAL	406.430.357.620,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp427.044.853.421,00 sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO per Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp406.430.357.620,00 Berikut rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO sebagai berikut :

Tabel 162. Rincian Transfer Antar Daerah - LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA	427.044.853.421,00
b.	Dikurangi :	
	1) Badan Pendapatan Daerah - Menutup Saldo Awal Piutang DBH Pajak Rokok	18.280.748.400,00
	2) Badan Keuangan dan Aset Daerah - Sisa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan Tahun 2023	2.333.747.401,00
c.	Jumlah Dikurangi	20.614.495.801,00
f.	Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO (a-c)	406.430.357.620,00
g.	Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	20.614.495.801,00

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)
	352.500.337.060,79	377.856.862.520,11

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun Pihak Lainnya Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp352.500.337.060,79 sedangkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp377.856.862.520,11 terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)
	77.471.777.559,79	112.702.361.200,51

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Negara/Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus yang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang. Pendapatan Hibah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp77.471.777.559,79 terdapat penurunan jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp112.702.361.200,51. Selisih tersebut sebesar 31,26% yang terdiri dari:

**Tabel 163. Pendapatan Hibah
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
a.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	23.241.835.474,35	57.693.785.081,24	(59,72)
b.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	54.175.213.485,44	54.266.073.219,27	1,69

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
c.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO	0,00	500.150.000,00	(100,00)
d.	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri-LO	18.031.000,00	10.122.100,00	78,13
e.	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	36.697.600,00	137.954.000,00	(73,40)
f.	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO	0,00	64.276.800,00	(100)
g.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	30.000.000,00	(100)
TOTAL		77.471.777.559,79	112.702.361.200,51	(31,26)

Pendapatan Hibah dari Pemerintah LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 21.723.499.500,00 berbeda dengan Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp77.471.777.559,79 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut yang tercantum pada **Lampiran 34**.

Tabel 164. Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	<i>Pendapatan Hibah –LRA</i>	21.723.499.500,00
b.	Dikurangi :	
c.	<i>Jumlah dikurangi</i>	83.226.195.567,85
d.	Ditambah :	
e.	<i>Jumlah ditambah</i>	138.974.473.627,64
f.	<i>Pendapatan Hibah -LO</i>	77.471.777.559,79
g.	<i>Selisih Pendapatan Hibah-LRA dengan Pendapatan Hibah-LO</i>	55.748.278.059,79

b. Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang - undangan -LO

Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang - undangan	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)
	275.028.559.501,00	265.154.501.319,60

Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan -LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp275.028.559.501,00 sedangkan Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan -LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp265.154.501.319,60 yaitu:

Tabel 165. Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenalkan/ Penurunan (%)
1.	Pendapatan Hibah Dana Bos	275.028.559.501,00	265.129.001.319,60	3,72
2.	Pendapatan Hibah Pengembalian Hibah Pada Pemerintah	0,00	25.500.000,00	(100)
TOTAL		275.028.559.501,00	265.154.501.319,60	3,72

Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan - LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp275.028.559.501,00 sedangkan Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan - LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp275.028.559.501,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 166. Rincian Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan – LO Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

	Uraian	Nilai
1.	<i>Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan –LRA</i>	275.028.559.501,00
2.	<i>Dikurangi :</i>	
3.	<i>Jumlah dikurangi</i>	0,00
4.	<i>Ditambah :</i>	
5.	<i>Jumlah ditambah</i>	0,00
6.	<i>Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan –LO</i>	275.028.559.501,00
7.	<i>Selisih Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan –LRA dengan Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan – LO (a-f)</i>	0,00

5.4.2 Beban

Beban	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
	(Rp)	(Rp)
	3.869.485.674.573,91	3.637.104.363.402,30

Beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Beban disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.869.485.674.573,91 bila dibandingkan dengan Beban Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.637.104.363.402,30. Pada tahun 2022 jumlah Beban Daerah sebesar Rp3.637.104.363.402,30. Dari tahun 2022 Beban Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp232.381.311.171,61 atau 6,39%. Beban-Laporan Operasional ini terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer dengan Rincian sebagai berikut.

**Tabel 167 Daftar Rincian Beban
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Operasi	3.573.836.934.368,41	3.377.924.185.433,30	5,80
2.	Beban Transfer	295.648.740.205,50	259.180.177.969,00	6,39
	TOTAL	3.869.485.674.573,91	3.637.104.363.402,30	6,39

Terdapat perubahan susunan Beban Laporan Operasional dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu di tahun 2022, susunan beban Laporan Keuangan hanya terdiri atas Beban Daerah. Sedangkan pada tahun 2023, susunan Beban Laporan Operasional terbagi atas Beban Operasi dan Beban Transfer.

5.4.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban

Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan, dan beban Penyusutan. Pengakuan Beban Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.573.836.934.368,41, apabila dibandingkan dengan pengakuan beban yang sama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.377.924.185.433,30, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp195.912.748.935,11 atau 5,80% dengan Rincian sebagai berikut.

**Tabel 168 Daftar Rincian Beban Operasi
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenalkan / (Penurunan) [%]
1.	Beban Pegawai	1.477.997.612.198,89	1.380.449.227.167,33	7,07
2.	Beban Barang	393.816.923.191,48	349.614.045.806,58	12,64
3.	Beban Jasa	532.075.363.064,79	564.352.296.087,42	(5,72)
4.	Beban Pemeliharaan	134.749.677.345,17	139.591.531.945,64	(3,47)
5.	Beban Perjalanan Dinas	118.644.447.211,00	130.292.311.682,00	(8,94)
6.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	56.932.961.234,00	49.491.578.972,00	15,04
7.	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	9.733.000,00	(100,00)
8.	Beban Barang dan Jasa BLUD	166.400,62	0,01	16.640.061,00
9.	Beban Hibah	327.876.039.281,00	238.335.909.970,52	37,57
10.	Beban Bantuan Sosial	29.501.319.000,00	63.400.191.000,00	(53,47)
11.	Beban Penyisihan Piutang	48.999.945.768,52	50.464.967.302,17	(2,90)
12.	Beban Penyusutan	453.242.479.672,94	411.922.392.499,63	10,03
	TOTAL	3.573.836.934.368,41	3.377.924.185.433,30	5.80

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pengakuan Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.477.997.612.198,89 sedangkan Beban Pegawai Tahun

Anggaran 2022 sebesar Rp1.380.449.277.167,33 mengalami kenaikan sebesar Rp97.548.385.031,56 atau 7,07% dengan Rincian sebagai berikut.

Tabel 169 Daftar Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	849.254.247.618,47	801.031.342.720,12	6,02
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	249.117.259.538,00	211.927.980.153,51	17,55
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	349.532.186.319,42	332.652.642.410,97	5,07
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.189.847.812,00	27.112.604.606,00	0,28
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	972.571.828,00	1.024.612.250,00	(5,08)
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.931.499.083,00	1.867.663.092,00	3,42
7.	Beban Pegawai BLUD	0,00	4.832.381.934,72	[100,00]
TOTAL		1.477.997.612.198,89	1.380.449.227.167,33	7,07

Belanja Pegawai-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.456.092.249.859,91 dengan Beban Pegawai-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.477.997.612.198,89 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 170 Rincian Penjelasan Selisih Belanja Pegawai dan Beban Pegawai

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Pegawai	1.456.092.249.859,91
	Ditambah :	
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.321.110.419,00
	Untuk mengakui Utang Belanja BKAD berupa iuran JKN atas ASN non guru dan tenaga medis Pemerintah Kabupaten Malang yang ditanggung Pemberi Kerja (4%) kepada BPJS Kesehatan periode TW IV 2023 yang nilainya telah divalidasi dan disetujui kedua belah pihak dan sedang dalam proses pembayaran di KPPN Malang	
2.	Puskesmas Ampelgading	42.304.873,00
	Jurnal pengakuan beban iuran jaminan kesehatan	
3.	Puskesmas Ampelgading	19.300.113,00
	Jurnal pengakuan beban iuran jaminan kesehatan	
4.	Puskesmas Ampelgading	5.300.000,00
	Jurnal pengakuan atas beban Klaim KB	
5.	Puskesmas Ampelgading	140.921.071,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2023	

No	Uraian		Nilai
6.	Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban jasa pelayanan kesehatan	1.541.744.108,00
7.	Puskesmas Ardimulyo	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	25.639.039,00
8.	Puskesmas Ardimulyo	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	3.633.703,00
9.	Puskesmas Ardimulyo	Jurnal Pengakuan Pendapatan Hibah secara terinci	29.024.500,00
10.	Puskesmas Ardimulyo	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2022 - Koreksi Utang Pegawai	225.000,48
11.	Puskesmas Ardimulyo	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	771.320.683,00
12.	Puskesmas Ardimulyo	Pengakuan Utang Belanja Pegawai 2023	118.997.258,00
13.	Puskesmas Ardimulyo	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	500.000,00
14.	Puskesmas Bantur	Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	27.459.004,00
15.	Puskesmas Bantur	Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	8.574.064,00
16.	Puskesmas Bantur	Jurnal Pengakuan Atas Pendapatan Klaim KB	11.000.000,00
17.	Puskesmas Bantur	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN -Jurnal pengakuan hutang belanja tahun 2023	14.182.335,00
18.	Puskesmas Bantur	Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	933.899.913,00
19.	Puskesmas Bululawang	Belanja Pegawai Puskesmas Bululawang 2023	45.931.380,00
20.	Puskesmas Bululawang	Belanja Pegawai Puskesmas Bululawang 2023	11.185.948,00
21.	Puskesmas Bululawang	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN -Jurnal pengakuan hutang belanja tahun 2023	88.415.068,00
22.	Puskesmas Bululawang	Belanja Pegawai Puskesmas Bululawang 2023	1.488.390.388,00
23.	Puskesmas Bululawang	Pendapatan klaim KB Puskesmas Bululawang 2023	15.068.972,00
24.	Puskesmas Dampit	Pengakuan Beban Pegawai Blud	46.469.997,00
25.	Puskesmas Dampit	Pengakuan Beban Pegawai Blud	11.714.971,00
26.	Puskesmas Dampit	Pengakuan Pendapatan Kb Dan Kopipu	14.700.000,00
27.	Puskesmas Dampit	Pengakuan Beban Pegawai Blud	1.833.837.334,00
28.	Puskesmas Dampit	Jurnal Pengakuan Utang 2023	29.917.766,00
29.	Puskesmas Dampit	Pengakuan Beban Pegawai Blud	4.200.000,00
30.	Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban pegawai secara terinci	26.556.134,00
31.	Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban pegawai secara terinci	5.193.036,00
32.	Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban pegawai secara terinci	812.750.441,00
33.	Puskesmas Dau	Pengakuan hutang jaspel tahun 2023	20.236.667,00
34.	Puskesmas Dau	KB	17.799.950,00
35.	Puskesmas Donomulyo	Jurnal atas pengakuan hutang 2023	2.029.183,00
36.	Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai secara terinci	58.661.893,00
37.	Puskesmas Donomulyo	Jurnal atas pengakuan hutang 2023	2.932.403,00
38.	Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai secara terinci	22.596.830,00
39.	Puskesmas Donomulyo	Jurnal rekening tempungan (klaim KB) secara terinci	17.000.000,00
40.	Puskesmas Donomulyo	Jurnal rekening tempungan (klaim isoter) secara terinci	27.830.000,00
41.	Puskesmas Donomulyo	Jurnal pendapatan rekening tempungan (Global Fund) secara terinci	2.856.000,00

No	Uraian		Nilai
42.	Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai secara terinci	2.045.105.448,38
43.	Puskesmas Donomulyo	Jurnal atas pengakuan hutang 2023	127.973.791,00
44.	Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai secara terinci	680.000,00
45.	Puskesmas Gedangan	Beban Pegawai 2023 PKM Gedangan	44.170.237,00
46.	Puskesmas Gedangan	Beban Pegawai 2023 PKM Gedangan	9.238.492,00
47.	Puskesmas Gedangan	Beban Pegawai 2023 PKM Gedangan	1.404.287.242,00
48.	Puskesmas Gedangan	Pengakuan Utang Jaspel ASN dan NON-ASN 2023 PKM Gedangan	47.656.311,00
49.	Puskesmas Gedangan	Pendapatan atas klaim KB 2023 yg dibelanjakan Jaspel Kesehatan ASN dan Non-ASN PKM Gedangan	22.157.500,00
50.	Puskesmas Gedangan	Beban Pegawai 2023 PKM Gedangan	870.000,00
51.	Puskesmas Gondanglegi	Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	40.063.740,00
52.	Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Hutang Belanja Pegawai Tahun 2023	2.288.394,00
53.	Puskesmas Gondanglegi	Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	4.685.498,00
54.	Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan hutang belanja pegawai tahun 2023	513.050,00
55.	Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Pendapatan Hibah dari Pemerintah daerah-LO (KB)	26.600.000,00
56.	Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Pendapatan Hibah dari Pemerintahan Daerah-LO (GP)	11.575.000,00
57.	Puskesmas Gondanglegi	Jurnal pengakuan beban secara terinci	1.204.396.008,45
58.	Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan hutang belanja pegawai tahun 2023	74.850.653,00
59.	Puskesmas Jabung	Belanja Pegawai PKM Jabung 2023	48.595.512,00
60.	Puskesmas Jabung	Belanja Pegawai PKM Jabung 2023	10.665.428,00
61.	Puskesmas Jabung	Belanja Pegawai PKM Jabung 2023	1.604.871.667,00
62.	Puskesmas Jabung	Pendapatan Klaim KB Pkm Jabung 2023	16.120.624,00
63.	Puskesmas Kalipare	Belanja Pegawai	11.992.893,91
64.	Puskesmas Kalipare	Belanja Pegawai	40.343.149,48
65.	Puskesmas Kalipare	Jurnal Mencatat Pendapatan KB	8.500.000,00
66.	Puskesmas Kalipare	Belanja Pegawai	1.461.941.834,82
67.	Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Hutang Belanja Tahun 2023	38.277.597,87
68.	Puskesmas Kalipare	Belanja Pegawai	760.000,00
69.	Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	44.528.371,00
70.	Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.213.047,00
71.	Puskesmas Karangploso	Jurnal Penyesuaian Perolehan Pendapatan PSC di Rek Tampung Pkm Karangploso	3.750.000,00
72.	Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.399.987.199,00
73.	Puskesmas Karangploso	Jurnal Hutang Pegawai Th 2023 Pkm Karangploso	5.324.799,00
74.	Puskesmas Kasembon	Pengakuan Beban Pegawai Rinci	26.887.414,00
75.	Puskesmas Kasembon	Pengakuan Beban Pegawai Rinci	3.560.194,00
76.	Puskesmas Kasembon	Jurnal pengakuan Dana KB	2.266.345,00

No	Uraian	Nilai
77.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Beban Pegawai Rinci	761.330.042,00
78.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Hutang Belanja Pegawai Tahun 2023	967.793,00
79.	Puskesmas Keparjen Jurnal Pengakuan Beban Pegawai secara terinci	65.480.765,00
80.	Puskesmas Keparjen Jurnal Pengakuan Beban Pegawai secara terinci	11.656.563,00
81.	Puskesmas Keparjen Jurnal Pengakuan Beban Pegawai secara terinci	1.988.725.532,00
82.	Puskesmas Keparjen Jurnal Mencatat Pendapatan Klaim KB	3.715.147,00
83.	Puskesmas Keparjen Jurnal Mencatat Hutang Jasa Pelayanan 2023	10.864.683,00
84.	Puskesmas Ketawang Jurnal pengakuan beban pegawai secara terperinci	22.453.722,00
85.	Puskesmas Ketawang Jurnal pengakuan beban pegawai secara terperinci	5.519.627,00
86.	Puskesmas Ketawang Jurnal penerimaan pendapatan Klaim KB 2023 di Rekening Tambungan	10.000.000,00
87.	Puskesmas Ketawang Jurnal pengakuan beban pegawai secara terperinci	719.448.299,56
88.	Puskesmas Ketawang Jurnal pengakuan hutang belanja tahun 2023	48.635.851,85
89.	Puskesmas Kromengan Adjustment Atas Belanja Pegawai 2023	26.535.413,00
90.	Puskesmas Kromengan Adjustment Atas Utang Jaspel 2023	2.027.822,00
91.	Puskesmas Kromengan Adjustment Atas Belanja Pegawai 2023	5.269.702,00
92.	Puskesmas Kromengan Adjustment Atas Utang Jaspel 2023	683.791,00
93.	Puskesmas Kromengan Adjustment Atas Belanja Pegawai 2023	816.219.934,00
94.	Puskesmas Kromengan Adjustment Atas Utang Jaspel 2023	67.790.323,56
95.	Puskesmas Kromengan Adjustment atas penerimaan KB 2023	15.540.508,00
96.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Pegawai Secara Rinci	40.042.391,00
97.	Puskesmas Lawang Pengakuan Hutang Belanja Pegawai Tahun 2023	2.668.651,00
98.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Pegawai Secara Rinci	10.677.298,00
99.	Puskesmas Lawang Pengakuan Hutang Belanja Pegawai Tahun 2023	1.073.315,00
100.	Puskesmas Lawang Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah (KB)	38.540.000,00
101.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Pegawai Secara Rinci	1.359.785.608,00
102.	Puskesmas Lawang Pengakuan Hutang Belanja Pegawai Tahun 2023	96.251.753,00
103.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	37.646.253,00
104.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	5.480.022,00
105.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	1.079.053.467,00
106.	Puskesmas Ngajum Jurnal Atas Pendapatan Dana Klaim Kb	10.296.410,00
107.	Puskesmas Ngajum Jurnal pengakuan beban pegawai secara terinci	1.360.000,00
108.	Puskesmas Ngantang Jurnal Pengakuan Beban Pegawai secara Terinci	39.550.238,00
109.	Puskesmas Ngantang Jurnal Pengakuan Beban Pegawai secara Terinci	11.380.502,00
110.	Puskesmas Ngantang Jurnal Pengakuan Pendapatan di rekening tambungan (Klaim KB)	3.600.000,00
111.	Puskesmas Ngantang Jurnal Pengakuan Beban Pegawai secara Terinci	1.316.519.652,00
112.	Puskesmas Ngantang Jurnal Pengakuan Beban Pegawai secara Terinci	1.200.000,00

No	Uraian	Nilai
113.	Puskesmas Pagak Adjustment Benban Pegawai	27.324.495,00
114.	Puskesmas Pagak Adjustment Benban Pegawai	3.336.692,00
115.	Puskesmas Pagak Adjs Atas Pendapatan Kb (Klaim Kb)	1.000.000,00
116.	Puskesmas Pagak Adjustment Benban Pegawai	815.882.521,00
117.	Puskesmas Pagelaran Pengakuan beban pegawai secara rinci	40.094.708,00
118.	Puskesmas Pagelaran Pengakuan beban pegawai secara rinci	9.575.931,00
119.	Puskesmas Pagelaran Jurnal Pendapatan dari Klaim KB - Rek. Tampungan	3.600.000,00
120.	Puskesmas Pagelaran Jurnal Pendapatan PSC - Rek. Tampungan	3.000.000,00
121.	Puskesmas Pagelaran Pengakuan beban pegawai secara rinci	1.326.314.824,00
122.	Puskesmas Pagelaran Jurnal atas Pengakuan Hutang Belanja 2023	70.433.717,00
123.	Puskesmas Pagelaran Pengakuan beban pegawai secara rinci	2.400.000,00
124.	Puskesmas Pakis Jurnal Pengakuan Beban Belanja Pegawai	69.151.001,00
125.	Puskesmas Pakis Jurnal Pengakuan Beban Belanja Pegawai	16.207.833,00
126.	Puskesmas Pakis Jurnal Mencatat Pendapatan Psc	23.000.000,00
127.	Puskesmas Pakis Jurnal Pengakuan Beban Belanja Pegawai	2.377.015.710,00
128.	Puskesmas Pakis Jurnal Pengakuan Hutang Th 2023	29.949.022,00
129.	Puskesmas Pakisaji Penyesuaian Atas Rincian Beban Pegawai	47.802.935,64
130.	Puskesmas Pakisaji Penyesuaian Atas Rincian Beban Pegawai	7.530.588,95
131.	Puskesmas Pakisaji Pengakuan Pendapatan Hibah dari Pemerintah daerah-LO (KLAIM KB)	51.980.000,00
132.	Puskesmas Pakisaji Pengakuan Pendapatan Hibah dari Pemerintahan Daerah-LO (GLOBAL FOUND)	2.400.000,00
133.	Puskesmas Pakisaji Penyesuaian Atas Rincian Beban Pegawai	1.438.187.230,00
134.	Puskesmas Pakisaji Pengakuan Hutang Belanja Jasa Pelayanan Pegawai Tahun 2023	5.495.438,55
135.	Puskesmas Pamotan Belanja Pegawai BLUD Puskesmas Pamotan 2023	36.288.202,00
136.	Puskesmas Pamotan Belanja Pegawai BLUD Puskesmas Pamotan 2023	4.668.404,00
137.	Puskesmas Pamotan Jurnal Pengakuan Beban pegawai secara terinci	17.545.540,00
138.	Puskesmas Pamotan Mencatat transaksi Atas Dana Klaim KB yang masuk ke Rekening Pamotan TA 2023	16.600.000,00
139.	Puskesmas Pamotan Belanja Pegawai BLUD Puskesmas Pamotan 2023	1.428.249.567,00
140.	Puskesmas Pamotan Jurnal Pengakuan Hutang Belanja Jaspel Medis Pkm Pamotan Tahun 2023	40.037.662,00
141.	Puskesmas Poncokusumo Jurnal Pengakuan Beban pegawai secara terinci	65.049.146,00
142.	Puskesmas Poncokusumo Jurnal Pengakuan Beban pegawai secara terinci	2.253.352.014,00
143.	Puskesmas Poncokusumo Jurnal Pengakuan Beban pegawai secara terinci	1.750.000,00
144.	Puskesmas Pujon Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terperinci	47.406.534,00
145.	Puskesmas Pujon Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terperinci	9.281.843,00
146.	Puskesmas Pujon Jurnal Pengakuan Dana Kb	3.285.634,97
147.	Puskesmas Pujon Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terperinci	1.494.184.612,05
148.	Puskesmas Pujon Pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun 2023	31.761.342,08

No	Uraian	Nilai
149.	Puskesmas Singosari Jurnal Merinci Beban Pegawai Ke Sub Rincian Objek Beban Pegawai Tahun 2023	54.669.592,00
150.	Puskesmas Singosari Jurnal Merinci Beban Pegawai Ke Sub Rincian Objek Beban Pegawai Tahun 2023	6.893.280,00
151.	Puskesmas Singosari Jurnal Merinci Beban Pegawai Ke Sub Rincian Objek Beban Pegawai Tahun 2023	1.644.297.977,97
152.	Puskesmas Singosari Jurnal Mencatat Utang Belanja Pegawai Dan Barjas 2023	70.229.820,00
153.	Puskesmas Singosari NEW jurnal pendapatan Dana Klaim KB Pkm Singosari tahun 2023	6.750.904,00
154.	Puskesmas Sitiarjo Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terperinci	31.749.283,00
155.	Puskesmas Sitiarjo Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terperinci	6.265.385,00
156.	Puskesmas Sitiarjo Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terperinci	1.001.330.785,00
157.	Puskesmas Sitiarjo Jurnal Pengakuan Utang Belanja Tahun 2023	13.996.898,00
158.	Puskesmas Sitiarjo Jurnal Pengakuan Klaim Kb	18.500.000,00
159.	Puskesmas Sumbermanjingkulon Adj. Beban Pegawai	21.629.361,00
160.	Puskesmas Sumbermanjingkulon Adj. Beban Pegawai	3.534.023,00
161.	Puskesmas Sumbermanjingkulon Adj. Beban Pegawai	639.757.554,00
162.	Puskesmas Sumbermanjingkulon Jurnal Pengakuan Hutang Belanja Tahun 2023	55.002.618,00
163.	Puskesmas Sumbermanjingkulon Jurnal atas Penggunaan Klaim KB 2023	4.791.685,00
164.	Puskesmas Sumbermanjingkulon Jurnal atas Penggunaan Hadiah Lomba Puskesmas Berprestasi 2023	3.848.743,00
165.	Puskesmas Sumbermanjingweta n Adj Beban Pegawai	36.899.785,00
166.	Puskesmas Sumbermanjingweta n Adj Beban Pegawai	9.979.334,00
167.	Puskesmas Sumbermanjingweta n Adj Beban Pegawai	1.214.531.400,00
168.	Puskesmas Sumbermanjingweta n Jurnal Pengakuan Hutang 2023	5.061.958,00
169.	Puskesmas Sumbermanjingweta n Jurnal Pendapatan Klaim KB	20.506.817,00
170.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	48.977.011,00
171.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	6.148.080,00
172.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	1.567.850.962,00
173.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Utang Jaspel 2023	71.214.131,00
174.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Penerimaan Klaim Tcm	9.800.000,00
175.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Penerimaan Klaim Kb Tahun 2023	4.098.910,00
176.	Puskesmas Tajinan Beban Pegawai BLUD	55.734.012,78
177.	Puskesmas Tajinan Ajustemen atas pelayanan KB	46.200.000,00
178.	Puskesmas Tajinan Beban Pegawai BLUD	1.162.882.912,59
179.	Puskesmas Tajinan Pengakuan Atas Utang Belanja Tahun 2023	15.361.509,49
180.	Puskesmas Tirtoyudo Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Rinci	41.520.878,00
181.	Puskesmas Tirtoyudo Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Rinci	13.693.942,00

No	Uraian	Nilai
182.	Puskesmas Tirtoyudo Jurnal Pengakuan Pendapatan Hibah Klaim PSC	500.000,00
183.	Puskesmas Tirtoyudo Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Rinci	1.451.108.482,00
184.	Puskesmas Tirtoyudo Jurnal pengakuan utang belanja 2023	30.142.811,00
185.	Puskesmas Tirtoyudo Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Rinci	8.160.000,00
186.	Puskesmas Tumpang Jurnal Perincian Pegawai Blud	12.097.513,00
187.	Puskesmas Tumpang Jurnal Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah-Lo (Klaim Kb, Psc)	44.600.000,00
188.	Puskesmas Tumpang Jurnal Perincian Pegawai Blud	2.358.579.084,00
189.	Puskesmas Turen Belanja Pegawai 2023	76.053.476,89
190.	Puskesmas Turen Belanja Pegawai 2023	18.319.514,12
191.	Puskesmas Turen Belanja Pegawai 2023	2.486.601.591,87
192.	Puskesmas Turen Penerimaan Pendapatan LO dari rekening tampungan Puskesmas - Klaim BKKB	30.546.340,89
193.	Puskesmas Turen Pengakuan Utang 2023	119.490.301,67
194.	Puskesmas Wagir Belanja Pegawai Puskesmas Wagir 2023	50.774.420,00
195.	Puskesmas Wagir Belanja Pegawai Puskesmas Wagir 2023	9.359.947,00
196.	Puskesmas Wagir Penerimaan Klaim Kb	67.400.000,00
197.	Puskesmas Wagir Penerimaan Psc	11.000.000,00
198.	Puskesmas Wagir Penerimaan Tb-Global Fund	1.200.000,00
199.	Puskesmas Wagir Belanja Pegawai Puskesmas Wagir 2023	1.672.021.107,00
200.	Puskesmas Wagir Pengakuan Utang Belanja Tahun 2023	257.411.036,00
201.	Puskesmas Wagir Belanja pegawai PKM Wagir tahun 2023	8.160.000,00
202.	Puskesmas Wajak Adj Beban Pegawai	57.152.274,00
203.	Puskesmas Wajak Adj Beban Pegawai	5.790.434,00
204.	Puskesmas Wajak Adj Beban Pegawai	1.863.434.889,00
205.	Puskesmas Wajak Pengakuan Hutang Jaspel 2023	49.975.408,00
206.	Puskesmas Wajak Adj Klaim KB	7.171.474,00
207.	Puskesmas Wonokerto Jurnal pengakuan beban pegawai secara rinci	27.432.827,00
208.	Puskesmas Wonokerto Jurnal Utang BLUD Tahun 2023	5.910.938,00
209.	Puskesmas Wonokerto Jurnal pengakuan beban pegawai secara rinci	7.537.793,00
210.	Puskesmas Wonokerto Jurnal Utang BLUD Tahun 2023	2.891.522,00
211.	Puskesmas Wonokerto Jurnal pengakuan beban pegawai secara rinci	928.940.324,00
212.	Puskesmas Wonokerto Jurnal Utang BLUD Tahun 2023	224.959.181,00
213.	Puskesmas Wonokerto Pendapatan atas klaim KB 2023 yg dibelanjakan Jaspel Kesehatan ASN dan Non-ASN	1.785.402,00
214.	Puskesmas Wonokerto Jurnal pengakuan beban pegawai secara rinci	2.040.000,00
215.	Puskesmas Wonosari Penyesuaian Atas Rincian Beban Pegawai	23.745.202,57
216.	Puskesmas Wonosari Penyesuaian Atas Rincian Beban Pegawai	8.754.793,90
217.	Puskesmas Wonosari Pengakuan Pendapatan Hibah dari Pemerintah daerah-LO (KB)	33.800.000,00
218.	Puskesmas Wonosari Penyesuaian Atas Rincian Beban Pegawai	617.500.002,75
219.	PuskesmasTumpang Jurnal Perincian Pegawai Blud	77.887.092,00
220.	RSUD Kanjuruhan Reklas Beban Pegawai BLUD	7.190.073.924,75
221.	RSUD Kanjuruhan Reklas Beban Pegawai BLUD	675.939.633,00

No	Uraian	Nilai
222.	RSUD Kanjuruhan Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2023	16.296.382.283,00
223.	RSUD Kanjuruhan Reklas Beban Pegawai BLUD	40.180.425.125,00
224.	RSUD Kanjuruhan Reklas beban pegawai BLUD	16.320.000,00
225.	RSUD Lawang Beban Gaji Pokok PPPK	3.501.712.484,48
226.	RSUD Lawang Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2023	2.027.796.435,75
227.	RSUD Lawang Jurnal Reklasifikasi Beban Pegawai BLUD TA 2023	20.400.000,00
228.	UPT Dana Bergilir Reklasifikasi Beban Pegawai Blud	72.000.000,00
b.	Jumlah Ditambah (1-228)	136.441.236.733,07
	Dikurang:	
1.	Kecamatan Gondanglegi Utang Beban Belanja Gaji Pokok PNS	2.769.843,00
2.	Kecamatan Gondanglegi Utang Beban Belanja Tunjangan Keluarga PNS	392.568,00
3.	Kecamatan Gondanglegi Utang Beban Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	180.000,00
4.	Kecamatan Gondanglegi Utang Beban Belanja Tunjangan Beras PNS	217.260,00
5.	Kecamatan Gondanglegi Utang Beban Belanja Pembulatan Gaji PNS	29,00
6.	Puskesmas Ampelgading Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2022	306.042.749,00
7.	Puskesmas Ampelgading Jurnal Pengakuan Beban Iuran Jaminan Kesehatan	61.604.986,00
8.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	1.541.744.108,00
9.	Puskesmas Ardimulyo Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2022	6.661.155,00
10.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	801.093.425,00
11.	Puskesmas Bantur Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN -Jurnal pelunasan utang 2021	6.864.864,00
12.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	969.932.981,00
13.	Puskesmas Bululawang Belanja Pegawai Puskesmas 2023	1.545.507.716,00
14.	Puskesmas Dampit Jurnal Pembayaran Utang Asn Dan Non Asn	45.063.847,00
15.	Puskesmas Dampit Pengakuan Beban Pegawai Blud	1.896.222.302,00
16.	Puskesmas Dau Pengakuan pelunasan hutang jaspel tahun 2022	1.414.050,00
17.	Puskesmas Dau Jurnal pengakuan Beban Pegawai secara Terinci	844.499.611,00
18.	Puskesmas Donomulyo Jurnal atas penghapusan hutang Jaspel tahun 2022	3.610.947,00
19.	Puskesmas Donomulyo Jurnal Pengakuan Beban Pegawai secara Terinci	2.127.044.171,38
20.	Puskesmas Gedangan Pembayaran Utang Tahun Jaspel ASN dan non-ASN 2022	1.389.902,00
21.	Puskesmas Gedangan Beban Pegawai 2023	1.458.565.971,00
22.	Puskesmas Gondanglegi Pengakuan pelunasan hutang 2022	14.145.062,19
23.	Puskesmas Gondanglegi Jurnal Pengakuan Beban secara Terinci	1.249.145.246,45
24.	Puskesmas Jabung Pelunasan Utang Pegawai di Tahun 2022	9.829.355,00
25.	Puskesmas Jabung Belanja Pegawai 2023	1.664.132.607,00
26.	Puskesmas Kalipare Jurnal Pelunasan Hutang Tahun 2022	3.681.634,00
27.	Puskesmas Kalipare Belanja Pegawai	1.515.037.878,21
28.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	54.741.418,00
29.	Puskesmas Karangploso Beban Pegawai BLUD	1.399.987.199,00
30.	Puskesmas Kasembon Jurnal Pelunasan Hutang Pegawai Tahun 2022	488.954,00

No	Uraian	Nilai
31. Puskesmas Kasembon	Pengakuan Beban Pegawai Rinci	791.777.650,00
32. Puskesmas Kepanjen	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	2.065.862.860,00
33. Puskesmas Ketaawang	Jurnal atas pelunasan hutang tahun 2022	662.010,56
34. Puskesmas Ketaawang	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	747.421.648,56
35. Puskesmas Kromengan	Adjustment atas Belanja Pegawai 2023	848.025.049,00
36. Puskesmas Lawang	Pengakuan Beban Pegawai secara Rinci	1.410.505.297,00
37. Puskesmas Ngajum	Jurnal Atas Pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun 2022	12.158.112,00
38. Puskesmas Ngajum	Beban Pegawai BLUD	1.123.539.742,00
39. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pelunasan Hutang Belanja 2022 Secara Terinci	1.781.965,00
40. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	1.368.650.392,00
41. Puskesmas Pagak	Ajds Atas Pelunasan Utang Tenaga kesehatan ASN dan NON-ASN	3.482.504,00
42. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Pegawai	846.543.708,00
43. Puskesmas Pagelaran	Jurnal Pelunasan Hutang Tahun 2022	3.837.224,00
44. Puskesmas Pagelaran	Pengakuan Beban Pegawai secara Rinci	1.378.385.463,00
45. Puskesmas Pakis	Jurnal Penghapusan Hutang Pkm Pakis Thn 2022	19.314.756,00
46. Puskesmas Pakis	Jurnal Pengakuan Beban Belanja Pegawai	2.462.374.544,00
47. Puskesmas Pakisaji	Pengakuan Pelunasan Hutang Jasa Pelayanan 2022	6.058.218,00
48. Puskesmas Pakisaji	Penyesuaian atas Rincian Beban Pegawai	1.493.520.754,59
49. Puskesmas Pamotan	Mencatat Transaksi Pelunasan Hutang Japel 2022	450.323,31
50. Puskesmas Pamotan	Beban Pegawai BLUD	1.469.206.173,00
51. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	2.337.696.700,00
52. Puskesmas Pujon	Jurnal Pelunasan Utang Pegawai Tahun 2022	8.090.602,05
53. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	1.550.872.989,05
54. Puskesmas Singosari	New Jurnal Pelunasan Utang Pegawai Tahun 2022 dibayarkan tahun 2023	16.123.029,00
55. Puskesmas Singosari	Jurnal merinci beban pegawai ke sub rincian objek beban pegawai tahun 2023	1.705.860.849,97
56. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pelunasan Utang Belanja Tahun 2022	123.393.889,00
57. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Terinci	1.039.345.453,00
58. Puskesmas Sumbermanjingkulon	Jurnal Pelunasan Hutang Tahun 2022	29.180.850,00
59. Puskesmas Sumbermanjingkulon	Adjustment Beban Pegawai	664.920.938,00
60. Puskesmas Sumbermanjingwetan	Jurnal Pelunasan Hutang 2022	615.049,00
61. Puskesmas Sumbermanjingwetan	Adjustment Beban Pegawai	1.261.410.519,00
62. Puskesmas Sumberpucung	Jurnal Pembayaran Utang Jaspel Bhud Tahun 2022	6.330.283,00
63. Puskesmas Sumberpucung	Jurnal Pengakuan Beban Secara Rinci	1.622.976.053,00
64. Puskesmas Tajinan	Pelunasan Hutang Belanja Tahun 2022	18.542.634,59
65. Puskesmas Tajinan	Beban Pegawai BLUD	1.218.616.925,37
66. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Pegawai Secara Rinci	1.514.483.302,00
67. Puskesmas Tumpang	Jurnal Rincian Pegawai BLUD	2.448.563.689,00

No	Uraian	Nilai
68. Puskesmas Turen	Pembayaran Utang 2022 - Jasa Pelayanan ASN dan Non ASN	9.212.634,18
69. Puskesmas Turen	Belanja Pegawai 2023	2.580.974.582,88
70. Puskesmas Wagir	Pelunasan Utang Belanja Tahun 2022	18.432.197,00
71. Puskesmas Wagir	Belanja Pegawai Puskesmas Wagir 2023	1.740.315.474,00
72. Puskesmas Wajak	Pelunasan Utang 2022	6.143.951,00
73. Puskesmas Wajak	Adjustment Beban Pegawai	1.926.377.597,00
74. Puskesmas Wonokerto	Pembayaran utang jaspel rapid	3.320.312,00
75. Puskesmas Wonokerto	Koreksi Tambah Sakti Awal Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	787.619,00
76. Puskesmas Wonokerto	Jurnal PengakuanBeban Pegawai secara rinci	965.950.944,00
77. Puskesmas Wonosari	Penyesuaian Atas Rincian Beban Pegawai	649.999.999,22
78. RSUD Kanjuruhan	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2022	5.299.661.707,30
79. RSUD Kanjuruhan	Terdapat kelebihan pencatatan Utang Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN pada RSUD Kanjuruhan	525.232.221,00
80. RSUD Kanjuruhan	Reklas beban pegawai blud	48.062.758.682,75
81. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Pegawai BLUD TA 2023	3.522.112.484,48
82. UPT Dana Bergulir	Reklasifikasi Beban Pegawai Blud	72.000.000,00
c.	Jumlah Dikurang (1-81)	114.535.874.394,09
d.	Beban Pegawai Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	1.477.997.612.198,89
e.	Selisih Antara Belanja Pegawai-Lra Dan Beban Pegawai-Laporan Operasional (a-d)	(21.905.362.338,98)

2. Beban Barang

Pengakuan Beban Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp393.816.923.191,48 Beban Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp349.614.045.806,60. Mengalami penurunan sebesar Rp44.202.877.384,89 atau 12,64%. Pengakuan Beban Barang dipergunakan untuk Beban Bahan Pakai Habis dan Beban Barang Tak Habis Pakai.

Tabel 171 Daftar Rincian Beban Barang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Beban Bahan Pakai Habis	389.374.166.915,48	349.041.749.025,58	11,56
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	4.442.756.276,00	572.296.781,00	676,30
	TOTAL	393.816.923.191,48	349.614.045.806,58	12,64

Rincian masing-masing Beban Barang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Beban Barang Pakai Habis

Beban Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp389.374.166.915,48 Beban Barang Habis Pakai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp349.041.749.025,58. mengalami penurunan sebesar Rp40.332.417.889,90 atau 11,56% terdiri dari:

Tabel 172 Daftar Rincian Beban Bahan Habis Pakai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaiakan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	8.439.186.717,08	2.874.994.416,64	193,54
2.	Beban Bahan-Bahan Kimia	18.012.782.770,06	10.223.204.490,07	76,20
3.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pehumas	7.879.604.303,49	7.441.574.237,11	5,89
4.	Beban Bahan-Bahan Baku	3.375.890.092,00	330.682.675,00	920,89
5.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6.659.197.822,00	1.192.761.440,96	458,30
6.	Beban Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	199.002.283,33	126.894.163,00	56,83
7.	Beban Bahan Isi Tabung Gas	2.151.970.572,86	2.405.679.395,66	(10,55)
8.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	92.775.132,50	12.081.150,00	667,93
9.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	70.558.600.732,20	100.734.032.008,32	(29,96)
10.	Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	1.270.999.720,00	1.286.769.847,30	(1,23)
11.	Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	662.416.995,00	392.731.425,00	68,67
12.	Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	3.000.000,00	0,00	100,00
13.	Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Laboratorium	152.286.871,00	5.189.250,00	2.834,66
14.	Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pemancar	33.305.500,00	0,00	100,00
15.	Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	120.019.800,00	8.068.000,00	1.387,60
16.	Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	59.723.400,00	8.360.000,00	614,39
17.	Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Bengkel	40.523.000,00	63.556.750,00	(36,24)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
18.	Beban Suku Cadang – Suku Cadang Lainnya	27.934.000,00	40.055.840,00	(30,26)
19.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	15.080.504.837,31	10.302.569.708,32	46,38
20.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	27.269.962.660,96	9.839.303.324,65	177,15
21.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	28.855.759.948,08	21.985.126.992,97	31,25
22.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	813.762.076,00	772.963.695,00	5,28
23.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	2.426.700,00	15.489.100,00	(84,33)
24.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	12.246.526.887,00	7.952.982.594,00	53,99
25.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor	5.277.038.940,09	3.724.893.750,65	41,67
26.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	6.699.009.043,38	2.339.952.865,27	186,29
27.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perlengkapan Dinas	7.336.351.973,60	2.645.642.376,41	177,30
28.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	1.291.800,00	(100,00)
29.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.781.395.120,00	245.336.456,00	626,10
30.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Souvenir/Cendera Mata	2.265.063.485,00	1.780.461.356,00	27,22
31.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.362.307.914,08	2.888.842.566,86	674,09
32.	Beban Obat-Obatan – Obat	56.020.862.223,40	88.073.017.558,86	(36,39)
33.	Beban Obat-Obatan – Obat Lainnya	7.517.274.869,29	3.346.725.653,10	124,62
34.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.067.430.462,44	9.871.680.832,00	42,50
35.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	447.524.000,00	518.852.581,00	(13,75)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenalkan/ (Penurunan) (%)
36.	Beban Natura dan Pakan - Natura	3.959.389.124,93	3.361.591.645,70	17,78
37.	Beban Natura dan Pakan - Pakan	651.439.270,00	1.126.382.149,00	(42,17)
38.	Beban Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	831.860.300,00	61.363.007,00	1.255,64
39.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	38.814.853.576,00	33.429.921.093,80	16,11
40.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	429.746.351,00	314.893.309,00	36,47
41.	Beban Perambah Daya Tahan Tubuh	0,00	439.340.000,00	(100,00)
42.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.453.054.922,00	-	100,00
43.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.934.433.809,40	7.647.555.628,93	16,83
44.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	32.475.000,00	(100,00)
45.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.524.719.570,00	1.446.281.275,00	5,42
46.	Beban Pakai Dinas KDH dan WKDH	0,00	436.338.000,00	(100,00)
47.	Beban Pakai Sipil Harian (PSH)	0,00	199.350.000,00	(100,00)
48.	Beban Pakai Dinas Harian (PDH)	536.445.110,00	1.778.427.712,00	(69,84)
49.	Beban Pakai Dinas Lapangan (PDL)	359.156.065,00	766.898.727,00	(53,17)
50.	Beban Pakai Dinas Upacara (PDU)	7.090.000,00	-	100,00
51.	Beban Pakai Penyelamatan	416.405.095,00	-	100,00
52.	Beban Pakai Siaga	11.294.250,00	37.939.000,00	(70,23)
53.	Beban Pakai Teknik	3.227.000,00	-	100,00
54.	Beban Pakai Kerja Laboratorium	3.037.500,00	3.572.000,00	(14,96)
55.	Beban Pakai Kerja Bengkel	7.875.000,00	17.118.200,00	(54,00)
56.	Beban Pakai KORPRI	5.168.000,00	808.306.960,00	(99,36)
57.	Beban Pakai Adat Daerah	827.572.700,00	214.333.900,00	286,11
58.	Beban Pakai Batik Tradisional	416.862.150,00	816.170.228,00	(48,92)
59.	Beban Pakai Olahraga	277.266.270,00	2.561.146.890,00	(89,17)
60.	Beban Pakai Paskibraka	120.850.000,00	90.576.000,00	33,42
	TOTAL	389.374.166.915,48	349.041.749.025,58	11,56

2. Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.442.756.276,00 sedangkan Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp572.296.781,00

mengalami kenaikan sebesar Rp3.870.459.495,00 atau 676,30% terdiri dari:

**Tabel 173 Beban Barang Tak Habis Pakai
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Komponen-Komponen Peralatan	4.205.308.276,00	533.557.781,00	688,16
2.	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	237.448.000,00	38.739.000,00	512,94
TOTAL		4.442.756.276,00	572.296.781,00	676,30

3. Beban Jasa

Pengakuan Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp532.075.363.064,79 sedangkan Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp564.352.296.087,42 mengalami penurunan sebesar Rp32.276.933.022,63 atau 5,72%. Pengakuan Beban Jasa sebesar Rp532.075.363.064,79 dipergunakan untuk Beban Jasa Kantor, Beban Jasa Asuransi, Beban Sewa Tanah, Beban Sewa Peralatan dan Mesin, Beban Sewa Gedung dan Bangunan, Beban Sewa Aset Tetap Lainnya, Beban Jasa Konsultasi Kontruksi, Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 174 Daftar Rincian Beban Jasa
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Jasa Kantor	393.759.732.488,39	414.963.378.300,45	(5,11)
2.	Beban Jasa Asuransi	77.371.087.356,40	83.970.783.105,30	(7,86)
3.	Beban Sewa Tanah	293.787.000,00	237.500.000,00	23,70
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.021.489.170,00	2.926.752.237,00	139,91

NO.	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	15.195.835.600,00	25.267.029.816,67	(39,86)
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	69.375.750,00	23.826.300,00	191,17
7.	Beban Jasa Konsultasi Kontruksi	24.758.153.355,00	22.675.476.911,00	9,18
8.	Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi	3.862.916.260,00	5.831.272.215,00	(33,76)
9.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	204.796.205,00	285.500.000	(28,27)
10.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.175.928.419,00	7.145.777.202,00	14,42
11.	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN	1.361.827.773,00	1.025.000.000,00	32,86
12.	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	433.655,00	0,00	100,00
	TOTAL	532.075.363.031,79	564.352.296.087,42	(5,72)

Rincian masing-masing Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

a. Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp393.759.732.488,39 sedangkan Beban Jasa Kantor Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp414.964.156.434,45 mengalami penurunan sebesar Rp21.204.423.946,06 atau 5,11% terdiri dari:

Tabel 175 Daftar Rincian Beban Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.692.922.140,00	17.885.243.838,00	21,29
2.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	1.362.919.872,00	708.862.500,00	92,27

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
3.	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	22.182.400,00	18.000.000,00	23,24
4.	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.793.753.600,00	543.300.000,00	414,22
5.	Beban Honorarium Rohaniwan	380.184.840,00	14.500.000,00	2.521,96
6.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.365.306.700,00	65.000.000,00	2.000,47
7.	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	1.656.218.400,00	7.680.000,00	21.465,34
8.	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	5.060.764.972,00	1.651.747.100,00	206,39
9.	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	617.700.000,00	710.525.000,00	(13,06)
10.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	47.842.823.259,00	95.416.896.354,00	(49,86)
11.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	23.991.842.514,28	56.945.209.483,00	(57,87)
12.	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.824.948.094,00	2.407.384.854,00	(24,19)
13.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.575.804.391,00	702.063.500,00	979,08
14.	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	13.600.000,00	13.200.000,00	3,03

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaiikan/ (Penurunan) (%)
15.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	700.225.000,00	1.534.965.000,00	(54,38)
16.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	463.955.000,00	(100,00)
17.	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	13.200.000,00	21.000.000,00	(37,14)
18.	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	49.617.000,00	555.191.475,00	(91,06)
19.	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.037.876.040,00	333.282.000,00	1.111,55
20.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	106.288.845.200,00	99.024.147.936,00	7,34
21.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	658.342.482,00	1.227.386.200,00	(46,36)
22.	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.846.414.451,00	3.135.640.188,00	(9,22)
23.	Beban Jasa Tenaga Ahli	20.583.798.957,00	7.805.346.986,00	163,71
24.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	10.697.379.972,50	7.650.422.823,15	39,83
25.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	8.157.075.923,00	1.219.017.401,00	569,15
26.	Beban Jasa Tenaga Supir	619.108.325,00	512.031.804,00	20,91
27.	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	193.673.676,50	132.573.170,00	26,94
28.	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.231.498.944,00	536.334.554,00	316,06
29.	Beban Jasa Audit/Surveillan ce ISO	1.258.193.700,00	903.881.342,00	39,20
30.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	155.461.700,00	138.400.000,00	12,33
31.	Beban Jasa Tata Rias	144.663.220,00	0,00	100,00
32.	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	197.795.404,00	829.511.578,00	(76,16)
33.	Beban Jasa Pemasangan	283.677.100,00	24.728.500,00	1.047,17

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
	Instalasi Telepon, Air, dan Listrik			
34.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	445.118.947,00	1.516.707.067,00	(70,65)
35.	Beban Jasa Rumah Sakit Aplikasi/Sistem Informasi	13.345.000,00	-	100,00
36.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	6.933.652.435,00	2.843.098.420,00	143,88
37.	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	390.000,00	-	100,00
38.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	57.902.692,00	71.588.247,00	(19,12)
39.	Beban Jasa Kalibrasi	732.553.690,00	922.346.006,00	(20,58)
40.	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.464.696.539,00	1.258.375.617,00	16,40
41.	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	104.981.100,00	-	100,00
42.	Beban Jasa Pengukuran Tanah	327.306.003,00	-	100,00
43.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.927.685.504,00	3.940.117.155,00	(25,70)
44.	Beban Tagihan Telepon	2.915.923.252,00	847.173.102,00	244,19
45.	Beban Tagihan Air	2.742.696.214,00	1.323.249.508,00	107,27
46.	Beban Tagihan Listrik	58.579.190.661,00	52.879.419.255,00	10,78
47.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.444.437.825,00	482.062.350,00	821,96
48.	Beban Jasa Kawat/Faksimili /Internet	7.461.479.506,00	6.605.025.377,18	12,97
49.	Beban Jasa Paket/Pengirim an	1.063.844.760,00	30.515.984,00	3.386,19
50.	Beban Penambahan Daya	293.332.800,00	49.679.000,00	490,46
51.	Beban Registrasi/Kean ggotaan	123.138.100,00	153.615.800,00	(19,84)
52.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.169.096.457,00	1.112.640.575,00	5,07
53.	Beban Pengolahan Air Limbah	162.326.870,00	106.502.606,00	52,42
54.	Beban Lembur	6.207.793.896,00	5.117.783.205,00	21,30

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
55.	Beban Medical Check Up	26.194.269,00	41.620.472,00	[37,06]
56.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	4.223.775.000,00	[100,00]
57.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.724.616.612,00	7.453.592.848,00	[76,86]
58.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Non ASN	18.520.211.079,11	20.827.840.254,12	[11,08]
TOTAL		393.759.732.488,39	414.964.156.434,45	(5,11)

Belanja Jasa Kantor-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp224.853.499.065,00 berbeda dengan Beban Jasa Kantor-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp393.759.732.488,39 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 176 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja Jasa Kantor dan Beban Jasa Kantor

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Jasa Kantor	224.853.499.065,00
	Ditambah :	
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jurnal IFTT	24.389.500,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jurnal BTT	137.425.000,00
3.	Dinas Kesehatan Jurnal Kelebihan Belanja Pembayaran Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif tenaga Kesehatan Penanganan tahun 2023 COVID-19	51.045.000,00
4.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	4.022.112.031,00
5.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	708.819.872,00
6.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	2.319.333.800,00
7.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	287.984.840,00
8.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.324.186.700,00
9.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	983.768.400,00
10.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	2.527.446.372,00
11.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	47.843.590.434,00
12.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.069.411.800,00
13.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	7.430.741.991,00
14.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	3.950.628.040,00
15.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	4.045.535.685,00

No	Uraian	Nilai
16.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	604.934.082,00
17.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	7.090.614.861,00
18.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.969.301.309,00
19.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	6.552.704.500,00
20.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	2.217.944.200,00
21.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	41.411.700,00
22.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	144.663.220,00
23.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	40.900.000,00
24.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	34.688.700,00
25.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	113.720.700,00
26.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	104.981.100,00
27.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.568.788.749,00
28.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.326.093.716,00
29.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.475.962.396,00
30.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	4.004.391.475,00
31.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.706.501.645,00
32.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.021.444.400,00
33.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	117.146.100,00
34.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	115.372.300,00
35.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	50.578.300,00
36.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.237.227.348,00
37.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	399.483.052,00
38.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	45.798.578,00
39.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	33.327.444,50
40.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	17.948.089,00
41.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	41.082.400,00
42.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	11.560.000,00
43.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	30.138.606,00
44.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	1.051.614,00
45.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	11.935.850,00
46.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	24.815.770,00
47.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	26.267.600,00
48.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	1.779.300,00
49.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	1.000.000,00
50.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	11.000.000,00
51.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	104.221.875,00
52.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	1.600.000,00

No	Uraian	Nilai
53.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	8.850.264,50
54.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	1.695.200,00
55.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	36.000,00
56.	Puskesmas Ampelgading Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	699.925.060,00
57.	Puskesmas Ampelgading Utang belajar Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN 2023	41.844.666,00
58.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	1.656.600,00
59.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	52.200.000,00
60.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	18.000.000,00
61.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	7.000.000,00
62.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	18.000.000,00
63.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	36.602.100,00
64.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	11.212.000,00
65.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	12.697.160,00
66.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	5.187.310,00
67.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	3.263.906,00
68.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	13.937.202,00
69.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	14.859.900,00
70.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	1.476.300,00
71.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	22.200.000,00
72.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	1.964.850,00
73.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	2.680.000,00
74.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	9.000.000,00
75.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	153.600,00
76.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	280.500,00
77.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	205.474.028,00
78.	Puskesmas Ardimulyo Pengakuan Utang Belanja Pegawai 2023	24.199.984,00
79.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	50.000.000,00
80.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	86.756.000,00
81.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	17.400.000,00
82.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	40.082.400,00
83.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	5.550.000,00
84.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	28.892.880,00
85.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	9.735.270,00
86.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	23.214.390,00
87.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	20.999.946,00
88.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	1.323.300,00

No	Uraian	Nilai
89.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	10.676.800,00
90.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	114.200.000,00
91.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	3.368.100,00
92.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	12.000.000,00
93.	Puskesmas Bantur Utang belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN-Jurnal pengakuan utang belanja tahun 2023	3.844.665,00
94.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	385.725.976,00
95.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	18.000.000,00
96.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	144.179.000,00
97.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	8.400.000,00
98.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	24.000.000,00
99.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	10.855.000,00
100.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	19.039.588,00
101.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	10.103.029,00
102.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	5.585.800,00
103.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	32.997.460,00
104.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	15.944.819,00
105.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	1.323.300,00
106.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa BLUD PUSKESMAS BULULAWANG	17.582.400,00
107.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	63.000.000,00
108.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	9.490.350,00
109.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	25.200.000,00
110.	Puskesmas Bululawang Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN-Jurnal Pengakuan Utang Belanja Tahun 2023	11.880.832,00
111.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	354.834.992,00
112.	Puskesmas Bululawang Pendapatan Klaim Kb Puskesmas Bululawang 2023	931.028,00
113.	Puskesmas Dampit pengakuan beban barang jasa blud	60.800.000,00
114.	Puskesmas Dampit pengakuan beban barang jasa blud	86.894.000,00
115.	Puskesmas Dampit pengakuan beban barang jasa blud	9.750.000,00
116.	Puskesmas Dampit pengakuan beban barang jasa blud	48.025.780,00
117.	Puskesmas Dampit pengakuan beban barang jasa blud	2.260.615,00
118.	Puskesmas Dampit pengakuan beban barang jasa blud	5.930.300,00
119.	Puskesmas Dampit pengakuan beban barang jasa blud	43.913.582,00
120.	Puskesmas Dampit pengakuan beban barang jasa blud	24.372.349,00
121.	Puskesmas Dampit pengakuan beban barang jasa blud	576.255.442,00

No	Uraian	Nilai
122. Puskesmas Dampit	Jurnal Pengakuan Utang 2023	5.772.942,00
123. Puskesmas Dampit	pengakuan beban barang jasa blud	17.582.400,00
124. Puskesmas Dampit	pengakuan beban barang jasa blud	132.550.000,00
125. Puskesmas Dampit	pengakuan beban barang jasa blud	10.420.350,00
126. Puskesmas Dampit	pengakuan beban barang jasa blud	775.000,00
127. Puskesmas Dampit	pengakuan beban barang jasa blud	24.000.000,00
128. Puskesmas Dampit	pengakuan beban barang jasa blud	2.625.000,00
129. Puskesmas Dampit	Jurnal Penghapusan Piutang 2022	46.400,00
130. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	9.600.000,00
131. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	8.400.000,00
132. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	9.600.000,00
133. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	22.500.000,00
134. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	5.450.000,00
135. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	10.277.490,00
136. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	9.772.847,00
137. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	18.384.857,00
138. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	22.447.547,00
139. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	2.058.584,00
140. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	275.071.070,00
141. Puskesmas Dau	Pengakuan hutang jaspel tahun 2023	2.955.983,00
142. Puskesmas Dau	KB	2.600.050,00
143. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	56.000.000,00
144. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	750.000,00
145. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	17.582.400,00
146. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	8.400.000,00
147. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	13.200.000,00
148. Puskesmas Dau	Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	2.400.000,00
149. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	58.800.000,00
150. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	160.800.000,00
151. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	32.400.000,00
152. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	42.582.400,00
153. Puskesmas Donomulyo	Jurnal atas pengakuan hutang 2023	5.330.000,00
154. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	57.555.140,00
155. Puskesmas Donomulyo	Jurnal atas pengakuan hutang 2023	12.737.195,00

No	Uraian	Nilai
156.	Puskesmas Donomulyo Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	513.713,00
157.	Puskesmas Donomulyo Jurnal atas pengakuan hutang 2023	44.519,00
158.	Puskesmas Donomulyo Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	943.750,00
159.	Puskesmas Donomulyo Jurnal atas pengakuan hutang 2023	134.495,00
160.	Puskesmas Donomulyo Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	26.676.110,00
161.	Puskesmas Donomulyo Jurnal atas pengakuan hutang 2023	6.426.116,00
162.	Puskesmas Donomulyo Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	27.041.550,00
163.	Puskesmas Donomulyo Jurnal atas pengakuan hutang 2023	898.530,00
164.	Puskesmas Donomulyo Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	546.000,00
165.	Puskesmas Donomulyo Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	705.152.901,50
166.	Puskesmas Donomulyo Jurnal atas pengakuan hutang 2023	48.321.927,00
167.	Puskesmas Donomulyo Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	139.600.000,00
168.	Puskesmas Donomulyo Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	6.895.000,00
169.	Puskesmas Donomulyo Jurnal atas pengakuan hutang 2023	11.600,00
170.	Puskesmas Donomulyo Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	1.198.600,00
171.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	84.106.821,00
172.	Puskesmas Gedangan Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	106.983.804,00
173.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	9.807.804,00
174.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	37.562.400,00
175.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	4.060.000,00
176.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	22.982.796,00
177.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	2.153.551,00
178.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	11.481.040,00
179.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	24.862.060,00
180.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	21.337.026,00
181.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	1.629.300,00
182.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	546.628.830,00
183.	Puskesmas Gedangan Pengakuan Utang Jaspel ASN dan NON-ASN 2023 PKM Gedangan	13.981.803,00
184.	Puskesmas Gedangan Pendapatan atas klaim KB 2023 yg dibelanjakan Jaspel Kesehatan ASN dan Non-ASN PKM Gedangan	557.500,00
185.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	1.200.000,00
186.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	146.607.305,00

No	Uraian	Nilai
187. Puskesmas Gedangan	Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	2.872.550,00
188. Puskesmas Gedangan	Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	8.607.804,00
189. Puskesmas Gedangan	Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	18.023.412,00
190. Puskesmas Gedangan	Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	1.685.000,00
191. Puskesmas Gondanglegi	Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	46.800.000,00
192. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	205.200.000,00
193. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	30.000.000,00
194. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	12.000.000,00
195. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	42.582.400,00
196. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	7.140.000,00
197. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	22.969.406,00
198. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	427.366,00
199. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	4.821.600,00
200. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	37.986.501,00
201. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	26.363.294,00
202. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	1.782.300,00
203. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	421.161.842,55
204. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan hutang belanja pegawai tahun 2023	18.657.681,00
205. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	11.200.000,00
206. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	7.550.000,00
207. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	15.600.000,00
208. Puskesmas Gondanglegi	Penghapusan piutang tahun 2023	2.900,00
209. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	796.130,00
210. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	1.265.000,00
211. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	245.000,00
212. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	52.800.000,00
213. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	75.600.000,00
214. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	12.000.000,00
215. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	24.000.000,00
216. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	7.025.000,00
217. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	17.158.050,00
218. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	8.190.119,00
219. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	1.488.150,00
220. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	27.767.516,00
221. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	14.888.650,00
222. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	1.135.300,00
223. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	393.533.982,00

No	Uraian	Nilai
224. Puskesmas Jabung	Pendapatan Klaim KB Pkm Jabung 2023	1.779.376,00
225. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	78.000.000,00
226. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	2.025.000,00
227. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	17.582.400,00
228. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	1.050.000,00
229. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	3.500,00
230. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	81.600.000,00
231. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	97.368.446,00
232. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	28.800.000,00
233. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	42.582.000,00
234. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	9.385.000,00
235. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	34.191.250,00
236. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	1.161.710,00
237. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	37.972.720,00
238. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	30.078.727,00
239. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	1.323.300,00
240. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	762.355.091,94
241. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Hutang Belanja Tahun 2023	9.630.972,67
242. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	275.598.068,00
243. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	18.000.000,00
244. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	13.200.000,00
245. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pemusnahan Piutang Tahun 2022	2.900,00
246. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	2.937.060,00
247. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	82.800.000,00
248. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	53.400.000,00
249. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	12.000.000,00
250. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	38.672.400,00
251. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	11.635.000,00
252. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	19.853.730,00

No	Uraian	Nilai
253.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	5.015.348,00
254.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	3.701.650,00
255.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	19.449.640,00
256.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	15.020.894,00
257.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	1.473.300,00
258.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	449.023.779,00
259.	Puskesmas Karangploso Jurnal Hutang Pegawai Th 2023 Pkm Karangploso	1.167.861,00
260.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	52.600.000,00
261.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	1.100.000,00
262.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	850.000,00
263.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	19.200.000,00
264.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	134.876.604,00
265.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	22.500.000,00
266.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	12.965.000,00
267.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	11.051.340,00
268.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	24.464.343,00
269.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	21.142.200,00
270.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	213.075.018,00
271.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Hutang Belanja Pegawai Tahun 2023	198.757,00
272.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	43.200.000,00
273.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	9.300.000,00
274.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	17.582.400,00
275.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	43.200.000,00
276.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	147.434.244,00
277.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	71.335.000,00
278.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	37.840.000,00
279.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	9.470.000,00
280.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	33.970.030,00
281.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	484.884,00
282.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	1.246.000,00
283.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	48.462.330,00
284.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	57.514.650,00
285.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	1.702.300,00
286.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	443.278.688,00
287.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Mencatat Pendapatan Klaim KB	484.853,00
288.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Mencatat Hutang Jasa Pelayanan 2023	1.417.918,00
289.	Puskesmas Kapanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	31.600.000,00

No	Uraian	Nilai
290. Puskesmas Keparjen	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	20.400.000,00
291. Puskesmas Keparjen	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	40.800.000,00
292. Puskesmas Keparjen	Jurnal Penghapusan Piutang di 2023	2.900,00
293. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	41.200.000,00
294. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	39.215.000,00
295. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	14.244.334,00
296. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	40.082.400,00
297. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	8.390.000,00
298. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	22.143.840,00
299. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	2.847.057,00
300. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	4.258.650,00
301. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	19.123.815,00
302. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	13.110.576,00
303. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	6.000,00
304. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	299.638.500,44
305. Puskesmas Ketawang	Jurnal pengakuan hutang belanja tahun 2023	198.035,76
306. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	2.094.200,00
307. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	70.000.000,00
308. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	17.554.000,00
309. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	9.000.000,00
310. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	15.180.000,00
311. Puskesmas Ketawang	Jurnal penghapusan piutang tahun 2022	2.900,00
312. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	13.345.000,00
313. Puskesmas Ketawang	Merinci beban jasa	9.000.000,00
314. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	21.600.000,00
315. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	97.200.000,00
316. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	9.000.000,00
317. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	35.342.400,00
318. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	9.397.500,00
319. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	19.190.194,00
320. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	1.025.419,00
321. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	1.600.000,00
322. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	19.084.746,00
323. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	21.108.724,00
324. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	1.875.300,00
325. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	230.081.738,00
326. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Utang Jaspel 2023	19.109.206,71
327. Puskesmas Kromengan	Adjustment atas penerimaan KB 2023	4.269.492,00
328. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	7.522.100,00
329. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	2.973.900,00
330. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	99.350.000,00
331. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	15.555.000,00

No	Uraian	Nilai
332.	Puskesmas Kromengan Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	9.000.000,00
333.	Puskesmas Kromengan Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	1.320.000,00
334.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	57.000.000,00
335.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	42.582.400,00
336.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	12.960.000,00
337.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	25.395.660,00
338.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	8.233.618,00
339.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	6.904.500,00
340.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	23.452.924,00
341.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	13.453.700,00
342.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	2.967.762,00
343.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	428.440.663,00
344.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	6.500.000,00
345.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	56.600.000,00
346.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	4.000.000,00
347.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	8.400.000,00
348.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	2.800.000,00
349.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	8.400.000,00
350.	Puskesmas Lawang Pelunasan Piutang 2022	2.900,00
351.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	1.194.850,00
352.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	9.300.000,00
353.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	41.582.400,00
354.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	7.092.550,00
355.	Puskesmas Ngajum Jurnal Atas Pendapatan Dana Klaim Kb	3.558.390,00
356.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	444.434.243,00
357.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	9.800.000,00
358.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	128.300.000,00
359.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	1.895.000,00
360.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	61.020.000,00
361.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	59.214.000,00
362.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	18.960.000,00
363.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	1.530.000,00

No	Uraian	Nilai
364. Puskesmas Ngajum	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	10.445.726,00
365. Puskesmas Ngajum	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	25.073.676,00
366. Puskesmas Ngajum	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	40.722.500,00
367. Puskesmas Ngajum	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	18.043.963,00
368. Puskesmas Ngajum	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	1.523.815,00
369. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	43.800.000,00
370. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	162.606.396,00
371. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	23.500.000,00
372. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	12.063.300,00
373. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	14.307.120,00
374. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	8.108.630,00
375. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	2.190.000,00
376. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	22.584.270,00
377. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	24.699.850,00
378. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	1.679.300,00
379. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	482.052.296,00
380. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	21.132.400,00
381. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	79.700.000,00
382. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	12.427.550,00
383. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	8.200.000,00
384. Puskesmas Ngantang	Jurnal penghapusan piutang secara terinci	522.200,00
385. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	10.500.000,00
386. Puskesmas Ngajum	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	1.444.277,00
387. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	66.600.000,00
388. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	72.000.000,00
389. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	18.000.000,00

No	Uraian	Nilai
390. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	8.335.000,00
391. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	13.308.480,00
392. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	731.878,00
393. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	1.740.450,00
394. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	15.126.959,00
395. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	19.549.800,00
396. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	197.247.625,00
397. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	7.671.000,00
398. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	69.200.000,00
399. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	210.000,00
400. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	38.488.778,00
401. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	92.656.484,00
402. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	32.793.244,00
403. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	42.582.400,00
404. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	8.000.000,00
405. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	27.965.766,00
406. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	2.334.793,00
407. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	42.933.038,00
408. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	31.293.025,00
409. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	3.814.738,00
410. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	502.025.360,00
411. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas Pengakuan Hutang Belanja 2023	1.061.751,00
412. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	144.325.847,00
413. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	27.608.704,00
414. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	30.604.451,00
415. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	11.877.804,00
416. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	8.889.990,00
417. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	82.300.000,00
418. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	86.363.500,00
419. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	10.800.000,00
420. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	13.200.000,00
421. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	51.339.540,00
422. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	3.708.140,00

No	Uraian	Nilai
423. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	9.665.800,00
424. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	37.555.336,00
425. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	32.179.520,00
426. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	3.497.011,00
427. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	885.439.899,00
428. Puskesmas Pakis	Jurnal Pengakuan Hutang Th 2023	7.892.133,00
429. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa BLUD Secara Terinci	500.000,00
430. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	46.900.000,00
431. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	197.600.000,00
432. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	17.400.000,00
433. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	42.840.000,00
434. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	12.000.000,00
435. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	23.000.000,00
436. Puskesmas Pakis	Jurnal Penghapusan Piutang 2022 Pkm Pakis	8.700,00
437. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	10.400.000,00
438. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	76.800.000,00
439. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	21.600.000,00
440. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	42.582.400,00
441. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	20.766.900,00
442. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	45.215.740,00
443. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	24.578.125,00
444. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	44.516.141,00
445. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	22.189.072,00
446. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	153.000,00
447. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	580.925.913,00
448. Puskesmas Pakisaji	Pengakuan Hutang Belanja Jasa Pelayanan Pegawai Tahun 2023	1.434.562,00
449. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	240.000.000,00
450. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	34.702.100,00
451. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	11.827.500,00
452. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Atas Penghapusan Piutang Tahun 2022	2.900,00
453. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	760.000,00
454. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	55.878.000,00
455. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	2.900.000,00
456. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	18.001.148,00

No	Uraian	Nilai
457. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	9.951.150,00
458. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	8.667.535,00
459. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	5.721.830,00
460. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	20.254.560,00
461. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	13.320.000,00
462. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	1.629.300,00
463. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	436.351.531,00
464. Puskesmas Pamotan	Jurnal Pengakuan Hutang Belanja Jaspel Medis Pkm Pamotan Tahun 2023	9.954.193,00
465. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	152.200.000,00
466. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	9.900.000,00
467. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	41.082.400,00
468. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	6.865.000,00
469. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	4.100.000,00
470. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	18.000.000,00
471. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	175.879.800,00
472. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	11.400.000,00
473. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	42.582.400,00
474. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	21.470.000,00
475. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	34.359.856,00
476. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	751.359,00
477. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	11.839.400,00
478. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	29.791.836,00
479. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	24.414.188,00
480. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	1.757.800,00
481. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	816.324.622,00
482. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	5.000.000,00
483. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	158.900.000,00
484. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	36.000.000,00
485. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	34.200.000,00
486. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal Pelunasan Piutang tahun 2022	2.900,00
487. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	5.282.550,00
488. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	42.000.000,00
489. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	189.960.000,00
490. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	18.000.000,00

No	Uraian	Nilai
491. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	42.582.400,00
492. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	9.760.000,00
493. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	17.560.605,00
494. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	532.661,00
495. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	8.227.000,00
496. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	17.223.992,00
497. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	21.057.500,00
498. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	1.632.300,00
499. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Dana Kb	1.914.365,03
500. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	447.837.447,95
501. Puskesmas Pujon	Pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun 2023	5.182.892,01
502. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	800.000,00
503. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	10.968.100,00
504. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	56.700.000,00
505. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	100.000,00
506. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	4.789.362,00
507. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	63.000,00
508. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	16.095.000,00
509. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	41.400.000,00
510. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	67.897.500,00
511. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	9.000.000,00
512. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	41.582.400,00
513. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	7.690.000,00
514. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian	24.418.260,00

No	Uraian	Nilai
	objek beban barjas tahun 2023	
515. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	30.209.360,00
516. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	26.486.226,00
517. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	1.257.800,00
518. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	490.428.745,63
519. Puskesmas Singosari	Jurnal mencatat utang belanja pegawai dan barjas 2023	23.409.939,12
520. Puskesmas Singosari	NEW jurnal pendapatan Dana Klaim KB Pkm Singosari tahun 2023	1.549.096,00
521. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	81.600.000,00
522. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	28.331.688,00
523. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	8.300.000,00
524. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	4.245.000,00
525. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	29.400.000,00
526. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	26.100.000,00
527. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	17.700.000,00
528. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	36.399.200,00
529. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	9.165.000,00
530. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	10.525.863,00
531. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	1.402.468,00
532. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	26.412.178,00
533. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	23.490.750,00
534. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	1.951.300,00
535. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	338.238.447,00
536. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Utang Belanja Tahun 2023	5.146.883,00
537. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	20.300.000,00
538. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	61.200.000,00
539. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	17.700.000,00
540. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Penghapusan Piutang Tahun 2022	2.900,00
541. Puskesmas SumbermanjingKulon	Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	1.119.200,00
542. Puskesmas SumbermanjingKulon	Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	33.600.000,00

No	Uraian	Nilai
543.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	44.800.000,00
544.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	20.400.000,00
545.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	36.082.400,00
546.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	1.900.000,00
547.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	28.760.879,00
548.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	448.455,00
549.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	1.270.550,00
550.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	13.379.616,00
551.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	19.968.870,00
552.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	1.798.300,00
553.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	246.370.012,00
554.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal Pengakuan Hutang Behaja Tahun 2023	29.623.550,00
555.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas Penggunaan Klaim KB 2023	1.433.315,00
556.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas Penggunaan Hadiah Lomba Puskesmas Berprestasi 2023	1.151.257,00
557.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	35.700.000,00
558.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	101.000.000,00
559.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	10.800.000,00
560.	Puskesmas SumbermanjingKulon Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	14.400.000,00
561.	Puskesmas SumbermanjingKulon Penghapusan Piutang 2022	5.800,00
562.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	4.570.000,00
563.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	28.200.000,00
564.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	109.924.996,00
565.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	12.000.000,00
566.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	20.000.000,00
567.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	15.085.000,00
568.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	13.858.026,00
569.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	8.583.910,00
570.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	600.000,00
571.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	17.439.332,00
572.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	14.330.685,00
573.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	1.600.800,00
574.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	435.694.800,00
575.	Puskesmas SumbermanjingWetan Jurnal Pengakuan Hutang 2023	1.119.412,00
576.	Puskesmas SumbermanjingWetan Jurnal Pendapatan Klaim KB	11.493.183,00
577.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	25.939.400,00
578.	Puskesmas SumbermanjingWetan Adj Beban Jasa	106.200.000,00

No	Uraian	Nilai
579.	Puskesmas Sumbermanjingwetan Adj Beban Jasa	10.200.000,00
580.	Puskesmas Sumbermanjingwetan Adj Beban Jasa	19.900.000,00
581.	Puskesmas Sumbermanjingwetan Adj Beban Jasa	12.000.000,00
582.	Puskesmas Sumbermanjingwetan Jurnal Penghapusan Piutang 2022	2.900,00
583.	Puskesmas Sumbermanjingwetan Adj Beban Jasa	4.120.000,00
584.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	133.600.002,00
585.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	6.600.000,00
586.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	50.166.668,00
587.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	14.714.590,00
588.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	23.500.000,00
589.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	11.120.000,00
590.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	34.050.630,00
591.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	493.887,00
592.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	27.305.577,00
593.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	27.527.113,00
594.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	2.175.300,00
595.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Penerimaan Klaim Kb-Tahun 2023	601.090,00
596.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	355.648.882,00
597.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Utang Jaspel 2023	10.638.601,00
598.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	5.600.000,00
599.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	14.000.000,00
600.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	15.840.000,00
601.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	21.000.000,00
602.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	100.000,00
603.	Puskesmas Sumberpucung Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	2.800.000,00
604.	Puskesmas Tajinan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	17.660.686,00
605.	Puskesmas Tajinan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	18.582.400,00
606.	Puskesmas Tajinan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	140.000.000,00
607.	Puskesmas Tajinan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	12.000.000,00
608.	Puskesmas Tajinan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	24.000.000,00
609.	Puskesmas Tajinan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	12.000.000,00
610.	Puskesmas Tajinan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	22.500.000,00
611.	Puskesmas Tajinan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	100.000,00
612.	Puskesmas Tajinan Jurnal Penghapusan Piutang tahun 2022	2.900,00
613.	Puskesmas Tajinan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	4.350.000,00
614.	Puskesmas Tajinan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	4.268.449,00
615.	Puskesmas Tajinan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	5.432.400,00

No	Uraian	Nilai
616. Puskesmas Tajinan	Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	21.988.314,00
617. Puskesmas Tajinan	Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	13.320.000,00
618. Puskesmas Tajinan	Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	1.869.300,00
619. Puskesmas Tajinan	Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	378.812.115,87
620. Puskesmas Tajinan	Pengakuan Atas Utang Belanja Tahun 2023	9.327.784,85
621. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	1.645.000,00
622. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	78.500.000,00
623. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	91.287.000,00
624. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	27.600.000,00
625. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	23.500.000,00
626. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	5.650.000,00
627. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	24.079.490,00
628. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	16.758.380,00
629. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	804.450,00
630. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	20.570.802,00
631. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	16.737.030,00
632. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	1.477.968,00
633. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	702.685.219,00
634. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal pengakuan utang belanja 2023	9.311.191,00
635. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	1.500.000,00
636. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	600.000,00
637. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	202.900.000,00
638. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	17.582.400,00
639. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	13.800.000,00
640. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	13.554.744,00
641. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal pelunasan piutang 2022	5.800,00
642. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	6.848.000,00
643. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	782.500,00
644. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	7.000.000,00
645. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	67.200.000,00
646. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	202.622.880,00
647. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	28.800.000,00
648. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	42.582.400,00
649. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	8.315.000,00
650. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	34.780.120,00
651. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	1.294.713,00
652. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	29.590.667,00

No	Uraian	Nilai
653. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	5.415.100,00
654. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	46.768.900,00
655. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	1.388.300,00
656. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	671.596.005,00
657. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	122.000.000,00
658. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	26.400.000,00
659. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	27.600.000,00
660. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	19.200.000,00
661. Puskesmas Tumpang	Penghapusan Piutang Bpjs Dengan Dipotong Biaya Transfer Bank (2022)	5.800,00
662. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	2.337.550,00
663. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	41.192.000,00
664. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	32.400.000,00
665. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	160.895.400,00
666. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	31.200.000,00
667. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	40.892.400,00
668. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	29.188.000,00
669. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	36.281.664,00
670. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	25.827.265,00
671. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	2.201.190,00
672. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	34.401.977,00
673. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	36.412.930,00
674. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	1.476.300,00
675. Puskesmas Turen	Penerimaan Pendapatan LO dari rekening tampungan Puskesmas - Klaim BKKB	7.953.659,11
676. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	666.210.817,61
677. Puskesmas Turen	Pengakuan Utang 2023	16.590.809,94
678. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	12.500.000,00
679. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	12.200.000,00
680. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	167.100.000,00
681. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	79.959.600,00
682. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	19.020.000,00
683. Puskesmas Turen	Penerimaan Pembayaran Piutang 2022	2.900,00
684. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	100.000,00
685. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	51.450.000,00
686. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	3.605.000,00
687. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	34.800.000,00

No	Uraian	Nilai
688. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	74.991.450,00
689. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	34.909.000,00
690. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	41.582.400,00
691. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	12.475.000,00
692. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	25.229.970,00
693. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	5.325.869,00
694. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	165.000,00
695. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	22.604.516,00
696. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	19.483.200,00
697. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	2.816.300,00
698. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	465.423.859,50
699. Puskesmas Wagir	Pengakuan Utang Belanja Tahun 2023	40.248.649,00
700. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa PKM Wagir Tahun 2023	1.500.000,00
701. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	600.000,00
702. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	196.000.000,00
703. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	1.980.000,00
704. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	12.600.000,00
705. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	5.750.000,00
706. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	76.351.000,00
707. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	97.104.000,00
708. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	18.370.000,00
709. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	41.582.400,00
710. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	16.780.000,00
711. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	24.785.893,00
712. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	11.144.400,00
713. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	31.424.106,00
714. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	13.320.000,00
715. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	2.354.500,00
716. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	676.515.325,00
717. Puskesmas Wajak	Pengakuan Hutang Jaspel 2023	23.280.430,00
718. Puskesmas Wajak	Adj Klaim KB	1.768.526,00
719. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	141.200.000,00
720. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	1.500.000,00

No	Uraian	Nilai
721. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	5.490.000,00
722. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	19.200.000,00
723. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	27.922.500,00
724. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	16.800.000,00
725. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	39.582.400,00
726. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	9.175.000,00
727. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	26.102.300,00
728. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	918.031,00
729. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	12.511.500,00
730. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	24.976.548,00
731. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	17.771.893,00
732. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	1.323.300,00
733. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	275.901.399,00
734. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Utang Blud Tahun 2023	43.900.299,00
735. Puskesmas Wonokerto	Koreksi Kurang Saldo Awal Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	787.619,00
736. Puskesmas Wonokerto	Pendapatan Atas Klaim KB 2023 Yg Dibelanjakan Jaspel Kesehatan ASN Dan Non-ASN	715.068,00
737. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	3.000.000,00
738. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	1.600.000,00
739. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	92.000.000,00
740. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	500.000,00
741. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	8.400.000,00
742. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	1.880.000,00
743. Puskesmas Wonokerto	Pembayaran Piutang PKM Wonokerto 2022 Di Tahun 2023	2.900,00
744. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci Beban Barang Dan Jasa Ke Rincian Objek Tahun 2023	1.631.700,00
745. Puskesmas Wonosari	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	7.565.000,00

No	Uraian	Nilai
746.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	50.350.000,00
747.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	105.818.194,00
748.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	3.840.854,00
749.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	21.500.000,00
750.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	10.070.000,00
751.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	25.996.380,00
752.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	6.987.800,00
753.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	400.000,00
754.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	11.030.220,00
755.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	14.397.000,00
756.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	1.476.300,00
757.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	416.328.574,23
758.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	24.069.200,00
759.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	124.600.000,00
760.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	10.200.000,00
761.	Puskesmas Wonosari Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	7.855.000,00
762.	Puskesmas Wonosari Jurnal Penghapusan Piutang Dengan Mempertimbangkan Biaya Transfer Yang Dipotong BPJS	58.000,00
763.	Puskesmas Wonosari Jurnal Piutang Tahun 2023	2.900,00
764.	Puskesmas Pakisaji Jurnal Rincian Beban Jasa	6.225.000,00
765.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	10.800.000,00
766.	RSUD Kanjuruhan Reklas Beban Barang Jasa Blud	64.935.400,00
767.	RSUD Kanjuruhan Reklasifikasi Beban Barang Jasa Blud	349.837.943,00
768.	RSUD Kanjuruhan Hutang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Kebersihan 2023	529.801.580,00
769.	RSUD Kanjuruhan Reklas Beban Barang Jasa Blud	2.669.116.240,00
770.	RSUD Kanjuruhan Hutang Belanja Jasa-Jasa Tenaga Keamanan 2023	141.098.225,00
771.	RSUD Kanjuruhan Reklas Beban Barang Jasa Blud	722.820.794,00
772.	RSUD Kanjuruhan Reklas Beban Barang Jasa Blud	4.879.700,00
773.	RSUD Kanjuruhan Reklas Beban Barang Jasa Blud	236.106.000,00
774.	RSUD Kanjuruhan Penyesuaian Utang Belanja Tahun 2023	3.422.833,00
775.	RSUD Kanjuruhan Reklasifikasi Beban Barang Jasa Blud	350.716.142,00
776.	RSUD Kanjuruhan Reklas Beban Barang Jasa Blud	90.200.000,00
777.	RSUD Kanjuruhan Reklas Beban Barang Jasa Blud	74.671.049,00
778.	RSUD Kanjuruhan Reklasifikasi Beban Barang Jasa Blud	160.690.750,00
779.	RSUD Kanjuruhan Reklasifikasi Beban Barang Jasa Blud	1.993.611.315,00
780.	RSUD Kanjuruhan Reklas Beban Barang Jasa Blud	8.280.000,00
781.	RSUD Kanjuruhan Reklasifikasi Beban Barang Jasa Blud	213.211.541,00

No	Uraian	Nilai
782. RSUD Kanjuruhan	Reklasifikasi Beban Barang Jasa Blud	900.860,00
783. RSUD Kanjuruhan	Reklasifikasi Beban Barang Jasa Blud	7.765.800,00
784. RSUD Kanjuruhan	Reklasifikasi Beban Barang Jasa Blud	6.420.000,00
785. RSUD Kanjuruhan	Reklasifikasi Beban Barang Jasa Blud	426.050.100,00
786. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	196.114.201,00
787. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	18.545.096.841,00
788. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	393.456.482,00
789. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	1.168.924.550,00
790. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	2.000.000,00
791. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	6.042.695,00
792. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	390.000,00
793. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	12.626.148,00
794. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	124.062.100,00
795. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	746.892.965,00
796. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	162.954.198,00
797. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	245.000,00
798. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	10.746.700,00
799. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	129.699.620,00
800. RSUD Lawang	Jurnal Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa BLUD TA 2023	82.863.250,00
801. UPT Dana Bergulir	Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa Blud	3.000.000,00
802. UPT Dana Bergulir	Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa Blud	185.000.000,00
803. UPT Dana Bergulir	Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa Blud	35.000.000,00
804. UPT Dana Bergulir	Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa Blud	2.455.504,00
805. UPT Dana Bergulir	Reklasifikasi Beban Barang Dan Jasa Blud	1.243.300,00
b.	Jumlah Ditambah (1-805)	174.511.823.009,42
	Dikurang:	
1. Dinas Kesehatan	Adjustment Atas Transfer Jasa Respon PSC 39 Puskesmas dan RSUD	200.000.000,00
2. Dinas Kesehatan	Adjustmen atas Pembayaran Utang Beban ke RSUD Kanjuruhan tahun 2022	32.065.000,00
3. Dinas Kesehatan	Adjustmen atas Pembayaran Utang Beban ke RS WAVA,	56.650.000,00

No	Uraian	Nilai
	RS UMM, RS Lawang Medika tahun 2022	
4. Dinas Kesehatan	Adjustmen atas Pembayaran Utang Beban ke RSUD Kanjuruhan tahun 2021	51.045.000,00
5. Dinas Pendidikan	Terdapat bukti pengeluaran honor pada SMPN 1 Bululawang yang dicatat lebih besar daripada bukti asli. Kelebihan belanja ini telah disetorkan Bendahara ke Rekening Kas BOS saat cash opname pada tanggal 2 Feb 2024	750.000,00
6. Dinas Pendidikan	Terdapat kelebihan kas Rp17.175 pada SMPN 1 Bululawang saat cash opname akibat akumulasi selisih pembulatan ke bawah atas belanja BOS	17.175,00
7. Puskesmas Ampelgading	Utang belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN 2022	137.278.374,00
8. Puskesmas Bantur	Utang Beban Honorarium Narasumber 2022	1.100.000,00
9. Puskesmas Bantur	Utang belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN-Jurnal pelunasan utang tahun 2021	4.517.636,00
10. Puskesmas Dampit	jurnal pembayaran utang jasa limbah	8.851.140,00
11. Puskesmas Dampit	jurnal pembayaran utang asn dan non asn	22.312.222,00
12. Puskesmas Dau	Pengakuan pelunasan hutang jaspel tahun 2022	728.450,00
13. Puskesmas Donomulyo	Jurnal atas penghapusan hutang jaspel Non ASN 2022	2.370.853,00
14. Puskesmas Gedangan	Pembayaran Utang Tahun Jaspel ASN dan non-ASN 2022	572.812,00
15. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan pelunasan hutang 2022	6.254.417,88
16. Puskesmas Jabung	Pelunasan Utang Pegawai di Tahun 2022	3.690.614,00
17. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pelunasan Hutang Tahun 2022	2.628.626,00
18. Puskesmas Kalipare	Jurnal Reklasifikasi Akun Beban Barang dan Jasa-BOK	84.898.068,00
19. Puskesmas Kasembon	Jurnal Pelunasan Hutang Pegawai Tahun 2022	180.846,00
20. Puskesmas Ketawang	Jurnal atas pelunasan hutang tahun 2022	355.989,44
21. Puskesmas Ngajum	Jurnal Atas Pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun 2022	7.031.313,00
22. Puskesmas Ngantang	jurnal pelunasan hutang belanja 2022 secara terinci	1.231.035,00
23. Puskesmas Pagak	Ajds Atas Pelunasan Utang Tenaga kesehatan ASN dan NON-ASN	2.317.496,00
24. Puskesmas Pagelaran	Jurnal Pelunasan Hutang Tahun 2022	1.946.026,00
25. Puskesmas Pakis	Jurnal Penghapusan Hutang Pkm Pakis Thn 2022	12.876.504,00
26. Puskesmas Pakisaji	Pengakuan Pelunasan Hutang Jasa Pelayanan 2022	3.259.867,00
27. Puskesmas Pamotan	Mencatat Transaksi Pelunasan Hutang Japel 2022	212.475,69
28. Puskesmas Pujon	Jurnal Pelunasan Utang Pegawai Tahun 2022	3.981.677,95

No	Uraian	Nilai
29. Puskesmas Singosari	New Pelunasan Utang Barjas Tahun 2022 dibayarkan tahun 2023	8.681.631,00
30. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Pelunasan Utang Belanja Tahun 2022	2.387.923,00
31. Puskesmas SumbermanjingKulon	Jurnal Pelunasan Hutang Tahun 2022	12.144.200,00
32. Puskesmas SumbermanjingWetan	Jurnal Pelunasan Hutang 2022	342.101,00
33. Puskesmas Sumberpucung	Jurnal Pembayaran Utang Jaspel Blud Tahun 2022	2.255.777,00
34. Puskesmas Tajinan	Pelunasan Hutang Belanja Tahun 2022	8.997.036,53
35. Puskesmas Turen	Pembayaran Utang 2022 - Jasa Pelayanan ASN dan Non ASN	4.009.365,82
36. Puskesmas Wagir	Pelunasan Utang Belanja Tahun 2022	7.667.803,00
37. Puskesmas Wajak	pelunasan utang 2022	3.431.283,00
38. Puskesmas Wonokerto	Pembayaran utang jaspel rapid	2.929.688,00
39. RSUD Kanjuruhan	menutup utang belanja tahun 2022	71.037.225,00
40. RSUD Lawang	Terdapat kesalahan penjurnalan pada RSUD Lawang atas penutupan hutang belanja pegawai BLUD Tahun 2022	4.832.381.934,72
c.	Jumlah Dikurang (1-37)	5.605.589.586,03
d.	Beban Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	393.759.732.488,39
e.	Selisih Antara Belanja Jasa Kantor-LRA Dan Beban Jasa-LO (a-d)	(168.906.233.423,39)

b. Beban Jasa Asuransi

Beban Jasa Asuransi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp77.371.087.356,40 sedangkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp83.970.783.105,30 mengalami penurunan sebesar Rp6.598.917.614,90 atau 7,86% dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 177 Daftar Rincian Beban Asuransi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.364.033.760,00	2.473.663.460,00	157,27
2.	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	136.828.000,00	168.142.100,00	(18,62)
3.	Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJU dan BP Kelas 3	47.122.478.132,00	55.989.441.000,00	(15,84)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	kenaikan/ (Penurunan) (%)
4.	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	11.325.837.600,00	10.687.804.968,00	5,97
5.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.291.680.041,40	11.335.259.202,15	(35,67)
6.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.007.745.699,00	2.136.643.806,15	(6,00)
7.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	44.503.786,00	41.660.469,00	6,82
8.	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	175.936.338,00	360.447.000,00	(51,19)
9.	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	2.902.044.000,00	777.721.100,00	273,15
TOTAL		77.371.087.356,40	83.970.783.105,30	(7,86)

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp75.352.731.864,00 berbeda dengan Beban Jasa Asuransi-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp77.371.087.356,40 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 178 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dan Beban Iuran Jaminan/Asuransi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	75.352.731.864,00
	Ditambah :	
1.	Puskesmas Ampelgading Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	28.335.945,00
2.	Puskesmas Ampelgading Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.374.123,00
3.	Puskesmas Ardimulyo Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.825.270,00
4.	Puskesmas Ardimulyo Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.410.560,00

No	Uraian	Nilai
5. Puskesmas Bantur	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.976.434,00
6. Puskesmas Bululawang	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.186.380,00
7. Puskesmas Bululawang	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.207.986,00
8. Puskesmas Bululawang	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	949.101,00
9. Puskesmas Dampit	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	54.293.921,00
10. Puskesmas Dau	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.060.745,00
11. Puskesmas Donomulyo	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.648.685,00
12. Puskesmas Donomulyo	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.347.310,00
13. Puskesmas Donomulyo	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.066.760,00
14. Puskesmas Donomulyo	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	137.425,00
15. Puskesmas Donomulyo	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.333.456,00
16. Puskesmas Donomulyo	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	171.782,00
17. Puskesmas Gedangan	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	50.985.180,00
18. Puskesmas Gondanglegi	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.520.415,00
19. Puskesmas Jabung	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.792.610,00
20. Puskesmas Jabung	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	980.476,00
21. Puskesmas Jabung	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.225.600,00
22. Puskesmas Kalipare	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31.876.308,00
23. Puskesmas Kalipare	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban	4.129.785,00

No	Uraian	Nilai
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	
24.Puskesmas Karangploso	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.557.451,00
25.Puskesmas Karangploso	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.576.069,00
26.Puskesmas Kasembon	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.260.053,00
27.Puskesmas Kepanjen	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.924.889,00
28.Puskesmas Ketawang	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	23.926.839,00
29.Puskesmas Ketawang	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	698.096,00
30.Puskesmas Ketawang	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	872.627,00
31.Puskesmas Kromengan	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.563.944,00
32.Puskesmas Kromengan	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.163.483,00
33.Puskesmas Kromengan	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.454.361,00
34.Puskesmas Lawang	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.792.610,00
35.Puskesmas Ngajum	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31.189.978,00
36.Puskesmas Ngajum	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.970.019,00
37.Puskesmas Ngantang	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	21.533.284,00
38.Puskesmas Ngantang	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.742.724,00
39.Puskesmas Pagak	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.308.514,00
40.Puskesmas Pagak	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.019.700,00
41.Puskesmas Pagak	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.274.620,00

No	Uraian	Nilai
42.Puskesmas Pagelaran	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31.212.074,00
43.Puskesmas Pagelaran	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.255.011,00
44.Puskesmas Pagelaran	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.568.770,00
45.Puskesmas Pakis	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	39.878.158,00
46.Puskesmas Pakisaji	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	47.474.887,00
47.Puskesmas Pakisaji	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.038.744,00
48.Puskesmas Pamotan	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.887.562,00
49.Puskesmas Poncokusumo	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.845.703,00
50.Puskesmas Pujon	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.348.188,00
51.Puskesmas Pujon	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	941.256,00
52.Puskesmas Pujon	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.176.575,00
53.Puskesmas Singosari	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.341.375,00
54.Puskesmas Sitarjo	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	23.204.754,00
55.Puskesmas Sumbermanjing Kulon	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	25.884.774,00
56.Puskesmas Sumbermanjing Kulon	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.862.428,00
57.Puskesmas Sumbermanjing Wetan	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.714.972,00
58.Puskesmas Sumbermanjing Wetan	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.741.514,00
59.Puskesmas Sumberpucung	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.311.290,00
60.Puskesmas Sumberpucung	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban	1.336.328,00

No	Uraian	Nilai
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	
61.Puskesmas Sumberpucung	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.670.417,00
62.Puskesmas Tajinan	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30.721.832,00
63.Puskesmas Tirtoyudo	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	23.065.449,00
64.Puskesmas Tumpang	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	41.245.694,00
65.Puskesmas Turen	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.751.464,00
66.Puskesmas Turen	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.349.289,00
67.Puskesmas Wagir	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29.806.668,00
68.Puskesmas Wajak	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.002.602,00
69.Puskesmas Wonokerto	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29.763.799,00
70.Puskesmas Wonokerto	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.590.591,00
71.Puskesmas Wonokerto	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.988.237,00
72.Puskesmas Wonosari	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.194.788,00
73.Puskesmas Wonosari	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.651.400,00
74.RSUD Kanjuruhan	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	447.968.398,40
75.RSUD Kanjuruhan	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	24.464.754,00
76.RSUD Kanjuruhan	Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	30.580.961,00
77.RSUD Lawang	Hutang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Kontribusi Jaminan Kesehatan PHI 2023	6.091.000,00
78.RSUD Lawang	Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa BLUD pada Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PHI	144.357.000,00
79.RSUD Lawang	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban	282.518.483,00

No	Uraian	Nilai
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	
80.RSUD Lawang	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	300.098.980,00
81.RSUD Lawang	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	307.316.425,00
82.UPT Dana Bergulir	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.843.898,00
83.UPT Dana Bergulir	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.010.682,00
b.	Jumlah Ditambah (1-83)	2.618.742.692,40
	Dikurang:	
1. Dinas Kesehatan	Adjutmesnt Transfer Belanja Isolasi Terpadu Pasien Covid ke Puskesmas Donomulyo TA 2023	50.600.000,00
2. Dinas Kesehatan	Adjustment atas Pembayaran Utang Beban JAMKESDA Klaim Pelayanan Pasien dengan jaminan masyarakat miskin ke RSUD Kanjuruhan tahun 2022	500.232.800,00
3. Dinas Kesehatan	Adjustment atas Pembayaran Utang Beban JAMKESDA Klaim Pelayanan Pasiendengan jaminan masyarakat miskin ke RSUD Lawang tahun 2022	35.934.400,00
4. RSUD Lawang	Pembayaran Hutang atas Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	13.620.000,00
c.	Jumlah Dikurang (1-4)	600.387.200,00
d.	Beban Jasa Asuransi Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	77.371.087.356,40
e.	Selisih Antara Belanja Jasa Asuransi-Lra Dan Beban Asuransi-Lo (a-d)	(2.018.355.492,40)

c. Beban Sewa Tanah

Beban Sewa Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp293.787.000,00 sedangkan Beban Tanah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp237.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp56.287.000,00 atau 23,70% terdiri dari:

Tabel 179 Daftar Rincian Beban Sewa Tanah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenalkan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	34.787.000,00	182.000.000,00	(80,89)
2.	Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir	259.000.000,00	55.500.000,00	366,67
	TOTAL	293.787.000,00	237.500.000,00	23,70

Belanja Sewa Tanah-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp259.000.000,00 berbeda dengan Beban Sewa Tanah-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp293.787.000,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 180 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja Sewa Tanah dan Beban Sewa Tanah

(dalam Rupiah)

No	Uraian		Nilai
a.	Belanja Sewa Tanah		259.000.000,00
	Ditambah :		
	1. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	34.787.000,00
b.	Jumlah Ditambah		34.787.000,00
	Dikurang:		
c.	Jumlah Dikurang		0,00
d.	Beban Sewa Tanah Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)		293.787.000,00
e.	Selisih Antara Belanja Sewa Tanah-Lra Dan Beban Sewa Tanah-Lo (a-d)		(34.787.000,00)

d. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.021.489.170,00 sedangkan Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.926.752.237,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.094.736.933,00 atau 139,91% terdiri dari:

Tabel 181 Daftar Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan / (Penurunan) (%)
1.	Beban Sewa Hauler	0,00	21.105.000,00	(100,00)
2.	Beban Sewa Alat Pengangkat	38.141.200,00	0,00	100,00
3.	Beban Sewa Mesin Proses	9.905.800,00	0,00	100,00
4.	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	467.665.800,00	0,00	100,00
5.	Beban Sewa Electric Generating Set	26.064.000,00	136.255.270,00	(80,87)
6.	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	181.593.000,00	0,00	100,00
7.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	797.415.000,00	467.232.050,00	70,67

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
8.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	52.578.500,00	0,00	100,00
9.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	89.185.000,00	0,00	100,00
10.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.600.000,00	0,00	100,00
11.	Beban Sewa Peralatan Las	0,00	75.000,00	(100,00)
12.	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	4.800.000,00	41.916.225,00	(88,55)
13.	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	3.922.672.615,00	43.085.000,00	9.004,50
14.	Beban Sewa Mebel	128.870.000,00	518.996.800,00	(75,17)
15.	Beban Sewa Alat Pendingin	1.600.000,00	25.945.000,00	(93,83)
16.	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	392.180.000,00	1.555.074.530,00	(74,78)
17.	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	6.007.297,00	2.280.000,00	163,48
18.	Beban Sewa Peralatan Jaringan	105.750.600,00	106.753.362,00	(0,94)
19.	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	115.565.000,00	0,00	100,00
20.	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.400.000,00	0,00	100,00
21.	Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	18.278.400,00	0,00	100,00
22.	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	15.794.000,00	0,00	100,00
23.	Beban Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	600.000,00	0,00	100,00
24.	Beban Sewa Alat Laboratorium Umum	8.700.000,00	0,00	100,00
25.	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	630.000,00	0,00	100,00
26.	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	34.352.600,00	0,00	100,00

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenalkan/ (Penurunan) (%)
27.	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	3.902.200,00	0,00	100,00
28.	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	7.024.000,00	0,00	100,00
29.	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	1.230.000,00	0,00	100,00
30.	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	45.821.000,00	0,00	100,00
31.	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	17.744.000,00	0,00	100,00
32.	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	10.600.000,00	0,00	100,00
33.	Beban Sewa Alat Peraga Kejuruan	9.300.000,00	0,00	100,00
34.	Beban Sewa Peralatan Umum	31.880.000,00	0,00	100,00
35.	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	432.139.158,00	0,00	100,00
36.	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	1.500.000,00	0,00	100,00
37.	Beban Sewa Elektronik/Electric	0,00	8.034.000,00	(100,00)
38.	Beban Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	35.000.000,00	0,00	100,00
TOTAL		7.021.489.170,00	2.926.752.237,00	139,91

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.112.586.142,00 berbeda dengan Beban Sewa Peralatan dan Mesin-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.021.489.170,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 182 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dengan Beban Sewa Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.112.586.142,00
	Ditambah :	
1. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Alat Pengangkat	38.141.200,00
2. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Alat Darat Lainnya	467.663.800,00
3. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Electric Generating Set	3.464.000,00
4. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Kendaraan Bermotor Perumpang	89.831.000,00
5. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.800.000,00
6. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	78.685.000,00
7. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.600.000,00
8. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	301.315.973,00
9. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Mebel	116.740.000,00
10. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.490.000,00
11. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Peralatan Studio Audio	18.215.000,00
12. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.400.000,00
13. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	18.278.400,00
14. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Alat Studio Lainnya	15.794.000,00
15. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	630.000,00
16. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	34.352.600,00
17. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	3.902.200,00
18. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	7.024.000,00
19. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa	1.230.000,00

		Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	
20. Dinas Pendidikan		Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	45.821.000,00
21. Dinas Pendidikan		Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	17.744.000,00
22. Dinas Pendidikan		Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	10.600.000,00
23. Dinas Pendidikan		Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Alat Peraga Kejuruan	9.300.000,00
24. Dinas Pendidikan		Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Peralatan Umum	31.880.000,00
25. Dinas Pendidikan		Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	432.139.158,00
26. Dinas Pendidikan		Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Peradatan Komputer Lainnya	1.500.000,00
27. Puskesmas Ardimulyo		Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.664.100,00
28. Puskesmas Bantur		Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.600.000,00
29. Puskesmas Ngantang		Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.800.000,00
30. Puskesmas Pakis		Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	2.980.000,00
31. Puskesmas Pakis		Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Mebel	980.000,00
32. Puskesmas Poncokusumo		Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	4.800.000,00
33. Puskesmas Poncokusumo		Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Alat Pendingin	1.600.000,00
34. Puskesmas Poncokusumo		Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.265.000,00
35. Puskesmas Pujon		Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	900.000,00
36. Puskesmas Singosari		Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.650.000,00
37. Puskesmas Singosari		Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	510.000,00
38. Puskesmas Sumbermanjingwetan		Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Alat Laboratorium	8.700.000,00
39. RSUD Kanjuruhan		Reklasifikasi Barang Jasa BLUD pada beban sewa mesin proses	9.905.800,00
40. RSUD Kanjuruhan		Reklasifikasi Barang Jasa BLUD pada beban sewa kendaraan bermotor angkutan barang	28.175.000,00
41. RSUD Kanjuruhan		Reklasifikasi Barang Jasa BLUD pada beban sewa kursi rapat pejabat	1.000.000,00

	42. RSUD Lawang	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.900.000,00
	43. RSUD Lawang	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	5.322.500,00
	44. RSUD Lawang	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	5.007.297,00
	45. RSUD Lawang	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	600.000,00
b.	Jumlah Ditambah (1-45)		1.908.903.028,00
	Dikurang:		
c.	Jumlah Dikurang		0,00
d.	Beban Sewa Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)		7.021.489.170,00
e.	Selisih Antara Belanja Peralatan Dan Mesin-Lra Dan Beban Sewa Peralatan Dan Mesin-Lo (a-d)		(1.908.903.028)

e. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.195.835.600,00 sedangkan Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.267.029.816,67 mengalami penurunan sebesar Rp10.071.194.216,67 atau 39,86% terdiri dari:

Tabel 183 Daftar Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenalkan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	44.000.000,00	3.666.666,67	1.100,00
2.	Beban Sewa Bangunan Gudang	0,00	80.000.000,00	100,00
3.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.681.619.000,00	24.044.407.340,00	(38,94)
4.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12.690.000,00	0,00	100,00
5.	Beban Sewa Bangunan Terbuka	0,00	478.566.300,00	(100,00)
6.	Beban Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	2.000.000,00	(100,00)
7.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	34.000.000,00	0,00	100,00
8.	Beban Sewa Rumah	235.000.000,00	230.000.000,00	2,17

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenalkan/ (Penurunan) (%)
	Negara Golongan I			
9.	Beban Sewa Mesa/Wisma /Bungalow/Tempat Peristirahatan	725.000,00	33.508.000,00	(97,84)
10.	Beban Sewa Hotel	187.801.600,00	340.861.510,00	(44,90)
11.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	54.020.000,00	(100,00)
	TOTAL	15.195.835.600,00	25.267.029.816,67	(39,86)

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.929.528.998,00 berbeda dengan Beban Sewa Gedung dan Bangunan-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.195.835.600,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 184 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dengan Beban Sewa Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.929.528.998,00
	Ditambah :	
1.	Dinas Pendidikan Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.850.000,00
2.	Dinas Pendidikan Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12.690.000,00
3.	Dinas Pendidikan Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.000.000,00
4.	Puskesmas Ampelgading Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.400.000,00
5.	Puskesmas Ardimulyo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	1.838.000,00
6.	Puskesmas Bantur Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.400.000,00
7.	Puskesmas Bululawang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	4.000.000,00
8.	Puskesmas Dampit Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	1.800.000,00

No	Uraian	Nilai
9.	Puskesmas Dau Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	3.150.000,00
10.	Puskesmas Donomulyo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.400.000,00
11.	Puskesmas Gedangan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	6.510.000,00
12.	Puskesmas Jabung Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	3.940.000,00
13.	Puskesmas Kalipare Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.400.000,00
14.	Puskesmas Kasembon Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.700.000,00
15.	Puskesmas Kepanjen Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	7.900.000,00
16.	Puskesmas Ketawang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.400.000,00
17.	Puskesmas Kromengan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.486.000,00
18.	Puskesmas Lawang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	26.496.000,00
19.	Puskesmas Ngajum Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.400.000,00
20.	Puskesmas Ngantang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.025.000,00
21.	Puskesmas Pagak Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	3.000.000,00
22.	Puskesmas Pagelaran Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	3.943.000,00
23.	Puskesmas Pakis Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	4.352.000,00
24.	Puskesmas Pakisaji Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	3.400.000,00
25.	Puskesmas Pamotan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	5.050.000,00
26.	Puskesmas Pujon Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.865.602,00
27.	Puskesmas Singosari Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	8.766.000,00
28.	Puskesmas Singosari Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.200.000,00
29.	Puskesmas Sitiarjo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	5.000.000,00
30.	Puskesmas Sumbermanjing Kulon Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	3.400.000,00
31.	Puskesmas Sumbermanjing Wetan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	3.460.000,00
32.	Puskesmas Sumberpucung Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.620.000,00

No	Uraian		Nilai
33.	Puskesmas Tajinan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	3.000.000,00
34.	Puskesmas Tumpang	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	3.900.000,00
35.	Puskesmas Turen	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	4.550.000,00
36.	Puskesmas Wagir	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	5.600.000,00
37.	Puskesmas Wajak	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.450.000,00
38.	Puskesmas Wonokerto	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.565.000,00
39.	Puskesmas Wonosari	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Hotel	2.400.000,00
40.	RSUD Kanjuruhan	Terdapat kelebihan pencatatan Beban Sewa Bangunan karena adanya kesalahan jurnal penutupan piutang tahun 2022 pada RSUD Kanjuruhan	84.333.333,33
41.	UPT Dana Bergulir	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00
b.	Jumlah Ditambah (1-41)		306.639.935,33
	Dikurang		
	1. RSUD Kanjuruhan	Koreksi Beban Sewa Gedung Kantor	40.333.333,33
c.	Jumlah Dikurang		40.333.333,33
d.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)		15.195.835.600,00
e.	Selisih Antara Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Lra Dan Beban Sewa Gedung dan Bangunan-Lo (a-d)		(266.306.602,00)

f. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp69.375.750,00 sedangkan Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.826.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp45.549.450,00 atau 191,17% dengan Rincian sebagai berikut.

Tabel 185 Daftar Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Sewa Alat Musik	0,00	23.826.300,00	(100,00)
2.	Beban Sewa Audio Visual	1.609.500,00	0,00	100,00
3.	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	67.766.250,00	0,00	100,00
TOTAL		69.375.750,00	23.826.300,00	191,17

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.766.250,00 berbeda dengan Beban Sewa Aset Tetap Lainnya-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp69.375.750,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 186 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya dan Beban Sewa Aset Tetap Lainnya
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	67.766.250,00
	Ditambah :	
	1. Puskesmas Poncokusumo Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD pada Beban Sewa Audio Visual	1.609.500,00
b.	Jumlah Ditambah (1)	
	Dikurang:	
c.	Jumlah Dikurang	0,00
d.	Beban Sewa Aset tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	69.375.750,000
e.	Selisih Antara Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Lra Dan Beban Sewa Aset Tetap Lainnya-Lo (a-d)	(1.609.750,00)

g. Beban Jasa Konsultasi Kontruksi

Beban Jasa Konsultasi Kontruksi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.758.153.388,00 sedangkan Beban Jasa Konsultasi Kontruksi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.675.476.911,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.082.676.477,00 atau 9,18% terdiri dari:

Tabel 187 Daftar Rincian Beban Jasa Konsultasi Kontruksi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenalkan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	6.889.000,00	(100,00)
2.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural	620.169.243,00	4.118.385.056,00	(84,94)
3.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan	0,00	15.065.409,00	(100,00)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
	Bangunan Gedung			
4.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	7.323.131.638,00	0,00	100,00
5.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.852.534.169,00	3.866.684.645,00	(52,09)
6.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	8.036.408.550,00	7.758.920.528,00	3,58
7.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	92.698.000,00	0,00	100,00
8.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	0,00	135.325.650,00	(100,00)
9.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa Lainnya	12.215.550,00	13.338.204,00	(8,42)
10.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.115.186.800,00	198.863.150,00	460,78
11.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	160.752.200,00	(100,00)
12.	Beban Jasa Konsultansi	94.893.900,00	299.236.000,00	(68,29)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenalkan/ (Penurunan) (%)
	Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang			
13.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	38.429.250,00	408.807.238,00	(90,60)
14.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.001.051.011,00	2.363.364.570,00	111,61
15.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	184.481.445,00	1.451.222.323,00	(87,29)
16.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	301.268.732,00	1.489.850.998,00	(79,78)
17.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	0,00	7.559.100,00	(100,00)
18.	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	2.040.100,00	0,00	100,00
19.	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	815.850,00	2.100.000,00	(61,15)
20.	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	82.829.150,00	308.451.840,00	(73,15)
21.	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa	0,00	49.839.000,00	(100,00)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaiikan / (Penurunan) (%)
	Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan			
22.	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	0,00	20.822.000,00	(100,00)
TOTAL		24.758.153.388,00	22.675.476.911,00	9,18

Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.634.975.688,00 berbeda dengan Beban Jasa Konsultasi Kontruksi-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.758.153.388,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 188 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja Jasa Konsultasi dan Beban Jasa Konsultasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Jasa Konsultasi	24.634.975.688,00
	Ditambah :	
1.	Puskesmas Kalipare Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	4.415.000,00
2.	Puskesmas Kasembon Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	695.000,00
3.	Puskesmas Kapanjen Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	4.533.600,00
4.	Puskesmas Ngajum Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	815.850,00
5.	Puskesmas Pagelaran Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	2.040.100,00
6.	Puskesmas Wagir Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.741.700,00
7.	Puskesmas Wagir Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.950.000,00
8.	Puskesmas Wajak Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	3.877.550,00
9.	RSUD Kanjuruhan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa	445.015.650,00

No	Uraian	Nilai
	Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	
10.	RSUD Kanjuruhan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	215.637.480,00
b.	Jumlah Ditambah (1-10)	681.721.930,00
	Dikurang:	
1.	RSUD Kanjuruhan Terdapat koreksi atas kelebihan pencatatan Beban Jasa Konsultansi atas Belanja Jasa Konsultansi yang sudah dikapitalisasi pada Gedung Bangunan	369.963.000,00
2.	RSUD Kanjuruhan Terdapat koreksi atas kelebihan pencatatan Beban Jasa Konsultansi atas Belanja Jasa Konsultansi yang sudah dikapitalisasi pada Gedung Bangunan	188.581.230,00
c.	Jumlah Dikurang	558.544.230,00
d.	Beban Jasa Konsultasi Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	24.758.153.388,00
e.	Selisih Antara Belanja Jasa Konsultasi-Lra Dan Beban Jasa Konsultasi-Lo (a-d)	(123.177.700)

h. Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi

Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.862.916.260,00 sedangkan Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.966.597.865,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.968.355.955,00 atau 33,76% terdiri dari:

Tabel 189 Daftar Rincian Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenalkan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	298.528.000,00	14.950.000,00	1.896,84
2.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	278.183.206,00	(100,00)
3.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	68.200.000,00	0,00	100,00
4.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi	68.919.900,00	0,00	100,00

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
	Bidang- Kependudukan			
5.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	108.412.500,00	213.455.682,00	(49,21)
6.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan	1.051.305.250,00	960.714.897,00	9,43
7.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	49.816.800,00	833.259.270,00	(94,02)
8.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	503.772.000,00	1.244.750.585,00	(59,53)
9.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	1.614.439.210,00	216.864.000,00	644,45
10.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	99.522.600,00	2.019.495.575,00	(95,070)
11.	Beban Jasa Konsultansi Layanan Keparwisataaan – Jasa Konsultasi Perencanaan Keparwisataaan	0,00	49.599.000,00	(100,00)
TOTAL		3.862.916.260,00	5.831.272.215,00	(33,76)

Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.868.491.310,00 berbeda dengan Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.862.916.260,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 190 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi dan Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	2.868.491.310,00
	<i>Ditambah :</i>	
	1. Puskesmas Dampit	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 27.800.000,00
	2. Puskesmas Kasembon	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Ketuanan 9.900.000,00
	3. Puskesmas Pagelaran	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 2.295.000,00
	4. RSUD Kanjuruhan	Utang Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 184.688.000,00
	5. RSUD Kanjuruhan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 769.741.950,00
b.	Jumlah Ditambah	994.424.950,00
	<i>Dikurang:</i>	
c.	Jumlah Dikurang	0,00
d.	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	3.862.916.260,00
e.	Selisih Antara Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi - Lra Dan Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi -Lo (a-d)	(994.424.950)

i. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban Beasiswa Pendidikan PNS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp204.796.205,00 sedangkan Beban Beasiswa Pendidikan PNS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp272.600.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp80.703.795,00 atau 28,27% terdiri dari :

Tabel 191 Daftar Rincian Beban Beasiswa Pendidikan PNS Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	112.196.205,00	242.900.000,00	(53,81)
2.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	92.600.000,00	42.600.000,00	117,37
	TOTAL	204.796.205,00	285.500.000,00	(28,27)

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.600.000,00 berbeda dengan Beban Beasiswa Pendidikan PNS-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp204.796.205,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 192 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dan Beban Beasiswa Pendidikan PNS

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	42.600.000,00
	Ditambah :	
	1. RSUD Kanjuruhan	Reklasifikasi Beban Barang Jasa BLUD pada Beban Beasiswa Tugas Belajar S3 50.000.000,00
	2. RSUD Lawang	Reklasifikasi Beban Barang Jasa BLUD pada Beban Beasiswa Tugas Belajar S1 112.196.205,00
b.	Jumlah Ditambah	162.196.205,00
	Dikurang:	
c.	Jumlah Dikurang	0,00
d.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	204.796.205,00
e.	Selisih Antara Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Lra Dan Beban Beasiswa Pendidikan-Lo (a-d)	(162.196.205,00)

- j. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 8.175.928.419,00, Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.158.677.202,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.030.151.217,00 atau 14,42% terdiri dari:

Tabel 193 Daftar Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan / (Penurunan) (%)
1.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	7.850.464.419,00	4.702.198.648,00	66,95
2.	Beban Bimbingan Teknis	144.700.000,00	2.443.578.554,00	(94,08)
3.	Beban Diklat Kepemimpinan	180.764.000,00	0,00	100,00

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
	TOTAL	8.175.928.419,00	7.145.777.202,00	14,42

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.501.981.695,00 berbeda dengan Beban Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.175.928.419,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 194 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dengan Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.501.981.695,00
	<i>Ditambah :</i>	
1.	Puskesmas Ampelgading Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	10.900.000,00
2.	Puskesmas Ardimulyo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	14.800.000,00
3.	Puskesmas Bantur Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	9.900.000,00
4.	Puskesmas Bululawang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	80.646.200,00
5.	Puskesmas Dampit Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	11.350.000,00
6.	Puskesmas Dau Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	19.350.000,00
7.	Puskesmas Donomulyo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Bimbingan Teknis	14.850.000,00
8.	Puskesmas Gedangan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	20.102.500,00
9.	Puskesmas Gondanglegi Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	4.800.000,00
10.	Puskesmas Gondanglegi Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Bimbingan Teknis	9.900.000,00
11.	Puskesmas Jabung Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.250.000,00
12.	Puskesmas Jabung Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Bimbingan Teknis	14.850.000,00

No	Uraian	Nilai
13.	Puskesmas Kalipare Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Bimbingan Teknis	9.900.000,00
14.	Puskesmas Karangploso Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	12.550.000,00
15.	Puskesmas Kasembon Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	750.000,00
16.	Puskesmas Kepanjen Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Bimbingan Teknis	22.650.000,00
17.	Puskesmas Ketawang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	4.850.000,00
18.	Puskesmas Ketawang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Bimbingan Teknis	9.900.000,00
19.	Puskesmas Kromengan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	250.000,00
20.	Puskesmas Kromengan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Bimbingan Teknis	9.900.000,00
21.	Puskesmas Lawang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	11.100.000,00
22.	Puskesmas Ngantang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	10.500.000,00
23.	Puskesmas Pagak Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	27.882.400,00
24.	Puskesmas Pagelaran Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	5.160.000,00
25.	Puskesmas Pagelaran Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Bimbingan Teknis	10.200.000,00
26.	Puskesmas Pakis Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	13.200.000,00
27.	Puskesmas Pakisaji Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	9.900.000,00
28.	Puskesmas Pakisaji Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Bimbingan Teknis	7.900.000,00
29.	Puskesmas Pamotan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	4.500.000,00
30.	Puskesmas Poncokusumo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	32.000.000,00
31.	Puskesmas Poncokusumo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Bimbingan Teknis	14.850.000,00
32.	Puskesmas Pujon Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	11.550.000,00
33.	Puskesmas Singosari Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	10.750.000,00
34.	Puskesmas Sitlarjo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	9.900.000,00

No	Uraian	Nilai
35. Puskesmas Sumbermanjing Kulon	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	9.900.000,00
36. Puskesmas Sumbermanjing Wetan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	11.150.000,00
37. Puskesmas Sumberpucung	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	9.900.000,00
38. Puskesmas Tirtoyudo	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	25.863.000,00
39. Puskesmas Tumpang	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.350.000,00
40. Puskesmas Tumpang	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Bimbingan Teknis	9.900.000,00
41. Puskesmas Turen	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	19.852.500,00
42. Puskesmas Wagir	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	18.350.000,00
43. Puskesmas Wajak	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	15.695.000,00
44. Puskesmas Wonokerto	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	8.700.000,00
45. Puskesmas Wonokerto	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Bimbingan Teknis	9.900.000,00
46. Puskesmas Wonosari	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	11.150.000,00
47. Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	502.562.240,00
48. Puskesmas Ngajum	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	16.100.000,00
49. Puskesmas Tajinan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	19.800.000,00
50. RSUD Kanjuruhan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.520.932.884,00
b.	Jumlah Ditambah	2.673.946.724,00
	Dikurang	
c.	Jumlah Dikurang	0,00
d.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	8.175.928.419,00
e.	Selisih Antara Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS-Lra Dan Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS-Lo (a-d)	(2.673.946.724,00)

k. Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN

Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.361.827.773,00. Beban Jasa Insentif bagi

Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.025.000.000,00. mengalami kenaikan sebesar Rp336.827.773,00 atau 32,86% terdiri dari:

Tabel 195 Daftar Rincian Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	67.500.000,00	90.000.000,00	(25,00)
2.	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	13.500.000,00	(100,00)
3.	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	494.250.000,00	581.000.000,00	(14,93)
4.	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	4.500.000,00	(100,00)
5.	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Air Tanah	0,00	4.500.000,00	(100,00)
6.	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	1.500.000,00	(100,00)
7.	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	717.577.773,00	0,00	100,00
8.	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	82.500.000,00	330.000.000,00	(75,00)
TOTAL		1.361.827.773,00	1.025.000.000,00	32,86

l. Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi

Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp433.655,00. Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp433.655,00 atau 100% terdiri dari:

Tabel 196 Daftar Rincian Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum	433.655,00	0,00	100,00
TOTAL		433.655,00	0,00	100,00

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 berbeda dengan Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp433.655,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 197 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi dan Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN	0,00
	<i>Ditambah :</i>	
	1. Puskesmas Kasembon Reklasifikasi barang dan jasa BLUD pada Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Kesehatan	433.655,00
b.	<i>Jumlah Ditambah</i>	433.655,00
	<i>Dikurang:</i>	
c.	<i>Jumlah Dikurang</i>	0,00
d.	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	433.655,00
e.	Selisih Antara Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN -Lra Dan Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN -Lo (a-d)	(433.655,00)

4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp134.749.677.345,17 sedangkan Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp139.591.531.945,64 mengalami penurunan sebesar Rp4.841.854.600,47 atau 3,47% Pengakuan Beban Pemeliharaan sebesar Rp134.749.677.345,17 dipergunakan untuk Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi, Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya antara lain:

Tabel 198 Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	209.085.190,00	0,00	100,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.023.437.737,68	38.824.315.644,48	(12,37)
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31.163.428.828,67	25.184.586.413,12	23,74
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	61.672.441.968,82	74.944.996.888,04	(17,71)
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.641.483.620,00	637.633.000,00	1.098,41
6.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	39.800.000,00	0,00	100,00
	TOTAL	134.749.677.345,17	139.591.531.945,64	(3,47)

Belanja Pemeliharaan-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp102.824.890.736,00 berbeda dengan Beban Pemeliharaan-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp143.266.205.945,17 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 199 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja
Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Pemeliharaan	102.824.890.736,00
	Ditambah :	
1.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	23.007.000,00
2.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	322.069.900,00
3.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	2.038.638.997,00
4.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.045.181.460,00
5.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	3.297.697.613,00
6.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	479.960.125,00
7.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	472.200.126,00
8.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	732.457.941,00
9.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.330.000,00
10.	Dinas Pendidikan Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	34.232.000,00
11.	Dinas Pendidikan Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	34.034.300,00
12.	Dinas Pendidikan Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	16.770.000,00
13.	Dinas Pendidikan Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	122.835.900,00
14.	Dinas Pendidikan Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	1.262.100,00
15.	Dinas Pendidikan Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	193.800,00
16.	Dinas Pendidikan Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	25.258.450,00
17.	Dinas Pendidikan Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	51.137.800,00
18.	Dinas Pendidikan Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	114.236.600,00

No	Uraian	Nilai
19. Dinas Pendidikan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	112.953.700,00
20. Dinas Pendidikan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	22.911.500,00
21. Dinas Pendidikan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	63.320.500,00
22. Dinas Pendidikan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	9.750.000,00
23. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	2.208.243.610,00
24. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	2.189.470.260,00
25. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	164.522.175,00
26. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	20.248.350,00
27. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	92.976.692,00
28. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.578.784.319,00
29. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	156.782.962,00
30. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	9.620.000,00
31. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	128.357.004,00
32. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	40.216.000,00
33. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	22.116.200,00
34. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	17.145.000,00
35. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.126.962.148,00
36. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	5.765.000,00
37. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	238.757.300,00
38. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	97.918.000,00
39. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	109.239.000,00
40. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.414.974.450,00
41. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.965.427.769,00
42. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	348.669.400,00
43. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	1.745.000,00
44. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	26.598.700,00

No	Uraian	Nilai
45. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	118.373.000,00
46. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	33.924.600,00
47. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	275.985.176,00
48. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	61.293.200,00
49. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	64.951.850,00
50. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	3.168.610.849,00
51. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	3.165.810.951,00
52. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	185.988.350,00
53. Dinas Pendidikan	Jurnal Beban Belanja Barjas BOS	86.976.700,00
54. Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban pemeliharaan peralatan dan mesin secara terinci	8.970.038,00
55. Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban pemeliharaan peralatan dan mesin secara terinci	41.158.070,00
56. Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban pemeliharaan peralatan dan mesin secara terinci	260.000,00
57. Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban pemeliharaan peralatan dan mesin secara terinci	2.066.000,00
58. Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban pemeliharaan gedung dan bangunan secara terinci	103.496.500,00
59. Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban pemeliharaan peralatan dan mesin secara terinci	364.000,00
60. Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban pemeliharaan peralatan dan mesin secara terinci	1.300.500,00
61. Puskesmas Ampelgading	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	12.438.000,00
62. Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban pemeliharaan peralatan dan mesin secara terinci	12.350.000,00
63. Puskesmas Ardimulyo	Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	1.097.326,00
64. Puskesmas Ardimulyo	Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	1.105.400,00
65. Puskesmas Ardimulyo	Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	250.000,00
66. Puskesmas Ardimulyo	Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	59.000.000,00
67. Puskesmas Bantur	Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	1.955.000,00
68. Puskesmas Bantur	Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	1.175.000,00
69. Puskesmas Bantur	Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	5.895.000,00
70. Puskesmas Bantur	Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	21.815.000,00
71. Puskesmas Bantur	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	6.668.309,00

No	Uraian	Nilai
	Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	
72. Puskesmas Bantur	Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	3.030.000,00
73. Puskesmas Bantur	Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	60.000,00
74. Puskesmas Bantur	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.582.000,00
75. Puskesmas Bululawang	Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	23.024.588,00
76. Puskesmas Bululawang	Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	11.121.395,00
77. Puskesmas Bululawang	Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	518.500,00
78. Puskesmas Bululawang	Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	27.275.448,00
79. Puskesmas Bululawang	Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	315.239.624,00
80. Puskesmas Bululawang	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	800.000,00
81. Puskesmas Bululawang	Belanja Barang Dan Jasa Blud Puskesmas Bululawang	10.684.000,00
82. Puskesmas Bululawang	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	1.332.000,00
83. Puskesmas Bululawang	Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	3.921.250,00
84. Puskesmas Dampit	Pengakuan Beban Barang Jasa Blud	2.995.000,00
85. Puskesmas Dampit	Pengakuan Beban Barang Jasa Blud	9.107.535,00
86. Puskesmas Dampit	Pengakuan Beban Barang Jasa Blud	14.900.000,00
87. Puskesmas Dampit	Pengakuan Beban Barang Jasa Blud	1.650.000,00
88. Puskesmas Dampit	Pengakuan Beban Barang Jasa Blud	6.520.000,00
89. Puskesmas Dampit	Pengakuan Beban Barang Jasa Blud	1.270.000,00
90. Puskesmas Dau	Jurnal Pengakuan Beban Barjas Secara Terinci	9.134.883,00
91. Puskesmas Dau	Jurnal Pengakuan Beban Barjas Secara Terinci	5.720.000,00
92. Puskesmas Dau	Jurnal Pengakuan Beban Barjas Secara Terinci	900.000,00
93. Puskesmas Dau	Jurnal Pengakuan Beban Barjas Secara Terinci	4.625.000,00
94. Puskesmas Dau	Jurnal Pengakuan Beban Barjas Secara Terinci	32.097.100,00
95. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengeluaran Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	20.284.117,00
96. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Atas Pengakuan Hutang 2023	700.000,00
97. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengeluaran Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	6.112.000,00
98. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengeluaran Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	4.124.000,00
99. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengeluaran Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	2.160.000,00

No	Uraian	Nilai
100. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Atas Pengakuan Hutang 2023	500.000,00
101. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengeluaran Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	2.620.000,00
102. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Atas Pengakuan Hutang 2023	730.000,00
103. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengeluaran Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	796.500,00
104. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengeluaran Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	600.000,00
105. Puskesmas Donomulyo	Jurnal Pengeluaran Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	185.000,00
106. Puskesmas Gedangan	Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	17.936.100,00
107. Puskesmas Gedangan	Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	30.000,00
108. Puskesmas Gedangan	Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	450.000,00
109. Puskesmas Gedangan	Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	15.560.000,00
110. Puskesmas Gedangan	Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	1.150.000,00
111. Puskesmas Gedangan	Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	1.880.000,00
112. Puskesmas Gedangan	Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	50.000,00
113. Puskesmas Gedangan	Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	605.000,00
114. Puskesmas Gedangan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	63.064.872,00
115. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Pemeliharaan secara terinci	16.037.000,00
116. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Pemeliharaan secara terinci	2.450.000,00
117. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Pemeliharaan secara terinci	375.000,00
118. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Pemeliharaan secara terinci	2.823.400,00
119. Puskesmas Gondanglegi	pengakuan beban pemeliharaan gedung	69.920.186,00
120. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Pemeliharaan secara terinci	2.055.000,00
121. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Pemeliharaan secara terinci	1.200.000,00
122. Puskesmas Gondanglegi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	18.870.000,00
123. Puskesmas Gondanglegi	Pengakuan Beban Pemeliharaan secara terinci	7.484.675,00
124. Puskesmas Gondanglegi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	4.174.710,00
125. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	1.779.730,00
126. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	9.013.000,00

No	Uraian	Nilai
127. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	2.340.000,00
128. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	395.000,00
129. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	99.908.276,00
130. Puskesmas Jabung	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	2.525.000,00
131. Puskesmas Jabung	Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	111.000,00
132. Puskesmas Jabung	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	530.000,00
133. Puskesmas Jabung	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	17.482.500,00
134. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	13.954.000,00
135. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	2.152.200,00
136. Puskesmas Kalipare	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	32.398.000,00
137. Puskesmas Kalipare	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	69.984.890,00
138. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.250.000,00
139. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.489.000,00
140. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.050.000,00
141. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.940.000,00
142. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250.000,00
143. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.111.000,00
144. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.258.480,00
145. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.116.367,00
146. Puskesmas Karangploso	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	14.883.000,00
147. Puskesmas Karangploso	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	400.000,00
148. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pengakuan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.765.000,00
149. Puskesmas Kasembon	Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	204.000,00
150. Puskesmas Kasembon	Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	300.000,00

No	Uraian	Nilai
151. Puskesmas Kasembon	Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	5.055.000,00
152. Puskesmas Kasembon	Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	100.000,00
153. Puskesmas Kasembon	Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	15.000.000,00
154. Puskesmas Kasembon	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	10.338.500,00
155. Puskesmas Kepanjen	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	12.352.500,00
156. Puskesmas Kepanjen	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	8.503.000,00
157. Puskesmas Kepanjen	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	5.831.500,00
158. Puskesmas Kepanjen	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	10.253.000,00
159. Puskesmas Kepanjen	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	20.740.000,00
160. Puskesmas Kepanjen	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	1.115.000,00
161. Puskesmas Kepanjen	Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	98.866.027,00
162. Puskesmas Kepanjen	Jurnal Mencatat Hutang Pemeliharaan Gedung 2023	2.371.515,00
163. Puskesmas Ketawang	Merinci beban pemeliharaan	2.433.000,00
164. Puskesmas Ketawang	Merinci beban pemeliharaan	6.455.050,00
165. Puskesmas Ketawang	Merinci beban pemeliharaan	2.870.000,00
166. Puskesmas Ketawang	Merinci beban pemeliharaan	2.775.000,00
167. Puskesmas Ketawang	Merinci beban pemeliharaan	4.920.000,00
168. Puskesmas Ketawang	Merinci beban pemeliharaan	51.786.957,00
169. Puskesmas Ketawang	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	320.000,00
170. Puskesmas Ketawang	Merinci beban pemeliharaan	2.365.000,00
171. Puskesmas Ketawang	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	11.250.000,00
172. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	12.247.008,00
173. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	500.000,00
174. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	600.000,00
175. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	3.660.000,00
176. Puskesmas Kromengan	Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	8.925.000,00
177. Puskesmas Lawang	Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	1.013.000,00
178. Puskesmas Lawang	Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	1.150.000,00

No	Uraian	Nilai
179. Puskesmas Lawang	Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	5.182.180,00
180. Puskesmas Lawang	Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	14.978.745,00
181. Puskesmas Lawang	Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	74.538.470,00
182. Puskesmas Lawang	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.674.027,00
183. Puskesmas Ngajum	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	14.175.000,00
184. Puskesmas Ngajum	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	839.434,00
185. Puskesmas Ngajum	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	910.000,00
186. Puskesmas Ngajum	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	3.730.000,00
187. Puskesmas Ngajum	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	6.833.500,00
188. Puskesmas Ngajum	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	1.896.000,00
189. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	780.000,00
190. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	1.780.000,00
191. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	225.000,00
192. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	2.600.000,00
193. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	119.437.979,00
194. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	1.987.487,00
195. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	2.365.000,00
196. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	710.000,00
197. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	12.652.876,00
198. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja pemeliharaan	8.662.023,00
199. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja pemeliharaan	16.018.647,00
200. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja pemeliharaan	4.024.150,00
201. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja pemeliharaan	36.257.113,00
202. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja pemeliharaan	40.332.670,00
203. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	75.932.961,00
204. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	24.581.900,00

No	Uraian	Nilai
205. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	5.088.200,00
206. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	4.975.000,00
207. Puskesmas Pakis	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	220.000,00
208. Puskesmas Pakis	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	750.000,00
209. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	3.955.147,00
210. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	15.353.652,00
211. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	2.465.000,00
212. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	4.015.000,00
213. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	149.942.160,00
214. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	675.000,00
215. Puskesmas Pakisaji	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	390.631.036,00
216. Puskesmas Pakisaji	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	30.753.000,00
217. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	12.527.276,00
218. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	3.141.000,00
219. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	850.000,00
220. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	2.790.000,00
221. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	1.200.000,00
222. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	85.514.503,00
223. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	6.743.250,00
224. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	1.380.000,00
225. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	150.000,00
226. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	14.559.635,00
227. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	13.845.000,00
228. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	26.835.000,00
229. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	117.555.421,00
230. Puskesmas Poncokusumo	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.320.971,00
231. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	8.237.200,00

No	Uraian	Nilai
232. Puskesmas Poncokusumo	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	3.810.000,00
233. Puskesmas Poncokusumo	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	1.620.000,00
234. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	7.290.000,00
235. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	2.274.000,00
236. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	473.000,00
237. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	325.000,00
238. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	4.300.000,00
239. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	2.360.000,00
240. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	160.321.550,51
241. Puskesmas Pujon	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	1.500.000,00
242. Puskesmas Pujon	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	5.935.000,00
243. Puskesmas Pujon	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	6.771.000,00
244. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	10.315.000,00
245. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	9.342.000,00
246. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	2.148.000,00
247. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	13.493.887,00
248. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	171.963.766,00
249. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	1.266.450,00
250. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	6.425.000,00
251. Puskesmas Singosari	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	2.250.000,00
252. Puskesmas Sitlarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	6.704.003,00
253. Puskesmas Sitlarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	1.575.000,00

No	Uraian	Nilai
254. Puskesmas Sitiarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	1.675.000,00
255. Puskesmas Sitiarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	19.560.000,00
256. Puskesmas Sitiarjo	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	435.000,00
257. Puskesmas Sitiarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	50.000,00
258. Puskesmas Sitiarjo	Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	50.000,00
259. Puskesmas Sitiarjo	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	1.975.000,00
260. Puskesmas Sitiarjo	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	2.190.000,00
261. Puskesmas SumbermanjingKulon	Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	1.303.000,00
262. Puskesmas SumbermanjingKulon	Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	1.721.000,00
263. Puskesmas SumbermanjingKulon	Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	27.562.160,00
264. Puskesmas SumbermanjingWetan	Adj Beban Jasa	23.372.500,00
265. Puskesmas SumbermanjingWetan	Adj Beban Jasa	18.853.750,00
266. Puskesmas SumbermanjingWetan	Adj Beban Jasa	50.000,00
267. Puskesmas SumbermanjingWetan	Adj Beban Jasa	3.805.000,00
268. Puskesmas SumbermanjingWetan	Adj Beban Jasa	3.328.200,00
269. Puskesmas SumbermanjingWetan	Adj Beban Jasa	156.560.149,00
270. Puskesmas SumbermanjingWetan	Adj Beban Jasa	1.000.000,00
271. Puskesmas SumbermanjingWetan	Adj Beban Jasa	5.276.000,00
272. Puskesmas Sumberpucung	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	3.836.216,00
273. Puskesmas Sumberpucung	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	1.800.000,00
274. Puskesmas Sumberpucung	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	2.450.000,00
275. Puskesmas Sumberpucung	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	50.024.306,00
276. Puskesmas Sumberpucung	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	1.100.000,00
277. Puskesmas Sumberpucung	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	9.978.000,00
278. Puskesmas Tajinan	Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	4.150.000,00

No	Uraian	Nilai
279. Puskesmas Tajinan	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.050.000,00
280. Puskesmas Tajinan	Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	13.675.000,00
281. Puskesmas Tajinan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	42.500.000,00
282. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	18.168.030,00
283. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	2.500.000,00
284. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	1.979.000,00
285. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	73.642.942,00
286. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	12.517.000,00
287. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	7.040.400,00
288. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	4.465.000,00
289. Puskesmas Tumpang	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	282.139.024,00
290. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	9.448.000,00
291. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	1.300.000,00
292. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	2.850.000,00
293. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	551.000,00
294. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	7.340.000,00
295. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	3.550.000,00
296. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	224.969.654,04
297. Puskesmas Turen	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	9.283.518,00
298. Puskesmas Turen	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Urit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	410.000,00
299. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	6.295.000,00
300. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	600.000,00
301. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	1.940.000,00
302. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	68.788.032,00
303. Puskesmas Wagir	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.500.000,00
304. Puskesmas Wagir	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	2.400.000,00

No	Uraian	Nilai
305. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	4.839.600,00
306. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	1.720.000,00
307. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	1.655.000,00
308. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	7.881.000,00
309. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	6.380.000,00
310. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	28.786.680,00
311. Puskesmas Wajak	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	60.000,00
312. Puskesmas Wajak	Adj Beban Barjas Blud	5.740.000,00
313. Puskesmas Wajak	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	528.000,00
314. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci beban barang dan jasa ke rincian objek tahun 2023	5.482.000,00
315. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci beban barang dan jasa ke rincian objek tahun 2023	7.862.130,00
316. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci beban barang dan jasa ke rincian objek tahun 2023	95.000,00
317. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci beban barang dan jasa ke rincian objek tahun 2023	6.333.700,00
318. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci beban barang dan jasa ke rincian objek tahun 2023	600.000,00
319. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci beban barang dan jasa ke rincian objek tahun 2023	1.450.000,00
320. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci beban barang dan jasa ke rincian objek tahun 2023	2.855.000,00
321. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci beban barang dan jasa ke rincian objek tahun 2023	89.337.975,00
322. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci beban barang dan jasa ke rincian objek tahun 2023	85.000,00
323. Puskesmas Wonokerto	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	1.450.000,00
324. Puskesmas Wonokerto	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	2.850.000,00
325. Puskesmas Wonosari	Jurnal pengakuan beban jasa secara terinci	16.396.400,00
326. Puskesmas Wonosari	Jurnal pengakuan beban jasa secara terinci	9.935.000,00
327. Puskesmas Wonosari	Jurnal pengakuan beban jasa secara terinci	70.588.383,00
328. Puskesmas Wonosari	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.954.091,00

No	Uraian	Nilai
329. RSUD Kanjuruhan	Reklas Beban Barang Jasa BLUD	79.637.711,00
330. RSUD Kanjuruhan	Reklas Beban Barang Jasa BLUD	849.511.488,00
331. RSUD Kanjuruhan	Reklas Beban Barang Jasa BLUD	2.038.025.867,68
332. RSUD Kanjuruhan	Hutang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum 2023	79.401.811,00
333. RSUD Kanjuruhan	Reklas Beban Barang Jasa BLUD	1.654.250.426,99
334. RSUD Kanjuruhan	Reklas Beban Barang Jasa BLUD	105.109.437,00
335. RSUD Kanjuruhan	Reklas Beban Barang Jasa BLUD	62.758.916,82
336. RSUD Lawang	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.830.267,00
337. RSUD Lawang	jurnal reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD TA 2023	55.081.442,00
338. RSUD Lawang	jurnal reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD TA 2023	156.777.105,00
339. RSUD Lawang	jurnal hutang BLUD	23.414.330,00
340. RSUD Lawang	jurnal reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD TA 2023	385.763.091,00
341. RSUD Lawang	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	1.512.663.585,13
342. UPT Dana Bergulir	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.329.500,00
343. UPT Dana Bergulir	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	305.000,00
344. UPT Dana Bergulir	reklasifikasi beban barang dan jasa blud	330.000,00
345. UPT Lumbung Desa Modern	reklasifikasi beban barang dan jasa blud	450.000,00
b.	Jumlah Ditambah	40.109.632.441,17
	Dikurang:	
1. Dinas Pendidikan	Terdapat belanja modal buku yang dicatat lebih besar Rp52.000 daripada bukti asli pada SDN 5 Randuangung. Atas kelebihan ini telah dikembalikan Bendahara secara tunai saat cash opname	52.000,00
2. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Pemasangan Paving di RSUD Kanjuruhan oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/09/SP-KNS-LL/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/56.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 4 Desember 2023	385.012.750,00

No	Uraian	Nilai
3. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Lantai 2 Mal Pelayaran Publik Kabupaten Malang oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/02/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 640/02.BAST/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 29 Agustus 2023	198.999.850,00
4. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung UPT Metrologi Legal Kabupaten Malang oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/04/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/21.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	198.530.550,00
5. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Prasarana di Kawasan Kantor Bupati di Kepanjen oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/06/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 640/03.BAST/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 29 Agustus 2023	199.711.200,00
6. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Dau oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/08/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/24.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	199.280.550,00
7. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wagir oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/11/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/27.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	198.897.850,00
8. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Pujon oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/17/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/31.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	199.280.200,00
9. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Donomulyo oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/18/SPK-	197.790.100,00

No	Uraian	Nilai
	KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/32.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	
10. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Bantur oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/19/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/33.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	195.999.100,00
11. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Pendopo dan Sarpras Kantor Kecamatan Kalipare oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/22/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/36.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	198.722.850,00
12. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Kantor Kelurahan Pagentan Kec. Singosari oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/23/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/37.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	198.191.750,00
13. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepokosmuho Kec. Kepanjen oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/25/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/39.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	198.399.250,00
14. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Kantor Kelurahan Candirenggo Kec. Singosari oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/27/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/41.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	199.192.450,00
15. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Malang oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/33/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No.	149.646.400,00

No	Uraian	Nilai
	640/04.BAST/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 29 Agustus 2023	
16. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Gedung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/34/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/46.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	147.576.800,00
17. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendopo, Rumah Dinas, dan Pringgitan di Malang oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/05/SP-KNS-LL/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 11 September 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/61.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 19 Desember 2023	823.452.550,00
18. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Terdapat pekerjaan Rehabilitasi Gedung Komisi Pemilihan Umum Kab. Malang yang dipinjam dari Dinas Cipta Karya oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/07/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/23.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	199.644.050,00
19. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Terdapat pekerjaan Rehabilitasi Pengadilan Negeri Kepanjen oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/07/SP-KNS-LL/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 11 September 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/63.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 19 Desember 2023	474.576.750,00
20. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Gedung DPRD Kab. Malang oleh Dinas Perkim Cipta Karya	2.263.364.400,00
21. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Masjid di Kawasan Perkantoran Jl. Trunojoyo, Kepanjen oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/45/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/50.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	198.193.250,00
22. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/50/SPK-	98.896.000,00

No	Uraian	Nilai
	KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 640/10.BAST/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 29 Agustus 2023	
23. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP Negeri 2 Pagak oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/01/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 640/01.BAST/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 29 Agustus 2023	199.243.250,00
24. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung SDN 2 Ngadas Kec. Poncokusumo oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/47/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 640/08.BAST/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 29 Agustus 2023	198.556.150,00
25. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung SDN 04 Panggungrejo Kec. Kepanjen oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/37/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/48.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	147.902.450,00
26. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung SDN 01 Permaru Kec. Pakisaji oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/38/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/17.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 19 September 2023	148.626.900,00
27. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya	Reklasifikasi belanja pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pasar Sumedang di Kepanjen oleh Dinas Perkim Cipta Karya sesuai SPK No. 640/03/SPK-KNS/PRPB/35.07.111/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan BAST No. 600.1.15.2/20.BAST/PRPB/35.07.303/2023 tanggal 27 September 2023	198.796.700,00
28. RSUD Kanjuruhan	Hutang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan 2022	167.433.732,00
29. RSUD Lawang	Jurnal balik hutang barjas 2023	876.000,00
c.	Jumlah Dikurang	8.184.845.832,00
d.	Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	134.749.677.345,17

No	Uraian	Nilai
c.	Selisih Antara Belanja Pemeliharaan-Lra Dan Pemeliharaan-Lo (a-d)	(31.924.786.609,17)

5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp118.644.447.211,00 Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp130.292.311.682,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.647.864.471,00 atau 8,94% Pengakuan beban perjalanan dinas dipergunakan untuk Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terdiri dari:

Tabel 200 Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenalkan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	118.631.844.311,00	130.150.071.682,00	(8,85)
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	12.602.900,00	142.240.000,00	(91,14)
TOTAL		118.644.447.211,00	130.292.311.682,00	(8,94)

Beban Perjalanan Dinas dibayarkan/diberikan kepada pegawai terkait yang akan/sedang/telah melaksanakan tugas perjalanan dinas *at cost* atau *lumpsum*, sehingga sehingga seharusnya beban sama dengan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, namun berdasarkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp110.272.552.698,00 berbeda dengan Beban Perjalanan Dinas-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp118.644.447.211,00 sehingga dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 201 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Perjalanan Dinas	110.272.552.698,00
	Ditambah :	

No	Uraian	Nilai	
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Reklasifikasi atas Belanja Tidak Terduga	145.530.000,00
2.	Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.218.001.691,00
3.	Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.338.322.695,00
4.	Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	94.551.000,00
5.	Dinas Pendidikan	Reklasifikasi Barang dan Jasa BOS pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	218.080.780,00
6.	Puskesmas Ampelgading	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.656.000,00
7.	Puskesmas Ampelgading	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.240.000,00
8.	Puskesmas Ampelgading	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.000.000,00
9.	Puskesmas Ardimulyo	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.375.000,00
10.	Puskesmas Ardimulyo	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00
11.	Puskesmas Bantur	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.300.000,00
12.	Puskesmas Bantur	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00
13.	Puskesmas Bantur	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00
14.	Puskesmas Bululawang	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	820.000,00
15.	Puskesmas Bululawang	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.375.000,00
16.	Puskesmas Bululawang	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.000.000,00
17.	Puskesmas Dampit	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.875.000,00
18.	Puskesmas Dampit	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00
19.	Puskesmas Dampit	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00
20.	Puskesmas Dampit	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	500.000,00
21.	Puskesmas Dau	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000,00

No	Uraian	Nilai
22.	Puskesmas Dau Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.930.000,00
23.	Puskesmas Dau Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.500.000,00
24.	Puskesmas Dau Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00
25.	Puskesmas Donomulyo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.970.000,00
26.	Puskesmas Donomulyo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00
27.	Puskesmas Donomulyo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00
28.	Puskesmas Donomulyo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00
29.	Puskesmas Gedangan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.100.000,00
30.	Puskesmas Gedangan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.171.000,00
31.	Puskesmas Gedangan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00
32.	Puskesmas Gondanglegi Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00
33.	Puskesmas Gondanglegi Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.060.000,00
34.	Puskesmas Gondanglegi Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.230.981,00
35.	Puskesmas Jabung Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.998.500,00
36.	Puskesmas Jabung Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.925.000,00
37.	Puskesmas Jabung Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00
38.	Puskesmas Kalipare Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	439.095.000,00
39.	Puskesmas Kalipare Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00
40.	Puskesmas Karangploso Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.760.000,00
41.	Puskesmas Karangploso Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00
42.	Puskesmas Kasembon Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.375.000,00
43.	Puskesmas Kasembon Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00

No	Uraian	Nilai
44.	Puskesmas Keparjen Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.060.000,00
45.	Puskesmas Keparjen Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.356.000,00
46.	Puskesmas Ketawang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.580.000,00
47.	Puskesmas Ketawang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00
48.	Puskesmas Ketawang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.402.000,00
49.	Puskesmas Kromengan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.512.000,00
50.	Puskesmas Kromengan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.745.000,00
51.	Puskesmas Kromengan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00
52.	Puskesmas Kromengan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.625.000,00
53.	Puskesmas Lawang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.800.000,00
54.	Puskesmas Lawang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00
55.	Puskesmas Lawang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.375.000,00
56.	Puskesmas Ngajum Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	570.000,00
57.	Puskesmas Ngajum Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.800.000,00
58.	Puskesmas Ngajum Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00
59.	Puskesmas Ngajum Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.750.000,00
60.	Puskesmas Ngantang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	31.082.000,00
61.	Puskesmas Ngantang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.125.000,00
62.	Puskesmas Ngantang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00
63.	Puskesmas Pagak Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00
64.	Puskesmas Pagak Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00

No	Uraian	Nilai
65.	Puskesmas Pagelaran Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.223.500,00
66.	Puskesmas Pagelaran Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00
67.	Puskesmas Pagelaran Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.425.000,00
68.	Puskesmas Pakis Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.245.000,00
69.	Puskesmas Pakis Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000,00
70.	Puskesmas Pakisaji Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.657.000,00
71.	Puskesmas Pakisaji Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.375.000,00
72.	Puskesmas Pakisaji Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.000.000,00
73.	Puskesmas Pakisaji Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.625.000,00
74.	Puskesmas Pamotan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.280.000,00
75.	Puskesmas Pamotan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.207.000,00
76.	Puskesmas Pamotan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00
77.	Puskesmas Poncokusumo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.143.500,00
78.	Puskesmas Poncokusumo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.750.000,00
79.	Puskesmas Poncokusumo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.750.000,00
80.	Puskesmas Poncokusumo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00
81.	Puskesmas Pujon Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.171.500,00
82.	Puskesmas Pujon Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.375.000,00
83.	Puskesmas Pujon Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00
84.	Puskesmas Singosari Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000,00
85.	Puskesmas Singosari Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.045.000,00
86.	Puskesmas Singosari Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00

No	Uraian	Nilai
87.	Puskesmas Singosari Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.500.000,00
88.	Puskesmas Sitarjo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.250.000,00
89.	Puskesmas Sitarjo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00
90.	Puskesmas Sumbermanjing Kulon Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.460.000,00
91.	Puskesmas Sumbermanjing Kulon Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00
92.	Puskesmas Sumbermanjing Wetan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.356.000,00
93.	Puskesmas Sumbermanjing Wetan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.685.000,00
94.	Puskesmas Sumbermanjing Wetan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00
95.	Puskesmas Sumberpucung Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.840.000,00
96.	Puskesmas Sumberpucung Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.200.000,00
97.	Puskesmas Sumberpucung Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00
98.	Puskesmas Tajinan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00
99.	Puskesmas Tajinan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.840.000,00
100.	Puskesmas Tajinan Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.620.000,00
101.	Puskesmas Tirtoyudo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.275.000,00
102.	Puskesmas Tirtoyudo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.000.000,00
103.	Puskesmas Tirtoyudo Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.200.000,00
104.	Puskesmas Tumpang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.375.000,00
105.	Puskesmas Tumpang Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00
106.	Puskesmas Turen Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.000.000,00
107.	Puskesmas Turen Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.716.000,00
108.	Puskesmas Wagir Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.125.000,00

No	Uraian	Nilai
109. Puskesmas Wagir	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.375.000,00
110. Puskesmas Wagir	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.000.000,00
111. Puskesmas Wajak	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Biasa	650.000,00
112. Puskesmas Wajak	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.675.000,00
113. Puskesmas Wajak	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00
114. Puskesmas Wonokerto	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.737.000,00
115. Puskesmas Wonokerto	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00
116. Puskesmas Wonokerto	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00
117. Puskesmas Wonosari	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.905.000,00
118. Puskesmas Wonosari	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.750.000,00
119. Puskesmas Wonosari	Reklasifikasi Barang dan Jasa BLUD pada Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00
120. RSUD Kanjuruhan	Reklas Beban Barang Jasa BLUD	12.757.000,00
121. RSUD Kanjuruhan	Reklas Beban Barang Jasa BLUD	70.277.000,00
122. RSUD Kanjuruhan	Reklas Beban Barang Jasa BLUD	751.532.175,00
123. RSUD Lawang	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	129.110.000,00
124. RSUD Lawang	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	44.559.691,00
125. RSUD Lawang	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17.782.500,00
126. UPT Dana Bergulir	Beban Perjalanan Dinas Biasa	18.690.000,00
127. UPT Dana Bergulir	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.500.000,00
b.	Jumlah Ditambah	9.145.039.513,00
	Dikurang:	
1. Dinas Kesehatan	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	352.000.000,00
2. Puskesmas Kalipare	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	415.395.000,00
3. RSUD Lawang	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.750.000,00
c.	Jumlah Dikurang	773.145.000,00
d.	Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	118.644.447.211,00
e.	Selisih Antara Belanja Perjalanan Dinas-Lra Dan Beban Perjalanan Dinas-Lo (a-d)	(8.371.894.513,00)

6. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Anggaran 2023 sebesar Rp56.932.961.234,00 sedangkan Beban Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.491.578.972,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.441.382.262,00 atau 15,04% terdiri dari:

Tabel 202 Daftar Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenalkan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.412.203.450,00	30.189.590.779,00	40,49
2.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.520.757.784,00	19.301.988.193,00	(24,77)
TOTAL		56.932.961.234,00	49.491.578.972,00	15,04

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.639.053.450,00 dengan Beban Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp56.932.961.234,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 203 Rincian Penjelasan Selisih Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.639.053.450,00
Ditambah :		
1.	Dinas Pendidikan Beban Beasiswa	9.822.750.000,00
2.	Puskesmas Donomulyo Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	27.999.574,00

No	Uraian	Nilai	
3.	Puskesmas Lawang	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	39.567.240,00
4.	Puskesmas Pakisaji	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	155.614.970,00
5.	Puskesmas Tajinan	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	143.976.000,00
6.	RSUD Kanjuruhan	Reklas Beban Barang Jasa BLUD	104.000.000,00
b.	Jumlah Ditambah (1-6)		10.293.907.784,00
	Dikurang:		
c.	Jumlah Dikurang		0,00
d.	Beban Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)		56.932.961.234,00
e.	Selisih Antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -Lra Dan Beban Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -Lo (a-d)		(10.293.907.784,00)

7. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00, sedangkan Beban Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.733.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp9.733.000,00 atau 100% terdiri dari:

Tabel 204 Daftar Beban Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	9.733.000,00	(100,00)
	TOTAL	0,00	9.733.000,00	(100,00)

Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp261.746.059.346,61, sedangkan Beban Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Selisih antara Belanja Barang dan Jasa BOS dengan Beban Barang dan Jasa BOS disebabkan karena pada Laporan Operasional Beban Barang dan Jasa di reklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Adapun penjelasan terkait selisih Belanja Barang dan Jasa BOS dengan Beban Barang dan Jasa BOS dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 205 Rincian Penjelasan Selisih Belanja Barang dan Jasa BOS dengan Beban Barang dan Jasa BOS

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Barang dan Jasa BOS	261.746.059.346,61
	Ditambah :	
1.	Dinas Pendidikan Penyesuaian Kas Dana BOS pada Lembaga	819.175,00
b.	Jumlah Ditambah	819.175,00
	Dikurang:	
1.	Dinas Pendidikan	
	Beban Bahan-Bahan Baku	3.285.442.792,00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	11.067.571.116,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.098.119.549,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.239.384.364,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.924.620.549,10
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.731.444.686,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.077.102.284,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.295.674.563,00
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.532.345.003,51
	Beban Bahan-Bahan Kimia	5.259.308.340,00
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	117.729.260,00
	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6.054.456.196,00
	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	96.439.200,00
	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	49.468.200,00
	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	90.058.000,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.870.000,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	31.403.750,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	33.305.500,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	120.019.800,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	59.723.400,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	13.751.200,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	74.395.906,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	831.085.150,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.176.947.200,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.511.495.476,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.016.396.000,00
	Beban Obat-Obatan-Obat	179.680.670,00

No	Uraian	Nilai
	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	730.469.400,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.739.324.032,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	123.080.400,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.453.054.922,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	27.760.000,00
	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	7.090.000,00
	Beban Pakaian Penyelamatan	17.049.000,00
	Beban Pakaian Teknik	3.227.000,00
	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	3.037.500,00
	Beban Pakaian Kerja Bengkel	7.875.000,00
	Beban Pakaian Adat Daerah	809.560.300,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional	42.146.500,00
	Beban Pakaian Olahraga	51.536.000,00
	Beban Pakaian Paskibraka	120.850.000,00
	Beban Komponen-Komponen Peralatan	3.818.357.163,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.022.112.031,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	708.819.872,00
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.319.333.800,00
	Beban Honorarium Rohaniwan	287.984.840,00
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.324.186.700,00
	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	983.768.400,00
	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.527.446.372,00
	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	47.843.590.434,00
	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.069.411.800,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.430.741.991,00
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.950.628.040,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	4.045.535.685,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	604.934.082,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli	7.090.614.861,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.969.301.309,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	6.552.704.500,00
	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.217.944.200,00
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	41.411.700,00
	Beban Jasa Tata Kias	144.663.220,00
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	40.900.000,00
	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	399.483.052,00

No	Uraian	Nilai
	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	34.688.700,00
	Beban Jasa Pengolahan Sampah	113.720.700,00
	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Pungsi	104.981.100,00
	Beban Tagihan Telepon	1.568.788.749,00
	Beban Tagihan Air	1.326.093.716,00
	Beban Tagihan Listrik	1.475.962.396,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.004.391.475,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.706.501.645,00
	Beban Paket/Pengiriman	1.021.444.400,00
	Beban Penambahan Daya	117.146.100,00
	Beban Registrasi/Kearifan	115.372.300,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	50.578.300,00
	Beban Lembur	1.237.227.348,00
	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	34.787.000,00
	Beban Sewa Alat Pengangkat	38.141.200,00
	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	467.665.800,00
	Beban Sewa Electric Generating Set	3.464.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	89.831.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.800.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	78.685.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.600.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	301.315.973,00
	Beban Sewa Mebel	116.740.000,00
	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.490.000,00
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	18.215.000,00
	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.400.000,00
	Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	18.278.400,00
	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	15.794.000,00
	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	630.000,00
	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	34.352.600,00
	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	3.902.200,00
	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	7.024.000,00
	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	1.230.000,00
	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	45.821.000,00
	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	17.744.000,00
	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	10.600.000,00

No	Uraian	Nilai
	Beban Sewa Alat Peraga Kejuruan	9.300.000,00
	Beban Sewa Peralatan Umum	31.880.000,00
	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	432.139.158,00
	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	1.500.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.850.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12.690.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.000.000,00
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	502.562.240,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	23.007.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	322.069.900,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.038.638.997,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.045.181.460,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.297.697.613,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	479.960.125,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	472.200.126,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	732.457.941,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.330.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	34.232.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	34.034.300,00
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	16.770.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	122.835.900,00
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	1.262.100,00
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	193.800,00
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik	25.258.450,00

No	Uraian	Nilai
	Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	51.137.800,00
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	114.236.600,00
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	112.953.700,00
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	22.911.500,00
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	63.320.500,00
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	9.750.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	2.208.243.610,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.189.470.260,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	164.522.175,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	20.248.350,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	92.976.692,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.578.784.319,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	156.782.962,00
	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	9.620.000,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	128.357.004,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	40.216.000,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	22.116.200,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara	17.145.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.126.962.148,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	5.765.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat	238.757.300,00

No	Uraian	Nilai
	Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	97.918.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	109.239.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.414.974.450,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.965.427.769,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	348.669.400,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.745.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	26.598.700,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	118.373.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	33.924.600,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	275.985.176,00
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	61.293.200,00
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	64.951.850,00
	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	3.168.610.849,00
	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	3.165.810.951,00
	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	185.988.350,00
	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	86.976.700,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	218.080.780,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.218.001.691,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.338.322.695,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	94.551.000,00
	Beban Beasiswa	9.822.750.000,00

No	Uraian		Nilai
	Dinas Pendidikan	Terdapat pengesahan belanja BOS pada lembaga pendidikan dasar swasta (SMP PGRI Pakis) yang salah dicatat ke Beban Barjas BOS	136.776.768,00
c.	Jumlah Dikurang		261.746.878.521,61
d.	Beban Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)		0,00
e.	Selisih Antara Barang dan Jasa BOS-Lra Dan Beban Barang dan Jasa BOS-Lo (a-d)		261.746.059.346,61

8. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp166.400,62 sedangkan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,01 mengalami kenaikan sebesar Rp166.400,62 atau 100% terdiri dari:

Tabel 206 Daftar Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Barang dan Jasa BLUD	166.400,62	0,01	100,00
TOTAL		166.400,62	0,01	100,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp172.327.303.345,31 dengan Beban Barang dan Jasa BLUD-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp166.400,62 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 207 Rincian Penjelasan Selisih Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian		Nilai
a.	Belanja Barang dan Jasa BLUD		172.327.303.345,31
	Ditambah :		
	1. Puskesmas Kalipare	Beban Barang dan Jasa BLUD	584.352.568,00
b.	Jumlah Ditambah		584.352.568,00
	Dikurang :		
	1. Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban bahan habis pakai secara rinci	799.639.815,00
	2. Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban pemeliharaan 488edung dan bangunan secara terinci	103.496.500,00
	3. Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban perjalanan dinas secara terinci	71.896.000,00
	4. Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban jasa secara rinci	1.120.043.719,00
	5. Puskesmas Ampelgading	Jurnal pengakuan beban pemeliharaan peralatan dan mesin secara terinci	78.906.608,00

No	Uraian	Nilai
6.	Puskesmas Ardimulyo Jurnal Pengakuan Barang dan Jasa Terinci	981.571.015,28
7.	Puskesmas Bantur Jurnal Pengakuan Beban Secara Terinci	917.281.805,00
8.	Puskesmas Bantur Jurnal pengakuan belanja barang BLUD terinci	607.612.249,61
9.	Puskesmas Bululawang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.015.767.528,00
10.	Puskesmas Dampit pengakuan beban barang jasa blud	1.745.978.182,00
11.	Puskesmas Dau Jurnal pengakuan beban barjas secara terinci	1.383.551.305,06
12.	Puskesmas Donomulyo Jurnal pengeluaran beban barang dan jasa secara terinci	37.298.901,00
13.	Puskesmas Donomulyo Jurnal Pengeluaran Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	53.851.617,00
14.	Puskesmas Donomulyo Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	2.334.930.646,50
15.	Puskesmas Gedangan Beban Barang dan Jasa BLUD 2023 PKM Gedangan	1.859.932.961,00
16.	Puskesmas Gondanglegi Pengakuan Beban Jasa secara Terinci	933.111.254,55
17.	Puskesmas Gondanglegi Jurnal Pengakuan beban secara rinci	687.849.900,00
18.	Puskesmas Gondanglegi Pengakuan Beban Pemeliharaan secara terinci	51.295.075,00
19.	Puskesmas Gondanglegi Pengakuan beban perjalanan dinas	38.290.981,00
20.	Puskesmas Gondanglegi Pengakuan Beban Pemeliharaan Gedung	74.094.896,00
21.	Puskesmas Jabung Belanja Barang dan Jasa Pkm Jabung 2023	1.610.746.232,00
22.	Puskesmas Kalipare Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa secara terinci	2.688.873.126,94
23.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Barang Pakai Habis	473.629.580,00
24.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Jasa Kantor	777.395.741,00
25.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Iuran Jaminan/Asuransi	23.133.520,00
26.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.550.000,00
27.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.396.480,00
28.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.116.367,00
29.	Puskesmas Karangploso Jurnal Pengakuan Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.760.000,00
30.	Puskesmas Kasembon Pengakuan Beban Barang dan Jasa Secara Rinci	924.655.145,00
31.	Puskesmas Kepanjen Jurnal Pengakuan Beban Barang dan Jasa	1.906.394.363,00
32.	Puskesmas Ketawang Jurnal perincian atas beban barang	469.727.515,65
33.	Puskesmas Ketawang Merinci beban jasa	683.080.934,44
34.	Puskesmas Ketawang Merinci beban pemeliharaan	85.175.007,00
35.	Puskesmas Ketawang Merinci beban perjalanan dinas	26.982.000,00
36.	Puskesmas Kromengan Adjustment Atas Barang dan Jasa 2023	895.825.626,00
37.	Puskesmas Lawang Pengakuan Beban Barang Jasa Secara Rinci	1.627.453.404,66
38.	Puskesmas Ngajum Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terinci	1.526.579.181,00
39.	Puskesmas Ngantang Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa secara terinci (kecuali persediaan)	1.153.282.099,00

No	Uraian	Nilai
40. Puskesmas Ngantang	Jurnal Pengakuan beban barang dan jasa (Persediaan) secara terinci	451.973.921,00
41. Puskesmas Pagak	Adjustment Beban Barang dan Jasa	911.389.560,20
42. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja jasa	1.105.868.377,00
43. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja barang BLUD	624.677.734,94
44. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja pemeliharaan	105.294.603,00
45. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas perincian beban belanja perjalanan dinas	25.648.500,00
46. Puskesmas Pakis	Jurnal Persediaan Barang Dan Jasa Blud Secara Terinci	3.275.312.965,00
47. Puskesmas Pakisaji	Penyesuaian Rincian Atas Beban Barang dan Jasa	893.904.810,58
48. Puskesmas Pakisaji	Jurnal Rincian Beban Jasa	1.637.601.451,00
49. Puskesmas Pamotan	Jurnal Merinci Beban Barjas ke rincian Objek	1.922.488.818,00
50. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban barang secara terperinci	1.020.947.761,16
51. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal pengakuan beban jasa secara terperinci	1.758.418.191,00
52. Puskesmas Pujon	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Secara Terperinci	1.852.898.518,46
53. Puskesmas Singosari	jurnal merinci beban barang dan jasa ke sub rincian objek beban barjas tahun 2023	1.960.103.905,63
54. Puskesmas Sitiarjo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Dan Jasa Terinci	1.096.656.729,00
55. Puskesmas Sumbermanjing Kulon	Jurnal atas rincian beban barang dan jasa	1.108.314.837,00
56. Puskesmas Sumbermanjing Wetan	Adj Beban Barang	571.684.021,00
57. Puskesmas Sumbermanjing Wetan	Adj Beban Jasa	1.157.300.034,00
58. Puskesmas Sumberpucung	Jurnal Pengakuan Beban Barang Secara Terperinci	701.103.596,00
59. Puskesmas Sumberpucung	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Terinci	883.309.206,00
60. Puskesmas Tajinan	Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023	1.288.055.508,87
61. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Barang Secara Rinci	801.941.926,00
62. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Pengakuan Beban Jasa Secara Rinci	1.434.356.404,00
63. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal Koreksi Belanja Modal ke Rincian Beban Barang	5.425.000,00
64. Puskesmas Tumpang	Jurnal Atas Perincian Barang Dan Jasa Blud	2.626.890.252,00
65. Puskesmas Turen	Belanja Barang dan Jasa BLUD 2023	2.889.450.153,41
66. Puskesmas Wagir	Belanja Barang Dan Jasa Puskesmas Wagir Tahun 2023	1.739.877.676,42
67. Puskesmas Wajak	adj beban barjas blud	2.157.919.896,00
68. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Merinci beban barang dan jasa ke rincian objek tahun 2023	1.448.009.911,00
69. Puskesmas Wonosari	Jurnal Pengakuan Beban Barang Secara Rinci	386.872.683,00
70. Puskesmas Wonosari	Jurnal pengakuan beban jasa secara terinci	988.659.584,23
71. RSUD Kanjuruhan	Reklas Barang dan Jasa BLUD	60.264.538.746,68
72. RSUD Lawang	Hutang Belanja Barang dan Jasa BLUD 2022	42.383.472.965,42
73. UPT Dana Bergulir	Beban Barang dan Jasa BLUD	366.474.584,00

No	Uraian		Nilai
	74. UPT Lumbung Desa Modern	Beban Barang dan Jasa BLUD	111.489.400,00
c.	Jumlah Dikurang (1-74)		172.911.489.512,69
d.	Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)		166.400,62
e.	Selisih Antara Barang dan Jasa BLUD-Lra Dan Beban Barang dan Jasa BLUD-Lo (a-d)		172.327.136.944,69

9. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp327.876.039.281,00 sedangkan Beban Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp238.335.909.970,52 mengalami kenaikan sebesar Rp89.540.129.310,48 atau 37,57% dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 208 Daftar Rincian Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.049.280.900,00	3.005.852.795,00	34,71
2.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	160.142.497.801,00	150.711.942.768,52	6,26
3.	Beban Hibah Dana BOS	154.236.098.080,00	75.169.951.907,00	103,18
4.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	9.448.162.500,00	9.448.162.500,00	0,00
TOTAL		327.876.039.281,00	238.335.909.970,52	37,57

10. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengakuan Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.501.319.000,00 sedangkan Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.400.191.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp33.898.872.000,00 atau 53,47% dengan Rincian sebagai berikut.

Tabel 209 Daftar Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) [%]
1.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	18.843.920.000,00	43.213.450.000,00	(56,39)
2.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	7.453.299.000,00	7.846.741.000,00	(5,01)
3.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	3.204100.000,00	12.200.000.000,00	(73,74)
4.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Kegamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	140.000.000,00	(100,00)
TOTAL		29.501.319.000,00	63.400.191.000,00	(53,47)

11. Beban Penyisihan

Beban Penyisihan merupakan Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. Beban Penyisihan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48.999.945.768,52 merupakan beban penyisihan atas piutang pendapatan Tahun Anggaran 2023 sedangkan Beban Penyisihan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.464.967.302,17 mengalami penurunan sebesar Rp1.465.021.533,65 atau 2.90% Rincian Beban Penyisihan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 210 Rincian Beban Penyisihan
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaiikan/ (Penurunan) [%]
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	45.539.446.915,36	47.025.858.119,82	(3,16)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	742.789.622,88	1.129.621.648,04	(34,24)
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2.700.392.396,26	2.274.820.726,32	(66,93)
4.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	12.646.415,70	(100,00)
5.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	17.316.634,01	22.020.392,29	(21,36)
	Total	48.999.945.768,52	50.464.967.302,17	(2,90)

Belanja Penyisihan Piutang-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 berbeda dengan Beban Penyisihan Piutang-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp49.000.267.277,53 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 211 Rincian Penjelasan Selisih Belanja Penyisihan dan Beban Penyisihan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Penyisihan Piutang	0,00
	Ditambah :	
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 52.532,37
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	saldo akhir penyisihan piutang hasil kerjasama pemanfaatan BMD 5.682.266,00
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	saldo akhir penyisihan piutang TPTGR 301.138.942,70
4.	Badan Pendapatan Daerah	saldo akhir penyisihan piutang pajak daerah 9.866.615,98
5.	Badan Pendapatan Daerah	Saldo Akhir Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah 189.495,15
6.	Badan Pendapatan Daerah	Saldo akhir Penyisihan Pajak Pameran 347.203.901,74
7.	Badan Pendapatan Daerah	Saldo akhir Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron 27.057.230,89
8.	Badan Pendapatan Daerah	Saldo akhir Penyisihan Piutang Pajak Parkir 3.626.821,50
9.	Badan Pendapatan Daerah	Saldo akhir Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah 571.671,98
10.	Badan Pendapatan Daerah	Saldo akhir Penyisihan Piutang PBBP2 45.150.931.178,12

No	Uraian	Nilai
11. Badan Pendapatan Daerah	Saldo akhir Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan-Pajak Tontonan	81.613.685,04
12. Badan Pendapatan Daerah	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.658.463,91
13. Badan Pendapatan Daerah	Saldo akhir Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	758.139,96
14. Badan Pendapatan Daerah	Saldo akhir Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	38.698,19
15. Badan Pendapatan Daerah	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	28.500,00
16. Dinas Kesehatan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	95.750,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	21.187.885,00
18. Dinas Lingkungan Hidup	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.323.781,20
19. Dinas Pemuda dan Olahraga	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.900.000,00
20. Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	78.040,20
21. Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.494.922,10
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	32.048.394,00
23. Dinas Pendidikan	Mencatat piutang temuan inspektorat atas audit ketaatan TA 2022 sbb: 1) kelebihan realisasi pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sekolah 2) Kemahalan harga Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sekolah	58.165,84
24. Dinas Perhubungan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Perediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	514.855,00
25. Dinas Perhubungan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	55.874,88

No	Uraian	Nilai
26. Dinas Perhubungan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir	562.900,00
27. Dinas Perhubungan	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	62.795,38
28. Dinas Perikanan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan	1.738.304.301,85
29. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	75.700.000,00
30. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	1.090,00
31. Kecamatan Buhulawang	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	131.841,00
32. Kecamatan Buhulawang	Mencatat penyisihan piutang atas temuan inspektorat pada audit ketaatan TA 2022 sbb: 1) kelebihan realisasi pembayaran belanja jasa kebersihan 2) belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan 3) kegiatan tidak dapat diyakini kebenarannya	17.229.968,17
33. Puskesmas Ardimulyo	Terdapat koreksi atas kekurangan pencatatan piutang pendapatan layanan kesehatan Puskesmas Ardimulyo berdasarkan audit KAP	3.800,00
34. Puskesmas Bantur	Jurnal atas pembentukan akumulasi penyisihan Piutang:	271.500,00
35. Puskesmas Buhulawang	Jurnal Penyisihan Piutang TA 2023	233.135,00
36. Puskesmas Dampit	Penyisihan Piutang th 2023	104.100,00
37. Puskesmas Dau	Pengakuan Penyisihan Piutang 2023	3.020,00
38. Puskesmas Donomulyo	Jurnal atas piutang	495.915,00
39. Puskesmas Gedangan	Jurnal atas penyisihan Piutang 2023 PKM Gedangan	188.400,00
40. Puskesmas Gondanglegi	Jurnal atas penyisihan piutang 2023	139.825,00
41. Puskesmas Kalipare	Jurnal Penyisihan Piutang tahun 2023	243.625,00
42. Puskesmas Kalipare	Terdapat koreksi atas kekurangan pencatatan Piutang Pendapatan Layanan Kesehatan Puskesmas Kalipare berdasarkan audit KAP	258.135,00
43. Puskesmas Karangploso	Jurnal Pembentukan Akumulasi Penyisihan Piutang 2023	4.500,00
44. Puskesmas Kasembon	Jurnal Beban Penyisihan Piutang Th 2023 Pkm Karangploso	221.725,00
45. Puskesmas Kepanjen	Jurnal Penyisihan Piutang klaim non Kapitasi bulan November 2023	134.300,00
46. Puskesmas Ketawang	Jurnal atas pembentukan akumulasi penyisihan piutang tahun 2023	352.425,00

No	Uraian	Nilai
47. Puskesmas Ketawang	Terdapat koreksi atas kekurangan pencatatan piutang pendapatan layanan kesehatan Puskesmas Ketawang berdasarkan audit KAP	114.825,00
48. Puskesmas Kromengan	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	142.500,00
49. Puskesmas Lawang	Penyisihan Piutang Tahun 2023	126.175,00
50. Puskesmas Ngajum	Jurnal Atas Penyisihan Piutang Tahun 2023	63.225,00
51. Puskesmas Ngantang	Jurnal penyisihan piutang 2023 secara terinci	177.175,00
52. Puskesmas Pagak	Adjs Atas Pengakuan Penyisihan Piutang 2023	129.115,00
53. Puskesmas Pagelaran	Jurnal atas pembentukan penyisihan Piutang 2023	358.500,00
54. Puskesmas Pakis	JURNAL PENYISIHAN PIUTANG 2023 PKM PAKIS	28.932,50
55. Puskesmas Pakisaji	Jurnal atas Penyisihan Piutang Tahun 2023	229.100,00
56. Puskesmas Pamotan	Jurnal Penyisihan Piutang Pkm Pamotan TA 2023	386.575,00
57. Puskesmas Poncokusumo	Jurnal penyisihan piutang 2023	241.200,00
58. Puskesmas Poncokusumo	Terdapat koreksi atas kekurangan pencatatan piutang pendapatan layanan kesehatan Puskesmas Poncokusumo berdasarkan audit KAP	216.450,00
59. Puskesmas Pujon	Jurnal Pembentukan Akumulasi Penyisihan Piutang 2023	145.325,00
60. Puskesmas Sitarjo	Jurnal Atas Pembentukan Akumulasi Penyisihan Piutang	154.887,50
61. Puskesmas SumbermanjingKulon	Jurnal Pembentukan Penyisihan Piutang 2023	27.250,00
62. Puskesmas SumbermanjingWetan	Jurnal Pembentukan Akumulasi Penyisihan Piutang 2023	100.800,00
63. Puskesmas Sumberpucung	Jurnal Penyisihan Piutang Tahun 2023	8.400,00
64. Puskesmas Tajinan	Jurnal Piutang Pendapatan BLUD 2023	32.512,50
65. Puskesmas Tajinan	Jurnal Penyisihan Piutang Pendapatan 2023	53.412,50
66. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal atas pembentukan akumulasi penyisihan piutang	253.450,00
67. Puskesmas Tumpang	Jurnal Akumulasi Penyisihan Piutang Tahun Ini (2023)	347.825,00
68. Puskesmas Turen	Penyisihan Piutang 2023	311.790,00
69. Puskesmas Wagir	Pengakuan Penyisihan Piutang Tahun 2023	295.825,00
70. Puskesmas Wajak	Pengakuan Beban Penyisihan Pendapatan Piutang 2023	137.462,50
71. Puskesmas Wonokerto	Jurnal Penyisihan Piutang Tahun 2023	219.130,00
72. Puskesmas Wonosari	Jurnal Penyisihan Piutang Tahun 2023	59.835,50
73. RSUD Kanjuruhan	saldo akhir Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	273.908.131,77
74. RSUD Lawang	penyisihan piutang TA 2023	27.167.851,54
75. UPT Dana Bergulir	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 2023	1.946.337.927,12
76. UPT Lumbung Desa Modern	saldo akhir Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	54.759.700,00
b.	Jumlah Ditambah (1-76)	50.135.358.401,58
	Dikurang:	

No	Uraian	Nilai
1. Dinas Komunikasi dan Informatika	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	561.485,00
2. Dinas Lingkungan Hidup	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.611.013,45
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	8.442.715,00
4. Dinas Perhubungan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	54.885,00
5. Dinas Perhubungan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	167.547,50
6. Dinas Perhubungan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir	292.150,00
7. Dinas Perikanan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan	1.121.989.573,09
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	784.750,00
9. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	1.090,00
10. Puskesmas Kalipare	Jurnal Penghapusan Penyisihan Piutang Tahun 2022	129.250,00
11. Puskesmas Kepanjen	Jurnal Penghapusan Penyisihan Piutang di 2023	64.825,00
12. Puskesmas Lawang	Terdapat koreksi atas kelebihan pencatatan piutang pendapatan layanan kesehatan Puskesmas Lawang berdasarkan audit KAP	6.900,00
13. Puskesmas Pakis	Jurnal Penghapusan Penyisihan Piutang Tahun 2022	65.380,00
14. Puskesmas Tajinan	Penghapusan Penyisihan Piutang Tahun 2022	53.412,50
15. Puskesmas Tirtoyudo	Jurnal penghapusan penyisihan piutang 2022	134.237,50
16. Puskesmas Wonokerto	Jurnal penghapusan penyisihan piutang tahun 2022	145.600,00
17. RSUD Lawang	Terdapat kurang catat piutang RSUD Lawang berdasarkan penelusuran dari KAP	907.819,02
c.	Jumlah Dikurang (1-17)	1.135.412.633,06
d.	Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	48.999.945.768,52
e.	Selisih Antara Belanja Penyisihan Piutang-Lra Dan Beban Penyisihan Piutang-Lo (a-d)	(48.999.945.768,52)

12. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*dispreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pengakuan Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp453.242.479.672,94 sedangkan Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp411.922.392.499,64, mengalami kenaikan sebesar Rp41.320.087.173,30 atau 10,03% dengan Rincian sebagai berikut.

Tabel 212 Daftar Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
a.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	187.843.866.447,25	176.364.667.604,80	6,51
b.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	47.729.657.664,15	46.778.702.333,66	1,88
c.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	212.414.482.467,19	184.472.021.290,58	15,12
d.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.254.473.094,35	4.307.001.270,60	7,87
TOTAL		453.242.479.672,94	411.922.392.499,64	10,03

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp187.843.866.447,25 sedangkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp176.364.667.604,80 mengalami kenaikan sebesar Rp11.479.198.842,45 atau 6,51% terdiri dari:

Tabel 213 Daftar Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
a.	Beban Penyusutan Alat Besar	4.785.298.847,04	4.927.021.072,07	(2,88)
b.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	27.795.143.185,13	30.267.463.006,10	(8,17)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
c.	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.017.189.580,10	1.899.295.331,50	(46,44)
d.	Beban Penyusutan Alat Pertanian	956.297.774,74	878.853.411,01	8,81
e.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.754.166.710,20	27.225.558.565,59	(1,73)
f.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemasar	5.734.784.359,64	5.840.557.736,98	(1,81)
g.	Beban Penyusutan Kedokteran dan Kesehatan	76.814.948.881,61	60.174.181.401,32	27,65
h.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	7.462.323.435,89	7.347.624.430,99	1,56
i.	Beban Penyusutan Alat Peralatan	150.895.939,83	169.229.083,33	(10,83)
j.	Beban Penyusutan Komputer	33.921.230.776,15	34.677.310.979,23	(2,18)
k.	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	600.000,00	0,00	100,00
l.	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	136.166.220,51	589.776.661,50	(76,91)
m.	Beban Penyusutan Alat Peraga	2.640.000,00	0,00	100,00
n.	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	11.362.428,57	0,00	100,00
o.	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	805.040.160,98	865.389.998,72	(6,97)
p.	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	1.495.778.146,86	1.502.405.926,46	(0,44)
TOTAL		187.843.866.447,25	176.364.667.604,80	6,51

b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.729.657.664,15 sedangkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp46.778.702.333,66 mengalami kenaikan sebesar Rp950.955.330,49 atau 2,03% terdiri dari:

Tabel 214 Daftar Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
a.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	47.319.011.648,14	46.472.927.796,62	1,67
b.	Beban Penyusutan Monumen	139.674.096,14	50.777.684,98	175,07
c.	Beban Penyusutan Bangunan Menara	141.113.814,08	60.666.648,75	132,61
d.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	129.858.105,79	194.330.203,31	(33,18)
TOTAL		47.729.657.664,15	46.778.702.333,66	2,03

c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp212.414.482.467,19 sedangkan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp184.472.021.290,58 mengalami kenaikan sebesar Rp27.942.461.176,61 atau 15,15% terdiri dari:

Tabel 215 Daftar Rincian Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
a.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	177.409.087.673,37	157.366.361.985,99	12,71
b.	Beban Penyusutan Bangunan Air	29.203.085.786,31	21.809.167.864,85	33,82
c.	Beban Penyusutan Instalasi	2.685.207.506,94	2.669.083.821,33	0,98
d.	Beban Penyusutan Jaringan	3.117.101.500,57	2.627.407.618,41	18,64
TOTAL		212.414.482.467,19	184.472.021.290,58	15,15

d. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.254.473.094,35 sedangkan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp4.307.001.270,60 mengalami kenaikan sebesar Rp947.471.823,75 atau 22%.

5.4.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan diakui sebelum pengeluaran kas. Pengakuan Beban Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp295.648.740.205,50,00 sedangkan Beban Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp259.180.177.969,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.468.562.236,50 atau 14,07% dengan Rincian sebagai berikut.

Tabel 216 Daftar Beban Transfer Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	32.543.249.560,00	23.818.892.695,00	36,63
2.	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi	3.987.278.609,50	4.809.041.781,00	(17,09)
3.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	259.118.212.036,00	230.552.243.493,00	12,39
TOTAL		295.648.740.205,50	259.180.177.969,00	14,07

Pengeluaran/pencairan Dana Transfer dari Pemerintah Kabupaten Malang kepada pihak Ketiga/Lainnya didasarkan pada Penerbitan SP2D LS kepada pihak ketiga/pengeluaran bersifat definitif, namun pada realisasinya terdapat perbedaan antara Belanja Transfer-Laporan Realisasi Anggaran dan Beban Transfer-Laporan Operasional. Belanja Transfer-Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp758.542.264.189,00 berbeda dengan Beban Transfer-Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp295.648.740.205,50 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 217 Rincian Penjelasan Selisih Belanja Transfer dan Beban Transfer

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Transfer	758.542.264.189,00
	<i>Ditambah :</i>	
b.	<i>Jumlah Ditambah</i>	0,00
	<i>Dikurang:</i>	
	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) - HUTANG BAGI HASIL TPI KUD MINA 2022
		271.428.983,50
	2. Badan Keuangan dan Aset Daerah	Transfer Dana Desa
		462.622.095.000,00
c	<i>Jumlah Dikurang</i>	271.428.983,00
d.	Beban Transfer Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	295.648.740.205,50
e.	Selisih Antara Belanja Transfer-Lra Dan Beban Transfer-Lo (a-d)	271.428.983,00

5.4.2.3 Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
	(Rp)	(Rp)
	609.649.650,00	2.480.823.300,00

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Pengakuan Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp609.649.650,00 sedangkan Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.480.823.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.871.173.650,00 atau 75,43%. Beban Luar Biasa tersebut merupakan beban Pemerintah Kabupaten Malang atas pembayaran hutang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 218 Daftar Rincian Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenalkan/ (Penurunan) (%)
1.	Beban Luar Biasa	609.649.650,00	2.480.823.300,00	(75,43)
	TOTAL	609.649.650,00	2.480.823.300,00	(75,43)

Belanja Luar Biasa pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.379.689.219,00, sedangkan Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp609.649.650,00, sehingga selisih sebesar Rp770.039.569,00 yang dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 219 Daftar Rincian Penjelasan Selisih Belanja Luar Biasa dan Beban Luar Biasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
a.	Belanja Luar Biasa	1.379.689.219,00
	<i>Ditambah:</i>	
b.	Jumlah Ditambah	0,00
	<i>Dikurang:</i>	
	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah (Belanja yang direalisasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah).	
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	259.093.019,00
	Beban Natura dan Pakan-Natura	8.330.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	725.500,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.342.500,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	961.500,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	193.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.230.000,00
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	185.819.550,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	137.425.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	24.389.500,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	145.530.000,00
c.	Jumlah Dikurang	770.039.569,00
d.	Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 (a+b-c)	609.649.650,00
e.	Selisih Antara Belanja Luar Biasa-Lra dan Beban Luar Biasa-Lo (a-d)	770.039.569,00

5.4.2.4 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.876.890.121,65/Surplus Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 Rp(16.235.099.341,34) kenaikan sebesar Rp91.111.989.462,99 atau 561,20% Surplus/Defisit Operasional merupakan selisih antara Pendapatan-Laporan Operasioanal dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit yang dihasilkan oleh kegiatan non operasional dan pos luar biasa dengan Rincian sebagai berikut.

**Tabel 220 Daftar Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022	Kenaikan (Penurunan) [%]
1.	Pendapatan Daerah-LO	3.944.972.214.345,56	3.623.350.087.360,96	8,84
2.	Beban-LO	3.869.485.674.573,91	3.637.104.363.402,30	6,39
3.	Surplus/Defisit Dari Operasi	75.486.539.771,65	(13.754.276.041,34)	(639,41)
4.	Defisit Non Operasional	0,00	0,00	0,00
5.	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	75.486.539.771,65	(13.754.276.041,34)	(639,41)
6.	Pos Luar Biasa	(609.649.650,00)	(2.480.823.300,00)	(75,43)
	Surplus/Defisit	74.876.890.121,65	(16.235.099.341,34)	(553,23)

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pendanaan dan transitoris. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Malang menggambarkan saldo awal per 1 Januari 2023, kenaikan dan atau (penurunan) kas selama Tahun 2023, serta saldo akhir per 31 Desember 2023.

Laporan Arus Kas disajikan menurut aktivitasnya, yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pendanaan dan transitoris. Arus kas menurut aktivitasnya diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Malang dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Adapun rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi dalam TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 221. Daftar Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
a. Penerimaan Pajak Daerah	454.120.555.692,00	402.323.511.146,00
b. Penerimaan Retribusi Daerah	34.597.374.072,000	34.668.963.079,00
c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.482.015.537,05	23.505.888.225,95
d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	323.766.562.042,84	305.060.786.890,42
e. Penerimaan Dana Bagi Hasil	223.768.129.181,00	234.062.983.815,00
f. Penerimaan Alokasi Umum	1.666.245.288.928,00	1.529.615.967.555,00
g. Penerimaan Alokasi Khusus – Fisik	88.582.620.305,00	99.424.460.305,00
h. Penerimaan Alokasi Khusus – Non Fisik	348.386.315.027,00	326.692.365.016,00
i. Penerimaan Dana Insentif	22.916.865.000,00	1.351.964.000,00
j. Penerimaan Dana Desa	462.622.095.000,00	409.429.612.400,00
k. Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	408.901.791.900,00	328.002.339.194,00
l. Penerimaan Bantuan Keuangan	18.143.061.521,00	19.004.053.000,00

URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
m. Penerimaan Hibah	21.723.499.500,00	43.097.603.455,00
n. Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	275.028.559.501,00	265.154.501.319,60
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	4.374.284.733.206,89	4.021.394.999.400,97
2. Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi		
a. Pembayaran Pegawai	1.456.092.249.859,91	1.399.095.815.915,55
b. Pembayaran Barang dan Jasa	1.181.742.699.245,92	1.191.289.001.640,92
c. Pembayaran Belanja Hibah	327.264.685.763,00	238.335.909.970,52
d. Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	29.501.319.000,00	63.400.191.000,00
e. Pembayaran Tak Terduga	1.379.689.219,00	3.838.813.700,00
f. Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	36.801.957.153,00	36.858.709.073,50
g. Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	721.740.307.036,00	639.981.855.893,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	3.754.522.907.276,83	3.572.800.297.193,49
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	619.761.825.930,06	448.594.702.207,48

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas investasi Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Malang kepada masyarakat di masa yang akan datang. Adapun Rincian Arus Kas dari Aktivitas investasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 222. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
1. Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
a. Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	152.394.000,00
b. Penjualan Aset Tetap Lainnya	203.055.000,00	200.027.000,00
c. Penjualan Aset Lainnya	737.394.200,00	449.214.550,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	940.449.200,00	801.635.550,00
2. Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi		
a. Perolehan Tanah	34.438.052.554,00	51.734.609.648,00
b. Perolehan Peralatan dan Mesin	159.628.882.616,00	197.586.057.830,33
c. Perolehan Gedung dan Bangunan	39.738.698.978,00	29.271.450.718,53
d. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	311.839.906.693,00	446.762.102.403,21
e. Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.976.231.659,00	29.469.854.142,00
f. Perolehan Aset Lainnya	1.761.400.960,00	2.884.070.388,00

g. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	13.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	561.383.173.460,00	771.208.145.130,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(560.442.724.260,00)	(770.406.509.580,07)

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus Kas dari Aktivitas pendanaan dalam Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 223. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
1. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
a. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	735.192.014,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	735.192.014,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(735.192.014,00)

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas adalah aktivitas transitoris meliputi penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK). Adapun rincian Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran sebagai berikut.

**Tabel 224. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun
Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022**

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
1. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	107.339.356.600,55
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	0,00	107.339.356.600,55
2. Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris		
a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	43.963.129,27	110.255.822.031,74
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	43.963.129,27	110.255.822.031,74
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(43.963.129,27)	(2.916.465.431,19)
Kenaikan/ (Penurunan) Kas	59.275.138.540,79	(325.463.464.817,78)
Saldo Awal Kas	216.175.355.447,52	541.638.820.265,30
Koreksi SILPA	0,00	0,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	216.175.355.447,52	541.638.820.265,30
Saldo Akhir Kas	275.450.493.988,31	216.175.355.447,52

5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah mengatur perlakuan Akuntansi yang dipilih dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam hal ini, Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Berikut dijelaskan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023:

Tabel 225. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023
1.	EKUITAS AWAL	5.816.690.858.283,08
2.	SURPLUS / (DEFISIT) LO	74.876.890.121,65
	RK PPKD	(5.893.088.135,07)
	RK SKPD	0,00
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR	
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	8.223,30
	Bahan Lainnya	(5.659.192.829,65)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Lainnya	(8.958.623.716,50)
	Obat	14.617.824.769,45
	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	36.668.220,99
	Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	10.000.000,00
	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	31.228.000,00
	Alat Kedokteran Nuklir	(1.219.779,00)
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	(550.000,00)
	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	(2.790.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(1.500.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Komputer	1.500.000,00
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(0,01)
	LAIN-LAIN	189.176.755.633,20
	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.422.200,00
	Piutang Penerimaan Kmisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.422.200,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran gaji dan Tunjangan	(10.020.891,80)
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	(500.000,00)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	(13.350.000,00)
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	(5.870.000,00)
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(500.000,00)
	Piutang Pendapatan BLUD	(87.886.900,00)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian daerah Terhadap Bendahara	181.980.356,00
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian daerah Terhadap Pegawai negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(631.593.462,84)
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	8.059.085,90
	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pameran	163.222.197,27
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame	18.130.937,68
	Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Sumber Lain	40.773.375,45
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	175.485,00
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	559.364,05
	Penyisihan Piutang PBBP2	46.777.617.474,47
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	23.575,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	107.204,03
	Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	302.467.267,70
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	8.336,88
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Pameran	45.423.475,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.563.400,36
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	469,34
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Parkir	35.097,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	827,80
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	578.462,90
	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	177.522,46
	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	2.500,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	80.970,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.850,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Gaji Pokok ASN- Gaji Pokok PPPK	162.144,50

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023
	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	327.984.682,00
	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok	91.403.742,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.696.172,29
	Beban Dibayar Dimuka	(84.333.333,33)
	Dana Bergulir melalui BLUD	2.123.069.641,81
	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	(3.419.295.403,99)
	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.083.000.000,00
	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00
	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(1.628.000,00)
	Tanah Persil Lainnya	0,00
	Tanah Basah	(1.257.490,00)
	Tanah Kering	1.120.203.755,00
	Tanah Hutan	3.231.000.000,00
	Tanah Pertanian	(1.350.000.000,00)
	Tanah Non Persil Lainnya	(3.006.600,00)
	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	0,00
	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	0,00
	Tanah untuk Jalan	28.292.611.894,44
	Tanah untuk Bangunan Air	2.094.294.870,11
	Tanah untuk Makam	0,00
	Tanah Kampung	0,00
	Hauler	(333.900.000,00)
	Compressor	17.400.000,00
	Electric Generating Set	(14.777.000,00)
	Pompa	22.178.205,00
	Mesin Bor	3.195.690,00
	Perlengkapan Kebakaran Hutan	(14.853.400,00)
	Peralatan SAR Mountenering	2.719.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.403.065.100,00
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	145.484.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	42.785.711,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00
	Kendaraan Bermotor Khusus	75.000.000,00
	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	23.659.650,00
	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	5.157.250,00
	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	2.674.692,00
	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	4.254.000,00
	Perkakas Bengkel Service	1.900.000,00
	Perkakas Bengkel Kayu	2.500.000,00
	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	(42.400.000,00)
	Perkakas Standard (Standard Tools)	(5.622.100,00)
	Perkakas Khusus (Special Tools)	2.331.000,00
	Perkakas Bengkel Kerja	(4.246.760,00)
	Peralatan Tukang Besi	3.300.000,00
	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	2.588.400,00
	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	3.139.950,00
	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	(370.000,00)
	Alat Ukur Universal	5.450.000,00
	Alat Kalibrasi	2.084.225,00
	Alat Ukur/Pembanding	(7.266.000,00)
	Alat Timbangan/Biara	60.606.000,00
	Alat Pengukur Keadaan Alam	14.600.000,00
	Alat Ukur Lainnya	500.000,00
	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(49.937.558,00)

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023
	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(9.256.500,00)
	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	75.752.900,00
	Alat Laboratorium Pertanian	(60.606.000,00)
	Alat Processing	2.100.000,00
	Alat Pasca Panen	996.000.000,00
	Alat Produksi Perikanan	(990.000.000,00)
	Alat-Alat Peternakan	(250.000,00)
	Mesin Ketik	(20.442.000,00)
	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(3.833.225,00)
	Alat Reproduksi (Penggandaan)	(97.800.000,00)
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	632.449.025,01
	Alat Kantor Lainnya	824.962.510,00
	Mebel	371.035.384,60
	Alat Pengukur Waktu	18.350.000,00
	Alat Pembersih	4.315.800,00
	Alat Pendingin	(26.723.555,01)
	Alat Dapur	12.867.500,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(1.178.849,00)
	Alat Pemadam Kebakaran	2.650.000,00
	Meja Kerja Pejabat	(38.932.400,00)
	Meja Rapat Pejabat	4.350.000,00
	Kursi Kerja Pejabat	5.911.984,00
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(4.397.000,00)
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14.700.000,00
	Lemari dan Arsip Pejabat	(308.497.800,00)
	Peralatan Studio Audio	(436.221.756,00)
	Peralatan Studio Video dan Film	(10.088.518,00)
	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(22.395.000,00)
	Alat Komunikasi Telephone	43.104.550,00
	Alat Komunikasi Radio SSB	0,00
	Alat Komunikasi Radio HF/FM	(80.595.000,00)
	Alat Komunikasi Radio VHF	0,00
	Alat Komunikasi Radio UHF	(502.016.600,00)
	Alat Komunikasi Sosial	11.500.000,00
	Alat-Alat Sandi	(8.400.000,00)
	Alat Komunikasi Satelit	(1.887.000,00)
	Alat Komunikasi Lainnya	(1.035.000,00)
	Peralatan Antena VHF/FM	0,00
	Peralatan Antena Penerima VHF	(83.765.000,00)
	Sumber Tenaga	49.875.800,00
	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	6.105.000,00
	Alat Kedokteran Umum	(1.589.478.848,00)
	Alat Kedokteran Gigi	(2.588.500,00)
	Alat Kedokteran Bedah	(1.215.004,00)
	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	(6.245.041,00)
	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(2.633.170,00)
	Alat Kedokteran Poliklinik	(311.856,00)
	Alat Kedokteran Jantung	1.500.000,00
	Alat Kedokteran Lainnya	(8.585.000,00)
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	(3.276.500,00)
	Alat Laboratorium Umum	(6.683.000,00)
	Alat Laboratorium Mikrobiologi	31.383.000,00
	Alat Laboratorium Kimia	20.716.600,00
	Alat Laboratorium Film	10.940.000,00
	Alat Laboratorium Farmasi	22.605.400,00
	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	1.500.000,00

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023
	Alat Laboratorium Pertanian	249.953.500,00
	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	(850.149,00)
	Alat Laboratorium Lain	2.142.000,00
	Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	(24.000.000,00)
	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	1.074.000,00
	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	22.577.000,00
	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	6.160.000,00
	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	(8.180.500,00)
	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	12.848.000,00
	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	3.000.000,00
	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	(1.330.000,00)
	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	137.136.360,00
	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	29.950.000,00
	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	108.912.500,00
	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	(38.226.000,00)
	Alat Peraga Kejuruan	3.000.000,00
	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	(2.737.000,00)
	Modular Counting and Scientific Electronic	37.917.800,00
	Assembly/Counting System	2.750.000,00
	System/Power Supply	(5.649.500,00)
	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	3.000.000,00
	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	900.000,00
	Lain	
	Alat Keamanan	345.667.500,00
	Senjata Sinar Lainnya	14.985.000,00
	Komputer Jaringan	(370.942.600,00)
	Personal Computer	794.803.424,00
	Komputer Unit Lainnya	166.037.160,00
	Peralatan Mainframe	11.672.219,00
	Peralatan Mini Computer	92.810.500,00
	Peralatan Personal Computer	191.442.948,00
	Peralatan Jaringan	1.600.790,00
	Peralatan Komputer Lainnya	(481.102.719,00)
	Sumur Pemboran	3.000.000,00
	Sepatu Lapangan	1.250.000,00
	Alat Pendukung Pencarian	69.494.000,00
	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan	4.500.000,00
	Bandar Udara	
	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	5.000.000,00
	Alat Peraga Pelatihan	6.000.000,00
	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	7.200.000,00
	Transport and Storage Equipment for Liquid	800.000,00
	Rambu Bersuar	2.737.000,00
	Rambu Tidak Bersuar	(14.959.000,00)
	Peralatan Olahraga Atletik	2.400.000,00
	Peralatan Permainan	30.558.500,00
	Peralatan Senam	37.574.000,00
	Peralatan Olahraga Air	3.000.000,00
	Bangunan Gedung Kantor	13.841.812.957,37
	Bangunan Gudang	0,00
	Bangunan Gedung Laboratorium	6.756.224.989,50
	Bangunan Kesehatan	1.054.230.468,00
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00
	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	100.000.000,00
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(19.228.347.246,80)
	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(198.895.000,00)
	Bangunan Gedung Perpustakaan	3.360.000.000,00
	Bangunan Pengujian Kelaikan	9.751.000,00

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023
	Bangunan Terbuka	(211.436.000,00)
	Taman	(1.800.000,00)
	Rumah Negara Golongan I	(3.106.323.700,00)
	Rumah Negara Golongan II	0,00
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	10.500.000,00
	Pagar	105.957.922,50
	Jalan Kabupaten	(9.375.087.044,45)
	Jalan Khusus	5.787.681.826,96
	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	19.936.295.400,00
	Jaringan Distribusi	0,00
	Jaringan Listrik Lainnya	9.901.675.643,00
	Buku Umum	58.354.150,00
	Buku Agama	3.555.000,00
	Buku Ilmu Sosial	(23.408.000,00)
	Buku Ilmu Bahasa	4.084.000,00
	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	12.675.500,00
	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	6.920.100,00
	Audio Visual	36.882.920,00
	Bahan Kartografi	2.506.000,00
	Musik Lainnya	(222.687.220,00)
	Alat Musik	(320.257.860,00)
	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	(1.089.034.190,00)
	Barang Kerajinan	12.608.000,00
	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	5.000.000,00
	Tanaman	(52.973.991,00)
	Aset Tetap Dalam Renovasi	(28.109.000,00)
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	(144.104.000,00)
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah untuk Jalan	1.850.916.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.454.752.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	1.900.000.000,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	392.510.000,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	(2.299.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	0,01
	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(1.925.714,28)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(2.815.385.099,92)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(145.484.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(12.704.022,40)
	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	5.550.000,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(5.550.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	780.000,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	187.500,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	(686.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	(92.000.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(62.442.233,59)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.749.000,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	97.800.000,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	64.760.999,99

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	36.517.500,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	103.832.423,40
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	79.339.775,01
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	1.500.000,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	821.919.865,00
	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	38.932.400,00
	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	33.948.800,00
	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4.397.000,00
	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	141.109.603,76
	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	195.958.100,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	5.980.000,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	502.016.600,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	83.765.000,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(1.132.200,00)
	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,01
	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(1.248.750,00)
	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	(423.484.773,13)
	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	(0,01)
	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	72.157.560,00
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	798.050.361,64
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	820.097.950,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	16.955.400,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	361.456.040,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	14.850.000,00
	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat SAR Lainnya	71.425.795,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	1.270.450,59
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.388.904.868,16
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	3.312.000,00
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(0,01)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(0,02)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	13.396.309,26
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	71.450.697,11
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(1.647.820.200,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	23.867.400,00
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(0,01)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(25.827.984,60)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25.827.984,60
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(436.822.880,00)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	38.399.820,00

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2023
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	35.756.817,18
	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(409.853.841,60)
	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	(4.200.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	417.827.961,60
	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(7.946.844,18)
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	18.685.112.369,95
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	0,00
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(7.720.501,44)
	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,01
	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	(0,01)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	(0,01)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	0,00
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	0,01
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,01
	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	(0,01)
	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	(0,01)
	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00
	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,01
	Dana Cadangan	(86.875.665,95)
	Lisensi dan Franchise	2.000.000,00
	Software	99.653.000,00
	Aset Rusak Berat/Usang	(3.395.967.041,00)
	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	72.468.899,00
	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	262.227.350,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	2.680.250.792,00
	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	(7.422.200,00)
	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	11.305.000,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.684.700.840,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.006.541,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	(1.006.541,00)
	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	27.376.428.182,00
	Utang Belanja Pegawai BLUD	4.832.381.934,72
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	(11.305.000,00)
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	736.386,00
	Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.077.649.650,00
4.	Ekuitas Akhir (1+2+3)	6.074.888.092.347,15

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.6.1 Ekuitas Awal	5.816.690.858.283,08	6.129.818.040.522,14

Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp5.816.690.858.283,08 merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Malang pada awal tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.6.2 Surplus/Defisit LO	74.876.890.121,65	(16.235.099.341,34)

Surplus/Defisit LO merupakan penambahan atau pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp74.876.890.121,65.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.6.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	189.176.755.633,20	(296.986.855.289,09)

Penambahan atau pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya selama tahun 2023 sebesar Rp486.163.610.922,29.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.6.4 Ekuitas Akhir	6.074.888.092.347,15	5.816.690.858.283,08

Ekuitas Akhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.074.888.092.347,15 Sedangkan Ekuitas Akhir sampai dengan 31 Desember 2022 Rp5.816.690.858.283,08 Sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp258.197.234.064,07.

BAB VI

INFORMASI LAINNYA

6.1 UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf b disebutkan bahwa "pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri". Dan atas tujuan tersebut maka diamanatkan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian / Lembaga Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk dalam negeri.

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diinstruksikan salah satunya pada para Bupati/Walikota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400.000.000.000.000,00 (empat ratus triliun rupiah) untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

6. Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk tayang dalam Katalog Elektronik;
7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor;
8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen);
9. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal;
10. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama;
12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023;
14. Melakukan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan mengupayakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global;
15. Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun 2023

telah melaksanakan penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, dengan realisasi sebagai berikut:

1. Atas pengadaan barang dan jasa yang menggunakan pihak ke-3 (penyedia), realisasi PDN sebesar Rp560.160.233.156,00 (lima ratus enam puluh milyar seratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) dari alokasi anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp910.342.878.242,00 (sembilan ratus sepuluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau sebesar 61,53%;
2. Atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara swakelola, realisasi PDN sebesar Rp908.668.519.265,20 (sembilan ratus delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh sen) dari alokasi anggaran sebesar Rp932.016.686.811,00 (Sembilan ratus tiga puluh dua milyar enam belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) atau sebesar 97,49%.

6.2 PENERIMAAN KAS YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerah berupa laporan keuangan daerah yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP tersebut telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, Pemerintah Daerah mengakui penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut sebagai pendapatan dan belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja Pemda yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun penerimaan yang tidak melalui RKUD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 antara lain Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Tata cara penganggaran dan penyaluran dana tersebut, antara lain:

1. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.

Dana BOSP terdiri atas:

- a. Dana BOP PAUD;
- b. Dana BOS; dan
- c. Dana BOP Kesetaraan.

Penyaluran Dana BOSP dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan. Adapun Rekening Satuan Pendidikan harus memenuhi kriteria berikut:

- a. atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Aplikasi Dapodik;
- b. nama rekening diawali dengan NPSN.

Rekening Satuan Pendidikan harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas kepada Kementerian melalui sistem aplikasi Rekening Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.

Dalam hal terdapat sisa Dana BOSP pada tahun anggaran sebelumnya, maka penggunaan sisa Dana BOSP dilakukan setelah sisa dana BOSP dicatatkan dalam RKAS dan komponen penggunaan sisa dana BOSP dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOSP tahun anggaran berkenaan. Sisa dana BOSP yang telah dicatatkan oleh Satuan Pendidikan dalam RKAS divalidasi dan diverifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri mengenai pengelolaan dana BOSP pada Pemerintah Daerah; dan diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOSP tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

Bantuan Operasional Kesehatan berasal dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, yang terdiri dari BOK Dinas dan BOK Puskesmas. BOK Dinas disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota, sedangkan BOK Puskesmas disalurkan dari

rekening kas umum negara ke rekening Puskesmas yang menjadi bagian kas umum daerah. Rekening Puskesmas yang digunakan untuk penerimaan dana BOK Puskesmas harus memenuhi kriteria:

- a. atas nama Puskesmas sesuai dengan nama yang terdaftar dalam aplikasi Regpus; dan
- b. nama rekening diawali dengan Noregpus, diikuti jenis pendanaan serta nama Puskesmas.

Rekening Puskesmas ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui aplikasi e-renggar. Rekening Puskesmas yang digunakan oleh UPT Puskesmas di lingkungan Kabupaten Malang adalah Bank Negara Indonesia (BNI).

3. Dana Desa

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penganggaran dan Pengalokasian

Perhitungan rincian Dana Desa setiap desa dihitung dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan, yaitu berdasarkan formula pengalokasian, antara lain:
 - a. Alokasi Dasar sebesar 65% dari Dana Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi sebesar 1% dari Dana Desa;
 - c. Alokasi Kinerja sebesar 4% dari Dana Desa;
 - d. Alokasi Formula sebesar 30% dari Dana Desa.
- b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dihitung secara proporsional dan memperhatikan kriteria berupa:
 - a. kriteria utama, yaitu antara lain:
 - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2023;
 - b. Desa telah disalurkan Dana Desa nonBLT Desa tahap I tahun anggaran 2023;
 - c. Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.

- b. kriteria kinerja, yaitu antara lain:
 - a. Kinerja Pemerintah Desa, yang terdiri atas:
 - 1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa;
 - 2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa;
 - b. Penghargaan Desa dari kementerian negara/ lembaga.

b. Penyaluran

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.

Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:

- a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
- b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.

Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus;
- c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

6.3 SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN MALANG

Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk Tim Verifikasi Penyerahan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/518/KEP/35.07.013/2020

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.4/434/KEP/35.07.013/2013 tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Malang. yang bertugas memproses penyerahan PSU. Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang sampai dengan Tahun 2023, diketahui terdapat 609 perumahan di wilayah Kabupaten Malang. Kondisi penyerahan PSU sebagai berikut:

- a. Penyerahan PSU perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari penyerahan secara administrasi dan dilanjutkan dengan penyerahan secara fisik. Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 253 perumahan yang telah melakukan serah terima dan 356 perumahan yang belum dilakukan serah terima.
- b. Atas 356 perumahan yang belum dilakukan serah terima dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. 34 perumahan yang masih proses Pembangunan;
 2. 49 perumahan telah terbangun dan diketahui pengembangnya;
 3. 229 perumahan yang telah terbangun tetapi tidak diketahui pengembangnya dan atas kondisi tersebut telah dilakukan Upaya dengan melakukan pengumuman pencarian pengembang dan membuat MoU atau kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang;
 4. 44 perumahan tidak jadi dilakukan Pembangunan dan atas kondisi tersebut belum ada regulasi yang mengatur.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dengan memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti. Penjabaran yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Posisi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah-LRA	Rp	4.375.225.182.406,89
- Pendapatan Asli Daerah-LRA	Rp	838.906.956.543,89
- Pendapatan Transfer-LRA	Rp	3.239.566.166.862,00
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA	Rp	296.752.059.001,00
2. Belanja Daerah	Rp	4.303.906.080.736,83
- Belanja Operasi	Rp	2.994.600.953.868,83
- Belanja Modal	Rp	549.383.173.460,00
- Belanja Tidak Terduga	Rp	1.379.689.219,00
- Belanja Transfer	Rp	758.542.264.189,00
5. Surplus/Defisit-LRA	Rp	71.319.101.670,06
6. Penerimaan Pembiayaan	Rp	216.131.392.318,25
7. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	12.000.000.000,00
8. Aset Daerah	Rp	6.121.381.824.385,03
9. Kewajiban Daerah	Rp	46.493.732.037,88
10. Ekuitas	Rp	6.074.888.092.347,15
11. Pendapatan-LO	Rp	3.944.972.214.345,56
- Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp	837.303.666.042,77
- Pendapatan Transfer-LO	Rp	2.755.168.211.242,00
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	Rp	352.500.337.060,79
12. Beban	Rp	3.869.485.674.573,91
13. Surplus/Defisit-LO	Rp	74.876.890.121,65
14. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	275.450.493.988,31

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang. Catatan atas Laporan Keuangan menjadi sarana untuk menjelaskan masalah-masalah ataupun informasi penting dalam penyajian laporan keuangan daerah, sehingga dengan penjelasannya yang cukup memadai

diharapkan dapat memudahkan dan bermanfaat bagi pengguna dalam memahami Laporan Keuangan Daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala do'a, usaha, langkah dan upaya kita untuk menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang semakin baik dan aspiratif dalam memajukan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malang. Aamiin.



**LAPORAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen, maka Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang berada di Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang periode 2021-2026 adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 yang disahkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 23 Pebruari 2021 Nomor 131.35-312 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 24 Pebruari 2021 Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 131.35-312 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya melalui kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memberikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Kewajiban penyampaian LKPJ secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Penyusunan LKPJ dimaknai sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah

daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, ruang lingkup LKPJ meliputi:

- a) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Agenda penyampaian LKPJ diharapkan mampu menjadi sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

LKPJ yang disusun memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan yakni untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan program-program pembangunan. Melalui mekanisme ini, *progress* dan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembangunan dapat dicermati dan dilakukan penilaian sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

LKPJ Bupati Malang Tahun 2023 adalah laporan penyelenggaraan program pembangunan pemerintahan daerah tahun 2023 yang merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah hasil kajian dari evaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang memiliki Dasar Hukum, Visi, Misi, Data Umum Daerah, Strategi dan Arah kebijakan Daerah, serta Prioritas Pembangunan yang dapat jabarkan sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang;

10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 201 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 133 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Malang berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, capaian pembangunan tahun 2016-2021, memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan

nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Kabupaten Malang pada lima tahun kedepan akan memperhatikan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2021-2026, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis yakni MALANG MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif). Hal-hal pokok yang terkandung dalam filosofis MALANG MAKMUR antara lain Maju yaitu pembangunan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya; Agamis yaitu pembangunan Kabupaten Malang mengandung nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat; Kreatif yaitu pembangunan diarahkan untuk membentuk daerah yang mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah; Mandiri yaitu Pembangunan Kabupaten Malang berorientasi untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah; Unggul yaitu kapasitas dan kemampuan kompetensi yang dihasilkan Kabupaten Malang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari wilayah lainnya dan Responsif yaitu Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Malang dilakukan secara profesional, transparan, dan bersih melalui prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja prestasi guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan mempertimbangkan landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2021-2026, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika".

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang periode 2021-2026 yang disebut sebagai Panca Cita adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul;
2. Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila;
3. Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa;
4. Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera;
5. Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

sebagaimana tercantum pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2023 adalah **"Pembangunan Pariwisata Kreatif (pariwisata dan industri kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal"**, dengan 6 prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan dan mendorong sektor industri, perdagangan dan pemberdayaan masyarakat serta ekonomi kreatif;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata untuk mendukung perekonomian dan pariwisata serta peningkatan daya saing daerah;

3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas dan kesehatan dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing;
4. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang inovatif;
5. Peningkatan ketentraman, ketertiban dan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal serta penegakan hukum;
6. Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

3. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul;
 - b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
 - c. Memperluas akses lapangan kerja dan wirausaha baru.
 - d. Pendidikan Warga Kabupaten Malang Yang Berkualitas Dan Berakhlakul Karimah;
 - e. Mengupayakan Pelayanan Kesehatan Yang Prima Dan Terjangkau;
 - f. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Yang Bersumber Dari Potensi Sumberdaya Alam Dan Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Malang;
 - g. Memperluas Akses Lapangan Kerja Dan Wirausaha Baru.
2. Misi 2 : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila dengan tujuan:
 - a. Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Yang Demokratis dan agamis.
3. Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan,

- akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik;
- b. Meningkatkan kemandirian Desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan.
4. Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera dengan tujuan
- a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan Anak.
5. Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan dengan tujuan: a
- a. Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi;
 - b. Mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri;
 - c. Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih dan nyaman.

4. Sasaran

Merujuk pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul, tujuan:
 - a. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, memiliki sasaran sebagai berikut::
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan;
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kesejahteraan PMKS;
 - 2) Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

- c. Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
 - 2) Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil;
2. Misi 2 : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila dengan tujuan:
 - a. Menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis dan agamis yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan;
 3. Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
 - 2) Meningkatnya inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik;
 - 3) Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah;
 - 4) Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah;
 - 5) Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah.
 - b. Meningkatkan kemandirian Desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan
 - 1) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air;

- 3) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi;
 - 4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi.
4. Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera dengan tujuan:
- a. meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan anak yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak;
 - 2) Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk.
5. Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan dengan tujuan:
- a. Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah;
 - 2) Meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian;
 - 3) Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura perkebunan, perikanan dan peternakan).
 - b. Mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kunjungan wisatawan;
 - 2) Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang.
 - c. Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih, nyaman yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - 2) Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana.

C. Data Umum Daerah

1. Data geografis daerah

Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan koordinat antara 112017',10,90" Bujur Timur dan 112057',00,00" Bujur Timur dan antara 7044',55,11" Lintang Selatan dan 8026',35,45" Lintang Selatan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, bahwa luas wilayah Kabupaten Malang sebesar 3.473,439 Km², terdiri dari 378 desa dan 12 kelurahan yang berada di 33 kecamatan meliputi Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Pagak, Kecamatan Bantur, Kecamatan Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Turen, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Wagir, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Pakis, Kecamatan Jabung, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon. Adapun batas administrasi Kabupaten Malang:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang;
- Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang;
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri;
- Bagian Tengah : Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu.

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumber daya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan.

Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan di atas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading, dan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada di bawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik.

Selain itu wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan di bidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan bidang pertanian lebih diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai suhu yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan.

Struktur penggunaan lahan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Data Rincian Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)
1	2	3
	Kawasan Budidaya	
1.	Hutan Produksi	50.907,24
2.	Hutan Rakyat	-
3.	Pertanian	168.315,84
	Pertanian Lahan Basah	48.905,26
	Pertanian Lahan Kering dan Holtikultura	119.410,58
4.	Perkebunan	14.597,08
	Perkebunan Negara	
	Perkebunan Rakyat	
5.	Perikanan	75,44
	Perikanan Tangkap	
	Perikanan Budidaya (Tambak)	75,44
6.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	40,50
7.	Industri	1.010,76
	Kawasan Industri	
	Kawasan Peruntukan Industri	1.010,76
8.	Pariwisata	
9.	Permukiman	41.493,30
	Permukiman Perkotaan	
	Permukiman perdesaan	
10.	Kawasan Peruntukan Lainnya	310,28
	Bandara	310,28
	Hankam/Kawasan Militer	-

No.	Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)
1	2	3
11.	Wilayah Perairan Darat	2.556,08
12.	Lain-lain	-
	Total	279.306,52
	Kawasan Lindung	
1.	Hutan Lindung	41.542,22
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Kawasan Resapan Air)	
3.	Kawasan Perlindungan Setempat	23.724,41
4.	a. Cagar Alam Pulau Sempu	999,49
	b. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	19.013,25
	c. Taman Hutan Raya R. Soerjo	3.711,67
	Total	65.266,63
	Luas total penggunaan lahan	344.573,15

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa. Sedangkan untuk jumlah RT/RW di Kabupaten Malang yaitu sebanyak 17.531 dengan rincian jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 3.077 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 14.454.

2. Gambaran Umum Demografis

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang menurut sumber data dari Kabupaten Malang Dalam Angka 2024 sejumlah 2.681,53 ribu jiwa pada tahun 2022 dan tahun 2023 sejumlah 2.711,10 ribu jiwa. Adapun rasio jenis kelamin penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Malang tahun 2023, secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2023

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022-2023
Total	35.07	Kabupaten Malang	2.711,10	1,64
1.	35.07.01	Donomulyo	69,90	1,27
2.	35.07.02	Pagak	52,74	1,91
3.	35.07.03	Bantur	78,41	2,02
4.	35.07.04	Sumbermanjing Wetan	101,93	1,66
5.	35.07.05	Dampit	131,48	1,83
6.	35.07.06	Ampelgading	58,97	0,75
7.	35.07.07	Poncokusumo	99,43	1,99
8.	35.07.08	Wajak	89,24	1,99
9.	35.07.09	Turen	124,89	1,59
10.	35.07.10	Gondanglegi	72,78	1,93
11.	35.07.11	Kalipare	70,68	1,30
12.	35.07.12	Sumberpucung	59,06	0,92
13.	35.07.13	Kepanjen	114,33	1,57
14.	35.07.14	Bululawang	88,78	2,05
15.	35.07.15	Tajinan	57,76	1,67
16.	35.07.16	Tumpang	79,68	2,06
17.	35.07.17	Jabung	77,63	1,73
18.	35.07.18	Pakis	149,29	1,71
19.	35.07.19	Pakisaji	92,32	1,52
20.	35.07.20	Ngajum	53,97	1,50
21.	35.07.21	Wagir	89,17	1,53
22.	35.07.22	Dau	67,88	1,81
23.	35.07.23	Karangploso	82,68	1,69
24.	35.07.24	Singosari	180,74	1,43
25.	35.07.25	Lawang	112,54	1,49
26.	35.07.26	Pujon	70,56	1,74
27.	35.07.27	Ngantang	59,88	1,33
28.	35.07.28	Kasembon	32,07	1,01
29.	35.07.29	Gedangan	59,16	2,35
30.	35.07.30	Tirtoyudo	68,06	1,34
31.	35.07.31	Kromengan	43,15	0,79
32.	35.07.32	Wonosari	45,90	1,18
33.	35.07.33	Pagelaran	76,05	2,16

Sumber data : Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2024

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Malang per kecamatan pada tahun 2023 sekitar 101,22 persen yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Sebagian Kecamatan memiliki rasio jenis kelamin penduduk lebih

dari 100 persen kecuali Kecamatan Kalipare, Dampit, Bululawang, Gondanglegi, Pagelaran, Sumberpucung, Kromengan, Lawang dan Dau.

3. Gambaran Umum Kepegawaian

Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Malang menurut sumber data dari Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2024 untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Malang pada tahun 2023 sejumlah 37,51% PNS laki-laki dan 62,49% PNS perempuan dengan jumlah PNS sebanyak 14.096 orang, yang tersebar di 71 Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Sumber Daya Manusia Pemerintahan Kabupaten Malang
Tahun 2023

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pegawai		
		PNS	PPPK	Kontrak/ Honorer
1.	Inspektorat Daerah	76	0	22
2.	Sekretariat Daerah	171	0	248
3.	Sekretariat DPRD	33	0	54
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	48	0	180
5.	RSUD Kanjuruhan	437	37	281
6.	RSUD Lawang	177	3	226
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	44	0	35
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	62	0	20
9.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	23	0	20
10.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	36	0	127
11.	Badan Pendapatan Daerah	67	0	328
12.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19	0	9
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	0	34
14.	Dinas Pendidikan	5.751	2.231	5.064
15.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18	0	14
16.	Dinas Kesehatan	1.228	76	1.318
17.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	58	0	131
18.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	177	0	254
19.	Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air	117	0	71
20.	Dinas Sosial	28	0	29
21.	Dinas Tenaga Kerja	25	0	33
22.	Dinas Ketahanan Pangan	31	0	15
23.	Dinas Lingkungan Hidup	150	0	187
24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41	0	157

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pegawai		
		PNS	PPPK	Kontrak/ Honorer
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28	0	29
26.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24	0	65
27.	Dinas Perhubungan	104	0	159
28.	Dinas Komunikasi dan Informatika	28	0	50
29.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	26	0	24
30.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30	0	32
31.	Dinas Pemuda dan Olahraga	40	0	59
32.	Dinas Pertanahan	21	0	24
33.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	38	0	33
34.	Dinas Perikanan	33	0	33
35.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	28	0	68
36.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	137	77	53
37.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	151	0	212
38.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	50	0	99
39.	Kecamatan Singosari	37	0	10
40.	Kecamatan Lawang	21	0	12
41.	Kecamatan Karangploso	13	0	5
42.	Kecamatan Dau	15	0	5
43.	Kecamatan Tumpang	14	0	3
44.	Kecamatan Pakis	17	0	4
45.	Kecamatan Jabung	20	0	5
46.	Kecamatan Poncokusumo	17	0	3
47.	Kecamatan Bululawang	10	0	4
48.	Kecamatan Tajinan	11	0	6
49.	Kecamatan Wajak	10	0	5
50.	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	12	0	7
51.	Kecamatan Pujon	13	0	4
52.	Kecamatan Ngantang	10	0	2
53.	Kecamatan Kasembon	9	0	3
54.	Kecamatan Donomulyo	8	0	5
55.	Kecamatan Bantur	11	0	3
56.	Kecamatan Gedangan	11	0	3
57.	Kecamatan Turen	21	0	11
58.	Kecamatan Gondanglegi	17	0	6
59.	Kecamatan Pagelaran	12	0	4
60.	Kecamatan Dampit	10	0	9
61.	Kecamatan Tirtoyudo	11	0	5
62.	Kecamatan Ampelgading	12	0	2
63.	Kecamatan Kepanjen	37	0	19
64.	Kecamatan Pakisaji	15	0	7
65.	Kecamatan Wagir	18	0	5
66.	Kecamatan Sumberpucung	15	0	1
67.	Kecamatan Ngajum	14	0	6
68.	Kecamatan Kromengan	10	0	3
69.	Kecamatan Wonosari	16	0	3
70.	Kecamatan Pagak	11	0	3
71.	Kecamatan Kalipare	15	0	4
Jumlah		10.069	2.424	9.975

Sumber data : Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2024

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jabatan Struktural/Fungsional/Pelaksana tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Sumber Daya Manusia Pemerintahan Kabupaten Malang
Tahun 2023

No	Pangkat/Golongan/ Tingkat Pendidikan/ Jabatan Struktural/ Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
A.	Pangkat/Golongan			
1.	Pembina Utama/(IV/e)	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya/(IV/d)	8	4	12
3.	Pembina Utama Muda/(IV/c)	46	44	90
4.	Pembina Tingkat I/ (IV/b)	482	679	1.161
5.	Pembina/(IV/a)	391	470	861
6.	Penata Tingkat I/(III/d)	466	742	1.208
7.	Penata/(III/c)	321	524	845
8.	Penata Muda Tingkat I/ (III/b)	614	1.220	1.834
9.	Penata Muda/(III/a)	1.835	3.836	5.671
10.	Pengatur Tingkat I/(II/d)	278	304	582
11.	Pengatur/(II/c)	541	954	1.495
12.	Pengatur Muda Tingkat I/ (II/b)	115	20	135
13.	Pengatur Muda/(II/a)	147	12	159
14.	Juru Tingkat I/(I/d)	39	-	39
15.	Juru/(I/c)	3	-	3
16.	Juru Muda Tingkat I/(I/b)	1	-	1
17.	Juru Muda/(I/a)	-	-	-
Jumlah		5.287	8.809	14.096
B.	Tingkat Pendidikan			
1.	S-3	10	3	13
2.	S-2	356	323	679
3.	S-1	3.328	6.341	9.669
4.	D-4	32	58	90
5.	D-3	486	1.595	2.081
6.	D-2	82	123	205
7.	D-1	5	59	64
8.	SLTA	808	303	1.111
9.	SLTP	140	4	144
10.	SD	40	0	40
Jumlah		5.287	8.809	14.096
C.	Jabatan Struktural/Fungsional			
1.	Struktural	442	249	691
2.	Fungsional	1.041	434	1.475
3.	Pelaksana	3.804	8.126	11.930
Jumlah		5.287	8.809	14.096

Sumber data : Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2024

II. PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan dan akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu Pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan arah kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Malang yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok, dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta adanya keterpaduan program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sehingga dapat sinergi untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kerangka anggaran pembangunan daerah tahun 2023 akan memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Malang. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBD Kabupaten Malang Tahun 2023 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 201 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 106 dan 133 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

A. Pendapatan Daerah

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Malang hingga akhir 2023 mendekati target yang ditetapkan dimana situasi penguatan rekonomi global dan Indonesia sangat berpengaruh terhadap kinerja pendapatan daerah Kabupaten Malang. Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp4.501.832.816.808,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.375.225.182.406,89 atau mencapai sebesar 97,19%:

Tabel 5
Komposisi Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan
Tahun 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.025.586.055.284,00	838.906.956.543,89	81,80
2	Pendapatan Transfer	3.178.842.234.524	3.239.566.166.862,00	101,91
3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	297.404.527.000	296.752.059.001,00	99,78
	Jumlah	4.501.832.816.808,00	4.375.225.182.406,89	97,19

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan Rp1.025.586.055.284,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp838.906.956.543,89 atau mencapai 81,80% dari target yang ditetapkan. Penyebab dari hal tersebut adalah belum tercapainya target dari semua sektor pendapatan asli daerah. Adapun perincian PAD Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Perincian Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pajak Daerah	476.666.164.778,00	454.120.555.692,00	95,27
2	Retribusi Daerah	119.529.323.105,00	34.597.374.072,00	28,94
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	46.849.399.240,00	25.482.015.537,05	54,39
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	382.541.168.161,00	324.707.011.242,84	84,88
Jumlah		4.501.832.816.808,00	4.375.225.182.406,89	97,19

Terlihat dalam tabel tersebut di atas bahwa komponen persentase capaian realisasi penerimaan yang paling besar yaitu Pajak Daerah sebesar 95,27%. Pada TA 2023 Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp476.666.164.778,00 dan direalisasikan sebesar Rp454.120.555.692,00 atau 95,27% dari target anggaran. Bila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Malang mengalami peningkatan sebesar Rp51.797.044.546,00 atau 12,87%. Hal ini menunjukkan aktivitas perekonomian Kabupaten yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah. Meningkatnya realisasi dari hasil pajak daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat dan dunia usaha Kabupaten Malang telah sadar dan berperan aktif dalam upaya pembangunan Kabupaten Malang. Melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama pajak daerah, maka diharapkan terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2. Permasalahan dan solusi

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Permasalahan :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Perlu upaya memaksimalkan penerimaan dari potensi PAD yang ada khususnya sektor pajak daerah dan retribusi daerah;
- Inventarisasi Barang Milik Daerah belum dilaksanakan secara maksimal dan penilaian asset itu sendiri belum berjalan secara keseluruhan yang berdampak nilai pada neraca tidak sesuai dengan kondisi yang a Perlu ditingkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan publik dan berbasis elektronik;
- Perlu dikembangkan secara berkelanjutan system informasi pengelolaan pajak daerah yang sudah terintegrasi;
- Pentingnya peningkatan kompetensi SDM aparatur khususnya yang menangani IT mengingat tuntutan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah di bidang IT sangat tinggi dan terus berkembang;
- Perlu adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum sebagai upaya dalam melaksanakan pengawasan dan/atau penindakan kepada wajib pajak yang tidak taat pajak;
- Pentingnya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan/monitoring pajak daerah berbasis aplikasi dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD.

2) Dana Transfer

Perhitungan Pendapatan Transfer, yaitu DAK, belum sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan pendapatan dari sisi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dalam pendistribusian, memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

b. Solusi :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan PAD;
- Pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya berbasis elektronik;
- Pengembangan aplikasi pajak daerah secara berkelanjutan dan didukung oleh SDM yang menguasai IT;
- Sosialisasi/penyuluhan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan media sosial secara kreatif dan inovatif serta memperluas layanan konsultasi untuk WP;
- Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- Mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan sinergitas antar Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- Meningkatkan pembinaan dan sistem pengawasan internal di bidang pendapatan daerah serta meningkatkan koordinasi antar OPD penghasil;
- Mewujudkan *tax clearance* salah satunya dengan membangun koneksi / *host to host* antar OPD terkait dan instansi vertikal.

2) Pendapatan Transfer

- Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan PPh, penertiban dan penagihan aktif terhadap tunggakan dan melaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
- Konsultasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Anggota DPR-RI dan DPD asal Malang Raya;

- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) termasuk komponen dana perimbangan, maka dalam hal penggunaannya, perlu dilakukan pengkajian kembali, sehingga alokasi DBHCHT bersifat *block grant* yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi;
- Guna efektifitas pelaksanaan kegiatan DBHCHT, diusulkan agar penetapan alokasi DBHCT dilakukan sebelum APBD ditetapkan.

B. Belanja Daerah

1. Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.705.964.209.126,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.303.906.080.736,83 atau mencapai 91,46%, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7

Komposisi Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	3.350.964.020.286	2.994.600.953.868,83	89,37
2.	Belanja Modal	578.498.629.921	549.383.173.460,00	94,97
3.	Belanja Tidak Terduga	3.209.649.650	1.379.689.219,00	42,99
4.	Belanja Transfer	773.291.909.269	758.542.264.189,00	98,09
Jumlah		4.705.964.209.126	4.303.906.080.736,83	91,46

Jika dilihat dari komposisinya, belanja transfer memberikan kontribusi sebesar 98,09% dan belanja modal sebesar 94,97%, sedangkan sisanya disumbang oleh belanja operasi sebesar 89,37% dan belanja tidak terduga sebesar 42,99%.

2. Permasalahan dan solusi :

a. Permasalahan

Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait belanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara di sisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan di

mana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.

b. Solusi

Dalam menghadapi situasi ini diperlukan penanganan ataupun solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyak kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar pula;
- 2) Memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat memberi umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan lain;
- 3) Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah;
- 4) Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- 5) Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil sehingga terjadi penghematan anggaran karena tidak selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.

Di samping permasalahan belanja tersebut di atas, permasalahan utama dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah terbatasnya anggaran pendapatan dan membengkaknya belanja yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan. Dalam rangka mencapai target kinerja program dan kegiatan dari belanja daerah dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah antara lain:

- 1) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur;
- 2) Mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- 3) Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil

melalui bantuan modal, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM:

- 4) Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
- 5) Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian program-program yang dibiayai dari pusat melalui program tiga klaster, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektivitas belanja dapat terkontrol.

Disamping itu untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, prinsip-prinsip yang dilaksanakan adalah:

- 1) Meningkatkan pembangunan fisik dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan dinamika masyarakat;
- 2) Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan potensi ekonomi wilayah dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah.

C. Realisasi Pembiayaan Daerah

Besarnya Penerimaan Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp204.131.392.318,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp204.131.392.318,30 atau 100,00%. Jumlah Penerimaan Daerah dalam pembiayaan ini, bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp216.131.392.318,25.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dengan demikian dalam APBD 2023, SiLPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD Tahun 2022.

Besarnya Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp12.000.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp12.000.000.000,00 atau 100,00%. Pengeluaran Pembiayaan Daerah ini digunakan untuk penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Tirta Kanjuruhan. Perincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Komposisi Pembiayaan Pemerintah
Kabupaten Malang Tahun Anggaran
2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	216.131.392.318	216.131.392.318,25	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.000.000.000	12.000.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	204.131.392.318	204.131.392.318,25	100,00

2. Permasalahan dan solusi

Permasalahan utama pembiayaan daerah dapat meliputi permasalahan penerimaan dan permasalahan pengeluaran dimana dapat dijelaskan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu harus diuraikan sampai dengan obyek dan rincian obyek.

Mengingat besarnya pendapatan daerah belum sepenuhnya memenuhi target belanja, maka diperlukan solusi sebagai berikut:

- a. Kebijakan defisit anggaran yang sudah dilakukan harus dapat memanfaatkan sumber- sumber pembiayaan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kemampuan penyediaan dana, dan dampaknya pada masa yang akan datang;
- b. Setiap pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan kesinambungan fiskal dapat terjaga.

III. PENUTUP

Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua semua *stakeholders* sesuai dengan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai fungsi dan tugas masing-masing yang didukung oleh APBD dan sumber pendapatan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Secara umum atas capaian kerja dan kinerja pada tahun 2023 yang mengambil tema **“Pembangunan Pariwisata Kreatif (pariwisata dan industri kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal”**. dapat direalisasikan secara optimal, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai hasil yang ditargetkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, Serta Keputusan Bupati Malang nomor: 188.45/660/KEP/35.07.013/2023 tentang materi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan untuk merealisasikan tema tersebut, dituangkan dalam 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 43 (empat puluh tiga) Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dijabarkan dalam program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun 2023.

Dari tema atau fokus pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2023 yang ditetapkan, 6 prioritas pembangunan Kabupaten Malang yaitu: (1) Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat; (2) Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah; (3) Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis; (5) Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima; dan (6) Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim.

Tahun 2023 banyak keberhasilan yang dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dibuktikan juga dengan pengakuan dan penghargaan terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Malang. Walaupun masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang kita

hadapi kedepan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* pelaksana pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Aparat Keamanan, termasuk jajaran Pemerintahan Desa dan masyarakat Kabupaten Malang secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala doa, usaha, langkah, dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

Amin Ya Robbal Alamin.

BUPATI MALANG,

